

**Laporan**  
**Triwulanan**  
Triwulan II - 2018



**Laporan  
Triwulan**  
Triwulan II - 2018

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710  
Phone. (021) 296 00000  
Fax. (021) 386 6032

# KATA PENGANTAR



**Wimboh Santoso, Ph.D**

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan perkenan dan bimbinganNya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan serta berperan dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat dan perlindungan konsumen keuangan.

Selama triwulan II-2018, kondisi perekonomian global terpantau melanjutkan kinerja positifnya, didorong oleh membaiknya indikator ekonomi negara maju terutama Amerika Serikat. Pertumbuhan ini telah menyebabkan laju kenaikan suku bunga *Fed Funds Rate* lebih cepat. Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga 25 basis poin untuk kedua kalinya pada 2018 menjadi 2%, imbal hasil (*yield*) suku bunga US Treasury 10 tahun juga naik menjadi 3,1%. Dinamika ini membuat investor global melakukan *rebalancing* investasi portofolionya, dan menjadi faktor utama penyebab gejolak di pasar keuangan *Emerging Market*, termasuk di Indonesia selain faktor meningkatnya tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan II - 2018 tercatat membaik, yaitu sebesar 5,27% (*yoj*), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didukung adanya momentum Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang mendorong konsumsi swasta dan rumah tangga. Namun demikian, sebagai implikasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tersebut, neraca perdagangan mencatatkan defisit yang cukup besar sebagai akibat

dari meningkatnya impor bahan baku dan barang modal untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang belum dapat sepenuhnya kita produksi sendiri. Hal ini pada gilirannya memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Dengan meningkatnya *capital outflow* dari investasi portofolio investor global di *Emerging Market*, kinerja sektor Pasar Modal domestik pada triwulan II-2018 menunjukkan pelemahan, baik di pasar saham maupun pasar surat utang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kontraksi sebesar - 6,30% (*qtq*), turun menjadi 5.799,24. Pasar surat utang dalam negeri juga terpantau mengalami koreksi ditandai dengan peningkatan rata-rata *yield* SBN 109,8 bps. Kontraksi di kinerja Pasar Modal ini juga mempengaruhi kinerja Reksa Dana yang juga mengalami koreksi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana turun sebesar 2,00% (*qtq*).

Di tengah tekanan yang terjadi di Pasar Modal domestik, kinerja lembaga jasa keuangan di triwulan II-2018 secara umum masih solid dengan tingkat likuiditas yang cukup dan tingkat permodalan yang memadai untuk menyerap potensi risiko dan mendukung ekspansi usaha. Tingkat risiko lembaga jasa keuangan juga terpantau masih pada tingkat yang terjaga. Fungsi intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan. Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 2,00% (*qtq*) dan kredit tumbuh sebesar 4,87% (*qtq*) dengan tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) yang lebih baik. Sama halnya, piutang pembiayaan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, yakni sebesar 1,94% (*qtq*) dengan kualitas pembiayaan yang membaik.

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan, selama triwulan II-2018 OJK menerbitkan empat Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. POJK yang diterbitkan terdiri dari masing-masing satu POJK yang mengatur sektor Perbankan dan Pasar Modal serta dua POJK yang mengatur industri keuangan *non-bank* (IKNB). Salah satu aturan yang diterbitkan adalah mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum dalam rangka mendorong pendalaman pasar keuangan. Selain itu, OJK juga menerbitkan dua Surat Edaran OJK, di mana keduanya mengatur sektor IKNB.

Dalam rangka mendukung aktivitas pengawasan sektor jasa keuangan, OJK menginisiasi sejumlah kegiatan strategis, antara lain *on site review* kepada beberapa Konglomerasi Keuangan (KK) dan *business visit* ke Entitas Non-Lembaga Jasa Keuangan, Kajian *Risk Culture* Konglomerasi Keuangan, Kajian Perusahaan Efek Daerah, serta Pemberian Tanda Terdaftar kepada 24 Lembaga *Fintech Lending*.

Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan, OJK berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. OJK melakukan sosialisasi edukasi dan perlindungan konsumen di Mataram dan Balikpapan, Edukasi Keuangan Komunitas dan Safari Ramadhan di berbagai kota serta peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Tadulako, Palu. OJK juga melaksanakan edukasi dan sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan dan Surabaya. Untuk pelayanan informasi debitur sektor jasa keuangan, OJK mengakomodasi dengan layanan SLIK di kantor OJK baik pusat maupun daerah.

Dalam upaya mewujudkan organisasi yang tangguh dan berdaya saing, OJK senantiasa melakukan peningkatan kapasitas internal antara lain dengan melaksanakan pengembangan kompetensi teknis maupun kepribadian serta melakukan pemetaan jalur dan pola karir bagi pegawainya. Selain itu, OJK mengoptimalkan sarana infrastruktur dengan menghadirkan berbagai sistem untuk

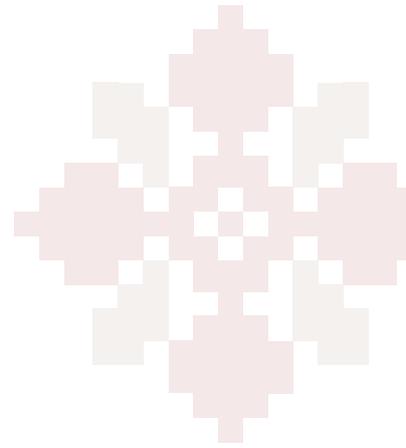
mendukung internalisasi *digital office*, di antaranya adalah Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO), Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT), Sistem Informasi *Audit Internal* (SIAI), *Record Management System* (RMS), *E-Procurement* OJK, Aplikasi SMART HR serta *Learning Management System* (LMS) OJK.

Akhir kata, atas nama Anggota Dewan Komisiner, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai OJK yang terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan senantiasa menjaga nama baik institusi. OJK terus berupaya meningkatkan kinerjanya serta menjalin hubungan kerja sama secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai upaya untuk mendorong terciptanya industri jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



**Wimboh Santoso, Ph.D**



Halaman ini sengaja di kosongkan



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

INFOGRAFIK PROGAM PRIORITAS OJK

v  
viii  
xii  
xv  
xviii  
xxii

## BAB 1 TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1	PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA	27
1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	27
1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	28
1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	29
1.2	PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	31
1.2.1	Perkembangan Bank Umum	31
1.2.2	Perkembangan Bank Umum Konvensional	31
1.2.3	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	33
1.2.4	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
1.2.5	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	38
1.3	PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	40
1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	40
1.3.2	Perkembangan Perusahaan Efek	43
1.3.3	Perkembangan Pengelolaan Investasi	44
1.3.4	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	47
1.3.5	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	54
1.4	PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	55
1.4.1	Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	56
1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	59
1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	61
1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	64
1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	65
1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	65
1.4.7	Perkembangan Industri Penunjang IKNB	67
1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	68
1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> ( <i>Financial Technology</i> )	68
1.5	PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK	69
1.5.1	Bank Wakaf Mikro	69
1.5.2	Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	69
1.5.3	Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)	69
1.5.4	Simpanan Pelajar (SIMPEL)	70
1.5.5	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	70
1.5.6	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	71
1.5.7	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	71
1.5.8	Asuransi Nelayan	71
1.5.9	Asuransi Usaha Budidaya Udang	71
1.5.10	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	72

**BAB 2**  
**TINJAUAN**  
**OPERASIONAL**  
**SEKTOR JASA**  
**KEUANGAN**

<b>2.1</b>	<b>AKTIVITAS PENGATURAN</b>	<b>77</b>
2.1.1	Pengaturan Terintegrasi	77
2.1.2	Pengaturan Bank	77
2.1.3	Pengaturan Pasar Modal	77
2.1.4	Pengaturan IKNB	77
<b>2.2</b>	<b>AKTIVITAS PENGAWASAN</b>	<b>77</b>
2.2.1	Pengawasan Terintegrasi	77
2.2.2	Pengawasan Perbankan	79
2.2.3	Pengawasan Pasar Modal	82
2.2.4	Pengawasan IKNB	86
<b>2.3</b>	<b>AKTIVITAS PENGEMBANGAN</b>	<b>102</b>
2.3.1	Pengembangan Pengawasan Terintegrasi	102
2.3.2	Pengembangan Industri Perbankan	102
2.3.3	Pengembangan Industri Pasar Modal	103
2.3.4	Pengembangan IKNB	104
<b>2.4</b>	<b>STABILITAS SISTEM KEUANGAN</b>	<b>104</b>
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	104
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	106
2.4.3	Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional	106
<b>2.5</b>	<b>EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>107</b>
2.5.1	Penelitian dan Pengaturan	107
2.5.2	Inklusi Keuangan	107
2.5.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	109
2.5.4	Perlindungan Konsumen	112
2.5.5	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	115
2.5.6	<i>Market Conduct</i>	116
2.5.7	<i>Investor Alert Portal</i>	116
<b>2.6</b>	<b>PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN</b>	<b>116</b>
2.6.1	Penanganan Perkara	116
2.6.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	117
2.6.3	Koordinasi dengan Instansi Terkait	117
2.6.4	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	117
2.6.5	Penandatanganan Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi dengan 13 Kementerian/ Lembaga	117
2.6.6	Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Aparat Penegak Hukum di Sektor Jasa Keuangan	117
2.6.7	Penyampaian Informasi Melalui Media	117
2.6.8	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	117
<b>2.7</b>	<b>PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME</b>	<b>117</b>
2.7.1	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester II Tahun 2017	117

**BAB 3**  
**TINJAUAN**  
**INDUSTRI DAN**  
**OPERASIONAL**  
**SEKTOR JASA**  
**KEUANGAN**  
**SYARIAH**

2.8	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	118
2.8.1	Kerjasama Domestik	118
2.8.2	Kerjasama Internasional	119
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	123
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	123
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	128
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	131
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	134
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	134
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	134
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	134
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	134
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	134
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	135
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	135
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	136
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	136
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	138
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	139

**BAB 4**  
**MANAJEMEN**  
**STRATEGIS**  
**DAN TATA**  
**KELOLA**  
**ORGANISASI**

4.1	MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA OJK	143
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	143
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	143
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	144
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RESIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	146
4.2.1	Pelaksanaan Audit Internal	146
4.2.2	Profil Risiko OJK	146
4.2.3	Pendampingan Profil Risiko Satuan Kerja <i>(Partnership Program)</i>	146
4.2.4	Mitigasi Risiko OJK Wide	146
4.2.5	<i>Control Self Assessment (CSA)</i>	146
4.2.6	Program Pengendalian Gratifikasi	146
4.2.7	<i>Whistle Blowing System</i>	146
4.2.8	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	146
4.2.9	Sosialisasi	147
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	147
4.4	KOMUNIKASI	148
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	148
4.4.2	Layanan Informasi	150
4.4.3	Kunjungan Instansi	150
4.4.4	OJK TV	150

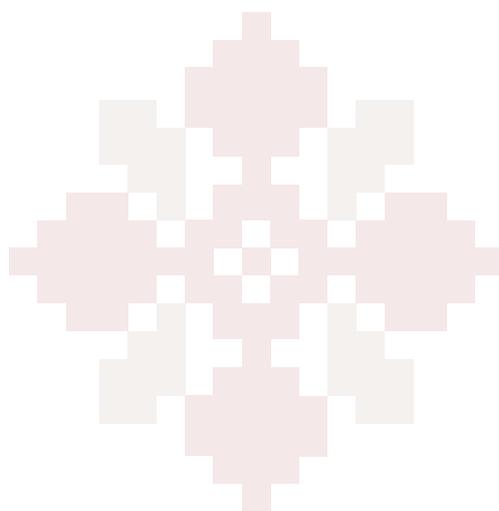
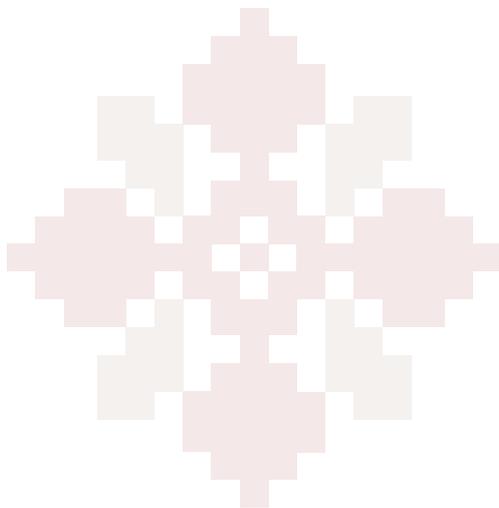
<b>4.5</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>151</b>
4.5.1	Realisasi Anggaran	151
4.5.2	Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan	151
<b>4.6</b>	<b>SISTEM INFORMASI</b>	<b>153</b>
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan	153
4.6.2	Tugas Pokok Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	153
<b>4.7</b>	<b>LOGISTIK</b>	<b>153</b>
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	153
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	153
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	154
<b>4.8</b>	<b>SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	<b>154</b>
4.8.1	Kebijakan Sumber Daya Manusia	154
4.8.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	154
4.8.3	Pengembangan Organisasi	154
4.8.4	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	155
<b>4.9</b>	<b>OJK INSTITUTE</b>	<b>155</b>
4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)	155
4.9.2	Program Pengembangan Kompetensi	155
4.9.3	Program Pendidikan Formal	155
4.9.4	Program Penugasan	155
4.9.5	Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan	155
4.9.6	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	155
4.9.7	Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	156
4.9.8.	Program <i>Visit</i> OJK	156
<b>4.10</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>156</b>
4.10.1	Program Budaya	156
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	157
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	157

# DAFTAR TABEL

Tabel I - 1	Kinerja Bank Umum	31
Tabel I - 2	Kondisi Bank Umum Konvensional	31
Tabel I - 3	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	32
Tabel I - 4	Kondisi Umum BPR	34
Tabel I - 5	Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Tabel I - 6	Konsentrasi Penyaluran UMKM	36
Tabel I - 7	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	37
Tabel I - 8	Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	38
Tabel I - 9	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	41
Tabel I - 10	Perkembangan IHSG dan Net Asing	41
Tabel I - 11	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	42
Tabel I - 12	Jumlah Perusahaan Efek	43
Tabel I - 13	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	43
Tabel I - 14	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	43
Tabel I - 15	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	44
Tabel I - 16	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	44
Tabel I - 17	Perkembangan Pengelolaan Investasi	44
Tabel I - 18	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	45
Tabel I - 19	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	46
Tabel I - 20	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	47
Tabel I - 21	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	47
Tabel I - 22	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II - 2018	48
Tabel I - 23	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	49
Tabel I - 24	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	50
Tabel I - 25	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	50
Tabel I - 26	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	51
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	52
Tabel I - 28	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan II-2018 Berdasarkan Sektor Industri	53
Tabel I - 29	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	54
Tabel I - 30	Komposisi Peringkat Perusahaan Kategori <i>Investment Grade</i> dan <i>Non Investment Grade</i>	54
Tabel I - 31	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	55
Tabel I - 32	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Profesi	55
Tabel I - 33	Total Aset IKNB	56
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	57
Tabel I - 35	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	58
Tabel I - 36	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	58
Tabel I - 37	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	59
Tabel I - 38	RBC Industri Asuransi	59
Tabel I - 39	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	59
Tabel I - 40	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	60
Tabel I - 41	Portofolio Investasi Dana Pensiun	60
Tabel I - 42	Jumlah Dana Pensiun	61
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	62
Tabel I - 44	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	63
Tabel I - 45	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	63
Tabel I - 46	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	64
Tabel I - 47	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	65
Tabel I - 48	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	68
Tabel I - 49	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	68
Tabel I - 50	Jumlah LKM	68
Tabel I - 51	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	68
Tabel I - 52	Perkembangan Industri Fintech ( <i>Peer to Peer Lending</i> )	68
Tabel I - 53	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	69

Tabel I - 54	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	70
Tabel I - 55	Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang per triwulan II-2018	72
Tabel II - 1	Profil Konglomerasi Keuangan	78
Tabel II - 2	Pemeriksaan Bank Umum	79
Tabel II - 3	Pemeriksaan Khusus Bank	79
Tabel II - 4	Perizinan Produk dan Aktifitas Baru Perbankan	79
Tabel II - 5	<i>Track Record</i> Tindak Tipibank Triwulan I-2018	80
Tabel II - 6	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	80
Tabel II - 7	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	80
Tabel II - 8	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU	81
Tabel II - 9	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	81
Tabel II - 10	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan II-2018	82
Tabel II - 11	Daftar Hasil <i>Fit</i> dan <i>Proper Test New Entry</i> BPR	82
Tabel II - 12	Aksi Korporasi Triwulan II - 2018	84
Tabel II - 13	Penyampaian Laporan Berkala	84
Tabel II - 14	Penetapan Sanksi Administratif	86
Tabel II - 15	Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis Triwulan II-2018	86
Tabel II - 16	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi selama triwulan II-2018	86
Tabel II - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun selama triwulan II-2018	86
Tabel II - 18	Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun	87
Tabel II - 19	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	87
Tabel II - 20	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	88
Tabel II - 21	Pengenaan Sanksi terhadap Lembaga Pembiayaan sampai dengan triwulan II-2018	89
Tabel II - 22	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh	89
Tabel II - 23	Pelaksanaan Pendampingan LKM selama Triwulan I-2018	88
Tabel II - 24	Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM selama triwulan II-2018	89
Tabel II - 25	LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro) pada triwulan II-2018	90
Tabel II - 26	Daftar Perusahaan Pergadaian yang telah Mendapatkan Izin Usaha atau telah terdaftar pada triwulan II-2018	90
Tabel II - 27	Daftar Penyelenggara Fintech Lending yang Terdaftar pada Triwulan II-2018	90
Tabel II - 28	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai triwulan II-2018	91
Tabel II - 29	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	92
Tabel II - 30	Penetapan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian sampai dengan triwulan II-2018	92
Tabel II - 31	Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan Pergadaian sampai dengan triwulan II-2018	92
Tabel II - 32	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan triwulan II-2018	93
Tabel II - 33	Jumlah IKNB Konvensional sampai dengan triwulan II-2018	94
Tabel II - 34	Rekapitulasi Likuidasi IKNB sampai dengan triwulan II-2018	95
Tabel II - 35	Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB sampai dengan triwulan II-2018	95
Tabel II - 36	Persetujuan Pengambilalihan IKNB sampai dengan triwulan II-2018	95
Tabel II - 37	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB sampai dengan triwulan II-2018	96
Tabel II - 38	Rekapitulasi Perubahan Nama sampai dengan triwulan II-2018	96
Tabel II - 39	Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB sampai dengan triwulan II-2018	97
Tabel II - 40	Rekapitulasi Perubahan Nama sampai dengan triwulan II-2018	97
Tabel II - 41	Rekapitulasi Pelaporan Produk sampai dengan triwulan II-2018	98
Tabel II - 42	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan triwulan II-2018	98
Tabel II - 43	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan triwulan II-2018	99
Tabel II - 44	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB sampai dengan triwulan II-2018	99
Tabel II - 45	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB sampai dengan triwulan II-2018	100
Tabel II - 46	Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal sampai dengan triwulan II-2018	100

Tabel II - 47	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan triwulan II-2018	100
Tabel II - 48	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama triwulan II-2018	101
Tabel II - 49	Pendaftaran Profesi sampai dengan triwulan II-2018	101
Tabel II - 50	Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin sampai dengan triwulan II-2018	101
Tabel II - 51	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama triwulan II-2018	102
Tabel II - 52	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	102
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	123
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	125
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	126
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	128
Tabel III - 5	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	129
Tabel III - 6	Perkembangan Indeks Saham Syariah	129
Tabel III - 7	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	130
Tabel III - 8	Perkembangan Reksa Dana Syariah	130
Tabel III - 9	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	131
Tabel III - 10	Aset IKNB Syariah	132
Tabel III - 11	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	132
Tabel III - 12	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	133
Tabel III - 13	Objek Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	136
Tabel IV - 1	Siaran Pers Triwulan II - 2018	149
Tabel IV - 2	Jumpa Pers dan <i>Media Briefing</i> Triwulan II - 2018	150
Tabel IV - 3	Kunjangan Instansi Triwulan II - 2018	150
Tabel IV - 4	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	154



# DAFTAR GRAFIK

Grafik I - 1	Tingkat Inflasi dan Pengangguran AS	27
Grafik I - 2	Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro	27
Grafik I - 3	Tingkat Inflasi dan Pengangguran Jepang	28
Grafik I - 4	Kinerja Eksternal Tiongkok	28
Grafik I - 5	Perkembangan Harga Komoditas Dunia	28
Grafik I - 6	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	28
Grafik I - 7	Tingkat Inflasi Indonesia	29
Grafik I - 8	Neraca Perdagangan Indonesia	29
Grafik I - 9	Penjualan Eceran	29
Grafik I - 10	<i>Credit Default Swap</i> Indonesia	29
Grafik I - 11	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional	30
Grafik I - 12	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional	30
Grafik I - 13	Pergerakan <i>Yield</i> SBN	30
Grafik I - 14	Perkembangan Aset BUK	32
Grafik I - 15	Tren Pertumbuhan DPK	32
Grafik I - 16	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan ( <i>yoy</i> )	33
Grafik I - 17	<i>Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)</i>	33
Grafik I - 18	Tren NPL (%)	33
Grafik I - 19	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	33
Grafik I - 20	Tren Aset BPR	34
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan DPK ( <i>yoy</i> )	35
Grafik I - 22	Tren Pertumbuhan DPK ( <i>qtq</i> )	35
Grafik I - 23	Tren ROA dan BOPO BPR	36
Grafik I - 24	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	37
Grafik I - 25	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ( <i>yoy</i> )	39
Grafik I - 26	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ( <i>yoy</i> )	39
Grafik I - 27	NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	40
Grafik I - 28	NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	40
Grafik I - 29	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama ( <i>qtq</i> )	40
Grafik I - 30	Perkembangan Indeks Industri ( <i>qtq</i> )	41
Grafik I - 31	Perkembangan IHSG dan Net Asing	41
Grafik I - 32	Indonesia <i>Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	42
Grafik I - 33	Rencana Penggunaan Dana	52
Grafik I - 34	<i>Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan II 2018</i>	54
Grafik I - 35	<i>Market Share Company Rating Triwulan II 2018</i>	54
Grafik I - 36	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2018	56
Grafik I - 37	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan I 2018	60
Grafik I - 38	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	61
Grafik I - 39	Piutang Perusahaan Pembiayaan	61
Grafik I - 40	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	64
Grafik I - 41	Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal	64
Grafik I - 42	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	65
Grafik I - 43	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	65
Grafik I - 44	Pertumbuhan Aset LJKK	65
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	66
Grafik I - 46	<i>Outstanding</i> Penjaminan	66
Grafik I - 47	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	66
Grafik I - 48	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	66
Grafik I - 49	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	66
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian	67
Grafik I - 51	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	67
Grafik I - 52	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	67
Grafik I - 53	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	67
Grafik I - 54	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	67
Grafik I - 55	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan II-2018	69
Grafik I - 56	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING	70
Grafik I - 57	Simpanan Pelajar (SIMPEL)	70

Grafik II - 1	Jenis Struktur Konglomerasi Keuangan	78
Grafik II - 2	Aset KK Berdasarkan Kepemilikan	78
Grafik II - 3	Komposisi Konglomerasi Keuangan yang Memiliki Bisnis Non-LJK secara <i>Group Wide</i>	78
Grafik II - 4	Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan II-2018	81
Grafik II - 5	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan II-2018	82
Grafik II - 6	Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan	105
Grafik II - 7	Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan	105
Grafik II - 8	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Perbankan	105
Grafik II - 9	<i>Risk Based Capital</i> (RBC) Asuransi Umum	105
Grafik II - 10	<i>Risk Based Capital</i> (RBC) Asuransi Jiwa	105
Grafik II - 11	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	105
Grafik II - 12	Rasio NPL Perbankan	106
Grafik II - 13	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	106
Grafik II - 14	Layanan Masuk Triwulan II-2018	112
Grafik II - 15	Informasi per Sektor Triwulan II-2018	112
Grafik II - 16	Pertanyaan per Sektor Triwulan II-2018	113
Grafik II - 17	Pengaduan per Sektor Triwulan II-2018	113
Grafik II - 18	Tingkat Penyelesaian Layanan Triwulan II-2018	113
Grafik II - 19	Kanal Layanan Triwulan II-2018	113
Grafik II - 20	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	113
Grafik II - 21	Data SLIK Triwulan II - 2018	114
Grafik II - 22	Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK	114
Grafik II - 23	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS	115
Grafik II - 24	Alasan Penolakan Permohonan Penyelesaian Sengketa	115
Grafik II - 25	Jumlah Iklan Per Sektor	116
Grafik II - 26	Kategori Dugaan Pelanggaran Iklan SJK	116
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	124
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah	124
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah ( <i>qtq</i> )	124
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	127
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	128
Grafik III - 6	Tren Aset Perbankan Syariah	128
Grafik III - 7	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	129
Grafik III - 8	Perkembangan Reksa Dana Syariah	130
Grafik III - 9	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	131
Grafik III - 10	Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan II-2018	132
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)	143
Grafik IV - 2	Komposisi Jenis Resiko OJK Wide	146
Grafik IV - 3	Jumlah Sosialisasi Berdasarkan Peserta Sosialisasi	146
Grafik IV - 4	Gambaran Topik RDK	147
Grafik IV - 5	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK Triwulan II - 2018	148
Grafik IV - 6	Jumlah Pemberitaan Triwulan II - 2018	149
Grafik IV - 7	Jumlah Layanan Informasi Triwulan II - 2018	150
Grafik IV - 8	Statistik OJK TV Triwulan II - 2018	151

Halaman ini sengaja di kosongkan

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Sepanjang triwulan II-2018, perekonomian global terpantau melanjutkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) yang melampaui ekspektasi diiringi membaiknya indikator ekonomi lainnya. Pertumbuhan ini juga menyebabkan laju kenaikan suku bunga *Fed Funds Rate* lebih cepat sehingga menjadi faktor utama penyebab gejolak di pasar keuangan. Pada zona Euro, pertumbuhan cenderung stagnan meskipun tingkat pengangguran terus melanjutkan tren penurunan dan tingkat inflasi sesuai kisaran target. Stagnasi ini disebabkan turunnya indeks kinerja manufaktur dan indeks keyakinan konsumen. Perekonomian Asia terpantau cukup baik. Di Jepang, perekonomian cenderung stabil didukung tingkat inflasi yang stabil dan peningkatan ekspor yang signifikan. Tingkat pengangguran menurun mencapai nilai terendah dalam 26 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat positif meski adanya indikasi pelemahan dari sisi kinerja eksternal akibat perang dagang AS-Tiongkok. Secara umum harga komoditas cenderung meningkat kecuali untuk minyak sawit. Peningkatan permintaan global serta tensi geopolitik kawasan Timur Tengah mendorong meningkatnya harga minyak mentah.

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan II-2018 sebesar 5,27% (*yo-y*), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya angka pertumbuhan didukung oleh konsumsi swasta seiring adanya momentum hari raya Idul Fitri. Tingkat inflasi juga berada pada level yang terkendali. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi sedikit terhambat oleh defisit neraca perdagangan akibat meningkatnya impor nonmigas berupa bahan baku dan barang modal, serta pelemahan nilai tukar Rupiah. Kinerja manufaktur Indonesia berada pada zona ekspansi. Sementara itu, kinerja sektor riil stabil dan diekspektasikan semakin solid mengingat membaiknya perekonomian domestik.

Pergerakan pasar keuangan domestik pada triwulan II-2018 menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, sebagaimana terjadi pada pasar keuangan global dan regional. Peningkatan tekanan pasar tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ekspektasi kenaikan FFR serta ancaman perang dagang AS-Tiongkok. Volatilitas tersebut mendorong *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia meningkat namun masih terjaga. Di tengah volatilitas yang terjadi, peringkat investasi Indonesia oleh pemeringkat Moody's kembali ditingkatkan dari Baa3 ke Baa2 (satu notch di atas batas

bawah investment grade) dan S&P Global mengafirmasi peringkat Indonesia pada level BBB- dengan *outlook* stabil, sehingga diharapkan memperbaiki persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia.

Pada pasar saham, IHSG terkoreksi sebesar 6,30% (*qtq*) dan berada pada posisi 5.799,24 utamanya akibat faktor eksternal. Namun demikian, tekanan dapat diredam oleh kinerja emiten yang terpantau stabil, seiring masih cukup baiknya persepsi investor atas prospek perekonomian Indonesia. Hal ini ditandai oleh peningkatan volume kepemilikan saham oleh investor nonresiden meskipun secara nilai mengalami penurunan akibat harga saham yang terkoreksi. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah sebesar 3,94% (*qtq*), masih lebih moderat dibandingkan beberapa mata uang negara berkembang lainnya. Sebagai langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia pada triwulan II-2018 telah menaikkan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebesar 100 bps.

## Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. **Pengembangan Bank Wakaf Mikro LKM Syariah**  
OJK memberikan izin usaha kepada 26 LKM Syariah dengan model bisnis Bank Wakaf Mikro. OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dalam penyusunan panduan model bisnis sebagai landasan sosialisasi model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
2. **Penerbitan Peraturan OJK mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum**  
Sebagai upaya mendorong pendalaman pasar keuangan serta menciptakan sistem perbankan yang mampu berkembang dan bersaing secara internasional, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum. Hal yang disempurnakan dalam peraturan ini antara lain terkait kewajiban agunan berupa kas.

3. **Pemberian Tanda Terdaftar kepada 24 Penyelenggara *Fintech Lending***

Dalam rangka mendukung perkembangan industri *financial technology* di Indonesia serta sesuai dengan POJK No. 77/POJK/01/2016, OJK memberikan 24 Tanda Terdaftar bagi penyelenggara *fintech lending*. Dengan diberikannya Tanda Terdaftar tersebut, penyelenggara dapat secara resmi melaksanakan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan secara berkala berkewajiban untuk melaporkan kegiatannya kepada OJK.

4. **Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Satgas Waspada Investasi dengan 13 Kementerian dan Lembaga Negara**

Sebagai penguatan upaya pencegahan merebaknya investasi ilegal, OJK bersama 13 Kementerian dan Lembaga Negara lainnya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.

OJK senantiasa melakukan upaya dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, salah satunya pada triwulan II-2018 dengan melaksanakan edukasi komunitas petani di Buleleng, komunitas nelayan di Wangi-wangi, komunitas perempuan dan ibu rumah tangga di Jakarta, pelaku UMKM di Banyuwangi dan komunitas umat Kristiani di Yogyakarta. Selain itu, OJK melaksanakan Edukasi Waspada Investasi serta Safari Ramadhan di berbagai kota di Indonesia. Sebagai langkah penguatan peran dalam hubungan internasional, OJK menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga sektor keuangan internasional salah satunya International Finance Cooperation (IFC), Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dan Bank of Thailand.

## Penguatan Kapasitas Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK didukung oleh Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi pencapaian kinerja OJK. Pada periode pelaporan, dilakukan evaluasi Peta Strategi OJK Wide 2018 untuk triwulan II-2018 serta memasuki tahap pertama untuk periode 2019 yaitu persiapan penyusunan strategi OJK 2019. OJK juga melaksanakan enam Inisiatif Strategis dan tiga Proyek Khusus OJK 2018 dalam mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis 2018. Terkait SDM, OJK memulai penyusunan pola dan jalur karir pegawai untuk memfasilitasi pengembangan diri dan karir pegawai.

Sebagai bentuk transformasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, OJK meluncurkan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO) yang mengintegrasikan enam aplikasi keuangan *end-to-end*. Selain itu, OJK mengembangkan sistem pendukung kinerja lainnya seperti Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT), Sistem Informasi Audit Internal (SIAI), Sistem Tata Persuratan dan Kearsipan OJK (RMS - *Record Management System*), *E-Procurement* OJK, Aplikasi *Mobile* Sumber Daya Manusia (SMART HR) serta *Learning Management System* (LMS) OJK.

Selama triwulan II-2018 OJK menerima 17 kunjungan, baik dari instansi maupun dari pelajar dan mahasiswa, dengan total peserta sebanyak 1.133 peserta serta menerbitkan 18 Siaran Pers dan melaksanakan tujuh Jumpa Pers.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan II-2018 telah dijabarkan dalam buku Laporan Triwulan II-2018.



# Program Prioritas OJK



## Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Pada triwulan II-2018 OJK memberikan 26 izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Total pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp6,052 miliar** kepada **5.738 nasabah** yang terbentuk ke dalam **1.153 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



## Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah **59.992 ekor** atau 50% dari target dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **36.871 peternak** dengan realisasi klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah sebesar **Rp 17,45 miliar**.



## Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Sampai dengan triwulan II-2018, jumlah total lahan klaim pertanian yang terdaftar adalah **8.749,22 ha** dengan nilai klaim berjalan **Rp 52,5 miliar**.



## Program JARING

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit program JARING **tumbuh 13,42% (yoy)** atau 5,54% (*qta*) menjadi **Rp29,57 triliun** dan **NPL gross 1,93%**.



## Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan II-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp1,8 triliun**.



## Asuransi Usaha Budidaya Udang

Asuransi Usaha Budidaya Udang memberikan proteksi terhadap kegagalan usaha Budidaya Udang karena penyakit/bencana alam. Sampai dengan triwulan II-2018, program tersebut telah menjangkau **14 provinsi** di mana **2.004 Nelayan Udang** dengan **3.300 hektar** lahan budidaya telah terlindungi dan nilai premi mencapai **Rp 1,49 miliar**.



## Asuransi Nelayan

Asuransi yang mewajibkan nelayan memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut sampai triwulan II - 2018 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai **9.216 orang nelayan** dari **27 provinsi** dengan jumlah klaim adalah sebanyak 5 orang nelayan dengan nilai sebesar Rp68 juta.



## Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Berbagai inisiatif diluncurkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan pada sektor infrastruktur melalui Pasar Modal, di antaranya:

1. Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar **Rp14,9 triliun**.
2. **Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP)**, tetap sejumlah lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar **Rp3,75 triliun atau turun sebesar 8,76% (qtq)**.
3. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar **26% (qtq)** menjadi **Rp23,39 triliun**.
4. Jumlah KIK-EBA tetap tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar **Rp6,32 triliun**.



## Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



**Jumlah Bank**  
280



**Jumlah Rekening**  
14.897.336



**Nominal**  
Rp 4,89 triliun

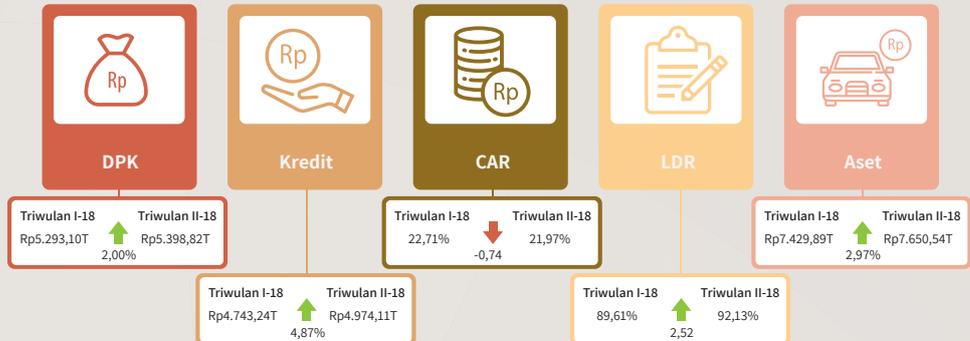


**Jumlah Perjanjian Kerjasama**  
324.690

# Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



Bank Umum



DPK

Triwulan I-18  
Rp5.048,28T  
Triwulan II-18  
Rp5.157,74T  
2,17%



Kredit

Triwulan I-18  
Rp4.553,17T  
Triwulan II-18  
Rp4.784,44T  
5,08%



CAR

Triwulan I-18  
22,65%  
Triwulan II-18  
21,91%  
-0,73



LDR

Triwulan I-18  
90,19%  
Triwulan II-18  
92,76%  
2,57

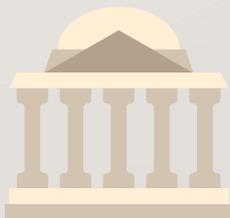


Aset

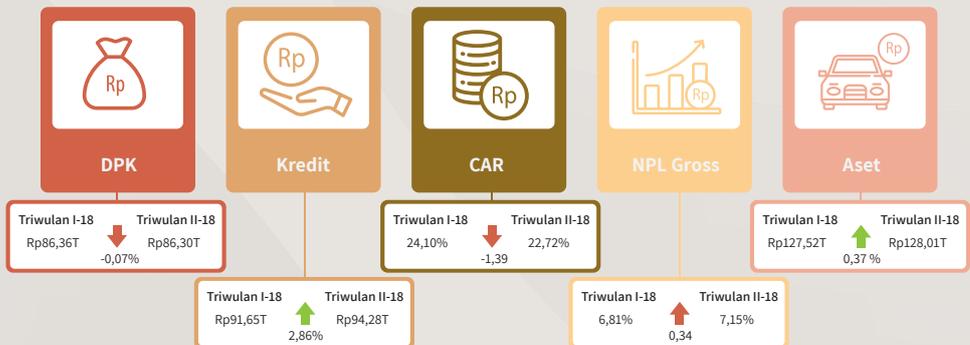
Triwulan I-18  
Rp7.135,60T  
Triwulan II-18  
Rp7.356,22T  
3,09%



Bank Umum Konvensional



BPR



IHSG

Triwulan I-18  
6.188,98  
Triwulan II-18  
5.799,24  
-6,30%



NAB Reksa Dana

Triwulan I-18  
Rp496,50T  
Triwulan II-18  
Rp486,55T  
2,00%



Nilai Perdagangan Obligasi

Triwulan I-18  
Rp1.636,24T  
Triwulan II-18  
Rp1.237,45  
-26,88%



Jumlah Emisi

Triwulan II-17  
61  
Triwulan II-18  
74  
21%

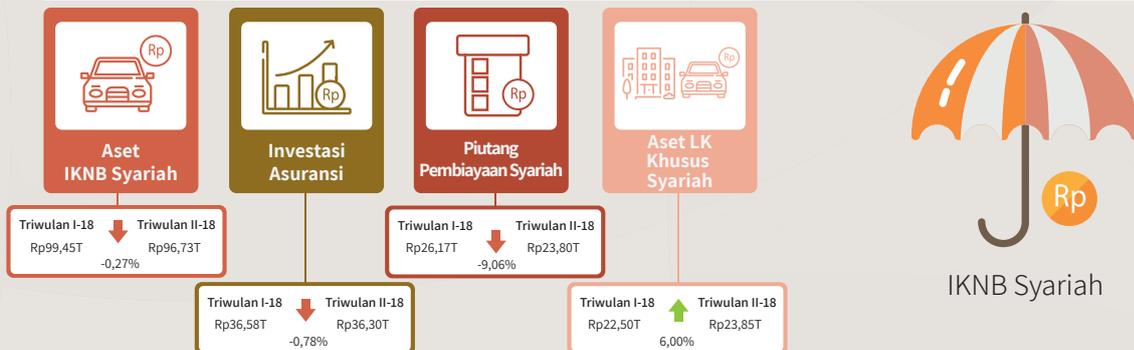
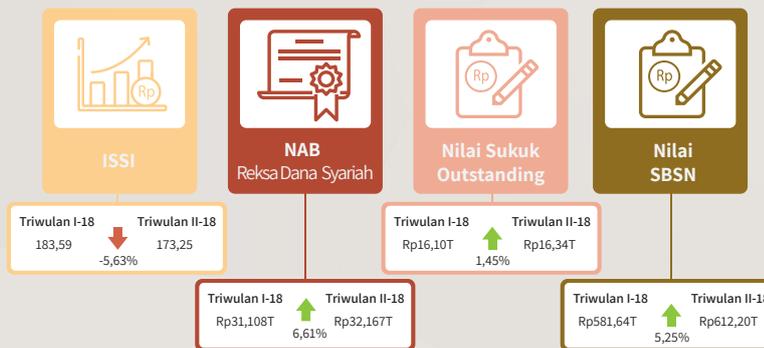
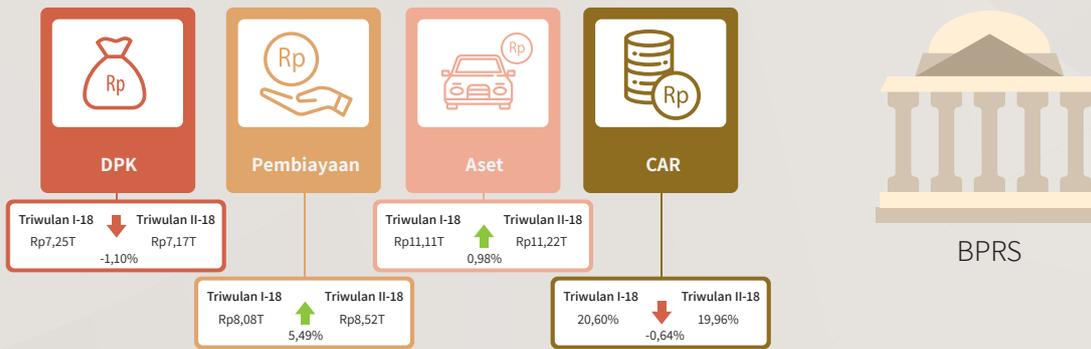
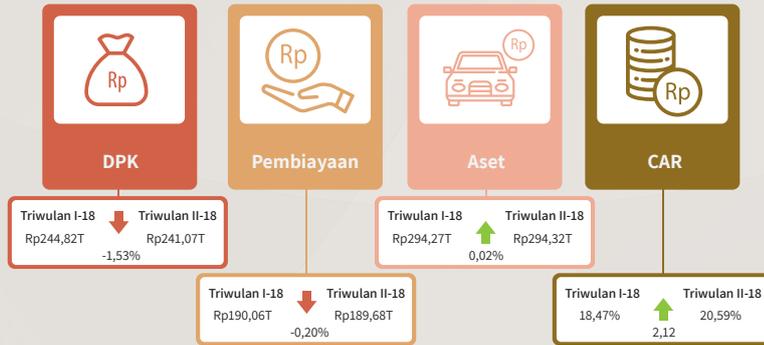
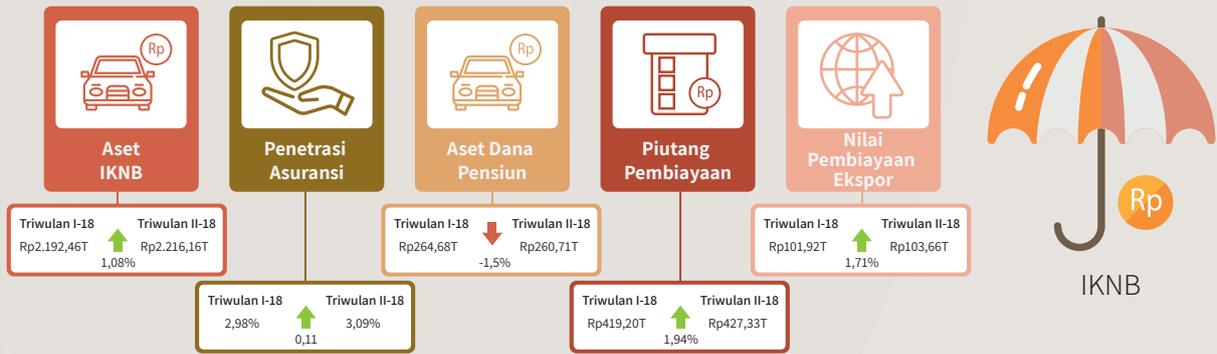


Nilai Emisi

Triwulan II-17  
Rp109,869T  
Triwulan II-18  
Rp77,152T  
-30%



Pasar Modal



Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 1

# TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN



Halaman ini sengaja di kosongkan



## 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

### 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

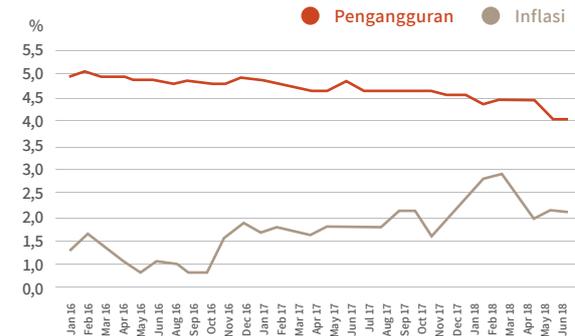
Pemulihan ekonomi global berlanjut pada triwulan II-2018, terutama didorong oleh perbaikan yang semakin solid di negara-negara maju. Perkembangan positif tersebut juga didukung oleh membaiknya indikator kinerja manufaktur, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Namun, ekspektasi laju kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) yang lebih cepat serta isu *trade war* antara AS dan negara-negara mitra dagang memicu terjadinya gejolak pasar keuangan di seluruh dunia.

#### Perkembangan Ekonomi Beberapa Negara Utama

Melanjutkan perkembangan positif pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada triwulan II-2018 tumbuh sebesar 2,8% (*yoj*), lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2018 yang sebesar 2,6%. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi tetap nonresiden, dan kebijakan pajak Pemerintah AS. Semakin solidnya perbaikan ekonomi AS juga didukung oleh membaiknya indikator-indikator ekonomi pada triwulan II-2018. Tingkat inflasi AS terpantau menunjukkan tren meningkat pada periode laporan dan tercatat sebesar 2,8% (*yoj*) per Juni. Tingkat pengangguran AS juga dalam tren menurun dan sempat mencapai level terendah pada Mei 2018 sebesar 3,8%. Sementara itu, *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur AS juga menunjukkan perkembangan yang positif (zona ekspansi).

Mencermati pemulihan ekonomi AS yang semakin solid tersebut, *Federal Open Market Committee* (FOMC) *The Fed* pada Juni 2018 kembali menaikkan *Fed Funds Rate* (FFR) menjadi pada kisaran 1,75%-2,00%. Selanjutnya, diperkirakan bahwa FFR akan naik sebanyak empat kali pada tahun 2018 dan tiga kali pada tahun 2019, sehingga FFR akan berada pada kisaran 3,25%-3,50% pada tahun 2020. Ekspektasi laju kenaikan FFR yang lebih cepat ini masih menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan volatilitas di pasar keuangan selama triwulan II-2018.

Grafik I - 1 — Tingkat Inflasi dan Pengangguran AS



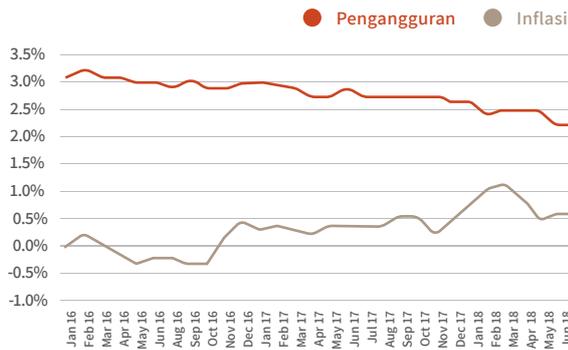
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Zona Euro pada triwulan II-2018 sedikit menurun menjadi 2,1% (*yoj*) (triwulan I-2018: 2,5% (*yoj*)), antara lain dipengaruhi oleh turunnya kinerja manufaktur. Namun demikian, perbaikan Zona Euro secara keseluruhan terpantau melanjutkan perkembangan positif. Tingkat inflasi Zona Euro per Juni 2018 tercatat sebesar 2,0% (*yoj*) atau mencapai target inflasi Bank Sentral Eropa (Maret 2017: 1,3%), terutama didorong oleh kenaikan harga minyak. Adapun tingkat pengangguran di Zona Eropa terus melanjutkan tren menurun dan mencapai level terendah dalam sembilan tahun terakhir (8,3% per Juni 2018).

Grafik I - 2 — Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro



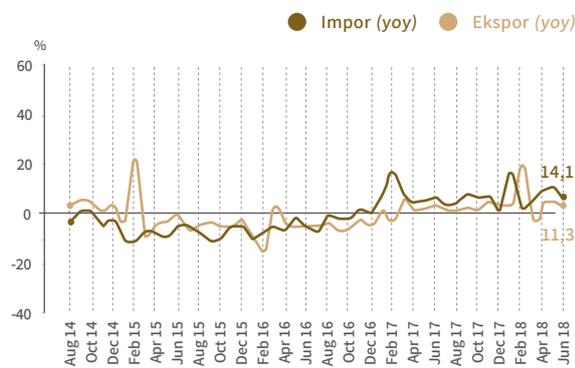
Perekonomian Jepang diperkirakan akan membaik pada triwulan II-2018, setelah mencatat penurunan pada triwulan sebelumnya (1,1% (*yoj*)) seiring masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi. Ekspor pada Juni 2018 tumbuh sebesar 6,7% (*yoj*) didorong meningkatnya permintaan global terhadap alat elektronik dan semikonduktor, sementara impor tumbuh sebesar 2,5%. Di samping itu, tingkat pengangguran melanjutkan tren menurun dan mencapai level terendah dalam 26 tahun terakhir pada Juni 2018 yaitu sebesar 2,2%. Di tengah perkembangan tersebut, tingkat inflasi Jepang cenderung menurun yaitu per Juni 2018 tercatat sebesar 0,7%.

**Grafik I - 3** ——— Tingkat Inflasi dan Pengangguran Jepang



Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2018 turun menjadi 6,7% (*yoy*) (triwulan I-2018: 6,8% (*yoy*)), yang turut dipengaruhi oleh mulai berlakunya tarif impor oleh AS terhadap produk-produk asal Tiongkok. Melanjutkan efek dari perang dagang tersebut, ekspor dan impor Tiongkok pada Juni 2018 tercatat turun menjadi masing-masing 11,3% (*yoy*) dan 14,1% (*yoy*). Ke depan, kinerja eksternal Tiongkok berpotensi masih akan terganggu seiring berlanjutnya isu perang dagang di antara kedua negara. Dari sisi inflasi, Tiongkok melaporkan tingkat inflasi pada level 1,9% (*yoy*) per Juni 2018, dibandingkan 2,1% (*yoy*) pada akhir triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 4** ——— Kinerja Eksternal Tiongkok



### Perkembangan Harga Komoditas

Harga komoditas dunia secara umum melanjutkan kecenderungan meningkat pada triwulan II-2018. Namun, volatilitas harga komoditas terpantau relatif tinggi, sejalan dengan kekhawatiran global mengenai berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, peningkatan permintaan global dan tensi geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak mentah sebesar 15,8% (*qtd*) pada triwulan II-2018.

**Grafik I - 5** ——— Perkembangan Harga Komoditas Dunia



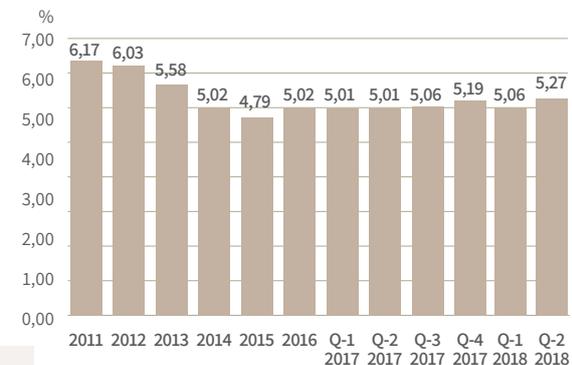
### 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian domestik pada triwulan II-2018 mencatat sejumlah perkembangan positif di tengah tekanan yang terjadi di pasar keuangan global maupun domestik. Stabilitas makroekonomi dalam negeri secara umum masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh permintaan domestik, diiringi oleh tingkat inflasi yang terkendali, kinerja eksternal yang stabil, dan sejumlah indikator kinerja sektor riil yang membaik.

### Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2018 tercatat tumbuh sebesar 5,27% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,06%) dan periode yang sama tahun lalu (5,01%). Meningkatnya angka pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,14% (*yoy*) seiring momentum bulan puasa dan Idul Fitri, serta konsumsi Pemerintah seiring meningkatnya realisasi belanja. Dari sisi kinerja eksternal, pertumbuhan ekonomi sedikit tertahan oleh defisit neraca perdagangan pada periode laporan.

**Grafik I - 6** ——— Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



## Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi pada triwulan II-2018 masih berada pada level yang terkendali. Per Juni 2018, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,12% (yoy) (Maret 2018: 3,40%), terjaga dalam kisaran target sebesar 3,5±1%. Inflasi inti dan *volatile food* selama periode bulan puasa dan Idul Fitri cenderung stabil, masing-masing berada pada level 2,72% (yoy) dan 4,60% (yoy). Sementara itu, inflasi *administered price* terpantau turun menjadi 2,88% (yoy), seiring tidak adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak dan tarif dasar listrik.

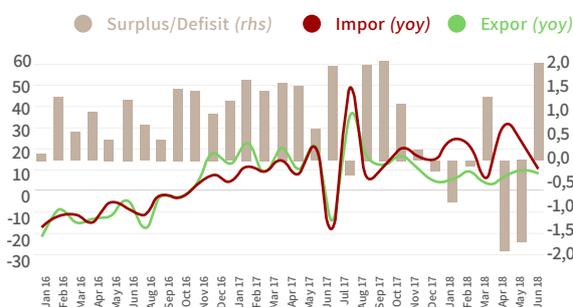
Grafik I - 7 Tingkat Inflasi Indonesia



## Perdagangan Eksternal dan Sektor Riil

Pada triwulan II-2018, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD1,34 miliar. Hal ini berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya di mana neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD314 juta. Melebarnya defisit neraca perdagangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya impor nonmigas serta pelemahan nilai tukar Rupiah. Per Juni 2018, ekspor Indonesia tumbuh sebesar 11,47% (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 12,66% (yoy). Pertumbuhan impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal di akhir periode laporan tercatat sebesar 21,64%, 21,54%, dan 31,84% (yoy). Tingginya pertumbuhan impor bahan baku/penolong dan barang modal tersebut diharapkan mendukung perbaikan industri pengolahan di dalam negeri.

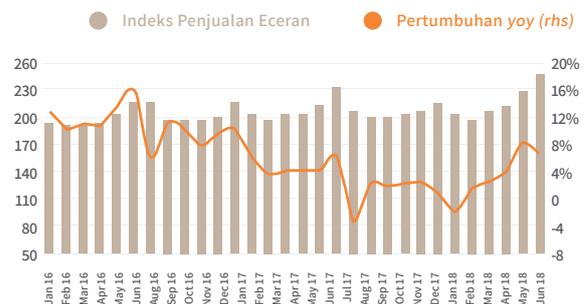
Grafik I - 8 Neraca Perdagangan Indonesia



Dari sisi kinerja sektor riil, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, antara lain didorong oleh momentum bulan puasa dan Idul Fitri. Penjualan ritel menunjukkan tren peningkatan meskipun sedikit termoderasi di bulan Juni. Demikian juga indikator penjualan semen dan kendaraan bermotor yang masih tumbuh positif. Indikator kinerja manufaktur

Indonesia pada triwulan II-2018 juga cenderung positif (zona ekspansi). Ke depan, pertumbuhan sektor riil diekspektasikan akan terus membaik sejalan dengan permintaan domestik yang masih relatif kuat.

Grafik I - 9 Penjualan Eceran

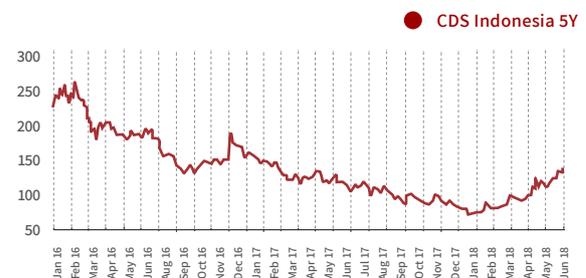


### 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pergerakan pasar keuangan domestik pada triwulan II-2018 menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, sebagaimana yang terjadi pada pasar keuangan global dan regional. Peningkatan tekanan pasar tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat serta ancaman perang dagang AS-Tiongkok, yang mendorong peningkatan aksi jual nonresiden. Namun di tengah fluktuasi tersebut, kondisi pasar domestik secara umum masih terjaga.

Pergerakan pasar keuangan domestik selama triwulan II-2018 dipengaruhi masih tingginya volatilitas di pasar keuangan global, sebagai dampak dari beberapa faktor seperti ekspektasi kenaikan FFR dan ancaman perang dagang AS-Tiongkok. Peningkatan volatilitas tersebut mendorong arah pelemahan *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia, meskipun masih relatif terjaga.

Grafik I - 10 Credit Default Swap Indonesia



Di tengah dinamika pasar tersebut, sepanjang triwulan II-2018 terdapat beberapa perkembangan positif terkait peringkat kredit Indonesia. Moody's pada April 2018 meningkatkan peringkat Indonesia dari Baa3 ke Baa2 (satu *notch* di atas batas bawah *investment grade*) dengan *outlook* stabil. Selanjutnya, pada Mei 2018, S&P Global

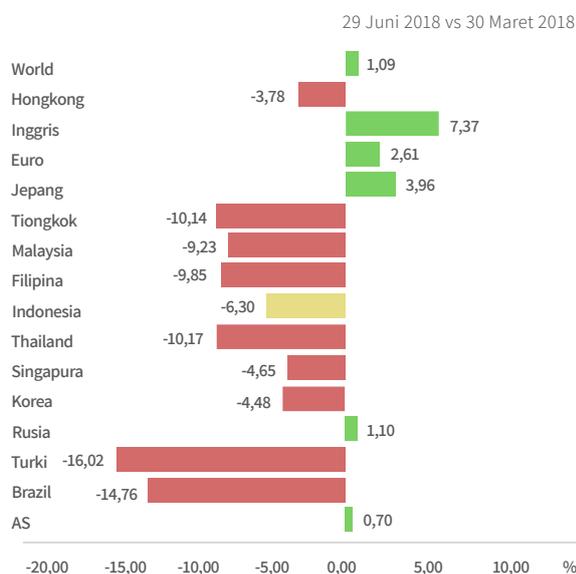
mengafirmasi peringkat Indonesia pada level BBB- dengan *outlook* stabil. Peringkat kredit yang terus membaik ini diharapkan akan turut membantu memperbaiki persepsi investor terhadap perekonomian domestik.

## Pasar Saham

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada triwulan II-2018 mencatat pelemahan sebesar 6,30% (*qta*). Pelemahan pasar saham ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor risiko di lingkup global, yang mendorong peningkatan *outflow* modal investor nonresiden di pasar keuangan *emerging markets*, termasuk Indonesia. Namun demikian, pelemahan IHSG tercatat lebih rendah dibandingkan sebagian indeks saham regional. Sejalan dengan kecenderungan pelemahan tersebut, investor nonresiden membukukan *net sell* sebesar Rp25,9 triliun (triwulan I-2018: *net sell* Rp23,4 triliun).

Tekanan di pasar saham akibat faktor-faktor eksternal ini diharapkan dapat diredam oleh kinerja emiten yang terpantau masih stabil, sejalan dengan masih baiknya persepsi investor atas prospek perekonomian Indonesia. Di penghujung periode laporan, tekanan pasar terpantau mulai mereda seiring meredanya tensi perang dagang AS-Tiongkok, membaiknya penjualan ritel dan keyakinan konsumen, serta dinaikkannya suku bunga acuan Bank Indonesia.

**Grafik I - 11** — Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional

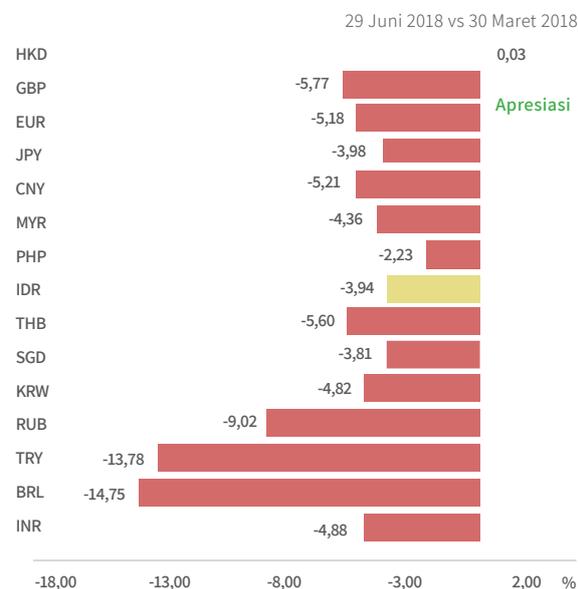


## Nilai Tukar Rupiah

Pada triwulan II-2018, nilai tukar Rupiah membukukan koreksi sebesar 3,94% (*qta*) terhadap Dollar AS, sejalan dengan arah pelemahan mata uang *emerging markets*. Perkembangan ini didorong oleh semakin solidnya perbaikan ekonomi AS, yang memicu kenaikan *yield* U.S. Treasury serta ekspektasi laju kenaikan FFR. Sebagai langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia pada triwulan II-2018 telah menaikkan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebesar 100 bps.

Jika dibandingkan dengan mata uang *emerging markets* lainnya, koreksi nilai tukar Rupiah pada periode laporan terpantau masih terkendali. Ke depan, di tengah berlanjutnya *downside risk* dari eksternal, nilai tukar Rupiah diharapkan akan semakin stabil sejalan dengan bauran kebijakan yang digulirkan oleh otoritas-otoritas terkait.

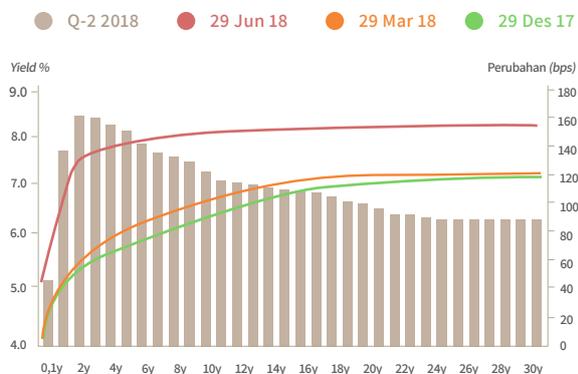
**Grafik I - 12** — Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



## Pasar Surat Berharga Negara

Sebagaimana pergerakan di nilai tukar Rupiah dan pasar saham, pasar surat utang dalam negeri juga terpantau melemah pada triwulan II-2018. *Yield* Surat Berharga Negara (SBN) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 112 bps, terutama dipengaruhi oleh kenaikan *yield* U.S. Treasury seiring masih tingginya ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan AS. Sepanjang periode laporan, investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp28,6 triliun (triwulan I-2018: *net buy* Rp22,6 triliun). Pada akhir Juni 2018, volatilitas pasar surat utang terpantau mereda dan *yield* SBN perlahan menunjukkan arah penurunan.

**Grafik I - 13** — Pergerakan *Yield* SBN



## 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

### 1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan II-2018 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 21,97%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko didukung oleh meningkatnya laba dan perbaikan kualitas kredit perbankan. Fungsi intermediasi

perbankan juga relatif baik dilihat dari pertumbuhan aset, kredit, dan DPK Bank Umum yang masing-masing tumbuh sebesar 8,89% (*yoy*), 10,75% (*yoy*) dan 6,99% (*yoy*). Secara triwulan, aset, kredit, dan DPK Bank Umum tumbuh masing-masing 2,97% (*qtq*), 4,87% (*qtq*), dan 2,00% (*qtq*), lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.

Tabel I - 1 — Kinerja Bank Umum

Indikator	Jun 2017	Mar 2018	Jun 2018	qtq Jun '17	qtq Mar '18	qtq Jun '18	yoy Jun '17	yoy Jun '18
Total Aset (Rp Miliar)	7.025.811	7.429.891	7.650.542	+ 2,87%	+ 0,57%	+ 2,97%	+ 10,42%	+ 8,89%
Kredit (Rp Miliar)	4.491.186	4.743.237	4.974.113	+ 2,77%	+ 0,11%	+ 4,87%	+ 7,75%	+ 10,75%
DPK (Rp Miliar)	5.045.987	5.293.098	5.398.817	+ 2,63%	+ 0,07%	+ 2,00%	+ 10,30%	+ 6,99%
- Giro (Rp Miliar)	1.193.577	1.234.418	1.311.559	+ 4,15%	+ 0,08%	+ 6,25%	+ 11,31%	+ 9,88%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.554.440	1.642.999	1.717.302	+ 4,35%	- 3,42%	+ 4,52%	+ 9,55%	+ 10,48%
- Deposito (Rp Miliar)	2.297.970	2.415.681	2.369.955	+ 0,74%	+ 2,59%	- 1,89%	+ 10,30%	+ 3,13%
CAR (%)	22,52	22,71	21,97	- 16	- 47	- 74	23	- 55
ROA (%)	2,42	2,50	2,38	- 3	11	- 11	17	- 4
NIM/NOM (%)	5,21	4,93	4,98	- 3	- 22	5	- 23	- 23
BOPO (%)	79,48	79,22	79,86	- 121	- 6	63	- 332	38
NPL/NPF Gross (%)	2,96	2,75	2,67	- 8	16	- 8	- 9	- 29
NPL/NPF Net (%)	1,41	1,25	1,23	7	8	- 2	- 7	- 18
LDR/LFR (%)	89,01	89,61	92,13	13	5	252	- 210	312

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Juni 2018

### 1.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan II-2018, sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi ketahanan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 21,91%. Fungsi intermediasi BUK juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 11,12% (*yoy*), meskipun masih dibayangi oleh perlambatan DPK yang tumbuh 6,98% (*yoy*).

Dengan pertumbuhan kredit yang jauh diatas DPK, LDR naik menjadi 92,76% atau di atas *threshold monitoring* pengawasan 78%-92%. Sementara itu, aset tumbuh cukup baik sebesar 8,91% (*yoy*). Risiko kredit BUK secara gradual membaik, terlihat dari turunnya NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 2,63% dan 1,19%.

Tabel I - 2 — Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Jun 2017	Mar 2018	Jun 2018	qtq Mar 18	qtq Jun 18	yoy Jun 17	yoy Jun 18
Total Aset (Rp Milyar)	6.754.376	7.135.601	7.356,22	+ 0,51%	+ 3,09%	+ 9,89%	+ 8,91%
Kredit (Rp Milyar)	4.305.803	4.553.173	4.784.436	+ 0,11%	+ 5,08%	+ 7,37%	+ 11,12%
DPK (Rp Milyar)	4.821.228	5.048,28T	5.157.774	- 0,05%	+ 2,17%	+ 9,63%	+ 6,98%
- Giro (Rp Milyar)	1.165.754	1.207.182	1.281.096	+ 0,01%	+ 6,12%	+ 10,46%	+ 9,89%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.489.947	1.568.534	1.641.484	- 3,57%	+ 4,65%	+ 9,00%	+ 10,17%
- Deposito (Rp Milyar)	2.165.527	2.272.562	2.235.164	+ 2,49	- 1,65%	+ 9,63%	+ 3,22%
CAR (%)	22,74	22,65	21,91	- 53	- 73	18	- 83
ROA (%)	2,47	2,55	2,43	10	- 13	16	- 5
NIM (%)	5,35	5,07	5,11	- 25	4	- 24	- 25
BOPO (%)	79,00	78,76	79,46	12	70	- 322	46
NPL Gross (%)	2,90	2,67	2,63	17	- 5	- 5	- 27
NPL Net (%)	1,35	1,120	1,19	9	- 1	- 4	- 16
LDR/LFR (%)	89,31	90,19	92,76	15	257	- 188	345

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Juni 2018

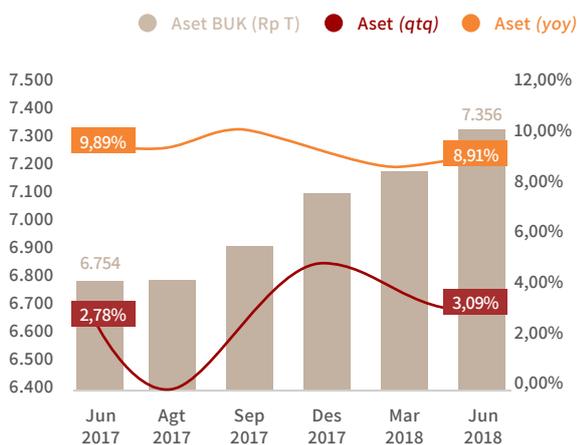
## A. Aset

Total aset BUK pada triwulan II-2018 tumbuh 8,91% (*yoy*), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,89% (*yoy*). Hal tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan modal. Dilihat dari kelompok bank, perlambatan aset utamanya terdapat pada kelompok BPD yang dipengaruhi oleh penundaan pencairan DAU kepada 192 Pemerintah Daerah (Pemda)

Meskipun secara tahunan melambat, pertumbuhan aset secara triwulanan masih lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, aset BUK meningkat 3,09% (*qtq*), dengan ditopang tumbuhnya DPK sebesar 2,17% (*qtq*), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara umum, aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari *Concentration Ratio* (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 48,47% dan CR aset 20 BUK terbesar yang mencapai 79,47% dari aset perbankan.

Grafik I - 14 — Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Juni 2018

Tabel I - 3 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Periode	Aset	
	CR4%	CR20%
2014	45,94	79,7
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
Jun '17	47,96	79,42
Sep '17	47,84	79,28
Des '17	48,81	79,87
Mar'18	47,80	79,23
Jun'18	48,47	79,47

\* *Concentration Ratio* digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi *output* sejumlah entitas (n) terhadap total *output* industri. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

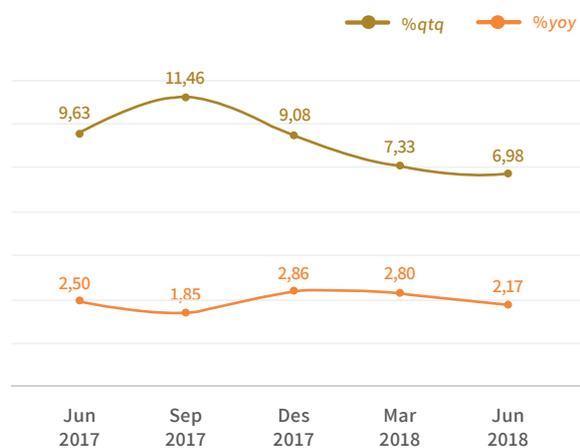
Sumber: OJK

## B. Dana Pihak Ketiga

DPK BUK tumbuh melambat 6,98% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan utamanya terjadi pada komponen deposito yang memiliki porsi terbesar (43,34%) yang tumbuh 3,22% (*yoy*), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,63% (*yoy*). Secara umum, perlambatan DPK dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi aliran dana masuk yang didorong oleh *tax amnesty* yang mengakibatkan lonjakan DPK di tahun 2017.

Secara triwulanan DPK tumbuh meningkat sebesar 2,17% (*qtq*) dibandingkan posisi Maret 2018 yang tumbuh terkontraksi -0,05% (*qtq*). Perbaikan pertumbuhan DPK pada periode berjalan antara lain dipengaruhi oleh adanya gaji ke-13 PNS ataupun THR yang biasanya diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Grafik I - 15 — Tren Pertumbuhan DPK



## C. Kredit

Penggunaan dana bank sebagian besar disalurkan untuk kredit yang umumnya diberikan kepada pihak ketiga non bank. Pada triwulan II-2018, kredit BUK meningkat sebesar 11,12% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 7,37% (*yoy*).

Berdasarkan jenis penggunaan, KMK dan KI tumbuh masing-masing 11,89% (*yoy*) dan 9,91% (*yoy*), yang menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan kredit produktif didorong oleh peningkatan penyaluran kredit di sektor listrik yang tumbuh signifikan, sejalan dengan program Pemerintah dalam pembangunan gardu listrik 35.000 MW, serta mulai meningkatnya aktifitas kegiatan usaha dilihat dari peningkatan konsumsi listrik oleh Industri. Sementara itu, KK juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dari 8,71% (*yoy*) menjadi 10,89% (*yoy*).

Secara triwulanan kredit tumbuh meningkat dari 0,11% (*qtq*) pada Maret 2018 menjadi 5,08% (*qtq*). Peningkatan penyaluran kredit ini salah satunya didorong oleh peningkatan KK sebagai dampak perbaikan daya beli

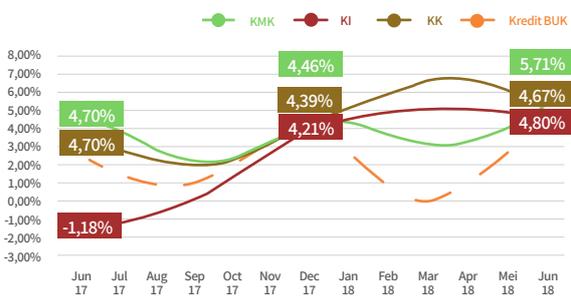
masyarakat seiring dengan penerimaan THR Hari Raya Idul Fitri.

**Grafik I - 16** — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)



Sumber: SPI, Juni 2018

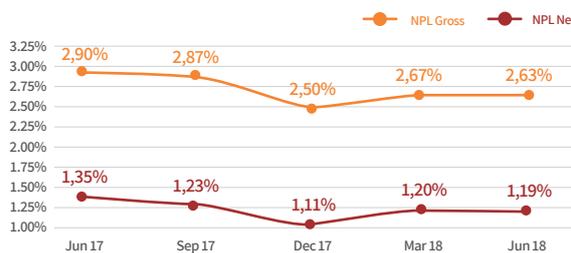
**Grafik I - 17** — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (*qtq*)



Sumber: SPI, Juni 2018

Ditengah pertumbuhan kredit, kualitas kredit berlanjut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. NPL *gross* BUK turun 27 *bps* (*yoy*) menjadi 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya (2,90%). Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI memiliki NPL tertinggi sebesar 3,15% dan 2,58%, namun masih terjaga dibawah *threshold* 5%. Sementara itu, NPL KK masih cukup rendah sebesar 1,77% meskipun tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan tren peningkatan.

**Grafik I - 18** — Tren NPL (%)



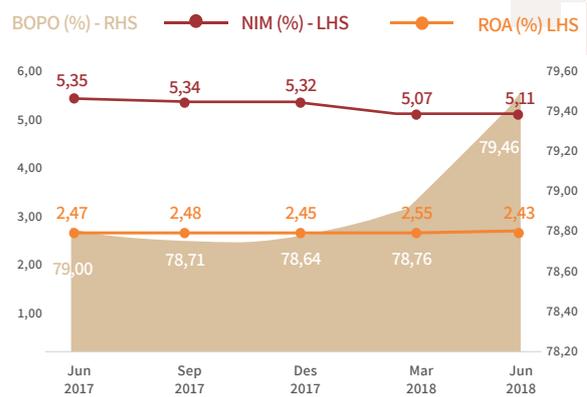
Sumber: SPI, Juni 2018

## D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada triwulan II-2018 relatif stabil dengan ROA sebesar 2,43% yang didukung oleh tumbuhnya laba sebesar 14,88% (*yoy*). Sementara itu, seiring dengan peningkatan suku bunga acuan, beban operasional meningkat sebesar 6,75% (*yoy*) melebihi peningkatan pendapatan operasional sebesar 5,62%

(*yoy*) sehingga berdampak pada rasio BOPO yang sedikit naik menjadi 79,46%.

**Grafik I - 19** — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



## E. Permodalan

Pada triwulan II-2018 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 21,91%. Hal tersebut ditopang oleh tumbuhnya modal BUK sebesar 8,02% (*yoy*). Ditengah meningkatnya pertumbuhan kredit, ATMR tumbuh 12,09% (*yoy*), melebihi pertumbuhan modal yang berdampak pada sedikit turunnya CAR dari tahun sebelumnya (22,74%). Namun demikian, rasio tersebut masih solid dan jauh lebih tinggi dari *requirement* minimum CAR sebesar 8%.

### 1.2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan II-2018, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari kondisi permodalan (CAR) yang masih solid. Aset, Kredit, dan DPK BPR juga tumbuh baik meskipun relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan likuiditas BPR masih memadai dilihat dari *Cash Rasio* (CR) BPR yang meningkat.

Tabel I - 4 — Kondisi Umum BPR

Indikator	Jun 2016	Jun 2017	Mar 2018	Jun 2018	qtq Mar 18	qtq Jun 18	yoy Jun 17	yoy Jun 18
Total Aset (Rp Milyar)	105.867	116.640	127.528	128.005	+1,26	+0,37%	+10,18%	+ 9,74
Kredit (Rp Milyar)	79.764	87.389	91.655	94.279	+2,43%	+2,86%	+9,56%	+ 7,88%
DPK (Rp Milyar)	70.238	77.853	86.361	86.300	-1,77%	-0,07%	+10,84%	+10,85%
- Tabungan (Rp Milyar)	20.723	23.389	26.999	26.686	-1,03%	-1,16%	+12,87%	+14,10%
- Deposito (Rp Milyar)	49.516	54.465	59.362	59.614	+2,11%	+0,42%	+9,99%	+9,45%
NPL Gross (%)	6,19	6,93	6,81	7,15	66	34	74	22
NPL Net (%)	4,51	4,59	5,10	5,41	58	31	8	82
ROA (%)	2,62	2,61	2,68	2,48	13	-20	-1	-13
LDR (%)	79,67	79,03	75,43	77,60	7	216	-64	-143
CR (%)	14,85	15,10	16,93	15,94	-293	-99	25	84
BOPO (%)	82,33	81,39	80,59	81,74	9	115	-94	-35
CAR (%)	22,17	22,49	24,10	22,72	116	-139	32	23

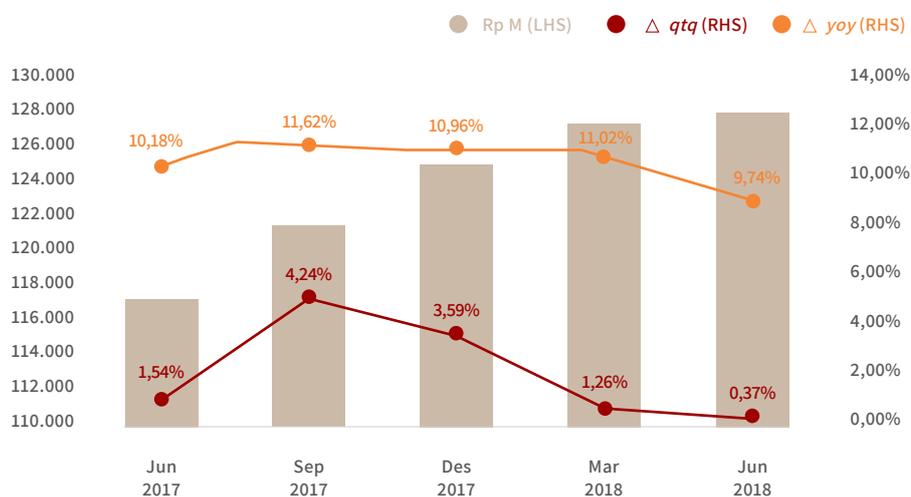
Sumber: SPI BPR, Juni 2018

### A. Aset

Aset BPR pada triwulan II-2018 tumbuh sebesar 9,74% (*yoy*), sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,18% (*yoy*). Sementara itu, secara triwulanan Aset BPR meningkat

0,57%, sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya (1,26%). Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang relatif stabil sebesar 10,85% (*yoy*) (Juni 2017=10,84%, *yoy*) serta melambatnya pertumbuhan modal.

Grafik I - 20 — Tren Aset BPR

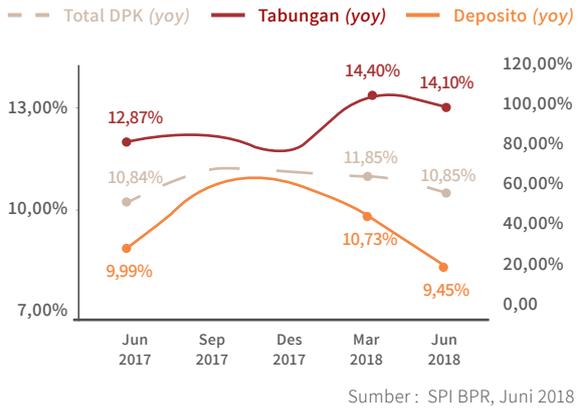


### B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

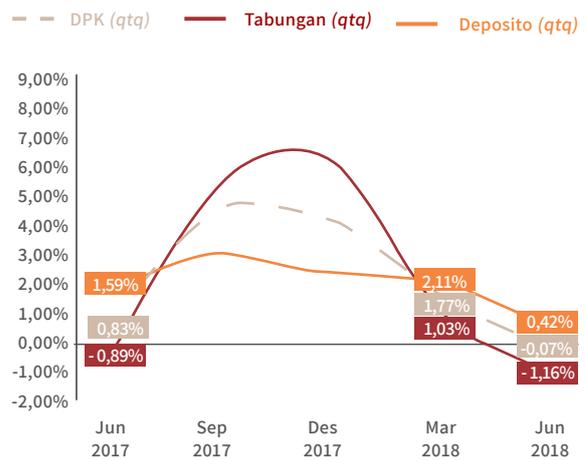
DPK BPR pada triwulan II-2018 tumbuh sebesar 10,85% (*yoy*) menjadi Rp86,30 triliun, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 10,84% (*yoy*). Tabungan tumbuh cukup tinggi, sebesar 14,10% (*yoy*) dibandingkan posisi Juni 2017 yang tumbuh 12,87% (*yoy*). Namun demikian, deposito sebagai komponen terbesar DPK BPR (69,08%) sedikit melambat yaitu tumbuh 9,45% (*yoy*) (Juni 2017=9,99%, *yoy*).

Di sisi lain, secara triwulan DPK BPR turun -0,07% (*qtq*) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,77% (*qtq*). Hal ini disebabkan perlambatan pertumbuhan deposito yang hanya tumbuh 0,42% (*qtq*) dan turunnya tabungan sebesar -1,16% (*qtq*).

**Grafik I - 21** — Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



**Grafik I - 22** — Tren Pertumbuhan DPK (qtq)



### C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada triwulan II-2018 tumbuh 7,88% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,56% (yoy). Tren penyaluran kredit BPR masih sama dengan periode-periode sebelumnya, dimana sebagian besar disalurkan untuk tujuan konsumsi dengan porsi sebesar 47,86%. Seiring dengan melambatnya penyaluran kredit BPR, baik KMK, KI dan KK BPR juga tumbuh melambat 8,71% (yoy), 11,35% (yoy) dan 6,63% (yoy).

Sektor perdagangan besar dan eceran masih merupakan sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar dengan porsi 25,44% dari keseluruhan penyaluran total kredit.

Sektor ini tumbuh sebesar 6,56% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,24% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor pertambangan tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 32,16% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi 0,25% terhadap total kredit BPR. Sebagian besar kredit BPR masih disalurkan ke sektor Bukan Lapangan Usaha – Lainnya. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa terdapat sektor-sektor ekonomi baru yang belum dapat digolongkan pada klasifikasi sektor ekonomi yang ada saat ini, dan/atau masih terbatasnya kompetensi SDM BPR dalam melakukan klasifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi.

**Tabel I - 5** — Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Jun 2017	Mar 2018	Jun 2018	Porsi	qtq Mar 2018	qtq Jun 2018	yoy Mar 2018	qtq Jun 2018
Modal Kerja	38.967	40.732	42.360	44,93%	2,41%	4,00%	9,26%	8,71%
Investasi	6.107	6.590	6.800	7,21%	1,90%	3,19%	15,52%	11,35%
Konsumsi	42.315	44.333	45.120	47,86%	2,53%	1,77%	9,02%	6,63%
<b>Total</b>	<b>87.389</b>	<b>91.655</b>	<b>94.279</b>	<b>100%</b>	<b>2,43%</b>	<b>2,86%</b>	<b>9,56%</b>	<b>7,88%</b>

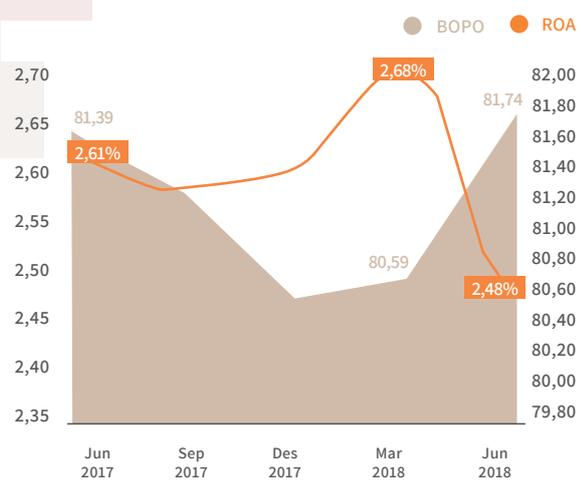
Sumber : SPI BPR, Juni 2018

### D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada triwulan II-2018 masih terjaga meskipun mengalami sedikit penurunan. Rasio ROA tercatat sebesar 2,48%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,61%. Hal tersebut

dipengaruhi oleh melambatnya laba yang hanya tumbuh 4,10% (yoy) seiring peningkatan BOPO sebesar 35 bps (yoy) menjadi 81,74%.

Grafik I - 23 — Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber : SPI BPR, Juni 2018

### 1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan II-2018, kredit UMKM tumbuh 10,02% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,26% (*yoy*). Peningkatan kredit UMKM terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian yang masing-masing tumbuh 8,38% (*yoy*) dan 14,14% (*yoy*) seiring dengan besarnya porsi kredit pada kedua sektor tersebut.

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 3,99% (*qtq*) lebih baik dari triwulan sebelumnya yang turun 0,45% (*qtq*). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit UMKM ke sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 3,79% (*qtq*) sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang hari raya Idul Fitri.

## E. Permodalan

Permodalan BPR tumbuh solid dengan CAR sebesar 22,72%, meningkat 23 bps (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 22,49%. Tingginya permodalan BPR tersebut tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

Tabel I - 6 — Konsentrasi Penyaluran UMKM

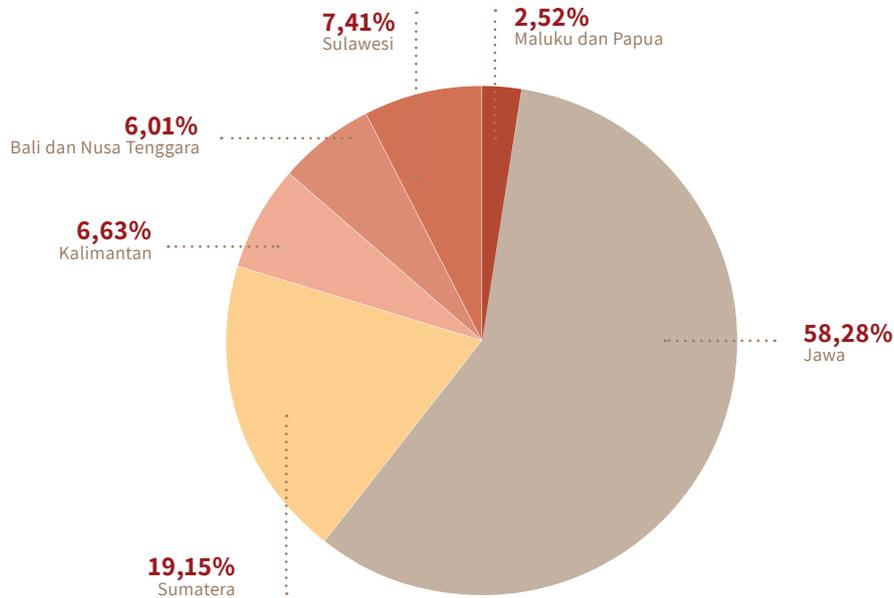
Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		qtq Mar 2017	qtq Jun 2018	yoy Mar 2017	yoy Mar 2018
	Jun'17	Mar'17	Jun'18	Jun'17	Mar'18				
<b>Perdagangan Besar dan Eceran</b>									
Baki Debet	443.403	462.998	480.540	53,37%	52,57%	0,06%	3,79%	5,65%	8,38%
NPL	19.395	18.914	19.896	4,37%	4,14%	8,09%	5,19%	11,52%	2,58%
<b>Industri Pengolahan</b>									
Baki Debet	89.894	90.551	93.234	10,82%	10,20%	-2,82%	2,96%	13,66%	3,72%
NPL	3.408	3.534	3.811	3,79%	4,09%	13,20%	7,84%	7,37%	11,83%
<b>Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan</b>									
Baki Debet	73.104	81.509	83.439	8,80%	9,13%	3,53%	2,37%	13,82%	14,14%
NPL	2.693	2.592	2.519	3,68%	3,02%	6,93%	-2,82%	-4,25%	-6,46%
<b>Listrik, gas, dan Air</b>									
Baki Debet	3.702	3.457	3.497	0,45%	0,38%	-3,35%	1,16%	69,56%	-5,54%
NPL	158	708	698	4,27%	19,96%	321,43%	-1,41%	373,82%	341,77%
<b>Lainnya</b>									
Baki Debet	220.698	240.468	253.367	26,56%	27,72%	-1,76%	5,36%	5,41%	14,80%
NPL	12.062	13.524	13.459	5,47%	5,31%	13,02%	-0,48%	19,56%	11,58%
<b>Baki Debet UMKM</b>	<b>830.801</b>	<b>878.983</b>	<b>914.077</b>			<b>-0,45%</b>	<b>3,99%</b>	<b>7,26%</b>	<b>10,02%</b>
<b>NPL UMKM</b>	<b>37.716</b>	<b>39.272</b>	<b>40.383</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,42%</b>	<b>11,64%</b>	<b>2,83%</b>	<b>12,59%</b>	<b>7,07%</b>

Keterangan : Shaded area merupakan rasio NPL  
Sumber : SPI, Maret 2018

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,28% terutama di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih minor yaitu hanya sebesar 22,56%. Namun demikian, dilihat dari

pertumbuhannya kredit UMKM di wilayah Maluku tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,32% (*yoy*). Masih rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dapat menjadi peluang bagi bank untuk meningkatkan pendampingan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat di *remote area*.

**Grafik I - 24** — Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber : SPI, Juni 2018

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,74%) dan BUSN (34,20%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BUMN dan BPD tumbuh tertinggi masing-masing sebesar 11,81% (*yoy*) dan 10,04% (*yoy*). Tingginya pertumbuhan

kredit UMKM BUMN sesuai dengan jumlah debitur atau kredit UMKM kelompok bank tersebut yang mendominasi pangsa pasar. Lebih lanjut, peningkatan kredit UMKM BPD ditopang oleh meningkatnya kredit ke sektor usaha kecil dan menengah.

**Tabel I - 7** — Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp Miliar)			Porsi	qtq Mar 2018	qtq Jun 2018	yoy Jun 2017	yoy Jun 2018
	Jun'17	Mar'18	Jun'18					
BUMN	472.057	503.402	527.800	57,74%	1,66%	4,85%	11,50%	11,81%
BUSN	290.937	305.460	312.628	34,20%	-1,54%	2,35%	2,86%	7,46%
BPD	60.133	62.705	66.172	7,24%	-10,89%	5,53%	12,43%	10,04%
KCBA dan Campuran	7.673	7.416	7.478	0,82%	2,89%	0,84%	-48,51%	-2,54%
<b>Total UMKM</b>	<b>830.801</b>	<b>878.983</b>	<b>914.077</b>	<b>100%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>3,99%</b>	<b>7,26%</b>	<b>10,02%</b>

Sumber : SPI, Juni 2018

## 1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

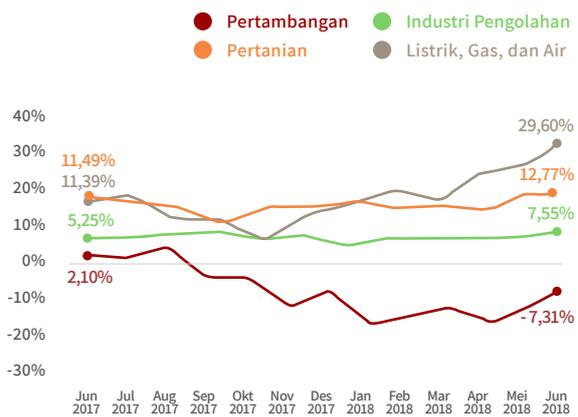
Berdasarkan program Nawacita, terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi fokus/prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap krusial bagi perekonomian Indonesia karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sektor-sektor ini juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya dan menjadi kontributor yang cukup

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 18,70% dan 16,97%, sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,36% terhadap total kredit.

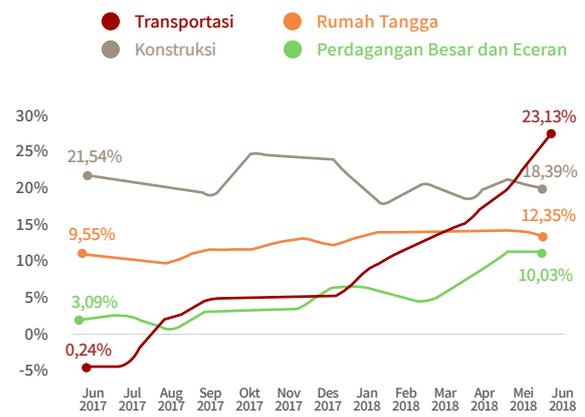
**Tabel I - 5** — Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq Mar 2018	qtq Jun 2018	yoy Jun 2017	yoy Jun 2018	Porsi
		Jun 2017	Mar 2018	Jun 2018					
<b>Lapangan Usaha</b>									
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	284,46	317,38	319,60	4,38%	0,70%	12,45%	12,35%	6,74%
2	Perikanan	9,78	11,27	10,64	8,17%	-5,62%	7,11%	8,74%	0,22%
3	Pertambangan dan Penggalian	124,80	113,62	104,75	3,19%	-7,81%	3,34%	-16,06%	2,21%
4	Industri Pengolahan	756,53	824,11	793,33	4,97%	-3,74%	3,72%	4,86%	16,73%
5	Listrik, Gas, dan Air	138,23	146,13	154,24	12,32%	5,55%	40,15%	11,58%	3,25%
6	Konstruksi	215,28	258,93	254,71	4,37%	-1,63%	26,41%	18,32%	5,37%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	836,52	885,45	885,84	3,44%	0,04%	7,30%	5,90%	18,68%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	94,40	97,89	97,37	2,11%	-0,53%	7,18%	3,14%	2,05%
9	Transportasi	171,08	182,63	192,10	4,64%	5,19%	-2,75%	12,29%	4,05%
10	Perantara Keuangan	196,33	214,19	211,49	2,63%	-1,26%	17,33%	7,72%	4,46%
11	Real Estate	206,87	221,92	225,52	2,91%	1,62%	12,41%	9,02%	4,75%
12	Administrasi Pemerintahan	22,64	21,82	21,98	-5,11%	0,73%	67,40%	-2,91%	0,46%
13	Jasa Pendidikan	8,89	10,10	10,17	6,03%	0,61%	9,65%	14,40%	0,21%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,57	19,09	19,80	8,23%	3,70%	9,97%	19,52%	0,42%
15	Jasa Kemasyarakatan	58,49	72,38	70,72	16,42%	-2,30%	8,84%	20,89%	1,49%
16	Jasa Perorangan	2,64	2,74	2,70	3,69%	-1,49%	1,22%	2,30%	0,06%
17	Badan Internasional	0,19	0,16	0,15	-1,27%	-2,24%	124,86%	-20,40%	0,00%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	2,39	2,75	3,49	-10,38%	26,77%	-78,67%	45,69%	0,07%
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>									
19	Rumah Tangga	1.002	1.102	1.136	4,86%	3,06%	8,63%	13,38%	23,95%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	221,86	233,32	228,53	1,90%	-2,05%	12,31%	3,01%	4,82%
<b>Industri</b>		<b>4.370</b>	<b>4.738</b>	<b>4.743</b>	<b>4,28%</b>	<b>0,11%</b>	<b>9,24%</b>	<b>8,54%</b>	<b>100%</b>

Grafik I - 25 & 26 — Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber : SPI, Juni 2018



Sumber : SPI, Juni 2018

Penyaluran kredit bank umum triwulan II-2018 tumbuh 10,75% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 7,75% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan pemulihan ekonomi global dan domestik. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor Listrik, gas, dan air tumbuh tertinggi sebesar 29,60% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik utamanya pada industri yang menunjukkan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha. Pada posisi kedua, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tumbuh 23,13% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor komunikasi yang tumbuh 45,26% (yoy).

Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 18,39% (yoy), yang utamanya ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil. Hal ini sejalan dengan masih berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan properti swasta.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi pada triwulan II-2018, kredit sektor rumah tangga tumbuh 12,35% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 9,55% (yoy). Secara nominal, peningkatan kredit pada sektor ini utamanya ditopang oleh kredit untuk pemilikan rumah tinggal dan kendaraan bermotor seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat. Sementara pertumbuhan tertinggi disalurkan kepada kredit untuk pemilikan flat/apartemen dan peralatan rumah tangga.

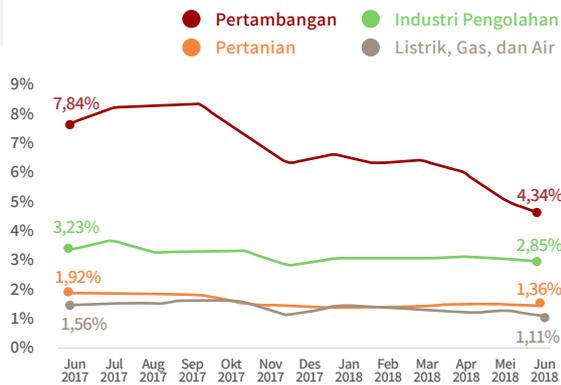
Kredit sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tumbuh 10,03% (yoy), sejalan dengan tumbuhnya konsumsi yang dipengaruhi faktor musiman Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tercermin pada peningkatan kredit subsektor perdagangan kelompok makanan dan produk antara yang juga

dipengaruhi oleh peningkatan sektor konstruksi. Selain itu, kredit perdagangan ekspor tumbuh tertinggi sebesar 20,82% (yoy) sejalan dengan perbaikan ekonomi global. Kredit ke sektor industri pengolahan/manufaktur tumbuh 7,55% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,25% (yoy). Peningkatan kredit pada sektor ini ditopang oleh tumbuhnya penyaluran ke subsektor industri pengolahan makanan minuman, industri kertas, pengolahan batubara dan pengilangan minyak. Meningkatnya kredit ke subsektor industri makanan dan minuman seiring dengan peningkatan kredit sektor pertanian dan *contagion effect* dari peningkatan konsumsi dan perdagangan makanan minuman. Sementara itu, meningkatnya kredit ke industri olahan batubara dan pengilangan minyak dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak global dan HBA.

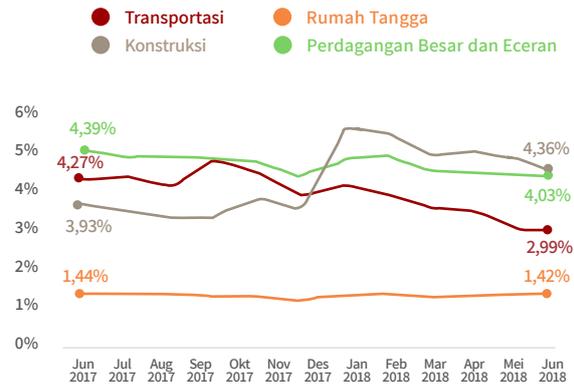
Kredit sektor pertanian tumbuh 12,77% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,49% (yoy). Peningkatan kredit pada sektor ini utamanya di dorong oleh tingginya penyaluran kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 12,06% (yoy). Selain itu, penyaluran ke subsektor jasa pertanian, perkebunan dan peternakan juga tumbuh tinggi sebesar 24,97% (yoy).

Kredit ke sektor pertambangan masih berkontraksi meskipun proses pemulihan harga komoditas global mulai membaik. Namun demikian, penurunan kredit pada sektor ini sudah melambat menjadi turun 7,31% (yoy) dibandingkan posisi Maret 2017 yang turun 16,06% (yoy). Perbaikan terutama terdapat pada subsektor pertambangan bijih logam dan penggalian batu-batuan yang mengalami pertumbuhan kredit masing-masing sebesar 6,65% (yoy) dan 3,40% (yoy).

Grafik I - 27 & 28 — NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber : SPI, Juni 2018



Sumber : SPI, Juni 2018

### 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

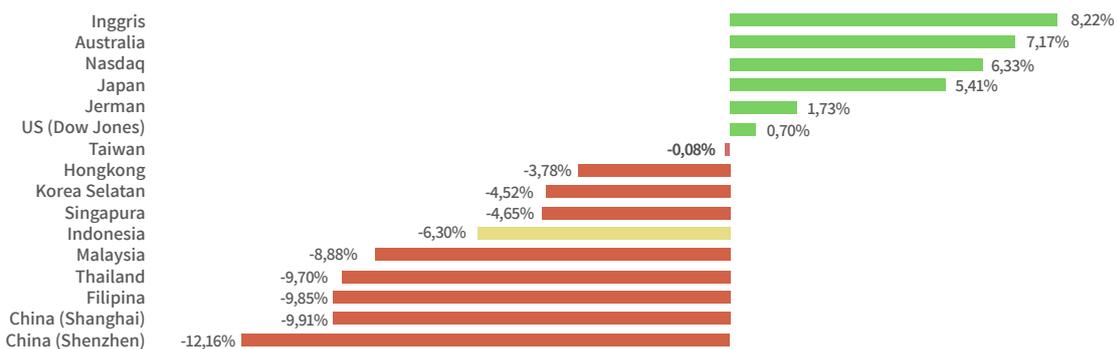
#### 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan II-2018 berada pada posisi 5,799.24 atau mengalami penurunan sebesar 6,30% jika dibandingkan posisi triwulan I-2018. Perdagangan Efek pada triwulan II-2018, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *outflow (net sell)* di pasar saham yaitu sebesar Rp25,93 triliun.

Faktor domestik yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya selama triwulan II-2018 Bank Indonesia kembali menaikkan BI *7-days Repo Rate* sebanyak tiga kali. BI *7-days Repo Rate* berada di level 5,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* turun di level 4,50% dan *Lending Facility* turun di 6,00%.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau *The Federal Reserve* kembali menaikkan suku bunga 25 basis poin untuk kedua kalinya pada 2018 menjadi 2%, imbal hasil (*yield*) suku bunga *US Treasury* 10 tahun naik 3,1% untuk pertama kalinya sejak 2011. Sementara itu, untuk *yield* 2 tahun berada pada level tertingginya setelah 1 dekade pada level 2,58%. Selain itu, terdapat pengaruh *industrial* politik dagang antara Amerika Serikat dengan China. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp574,- atau -4,17% menjadi Rp 14.330,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 29 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)

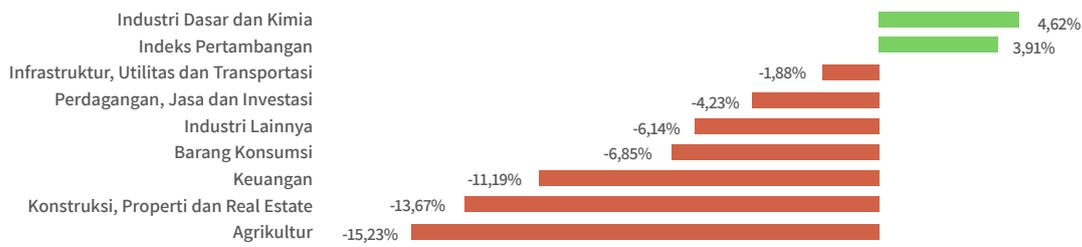


Sumber: Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 5,42% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp 6.511,73 triliun. Rata-rata nilai dan volume perdagangan per hari mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,60% dan 25,21% menjadi sebesar Rp8,349.94 miliar dan Rp9,38 miliar. Sementara itu, rata-rata frekuensi perdagangan per hari mengalami kenaikan 6,29% menjadi 409 ribu kali transaksi. Penurunan IHSG masih lebih baik jika dibandingkan dengan indeks bursa Malaysia, Thailand, Filipina, dan China.

Sebagian besar kinerja indeks sektoral pada triwulan II-2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan terdapat pada indeks sektor pertanian sebesar -15,23%. Hal ini disebabkan pergeseran musim serta penurunan harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) pada enam bulan pertama 2018 sehingga harga CPO mengalami penurunan sebesar 7,07% (*ytd*) serta kebijakan *anti-CPO* Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan India sebagai konsumen utama produk tersebut dunia.

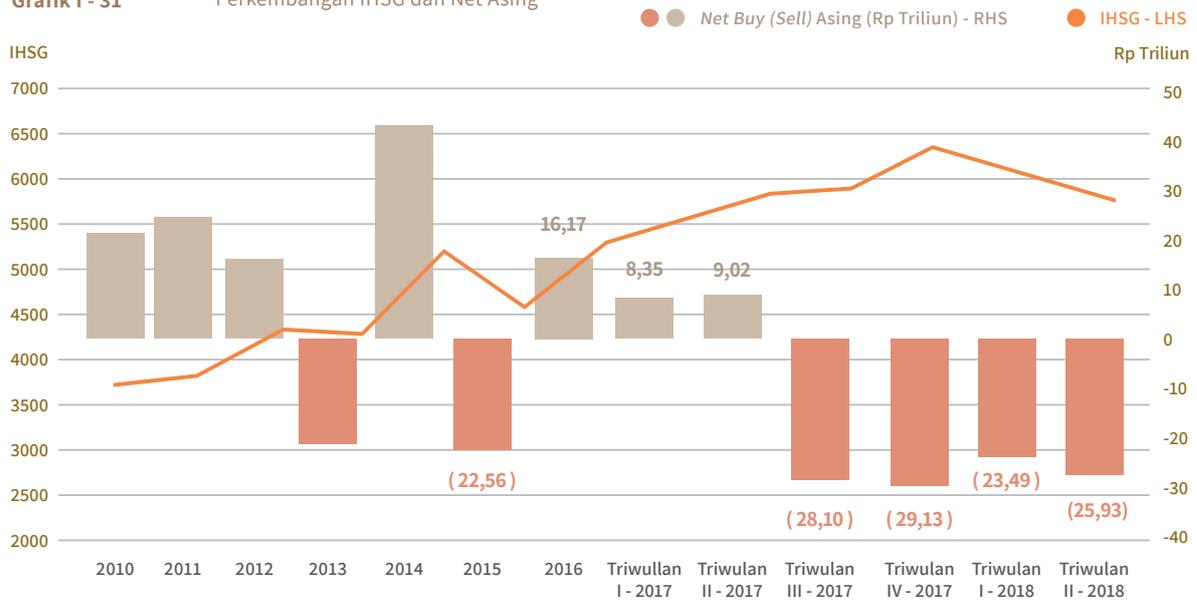
**Grafik I - 30** ——— Perkembangan Indeks Industri (qta)



**Tabel I - 6** ——— Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator ( Rata-Rata Harian )	Triwulan I - 2017	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar)	6,995.23	8,445.45	6,397.99	8,714.81	9,553.69	8,349.94
<b>Investor Asing (Rp miliar)</b>						
Beli	2.411,95	3.365,73	2.167,99	2.960,76	3.516,68	3.120.26
Jual	2.227,32	3.195,46	2.621,32	3.438,38	3.895,62	3.600.51
<b>Investor Domestik (Rp miliar)</b>						
Beli	4.583,28	5.079,71	4.230,00	5.754,05	6.037,01	5.224.68
Jual	4.717,91	5.249,99	3.776,68	5.276,43	5.658,07	4.749.44
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	336.568	301.152	291.847	318.829	384.845	409.065

**Grafik I - 31** ——— Perkembangan IHSG dan Net Asing

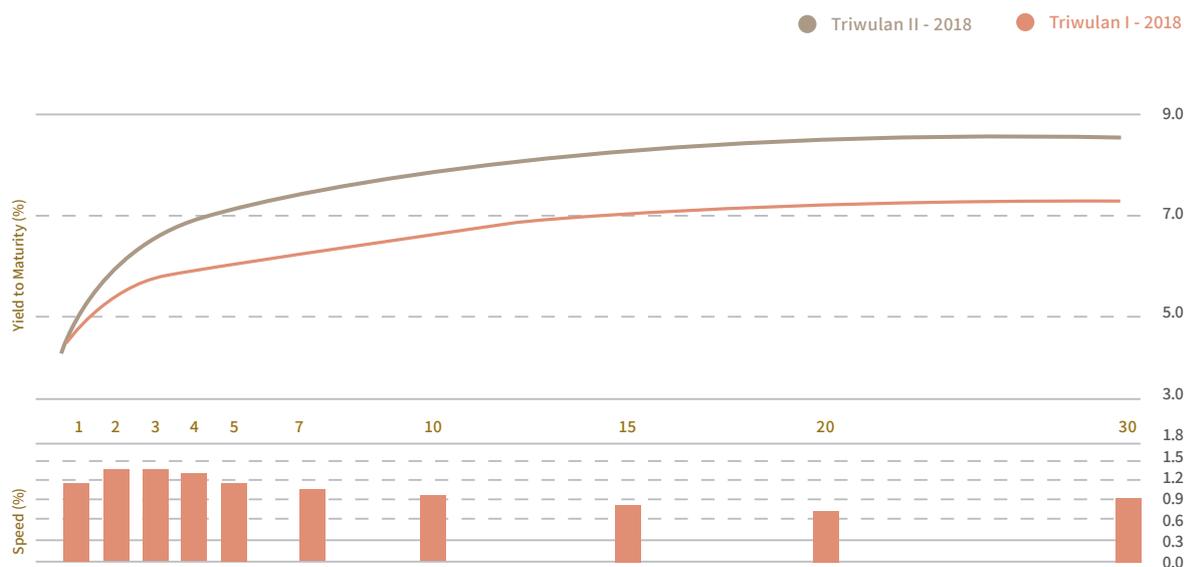


**Tabel I - 7** ——— Perkembangan IHSG dan Net Asing

Periode	IHSG	Net Sell/Buy (Rp Triliun)
2015	4.593,01	-22,56
2016	5.296,71	16,17
Triwulan I - 2017	5.568,11	8,35
Triwulan II - 2017	5.829,71	9,02
Triwulan III - 2017	5.900,85	-28,10
Triwulan IV - 2017	6.355,65	-29,13
<b>Total</b>		<b>-39,87</b>
Triwulan I - 2018	6.188,98	-23,49
Triwulan II - 2018	5.799,24	-25,93
<b>Total</b>		<b>-49,42</b>

Selama triwulan II - 2018 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp25,93 triliun.

**Grafik I - 32** — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan II-2018 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren kenaikan dengan rata-rata *yield*

untuk seluruh tenor naik sebesar +111,9 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami kenaikan masing-masing sebesar +154,2 bps, +140,6 bps, dan +100,9 bps.

**Tabel I - 8** — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan II - 2017			Triwulan I - 2018			Triwulan II - 2018		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)
<b>Obligasi :</b>									
Korporasi	68,47	68,61	6.385	63,36	64,23	7.130	87,87	87,97	7.486
SBN	814,57	841,36	45.205	1.512,90	1.572,01	74.853	1.150,36	1.149,47	56.092
<b>Total</b>	<b>883,04</b>	<b>909,96</b>	<b>51,591</b>	<b>1.576,26</b>	<b>1.636,24</b>	<b>81.983</b>	<b>1.238,23</b>	<b>1.237,45</b>	<b>63.578</b>
<b>Repo</b>	<b>883,04</b>	<b>909,96</b>	<b>51,591</b>	<b>1.576,26</b>	<b>1.636,24</b>	<b>81.983</b>	<b>1.238,23</b>	<b>1.237,45</b>	<b>63.578</b>

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah mengalami penurunan tercemin dari volume, nilai dan frekuensi perdagangan Obligasi Pemerintah, pada triwulan II-2018 mengalami penurunan masing-masing sebesar -23,96%, -26,88%, dan -25,06% dibandingkan periode sebelumnya. Namun dibandingkan dengan triwulan II-2017, volume, nilai dan frekuensi perdagangan

Obligasi Pemerintah meningkat sebesar masing-masing 41,22%, 36,62% dan 24,08%.

Adapun aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan II-2018 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2018. Volume, nilai dan frekuensi perdagangan naik masing-masing +38,69%, +36,96%, dan +4,99% menjadi Rp87,87 triliun, Rp87,97 triliun dan 7.486 kali.

### 1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

**Tabel I - 9** — Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	33
2	Penjamin Emisi Efek *)	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	83
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
<b>Total</b>		<b>125</b>

\*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini terdapat dua pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yaitu PT Optima Kharya Capital Securities dan PT Panca Global Kapital sehingga jumlah PE yang terdaftar sebanyak 125 PE. Terkait dengan

kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah enam lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 21 lokasi selain Kantor Pusat.

**Tabel I - 10** — Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	701	686

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 161 izin dengan rincian 140 izin Wakil Perantara Pedagang Efek

(WPPE) dan sebanyak 21 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.686 WPPE dan 2.089 WPEE.

**Tabel I - 11** — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan I - 2018		Triwulan II - 2018		Izin Total s/d Triwulan II - 2018	Total
	Dokumen Masuk	Pemberian Izin	Dokumen Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	93	46	132	140	186	9.686
WPEE	23	5	17	21	26	2.089
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>51</b>	<b>149</b>	<b>161</b>	<b>212</b>	<b>11.775</b>

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 63 perpanjangan izin dengan rincian 59 perpanjangan izin WPPE dan 4 perpanjangan izin WPEE sehingga secara total

OJK menerbitkan 5.469 perpanjangan izin dengan rincian 4.762 perpanjangan izin WPPE dan 707 perpanjangan izin WPEE.

**Tabel I - 12** — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan I - 2018		Triwulan II - 2018		Izin Total s/d Triwulan II - 2018	Total
	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	131	46	88	59	105	4.762
WPEE	10	5	4	4	9	707
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>51</b>	<b>92</b>	<b>63</b>	<b>114</b>	<b>5.469</b>

Pada periode laporan, OJK menerima 172 dokumen perizinan dengan rincian 167 dokumen permohonan izin WPPEP dan lima permohonan WPPEPT. OJK juga

menerbitkan 139 izin WPPEP dan 4 untuk izin WPPEPT. Sampai akhir periode laporan total izin WPPEP sebanyak 240 dan WPPEPT sebanyak tujuh.

**Tabel I - 13** — Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan I - 2018		Triwulan II - 2018		Izin Total s/d Triwulan II - 2018	Total
	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	117	101	167	139	240	779
WPEE	5	3	5	4	7	73
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>104</b>	<b>172</b>	<b>143</b>	<b>247</b>	<b>852</b>

### 1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan II-2018 mengalami penurunan sebesar Rp9,94 triliun (2,00%) menjadi Rp486,56 triliun dibandingkan dengan triwulan I-2018. NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan penurunan jumlah NAB terbesar yaitu Rp9,46 triliun (-15,91%), diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp2,17 triliun (-2,09%), Reksa

Dana Saham sebesar Rp1,47 triliun (-1,06%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,42 triliun (-5,60%), ETF sebesar Rp0,72 triliun (-6,83%), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,28 triliun (-5,61%). Namun demikian, Reksa Dana Pasar Terproteksi dan Reksa Dana Syariah mencatatkan peningkatan NAB sebesar Rp4,54 triliun (3,72%) dan Rp1,06 triliun (3,41%).

**Tabel I - 14** — Perkembangan Pengelolaan Investasi

NAB Per Jenis Reksa Dana	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
RD Pasar Uang	40,89	45,59	52,11	49,82	59,45	49,99
RD Pendapatan Tetap	76,54	83,44	91,43	107,55	104,06	101,89
RD Saham	109,73	108,16	115,23	120,85	138,91	137,44
RD Campuran	22,75	24,00	24,66	26,94	25,35	23,93
RD Terproteksi	88,86	94,29	99,27	107,55	122,07	126,61
RD Indeks	0,87	1,00	1,95	3,99	4,99	4,71
ETF	7,46	7,44	7,94	7,97	10,54	9,82
RD Syariah*	17,31	18,91	21,43	28,31	31,11	32,17
<b>Total</b>	<b>364,42</b>	<b>382,84</b>	<b>414,03</b>	<b>457,51</b>	<b>496,50</b>	<b>486,56</b>

\*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 26% menjadi Rp23,39 triliun pada triwulan II-2018. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga

mengalami peningkatan sebesar 12,72% menjadi 62 RDPT dari sebelumnya 55 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

**Tabel I - 15** ——— Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Dalam Triliun Rupiah

Jenis Investasi	Triwulan I - 2017	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
<b>Reksa Dana</b>						
Jumlah	1.491	1.552	1.667	1.777	1.849	1.921
Total NAB	364,42	382,84	414,03	457,51	496,50	486,56
<b>RDPT</b>						
Jumlah	77	76	73	54	55	62
Total NAB	16,22	20,08	19,59	18,30	18,57	23,39
<b>EBA</b>						
Jumlah	7	7	8	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	1,63	1,56	7,32	6,98	6,59	6,32
<b>EBA-SP</b>						
Jumlah	3	4	4	4	5	5
Nilai Sekuritisasi	1,43	2,47	2,36	2,23	4,11	3,75
<b>Dire</b>						
Jumlah	3	3	4	3	3	3
Total Nilai	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,61
<b>KPD</b>						
Jumlah	372	377	385	395	423	440
Total Nilai	177,89	187,09	192,65	202,87	197,59	189,30

OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-EBA tetap tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,32 triliun atau turun sebesar 4,1%. Sementara itu, jumlah KIK-DIRE tetap tiga KIK dengan dana kelolaan Rp0,61 triliun atau naik sebesar 3,39%.

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap lima

EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,75 triliun atau turun sebesar 8,76% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan II-2018, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan sebesar 4,19% menjadi Rp189,30 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak KPD justru meningkat sebesar 4,02% menjadi 440 KPD. Sampai akhir periode laporan, OJK telah menerbitkan 237 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

**Tabel I - 16** — Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	11
Reksa Dana Campuran	12
Reksa Dana Pendapatan Tetap	17
Reksa Dana Pasar Uang	13
Reksa Dana Terproteksi	154
Reksa Dana Indeks	6
ETF-Saham	3
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Syariah Saham	4
Reksa Dana Syariah Indeks	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	7
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
<b>Total</b>	<b>237</b>

OJK menerbitkan 93 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 90 Reksa Dana Konvensional dan tiga Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 78 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 62 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 16 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Tiga Reksa Dana Campuran terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Empat Reksa Dana Saham terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Tiga Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK,

satu Reksa Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;

- Satu Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Indeks yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek luar negeri yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Berbasis Efek Sukuk yang dibubarkan karena karena kesepakatan MI dan BK;
- Satu Reksa Dana Syariah Terproteksi yang dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.

**Tabel I - 17** — Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	Triwulan I - 2017	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
Wakil Manajer Investasi (WMI)	3.136	1.856	1.967	2.031	2.101	2.165
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	23.182	23.300	24.149	24.972	25.714	26.450
Penasehat Investasi (PI)	4	4	4	4	4	4
<b>Institusi</b>						
Manajer Investasi (MI)	85	87	87	90	90	90
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	32	34	35	36	36	37
Penasehat Investasi (PI)	3	3	3	4	4	5

Selama triwulan II-2018, OJK memberikan izin kepada 1 pelaku institusi Penasehat Investasi (PI) sehingga jumlah PI meningkat sebesar 25%. Selain itu OJK tidak mengeluarkan izin baru terhadap MI dan APERD sehingga masing-masing tetap berjumlah 90 MI dan 37 APERD.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WAPERD sebesar 2,86% dan WMI sebesar 3,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

### 1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan II-2018, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami peningkatan 21%. Sementara itu, nilai emisi mengalami penurunan 30% dibanding triwulan II-2017. Jumlah dan nilai emisi Penawaran Umum Perdana Saham mengalami peningkatan masing-masing sebesar 28% dan 235%. Sementara itu, Jumlah emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang mengalami peningkatan 9% tetapi

untuk nilai emisinya mengalami penurunan 25%. Jumlah Penawaran Umum Terbatas juga mengalami peningkatan 56% dan untuk nilai emisinya mengalami penurunan 56% dibandingkan triwulan II-2017. Selama triwulan II-2018, jumlah Penawaran Umum sebanyak 74, terdiri dari 23 Penawaran Umum Perdana Saham, 14 Penawaran Umum Terbatas, dan 37 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.

**Tabel I - 18** — Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II - 2017		Triwulan II - 2018		(% Jumlah Emisi	(% Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	18	3.222	23	10.797	28%	235%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	9	44.269	14	19.498	56%	-56%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	34	62.378	37	46.857	9%	-25%
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	7	7.860	5	6.800	-29%	-13%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 1	18	35.120	18	19.449	50%	67%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 2, 3 dst	9	19.398	-45%	27.894	-9%	19%
<b>Total Emisi</b>	<b>61</b>	<b>109.869</b>	<b>74</b>	<b>77.152</b>	<b>21%</b>	<b>-30%</b>

**Tabel I - 19** — Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan II - 2018

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	2.089.020	6.665.196	9.391.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	684.445	147.000	22.410.000
3.	Sekuritas dan Investasi	40.000	715.744	300.000
4.	Perdagangan	2.374.689	-	3.028.500
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.077.502	351.856	6.827.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	3.168.444	560.002	1.200.000
7.	Properti dan Perhotelan	1.057.912	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	-	806.694	3.200.000
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	500.000
11.	Aneka Industri Lainnya	40.250	-	-
12.	Industri Dasar	106.272	-	-
13.	Industri Logam	-	-	-
14.	Industri Kimia	-	10.251.481	-
15.	Agrobisnis	158.330	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-
<b>Total</b>		<b>10.796.862</b>	<b>19.497.973</b>	<b>46.856.500</b>

#### A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan II-2018, terdapat 35 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak

23 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 12 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 23 Emiten tersebut sebesar Rp10,8 triliun.

**Tabel I - 20** — Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Dafam Property Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan	46.000.000.000
2	PT Charnic Capital Tbk	Sekuritas dan Investasi	40.000.000.000
3	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	Perbankan	751.110.750.000
4	PT Bank BRISyariah Tbk	Perbankan	1.337.908.806.000
5	PT Surya Pertiwi Tbk	Perdagangan	812.000.000.000
6	PT Medikaloka Hermina Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	1.300.108.960.000
7	PT Royal Prima Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	600.000.000.000
8	PT Guna Timur Raya Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	34.500.000.000
9	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	684.444.530.000
10	PT Sarimelati Kencana Tbk	Perdagangan	664.812.500.000
11	PT MNC Studios International	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	780.000.000.000
12	PT Sriwahana Adityajakarta Tbk	Industri Dasar	106.272.000.000
13	PT Steadfast Marine Tbk	Aneka Industri Lainnya	40.250.345.000
14	PT Trimuda Nuansa Citra Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	30.000.000.000
15	PT Batavia Prosperindo Trans Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	40.000.000.000
16	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	835.002.228.000
17	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk.	Perdagangan	897.876.000.000
18	PT Transcoal Pacific Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	138.000.000.000
19	PT Mahkota Group Tbk	Agrobisnis	158.329.800.000
20	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	180.000.000.000
21	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.	Properti dan Perhotelan	767.411.514.000
22	PT NFC Indonesia Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	308.334.875.000
23	PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk	Properti dan Perhotelan	244.500.000.000
<b>Total</b>			<b>10.796.862.308.000</b>

## B. Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Selama triwulan II-2018, terdapat 19 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 14 perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran

Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp19,49 triliun.

**Tabel I - 21** — Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Perbankan	199.973.645.625
2	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan	1.376.370.259.500
3	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan	1.998.531.801.476
4	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Perbankan	946.502.594.250
5	PT Barito Pacific Tbk.	Industri Kimia	10.251.481.013.470
6	PT Bank MNC Internasional Tbk	Perbankan	489.630.556.400
7	PT Buana Lintas Lautan Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	351.856.061.340
8	PT Anabatic Technologies Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	560.001.736.660
9	PT Bank Harda International Tbk	Perbankan	100.375.000.000
10	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	147.000.000.000
11	PT Matahari Putra Prima Tbk	Real Estate dan Konstruksi	806.694.420.000
12	PT Multipolar Tbk	Sekuritas dan Investasi	503.237.366.170
13	PT Bank Bukopin Tbk	Perbankan	1.553.812.094.100
14	PT Panca Global Kapital Tbk	Sekuritas dan Investasi	212.506.279.200
<b>Total</b>			<b>19.497.972.828.191</b>

### C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama triwulan II-2018 terdapat lima Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi, 18 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 14 Perusahaan yang

telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp 46,9 triliun.

**Tabel I - 22** — Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Penawaran Umum Obligasi				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi
1	PT Oto Multiartha	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi II Oto Multiartha Tahun 2018	1.100.000.000.000
2	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi II	1.000.000.000.000
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	500.000.000.000
4	PT Medco Power Indonesia	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	Obligasi I Sukuk Wakalah I	1.200.000.000.000
5	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi I	3.000.000.000.000
<b>Total</b>				<b>6.800.000.000.000</b>

**Tabel I - 23** — Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi I				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi
1	PT Serasi Autoraya Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	500.000.000.000
2	PT Maybank Indonesia Finance	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi II Tahap I	500.000.000.000
3	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	- PUB Obligasi IV Tahap I - PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	1.620.000.000.000
4	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018	4.000.000.000.000
5	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB II Tahap I	300.000.000.000
6	PT BFI Finance Indonesia Tbk.	Asuransi dan Pembiayaan	PUB IV Tahap I	740.000.000.000
7	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Perbankan	-PUB Obligasi III Tahap I - PUB Obligasi Subordinasi III Tahap I	1.402.000.000.000
8	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB Obligasi II Tahap I	300.000.000.000
9	PT Bank Central Asia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi I Tahap I	500.000.000.000
10	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	450.000.000.000
11	PT PP Properti Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap I	1.000.000.000.000
12	PT PP (Persero)	Real Estate dan Konstruksi	-	1.500.000.000.000
13	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	600.000.000.000
14	PT Sinarmas Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap I	400.000.000.000
15	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi III Tahap I	608.000.000.000
16	PT Perusahaan Listrik Negara	Perdagangan	-PUB Obligasi III Tahap I - PUB Sukuk Ijarah III Tahap I	2.028.500.000.000
17	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	- PUB Green Bond I Tahap I Tahun 2018 - PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I Tahun 2018	2.000.000.000.000
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan	-	1.000.000.000.000
<b>Total</b>				<b>19.448.500.000.000</b>

**Tabel I - 24** — Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

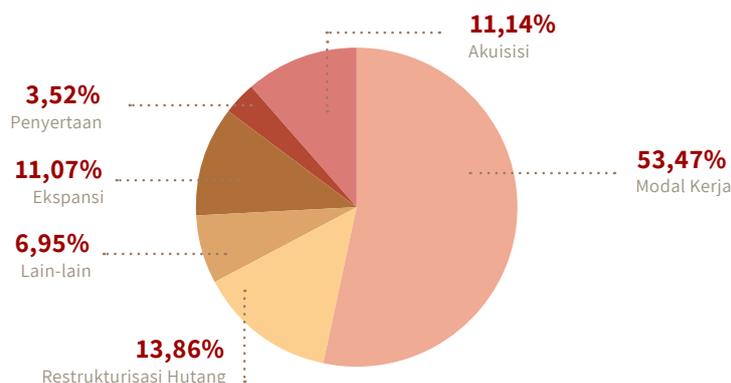
PUB Obligasi Tahap II dst				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi
1	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	1.000.000.000.000
2	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	3.000.000.000.000
3	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap IV	2.239.000.000.000
4	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Perdagangan	PUB II Tahap II	1.000.000.000.000
5	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap III	2.500.000.000.000
6	PT BANK PAN INDONESIA Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II tahap IV	1.500.000.000.000
7	PT Mayora Indah Tbk.	Barang Konsumsi	Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	500.000.000.000
8	PT Indosat Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II	2.719.000.000.000
9	PT Sarana Multi Griya Finansial	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap IV	2.000.000.000.000
10	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	1.000.000.000.000
11	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB I Tahap II	700.000.000.000
12	PT Bank UOB Indonesia	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap II	1.000.000.000.000
13	PT Bank Victoria International Tbk	Perbankan	- PUB Obligasi I Tahap II - PUB Obligasi Subordinasi I Tahap II	650.000.000.000
14	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap V	800.000.000.000
<b>Total</b>				<b>20.608.000.000.000</b>

#### D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan selama triwulan II-2018 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 53,47% atau sekitar Rp40,8 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 13,86% atau sekitar Rp10,6 triliun untuk restrukturisasi

hutang; 11,14% atau sekitar Rp8,5 triliun untuk akuisisi; 11,07% atau sekitar Rp8,4 triliun untuk ekspansi; 3,52% atau sekitar Rp2,7 triliun untuk penyertaan dan 6,95% atau sekitar Rp 5,3 triliun untuk lain-lain.

**Grafik I - 33** — Rencana Penggunaan Dana



\*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

**Tabel I - 25** Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan II-2018 Berdasarkan Sektor Industri

Dalam Jutaan Rupiah

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	1.433.878	-	-	15.211.265	-	1.352.800
2	Asuransi dan Pembiayaan	1.775.568	397.946	-	20.784.190	168.922	19.950
3	Sekuritas dan Investasi	33.790	496.212	-	287.998	225.000	-
4	Perdagangan	2.438.883	-	-	137.745	2.497.181	250.065
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.484.438	198.028	-	1.224.055	5.082.991	204.054
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	641.523	1.189.649	272.609	182.397	1.740.462	788.822
7	Properti dan Perhotelan	33.401	243.664	499.694	3.500	-	5.047
8	Real Estate dan Konstruksi	595.626	-	248.178	2.291.467	849.271	-
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10	Barang Konsumsi	-	-	-	498.300	-	-
11	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	37.250	-	-
12	Industri Dasar	-	-	-	99.747	-	-
13	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14	Industri Kimia	-	-	7.470.299	-	-	2.680.102
15	Agrobisnis	-	153.992	-	-	-	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.437.107</b>	<b>2.679.491</b>	<b>8.490.780</b>	<b>40.757.914</b>	<b>10.563.827</b>	<b>5.300.841</b>

### 1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

#### A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek

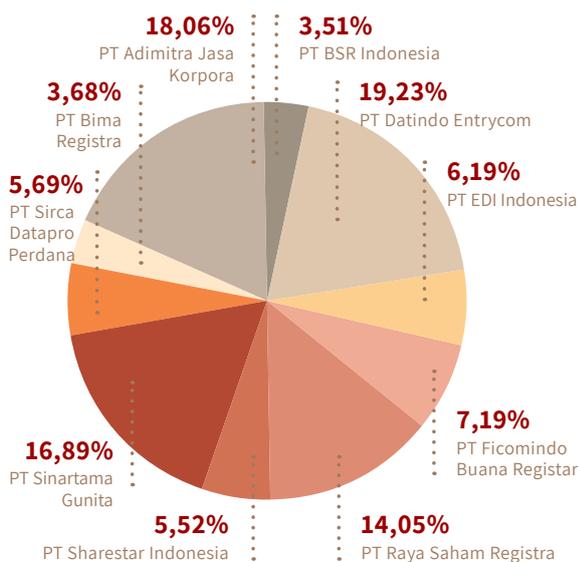
Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemingkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

**Tabel I - 26** — Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018	Jenis
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	20	20	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemingkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

#### B. Biro Administrasi Efek (BAE)

**Grafik I - 34** — Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan II 2018



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 19.23%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 18.06%, PT Sinartama Gunita sebanyak 16.89% dari keseluruhan

klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3.51%, PT Bima Registra sebanyak 3.68%, dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5.52%.

#### C. Pemingkat Efek

Sampai dengan triwulan II-2018, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemingkat Efek sebanyak 181 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemingkat Efek adalah PT Pemingkat Efek Indonesia sebanyak 82 Perusahaan. Selanjutnya PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 99 Perusahaan. Berikut *market share company rating (%)* berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemingkat Efek triwulan II-2018:

**Grafik I - 35** — Market Share Company Rating Triwulan II 2018



Dari 181 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemingkat Efek, sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak 12 Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*.

Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan II-2018:

**Tabel I - 27** — Komposisi Peringkat Perusahaan Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*

Pemingkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
PT Pemingkat Efek Indonesia	79	73	9	9
PT Fitch Ratings Indonesia	98	96	1	3
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>169</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

## D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama triwulan II-2018, OJK menerbitkan sebanyak 15 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan lima Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:

a.	Konsultan Hukum	5 STTD
b.	Penilai	7 STTD
c.	Notaris	3 STTD
d.	ASPM	5 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan

OJK menetapkan sebanyak 14 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:

a.	Akuntan	1 pembatalan STTD
b.	Konsultan Hukum	2 pembatalan STTD
c.	Notaris	11 pembatalan STTD

Selain itu, terdapat satu orang Notaris yang memasuki masa pensiun. Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

**Tabel I - 28** — Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
Akuntan	593	592
Konsultan Hukum	726	729
Penilai	223	230
Notaris	1306	1297
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	73	78

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama Triwulan II-2018, OJK bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel I - 29** — Kegiatan Peningkatan Pengembangan Profesi

No.	Judul Kegiatan	Profesi	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	"Year And Reminder Audit dan Temuan-Temuan Dalam Penerapan Peraturan Serta Ketentuan OJK Pada Pelaporan Keuangan Emiten"	Akuntan	Jakarta	177 orang
2	"Financial Market Integration in ASEAN: How Role and Function of Financial Lawyer"	Konsultan Hukum	Bangkok, Thailand	49 orang
3	Analisa Fairness Opinion	Penilai	Semarang	20 orang

## 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan II-2018, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 1,08% menjadi Rp2.216,16 triliun. Adapun kenaikan aset IKNB tersebut didukung dengan kenaikan aset yang signifikan dari industri Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Pembiayaan.

Tabel I - 30 Total Aset IKNB

Dalam Triliun Rupiah

No.	Industri	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.012,34	1.078,99	1.132,60	1.147,14	1.150,10
2	Dana Pensiun Konvensional	254,13	258,94	264,50	264,68	260,71
3	Lembaga Pembiayaan*)	534,02	538,28	556,99	560,27	577,83
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	199,41	201,67	207,66	211,99	219,13
5	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	8,26	8,26	8,05	8,05	8,05
6	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***)	0,31	0,30	0,33	0,33	0,34
<b>Total Aset</b>		<b>2.008,47</b>	<b>2.086,44</b>	<b>2.170,13</b>	<b>2.192,46</b>	<b>2.216,16</b>

\*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah.

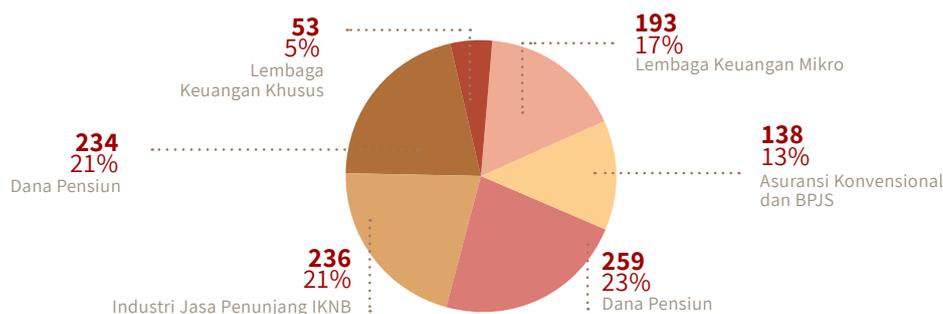
\*\*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan II 2018 menggunakan data per Semester II 2017

\*\*\*) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan menggunakan data kuartal I 2017, Triwulan III 2017 menggunakan data kuartal II 2017, Triwulan IV 2017 serta Triwulan I 2018 menggunakan data Kuartal III 2017, dan triwulan II 2018 menggunakan data kuartal I 2018

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 259 pelaku, diikuti

oleh Industri Jasa Penunjang IKNB dan Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 36 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2018



1. Data Pelaku IKNB per Juni 2018

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

### 1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 0,26% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp1.150,10 triliun. Kenaikan aset tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah investasi yang terpantau turun 0,4% menjadi Rp980,71 triliun. Penurunan investasi terbesar terdapat pada jenis investasi Deposito Berjangka dan Reksa dana. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, maka penurunan nilai investasi terbesar terjadi pada asuransi jiwa dan asuransi wajib dengan total penurunan investasi sebesar Rp9,79 triliun. Meskipun mengalami penurunan, aset dan investasi industri

Asuransi dan BPJS masih didukung oleh peningkatan kinerja industri yaitu dari sisi pendapatan premi yang meningkat sebesar 20,3% (*yoY*) menjadi Rp214,9 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 44,43%, diikuti oleh BPJS sebesar 32,72%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 20,21%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,64%.

Tabel I - 31 — Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Dalam Triliun Rupiah

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
<b>1</b>	<b>Total Aset</b>					
	Asuransi Jiwa	434,76	486,66	512,95	516,27	509,37
	Asuransi Umum dan Reasuransi	140,34	142,03	146,17	154,99	159,71
	Asuransi Wajib	124,36	126,15	132,40	131,12	128,23
	BPJS	312,89	324,16	341,09	344,76	352,79
	<b>Jumlah</b>	<b>1.012,34</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.132,60</b>	<b>1.147,14</b>	<b>1.150,10</b>
<b>2</b>	<b>Total Investasi</b>					
	Asuransi Jiwa	378,89	430,14	458,59	458,97	453,06
	Asuransi Umum dan Reasuransi	71,97	75,43	77,08	80,22	79,93
	Asuransi Wajib	103,52	106,13	111,90	116,77	112,88
	BPJS	295,65	307,92	324,50	328,72	334,85
	<b>Jumlah</b>	<b>850,03</b>	<b>919,62</b>	<b>972,08</b>	<b>984,67</b>	<b>980,71</b>
<b>3</b>	<b>Total Pendapatan Premi</b>					
	Asuransi Jiwa	73,79	131,85	183,85	49,54	95,47
	Asuransi Umum dan Reasuransi	37,47	56,39	79,65	21,58	43,44
	Asuransi Wajib	5,74	8,79	11,90	2,92	5,67
	BPJS	61,60	95,13	130,49	32,55	70,32
	<b>Jumlah</b>	<b>178,61</b>	<b>292,16</b>	<b>405,88</b>	<b>106,59</b>	<b>214,90</b>
<b>4</b>	<b>Total Klaim Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa	43,93	80,98	115,77	34,74	72,93
	Asuransi Umum dan Reasuransi	15,50	23,60	33,51	7,77	15,57
	Asuransi Wajib	5,21	8,53	11,79	3,33	6,46
	BPJS	52,63	80,11	109,81	31,60	55,88
	<b>Jumlah</b>	<b>117,26</b>	<b>193,22</b>	<b>270,88</b>	<b>77,44</b>	<b>150,84</b>
<b>5</b>	<b>Total Liabilitas</b>					
	Asuransi Jiwa	349,37	396,50	421,96	425,40	425,71
	Asuransi Umum dan Reasuransi	84,14	84,32	85,82	93,40	98,90
	Asuransi Wajib	100,24	101,79	105,49	104,90	108,60
	BPJS	44,78	49,23	51,20	57,42	64,19
	<b>Jumlah</b>	<b>578,53</b>	<b>631,84</b>	<b>664,47</b>	<b>681,11</b>	<b>697,39</b>

**Tabel I - 32** — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Deposito Berjangka	141,35	138,89	133,08	117,20	108,60
2	Sertifikat Deposito	-	1,86	0,33	0,32	0,39
3	Saham	181,30	201,02	216,96	214,85	214,80
4	Obligasi	105,10	107,79	111,13	109,67	110,51
5	MTN	-	1,32	1,95	2,36	1,95
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	240,03	247,87	246,40	264,87	269,42
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,86	0,90	0,88	0,86	0,90
8	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	0,00
9	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0,01	0,01	-	0,02	-
10	Reksa Dana	150,54	185,47	225,81	236,41	233,53
11	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	1,49	2,71	2,56	2,93	2,72
12	Dana Investasi Real Estat	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
13	REPO	-	-	-	-	-
14	Penyertaan Langsung	13,74	14,06	15,24	16,31	18,20
15	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	13,49	13,57	13,90	14,88	15,42
16	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,39	0,45	0,58	0,50	0,53
17	Emas Murni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,18	0,17	0,17	0,24	0,26
19	Pinjaman Polis	-	2,02	1,97	2,03	2,10
20	Investasi Lain	1,34	1,31	0,90	1,03	1,18
	<b>Total</b>	<b>850,03</b>	<b>919,62</b>	<b>972,08</b>	<b>984,67</b>	<b>980,71</b>

Terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (27,5%), Reksa Dana (23,8%), Saham (21,9%) dan Deposito Berjangka (11,1%). Pada

periode triwulan II-2018 tidak terdapat perubahan jumlah pelaku yaitu masih dengan jumlah 138 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 33** — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	28	30	30	30	30
	c. Patungan	23	23	23	22	22
	<b>Sub Total</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	51	51	50	50	50
	c. Patungan	23	23	23	22	22
	<b>Sub Total</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
3	Reasuransi	5	5	6	6	6
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>138</b>

**Tabel I - 34** — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
GDP (miliar Rupiah)	12.406.800	12.406.800	13.588.797	13.588.797	13.588.797
Premi Bruto (miliar Rupiah)	340.656	371.139	385.809	405.234	420.331
Jumlah Penduduk (juta)	257	257	257	257	257
Penetrasi	2,75%	2,99%	2,84%	2,98%	3,09%
Densitas (ribu Rupiah)	1.325,51	1.444,12	1.501,20	1.576,79	1.635,53

Catatan:

1. Angka Premi Bruto merupakan premi per Juni 2018 disetahunkan <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>
2. Angka GDP merupakan GDP per triwulan IV-2017 berdasarkan press release BPS 5 Februari 2018.
3. Penetrasi: Premi Bruto/GDP
4. Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 3,72% menjadi Rp1.635.528 per tahun. Adapun tingkat penetrasi

asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,09% atau naik 0,11%.

**Tabel I - 35** — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
Asuransi Jiwa	414,0%	491,5%	521,0%	480,6%	455,1%
Asuransi Umum dan Reasuransi	278,6%	294,1%	321,0%	321,9%	333,0%

Sementara itu, RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 455,1%, atau turun 25,5% dibanding periode

sebelumnya. Sementara itu, untuk RBC Asuransi Umum, mengalami peningkatan sebesar 11,1% menjadi 333,0% dibanding periode sebelumnya.

### 1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan II-2018, aset dan investasi industri Dana Pensiun mengalami penurunan dibanding triwulan I-2018 disebabkan melemahnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan indeks perkembangan harga ataupun *yield* obligasi gabungan

(INDOBeX) yang masing-masing turun sebesar 6,30% dan 4,62%. Aset dana pensiun turun 1,5% dari Rp264,68 triliun menjadi Rp260,71 triliun. Sementara itu, investasi turun 1,7% dari Rp257,02 triliun menjadi Rp252,60 triliun.

**Tabel I - 36** — Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

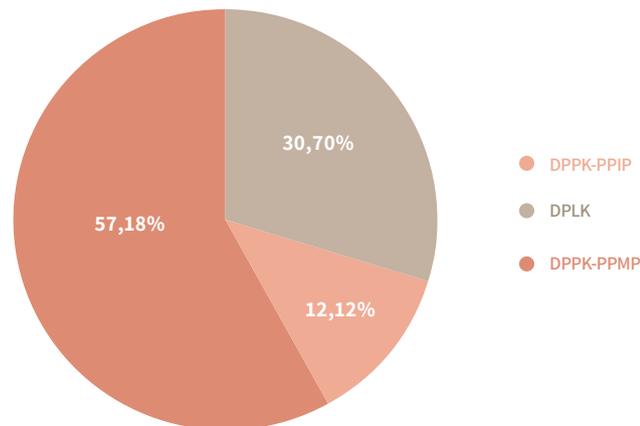
Jenis Program	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
DPPK-PPMP	152,65	152,37	154,50	154,60	150,25
Growth	1,44%	-0,19%	1,40%	0,07%	-2,81%
DPPK-PPIP	28,34	30,91	30,95	31,55	31,43
Growth	3,23%	9,08%	0,15%	1,94%	-0,38%
DPLK	73,14	75,66	75,50	78,53	79,03
Growth	6,21%	3,45%	-0,21%	4,01%	0,63%
<b>Total Aset</b>	<b>254,13</b>	<b>258,94</b>	<b>260,96</b>	<b>264,68</b>	<b>260,71</b>
Growth	2,97%	1,9%	0,8%	1,4%	-1,5%

**Tabel I - 37** — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

Jenis Program	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
DPPK-PPMP	146,19	146,73	149,61	149,10	144,42
<i>Growth</i>	0,80%	0,37%	1,96%	-0,34%	-3,13%
DPPK-PPIP	27,49	30,20	30,36	30,84	30,62
<i>Growth</i>	2,49%	9,88%	0,53%	1,58%	-0,71%
DPLK	71,62	74,59	74,52	77,08	77,55
<i>Growth</i>	4,16%	-0,10%	7,34%	3,44%	0,61%
<b>Total Aset</b>	<b>245,30</b>	<b>251,52</b>	<b>254,48</b>	<b>257,02</b>	<b>252,60</b>
<i>Growth</i>	2,5%	1,2%	4,60%	1,0%	-1,7%

**Grafik I - 37** — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II - 2018



**Tabel I - 38** — Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Surat Berharga Negara	57,08	57,70	58,36	58,46	57,24
2	Tabungan	0,19	0,57	0,29	0,68	0,58
3	Deposito <i>On Call</i>	2,04	1,25	1,17	1,47	2,06
4	Deposito Berjangka	65,59	68,34	67,00	66,27	66,44
5	Sertifikat Deposito	1,56	1,57	1,59	1,42	1,36
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	0,05	-
7	Saham	30,29	29,60	31,61	31,14	29,11
8	Obligasi	49,18	51,55	52,70	54,15	53,50
9	Sukuk	2,37	2,61	3,02	3,32	3,15
10	Unit Penyertaan Reksa Dana	14,59	15,07	15,92	16,07	16,01
11	<i>Medium Term Note</i>	0,19	0,12	0,20	0,16	0,17
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,56	1,20	1,14	1,14	1,06
13	Unit Penyertaan Berbentuk KIK	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
14	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15	<i>Repurchase Agreement</i>	-	-	-	-	-
16	Penempatan Langsung pada Saham	7,77	7,77	8,18	8,55	8,67
17	Tanah	4,75	4,85	4,71	4,82	3,99
18	Bangunan	2,10	2,12	1,98	2,11	2,27
19	Tanah dan Bangunan	6,91	7,06	6,48	7,09	6,84
	<b>Total</b>	<b>245,30</b>	<b>251,52</b>	<b>254,48</b>	<b>257,02</b>	<b>252,60</b>

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (27,89%), SBN (22,66%), obligasi (22,43%), dan saham (11,53%). Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah 234 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 39** Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
DPPK PPMP	175	171	169	167	167
DPPK PPIP	43	43	44	44	44
DPLK	24	24	23	23	23
<b>Total</b>	<b>242</b>	<b>238</b>	<b>236</b>	<b>234</b>	<b>234</b>

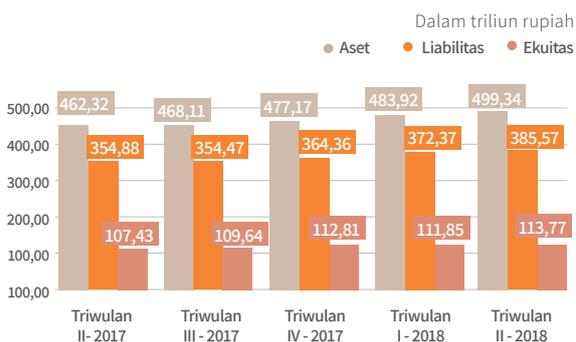
### 1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan II-2018 sebagai berikut:

#### A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai periode laporan, total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 3,19%, 3,54%, dan 1,99% dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 38** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

#### B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode triwulan II-2018, tidak terdapat pencabutan maupun penerbitan izin Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan II-2018 tetap sebanyak 191 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, sebanyak 73 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan

porosi sebesar 92%. Sementara itu, 118 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

#### C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp8,12 triliun atau 1,94% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 59,48% dan 29,48%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 76,87% (Rp340,96 triliun).

**Grafik I - 39** Piutang Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 40 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam triliun rupiah

No	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2017	Triwulan II-2018
<b>A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha</b>		<b>315,30</b>	<b>320,26</b>	<b>331,67</b>	<b>335,16</b>	<b>340,96</b>
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,00	19,12	20,40	20,17	18,18
2	Pertambangan dan Penggalian	22,24	22,97	23,74	24,65	26,21
3	Industri Pengolahan	35,71	36,39	38,34	39,88	37,55
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	21,21	22,07	19,26	21,66	18,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
6	Konstruksi	12,90	13,61	14,50	14,64	16,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	65,47	68,18	71,82	69,37	73,65
8	Transportasi dan Pergudangan	24,10	25,04	26,25	27,82	29,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,84	10,02	9,85	9,93	10,01
10	Informasi dan Komunikasi	4,04	3,57	3,55	3,73	3,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,27	4,14	4,35	4,44	4,87
12	Real Estate	1,91	1,83	1,83	2,04	2,07
13	Jasa profesional, Ilmiah dan Teknis	2,44	2,41	2,62	2,48	2,95
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	36,88	37,30	39,23	40,63	42,39
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,94	7,18	7,01	7,34
16	Jasa Pendidikan	4,37	4,71	4,84	4,73	4,71
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,01	9,27	9,41	9,28	9,28
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2,05	2,04	2,13	2,22	2,27
19	Kegiatan Jasa Lainnya	22,90	20,81	22,05	20,58	21,46
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	9,72	9,48	9,90	9,48	9,01
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,01	0,01	0,06	0,07	0,09
<b>B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha</b>		<b>104,61</b>	<b>104,34</b>	<b>97,87</b>	<b>99,58</b>	<b>102,59</b>
1	Rumah Tangga	58,46	56,61	61,45	61,55	63,99
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	46,15	47,73	36,42	38,03	38,59
<b>Jumlah</b>		<b>419,91</b>	<b>424,60</b>	<b>429,54</b>	<b>434,74</b>	<b>443,55</b>

## D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 85,58% atau masih dalam batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan (NPF)

masih berada pada level 3,15% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 3,14 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

**Tabel I - 41** — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Indikator	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
FAR (%)	87,88%	87,77%	86,94%	86,63%	85,58%
NPF (%)	3,47%	3,18%	2,96%	3,25%	3,15%
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	3,05	3,00	2,99	3,08	3,14

**Tabel I - 42** — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
<b>A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha</b>		3,49%	3,20%	3,10%	3,36%	3,28%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,46%	2,22%	1,87%	2,18%	1,86%
2	Pertambangan dan Penggalian	7,17%	6,75%	6,22%	5,36%	4,99%
3	Industri Pengolahan	2,44%	2,38%	2,04%	2,08%	2,52%
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,04%	0,11%	0,13%	0,12%	0,16%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,19%	1,96%	1,98%	1,78%	2,69%
6	Konstruksi	3,01%	3,13%	2,95%	2,84%	2,47%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,30%	1,76%	2,35%	3,59%	3,77%
8	Transportasi dan Pergudangan	14,01%	13,32%	12,27%	12,00%	11,39%
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,28%	5,00%	5,10%	5,11%	1,82%
10	Informasi dan Komunikasi	5,10%	6,52%	1,18%	0,86%	0,98%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81%	1,54%	3,04%	2,78%	1,47%
12	<i>Real Estate</i>	4,49%	3,72%	3,61%	4,02%	3,92%
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	2,51%	2,26%	1,55%	1,57%	2,49%
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1,99%	1,73%	1,53%	1,69%	1,56%
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88%	1,34%	1,35%	1,51%	1,41%
16	Jasa Pendidikan	1,93%	1,39%	1,30%	1,58%	1,82%
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,51%	1,60%	1,67%	1,68%	1,40%
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,13%	1,40%	1,20%	0,92%	1,06%
19	Kegiatan Jasa Lainnya	2,05%	1,72%	1,59%	1,75%	1,79%
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	1,81%	1,89%	1,79%	1,87%	2,42%
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	2,66%	0,64%	1,13%	0,86%	1,52%
<b>B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha</b>		3,40%	3,12%	2,48%	2,89%	2,73%
1	Rumah Tangga	2,37%	2,30%	2,17%	2,15%	2,27%
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,71%	4,09%	3,01%	4,08%	3,50%
<b>Jumlah</b>		<b>3,47%</b>	<b>3,18%</b>	<b>2,96%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,15%</b>

## E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, maka laba bersih industri perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar 30,20% atau naik dari Rp6,06 triliun pada triwulan II-2017 menjadi Rp7,90 triliun pada triwulan II-2018.

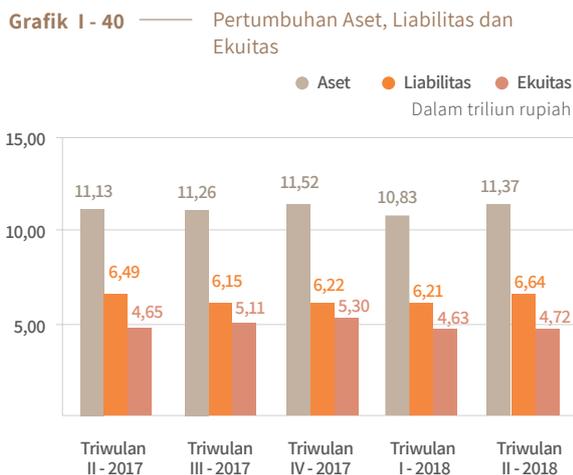
## F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada periode laporan jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp279,83 triliun. Dari jumlah pinjaman sebesar Rp279,83 triliun yang diterima perusahaan pembiayaan pada triwulan II-2018, sebesar 55,28% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh Dollar US 35,96%, Yen Jepang 8,76%, dan Dollar Singapura 0,001%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

### 1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

## A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,90%, 7,01%, dan 2,06% menjadi Rp11,37 triliun, Rp6,64 triliun, dan Rp4,72 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



## B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

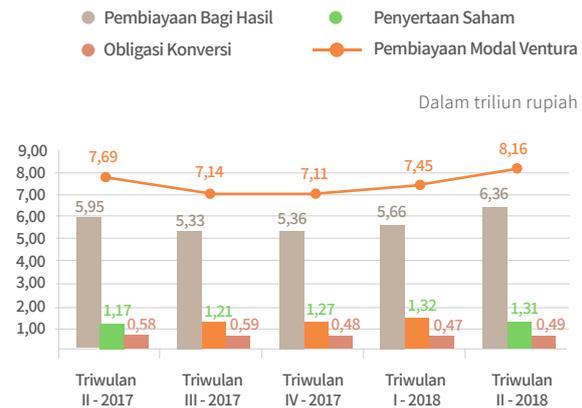
Sampai dengan triwulan II-2018, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 66 perusahaan.

## C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 9,51% menjadi Rp8,16 triliun

bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 77,98% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp6,36 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp3,77 triliun atau dengan proporsi sebesar 45,75%.

**Grafik I - 41** — Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



**Tabel I - 43** — Pembiayaan/ Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi

Dalam miliar rupiah

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	766	730	742	761	814
2	Pertambangan	980	602	463	481	485
3	Perindustrian	575	552	554	526	567
4	Konstruksi	516	493	436	422	462
5	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	3.276	3.037	3.094	3.362	3.772
6	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	159	153	153	142	157
7	Jasa Pendukung Bisnis	422	537	578	770	797
8	Jasa Sosial dan Masyarakat	160	155	163	174	182
9	Lain-Lain	633	701	787	889	1.007
<b>Jumlah</b>		<b>7.488</b>	<b>6.960</b>	<b>6.970</b>	<b>7.528</b>	<b>8.243</b>

Catatan: Data termasuk Pembiayaan Syariah

## D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

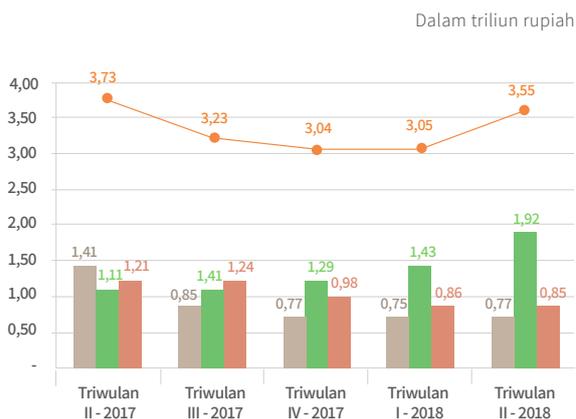
Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 96,24%, 71,76%, 1,45%, 2,54%.

- Kenaikan BOPO dari 92,34% pada triwulan I-2018 menjadi 96,24% pada triwulan II-2018.
- Kenaikan IFAR dari 68,73% pada triwulan I-2018 menjadi 71,76% pada triwulan II-2018.
- ROA mengalami penurunan dari 2,13% pada triwulan I-2018 menjadi 1,45% pada triwulan II-2018.
- ROE mengalami penurunan dari 3,27% pada triwulan I-2018 menjadi 2,54% pada triwulan II-2018.

## E. Sumber Pendanaan

Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan II-2018 adalah sebesar Rp3,55 triliun atau naik sebesar 16,48% dibandingkan triwulan sebelumnya.

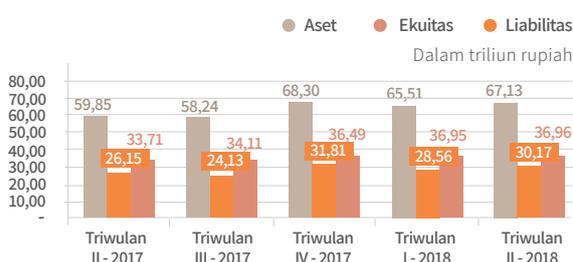
**Grafik I - 42** Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



### 1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pada triwulan II-2018, dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatatkan total aset sebesar Rp67,13 triliun, total liabilitas sebesar Rp30,17 triliun dan total ekuitas sebesar Rp36,96 triliun. Total aset, total liabilitas dan total ekuitas mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,47%, 5,62% dan 0,03% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 43** Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



**Tabel I - 44** Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

Dalam triliun rupiah

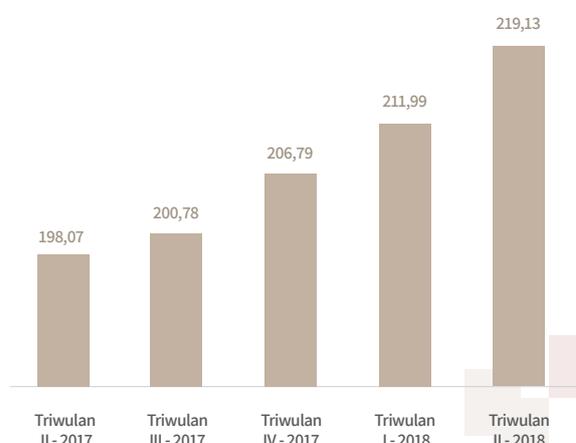
Jenis Infrastruktur	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
Air Minum	0,45	0,31	0,62	0,84	1,24
Jalan	7,53	8,15	9,07	8,76	10,63
Ketenagalistrikan	13,44	13,06	15,54	15,28	15,14
Lainnya	6,07	4,64	4,48	4,13	4,40
Minyak dan Gas Bumi	3,17	3,20	3,19	3,15	3,38
Telekomunikasi	2,31	2,11	2,25	1,95	1,92
Transportasi	3,18	4,36	4,43	4,46	3,15
<b>Jumlah</b>	<b>36,15</b>	<b>35,83</b>	<b>39,59</b>	<b>38,58</b>	<b>39,85</b>

### 1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 3,36% menjadi Rp219,13 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

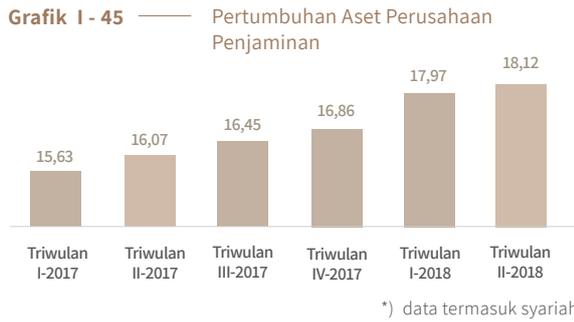
**Grafik I - 44** Pertumbuhan Aset LJKK

Dalam triliun rupiah

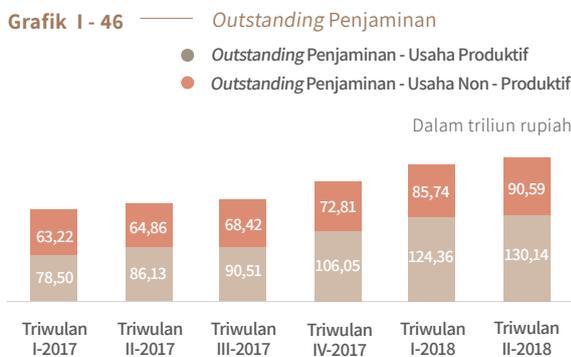


## A. Perusahaan Penjaminan

Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 0,82% menjadi Rp18,12 triliun.



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif. *Outstanding* penjaminan selama triwulan II-2018 naik 5,06% menjadi Rp220,73 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat sebesar 4,65% dan 5,66% dibanding dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.



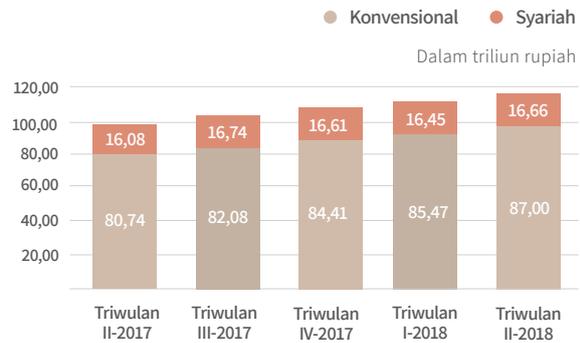
## B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 2,92% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp112,70 triliun menjadi Rp115,99 triliun.



Kenaikan aset tersebut seiring dengan naiknya penyaluran pembiayaan dan piutang yang dilakukan oleh LPEI. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp103,66 triliun atau naik 1,71%. Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 1,79% dan piutang melalui sistem syariah sebesar 1,29% dari triwulan sebelumnya melalui sistem konvensional sebesar 1,26% (*qtq*). Sementara itu, piutang melalui sistem syariah turun 0,99% (*qtq*)

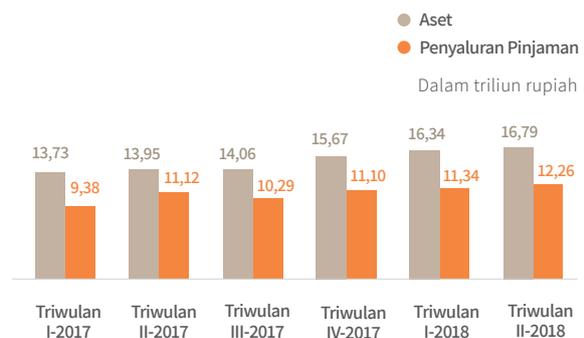
**Grafik I - 48** — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



## C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2018 naik 2,78% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp16,79 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan nilai pinjaman yang disalurkan yang mengalami kenaikan sebesar 8,09% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp12,26 triliun.

**Grafik I - 49** — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)

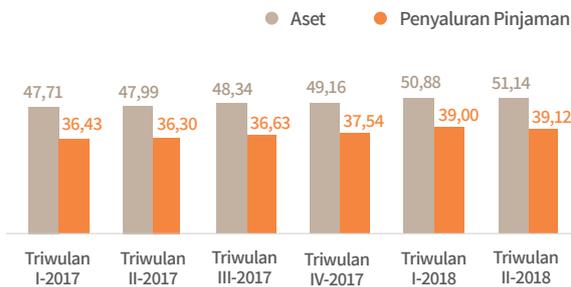


## D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian swasta mulai mendaftarkan diri ataupun memproses izin usahanya ke OJK. Sampai dengan triwulan II-2018, terdapat 12 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri (11 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan satu perusahaan pergadaian swasta syariah) serta tujuh perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh ijin dari OJK (enam perusahaan pergadaian swasta konvensional dan satu perusahaan pergadaian swasta syariah). Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 0,51% menjadi Rp51,14 triliun.

Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan II-2018 sebesar Rp39,12 triliun, atau naik 0,31% dibandingkan triwulan sebelumnya.

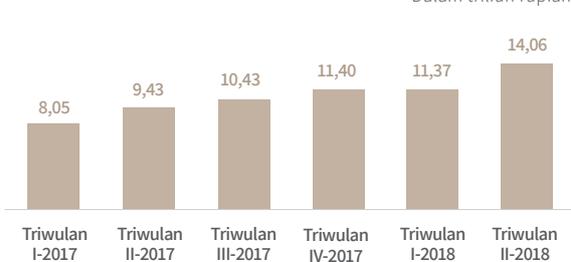
**Grafik I - 50** — Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian



## E. PT PNM (Persero)

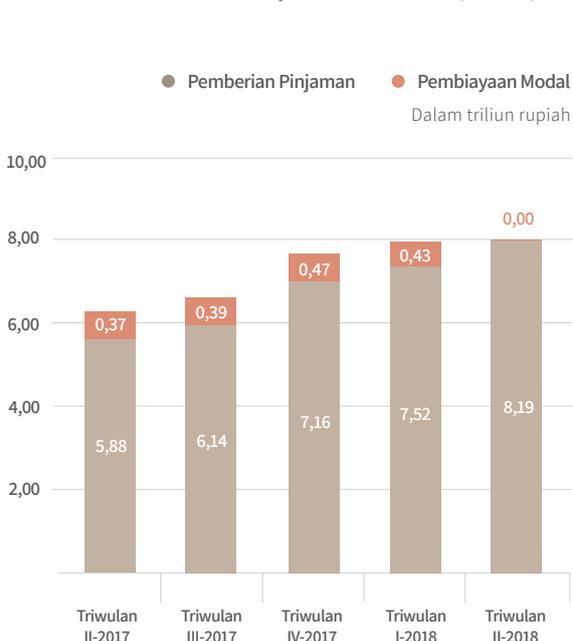
Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp14,06 triliun, naik 23,59% dari triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 51** — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Pada triwulan II-2018, pemberian pinjaman mengalami kenaikan sebesar 8,94%. Sementara itu, pembiayaan modal mengalami penurunan sebesar 99,54% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 52** — Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)



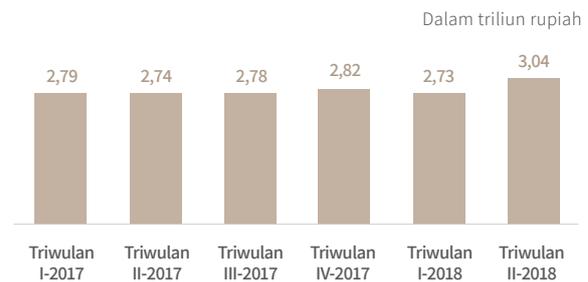
## F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

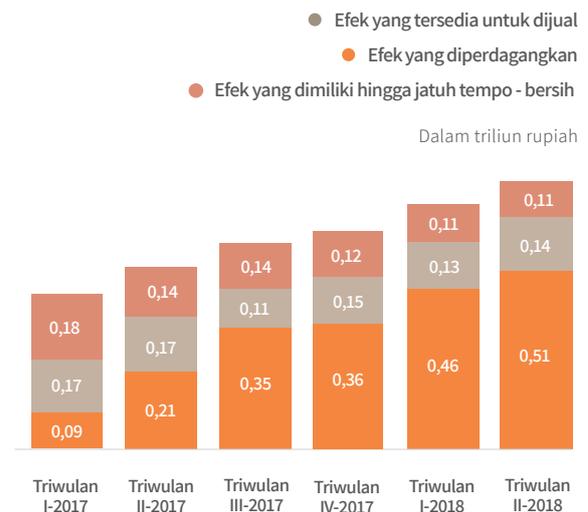
Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan II-2018 sebesar Rp3,04 triliun, naik 11,06% dari triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 53** — Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan II-2018 tercatat sebesar Rp0,77 triliun, naik 9,08% dari triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 54** — Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)



### 1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester I-2018 menurun 2,54% menjadi Rp8,05 triliun dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan mengalami kenaikan 107,61% menjadi Rp1,91 triliun dibandingkan semester I-2017.

**Tabel I - 45** — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Indikator	Semester II-2016	Semester I-2017	Semester II-2017	Semester I-2018
1	Aset	7,30	8,26	8,05	8,05
2	Liabilitas	5,00	5,78	5,64	5,64
3	Modal Sendiri	2,30	5,06	2,41	2,41
4	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,11	0,92	1,91	1,91
5	Laba/(Rugi)	0,21	0,21	0,57	0,57

\*) data semester I 2018 menggunakan data semester II 2017 karena laporan semester I 2018 masih dalam proses pengolahan.

Selama periode pelaporan, terdapat satu izin baru Perusahaan Pialang Reasuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 236 perusahaan.

**Tabel I - 46** — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
1	Pialang Asuransi	169	169	168	165	165
2	Pialang Reasuransi	42	42	43	43	44
3	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah		238	238	238	235	236

### 1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan II-2018 adalah sebanyak 193 LKM dengan 154 LKM Konvensional dan 39 full syariah. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan triwulan I-2018 adalah sebesar Rp339,89 miliar.

**Grafik I - 47** — Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan I - 2018
<b>Konvensional</b>				
1	Koperasi PT	129 18	132 19	133 21
<b>Syariah</b>				
2	Koperasi PT	18 0	29 0	38 1
<b>Jumlah</b>		<b>165</b>	<b>180</b>	<b>193</b>

**Tabel I - 48** — Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

No	Jenis Indikator	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan I - 2018
1	Aset	304,77	332,95	339,89
2	Liabilitas	191,30	214,11	216,61
3	Ekuitas	115,92	118,84	123,29
4	Pinjaman Yang Diberikan	246,75	264,98	250,53
5	Simpanan/Tabungan	160,30	186,76	188,52

\*data Triwulan II-2018 menggunakan data laporan Triwulan I-2018

### 1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan II-2018 sebanyak 64 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp7,64 triliun atau naik 68,89% dari periode sebelumnya sebesar Rp 4,47 triliun.

**Tabel I - 49** — Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	N/A	22	29	39	64
2	Jumlah Pemberi Pinjaman	N/A	63.867	100.940	145.965	123.633
3	Jumlah Penerima	N/A	119.857	259.635	1.032.776	1.090.306
4	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (triliun Rp)	N/A	1,6	2,5	4,5	7,6

## 1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

### 1.5.1 Bank Wakaf Mikro

OJK memberikan izin usaha kepada 26 LKM Syariah dengan model bisnis Bank Wakaf Mikro, serta terdapat tiga tambahan Bank Wakaf Mikro yang dalam proses fasilitasi pendirian, yaitu di daerah Bandung, Balikpapan dan Makassar. Peningkatan LKM Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan yang dapat disalurkan. Total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp6,052 miliar kepada 5.738 nasabah yang terbentuk ke dalam 1.153 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil juga turut aktif dalam membahas penyusunan panduan model bisnis yang dilakukan. Panduan model bisnis dimaksud juga dijadikan salah satu landasan dalam bahan sosialisasi model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah ke masyarakat. OJK juga turut aktif menghadiri undangan diskusi pengembangan skema model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan pihak eksternal, baik Badan Wakaf Indonesia, Badan Keuangan Fiskal, Kementerian Agama, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta permintaan sosialisasi dan pelatihan, baik dari universitas, institusi terkait, maupun pelatihan bagi pengelola, pengurus, dan pendamping Bank Wakaf Mikro *pilot project*.

### 1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Pada triwulan II-2018, terdapat tambahan satu bank umum yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sehingga secara total bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 29 bank, yang terdiri dari 27 BUK (termasuk 14 BPD) dan dua BUS.

Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan II-2018 mencapai 762.207 agen (739.798 agen perorangan dan 22.409 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik *Basic Saving Account* (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,70 triliun dan 20.185.441 nasabah.

Tabel I - 50 — Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2018

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
739.798	22.409

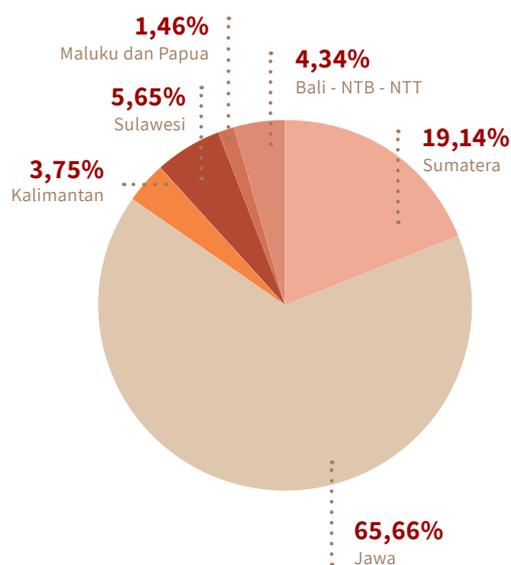
  

Nasabah BSA	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
20.185.441	Rp1,70 Triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (65,66%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian diikuti oleh Sumatera sebesar 19,14% dan sisanya sebesar 15,20% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran nasabah BSA yang sebagian besar berada di pulau Jawa (71,07%) dan Sumatera (15,63%), sementara sisanya sebesar 13,30% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik I - 55 — Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan II-2018



Sumber: OJK

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai dengan triwulan II-2018, terdapat 3 (tiga) bank yang sudah menyalurkan kredit mikro melalui agen, yaitu 2 (dua) bank menyalurkan KUR Mikro dan 1 (satu) bank menyalurkan kredit mikro bukan KUR.

Selain didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah (Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi Zakat/zakat inclusion), agen Laku Pandai dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan ekosistem ekonomi digital. Terkait hal ini, beberapa bank penyelenggara telah berencana untuk bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce/marketplace*.

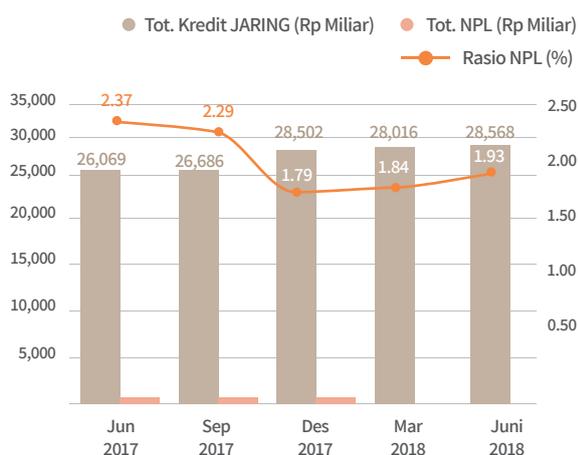
### 1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Pada triwulan II-2018, penyaluran kredit program JARING tumbuh 13,42% (*yoj*) atau 5,54% (*qtq*) menjadi Rp29,57 triliun. Sebagian besar kredit JARING masih diserap oleh subsektor industri hilir (Pengolahan dan Perdagangan) dengan porsi 62,07%. Pertumbuhan kredit jaring didorong oleh meningkatnya kredit pada hampir semua subsektor kegiatan usaha perikanan utamanya pada

subsektor jasa sarana produksi yang tumbuh tertinggi sebesar 36,79% (yoy), diikuti subsektor perdagangan dalam negeri dan ekspor perikanan yang tumbuh 21,96% (yoy). Sementara itu, kredit ke subsektor penangkapan mengalami penurunan sebesar 3,57% (yoy).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit JARING, kualitas kredit JARING juga meningkat tercermin dari NPL gross yang turun dari 2,37% pada tahun sebelumnya menjadi 1,93%. Perbaikan kualitas kredit terjadi pada hampir semua subsektor terutama pada penangkapan dan jasa sarana produksi seiring dengan adanya pelunasan kredit dan meningkatnya kredit pada subsektor jasa sarana produksi.

**Grafik I - 56** Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK, Juni 2018

**Tabel I - 50** NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

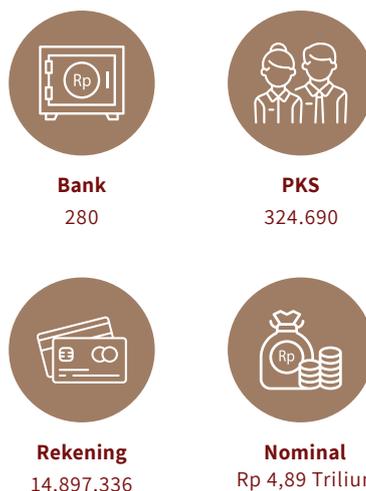
Kegiatan Usaha	Jun 2017	Mar 2018	Jun 2018
Penangkapan	4,02	3,06	2,97
Budidaya	2,18	1,44	1,56
Jasa Sarana Produksi	5,25	4,40	4,54
Industri Pengolahan	0,91	0,38	0,42
Perdagangan	2,56	2,50	2,66
<b>NPL</b>	<b>2,37</b>	<b>1,84</b>	<b>1,93</b>

Sumber: OJK, Juni 2018

### 1.5.4 Simpanan Pelajar (SimPel)

OJK terus mendorong produk tabungan Simpanan Pelajar atau SimPel untuk dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh pelajar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data triwulan II – 2018, jumlah Bank Peserta SimPel adalah sebanyak 280 bank, dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sekolah sebanyak 324.690 sekolah. Selain itu, jumlah rekening SimPel adalah sebanyak 14.897.336 rekening dengan nominal Rp4,89 triliun.

**Grafik I - 57** Simpanan Pelajar (SIMPEL)



### 1.5.5 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

#### a. Emiten sektor infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, maka diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin baik. Saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Perusahaan dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan melakukan antara lain penjualan saham, penerbitan obligasi atau sukuk. Selama triwulan II-2018 terdapat Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar Rp 14,9 triliun.

#### b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil.

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 25,96% menjadi Rp23,39 triliun pada triwulan II-2018. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami peningkatan menjadi 62 RDPT dari sebelumnya 55 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

#### c. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki

bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama periode laporan OJK, tidak menerbitkan izin baru Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP menjadi lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,75 triliun atau menurun sebesar 8,76% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

d. **Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)**

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA tetap tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,32 triliun atau turun sebesar 4,1%.

e. **Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)**

Dana Investasi *Real Estate* adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset *Real Estate*, Aset Yang Berkaitan Dengan *Real Estate*, dan/atau kas dan setara kas.

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-DIRE tetap tiga KIK dengan dana kelolaan Rp0,61 triliun atau naik sebesar 3,39%.

### 1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80

% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan II-2018, jumlah total lahan klaim pertanian yang terdaftar adalah 8.749,22 ha dengan nilai klaim berjalan Rp52,50 miliar

### 1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan II-2018, realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp12,00 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 59.992 ekor sapi di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 36.871 peternak. Sementara itu, realisasi klaim adalah sebesar Rp17,45 miliar.

### 1.5.8 Asuransi Nelayan

Asuransi Nelayan merupakan program perlindungan bagi nelayan dan keluarga dari risiko baik saat sedang melaut maupun saat sedang di darat. Jumlah nelayan yang telah ikut serta dalam program asuransi tersebut adalah 9.216 orang dari 27 provinsi di Indonesia. Sampai akhir triwulan II-2018, jumlah klaim adalah sebanyak 5 orang nelayan dengan nilai sebesar Rp68.968.454,-

### 1.5.9 Asuransi Usaha Budidaya Udang

Asuransi Usaha Budidaya Udang memberikan proteksi terhadap penyakit yang mengakibatkan matinya udang, atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan mencapai  $\geq 50\%$ . Sampai dengan triwulan II-2018, program Asuransi Usaha Budidaya Udang menjangkau 14 provinsi di mana 2.004 Nelayan Udang dengan 3.300 hektar lahan budidaya telah terlindungi dan nilai premi mencapai Rp 1,49 miliar sebagai mana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I - 51** — Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang per triwulan II-2018

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan	Realisasi Premi		Realisasi Klaim	
			Luas Lahan (Ha)	Nilai Premi	Luas Lahan (Ha)	Nilai Klaim
1.	Aceh	200	204,61	92.072.250,00	3,90	19.500.00
2.	Banten	41	140,30	63.135.000,00	2,94	14.696.000
3.	Gorontalo	35	96,50	43.425.000,00	-	-
4.	Jawa Barat	129	325,55	146.497.500,00	9,92	49.600.000
5.	Jawa Tengah	225	405,79	182.605.500,00	24,15	120.750.000
6.	Jawa Timur	263	219,20	98.640.000,00	-	-
7.	Kalimantan Selatan	19	44,50	20.025.000,00	-	-
8.	Lampung	90	136,58	61.458.750,00	13,00	65.000.000
9.	Nusa Tenggara Barat	53	31,11	13.999.500,00	-	-
10.	Sulawesi Barat	8	9,35	4.207.500,00	-	-
11.	Sulawesi Selatan	789	1.368,18	615.681.000,00	3,50	17.500.000
12.	Sulawesi Tengah	18	39,80	17.910.000,00	-	-
13.	Sulawesi Tenggara	109	262,00	117.900.000,00	-	-
14.	Sumatera Utara	25	16,54	7.443.000,00	0,28	1.400.000
<b>Total</b>		<b>2.004</b>	<b>3.300</b>	<b>1.485.000.000,00</b>	<b>57,69</b>	<b>288.446.000</b>

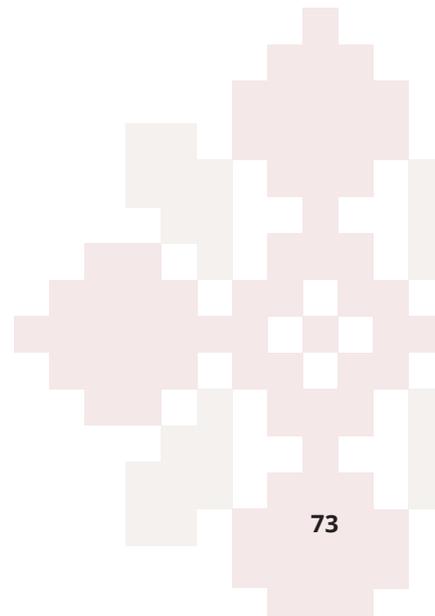
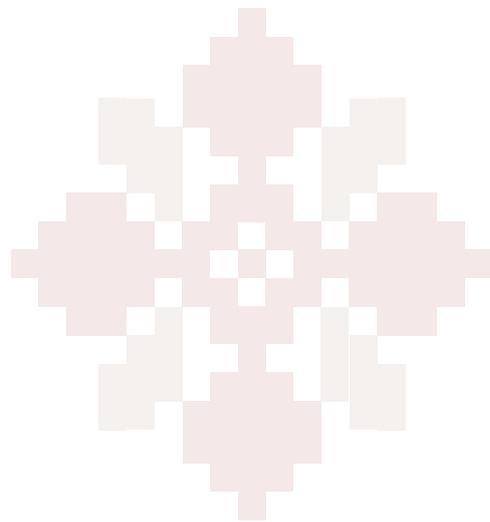
### 1.5.10 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

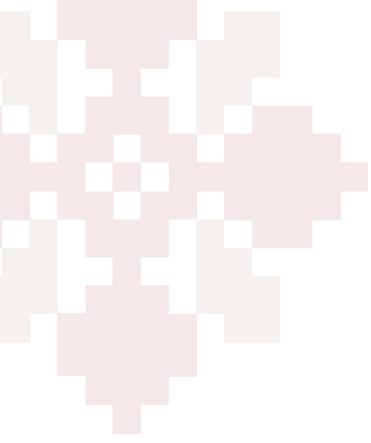
Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia

dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Selama triwulan II-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp1,8 triliun.

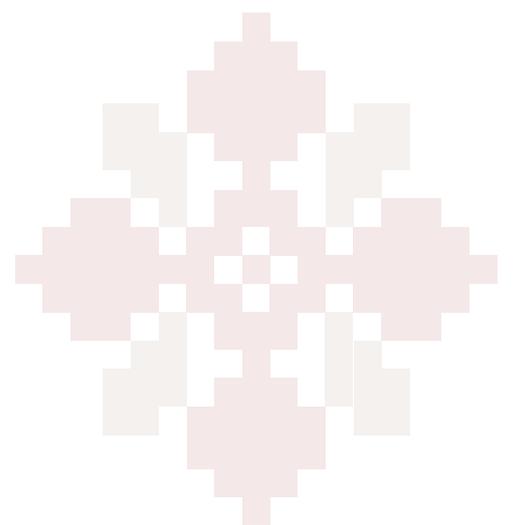


Halaman ini sengaja di kosongkan





Halaman ini sengaja di kosongkan



BAB 2

# **TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN**





## Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan empat POJK dan satu SEOJK yang Mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB
  - Pemberian Tanda Terdaftar kepada 24 Penyelenggara *Fintech Lending*
- 



## Pengembangan

- Kajian *Risk Culture* Konglomerasi Keuangan
  - Kajian Perusahaan Efek Daerah
  - Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan *International Finance Cooperation (IFC)* terkait Kerjasama Pengembangan serta Implementasi Kebijakan dan Peraturan Keuangan Berkelanjutan
  - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Satgas Waspada Investasi dengan 13 Kementerian/Lembaga Negara
- 



## Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Mataram dan Balikpapan
  - Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Tadulako Palu
  - Edukasi dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan dan Surabaya
  - Edukasi Keuangan Komunitas Petani di Buleleng, Nelayan di Wangi-Wangi, Pelaku UMKM di Banyuwangi dan Ibu Rumah Tangga di Jakarta
  - Penyusunan *Roadmap* Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022)
-

## 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

### 2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

OJK memiliki fungsi pelaksanaan pengaturan dan perizinan terintegrasi dalam rangka mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan guna mendukung kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan selama triwulan II-2018 antara lain :

- Penyusunan RPOJK Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan atas proses perizinan yang dilakukan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).
- Kajian ruang lingkup pengaturan terintegrasi yang bersifat lintas sektor dan bukan pengaturan terkait konglomerasi keuangan.

### 2.1.2 Pengaturan Bank

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu POJK yaitu POJK Nomor 6/POJK.03/2018 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum. Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan serta menciptakan sistem perbankan yang mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Penambahan pengecualian pada Pasal 6 terkait kewajiban agunan berupa kas sebesar 10% dari nilai nasional transaksi, yaitu tidak hanya berlaku bagi Nasabah tertentu tetapi juga berlaku untuk transaksi *Structured Product* tertentu; dan (2) Transaksi *Structured Product* tertentu adalah transaksi *Structured Product* valuta asing terhadap Rupiah dengan nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif sepanjang memenuhi persyaratan.

### 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu POJK yaitu POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Emiten atau Perusahaan Publik. Penerbitan peraturan tersebut bertujuan memberikan arahan kepada Emiten terkait dengan kewajiban dan tata cara pelaporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Batas waktu penyampaian Laporan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE; dan (2) Laporan yang diwajibkan adalah laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

### 2.1.4 Pengaturan IKNB

Pada triwulan II-2018, OJK menerbitkan dua POJK dan satu SEOJK terkait dengan pengaturan IKNB sebagai berikut:

1. **POJK nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun**  
Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi bahwa salah satu alat yang digunakan untuk pengawasan Dana Pensiun adalah melalui laporan-laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan oleh Industri Jasa Keuangan kepada OJK. Kondisi saat ini, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan ke OJK dengan batas waktu penyampaian yang berbeda-beda dan kewajiban penyampaian pelaporan tersebar dan dengan format tertentu dalam beberapa peraturan yang terpisah. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain penyusunan laporan berkala, penyampaian laporan berkala, dan sanksi administratif.
2. **POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.**  
Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi oleh diperkenalkannya dana pensiun untuk mengelola dan menjalankan program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun dan manfaat lain kepada peserta dana pensiun yang pengaturannya belum diatur pada ketentuan mengenai pendanaan dana pensiun sebelumnya. Adapun pokok-pokok materi pengaturan yang diatur antara lain: ketentuan umum, Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti; Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti; Pendanaan DPLK; dan Pendanaan Program Manfaat Lain.
3. **SEOJK nomor 9/SEOJK.05/2018 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi** merupakan amanat dari POJK 68/2016, mengatur mengenai perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Tata Cara Penyampaian; (2) Penyimpanan Data; (3) Ketentuan Peralihan.

## 2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

### 2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

OJK melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan dengan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Tujuan pengawasan berdasarkan risiko ialah agar hasil pengawasan konglomerasi keuangan memenuhi standar kualitas yang objektif, menghasilkan informasi yang

komprensif, memiliki ketajaman dan kedalaman analisis atas kondisi Konglomerasi Keuangan, serta kesesuaian tindakan pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan dilakukan secara *on site* melalui pelaksanaan *on site review* kepada beberapa Konglomerasi Keuangan (KK) dan *Business visit* ke Entitas Non-LJK (Lembaga Jasa Keuangan) yang terelasi dengan Konglomerasi Keuangan maupun ke debitur besar dari Entitas Utama dalam KK. Tujuan utama *on site review* adalah memastikan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 dan 18/POJK.03/2014 serta POJK N0 26/POJK.03/2015. Sementara itu, tujuan kegiatan *Business visit* adalah mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari bisnis Non LJK atau debitur besar dari Entitas Utama dalam KK.

### A. Profil Konglomerasi Keuangan

OJK mencatat, bahwa total aset dari 49 Grup KK (yang terdiri dari 206 LJK) per maret 2018 sebesar Rp7.408 triliun. Persentase perbandingan terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 75,82%.

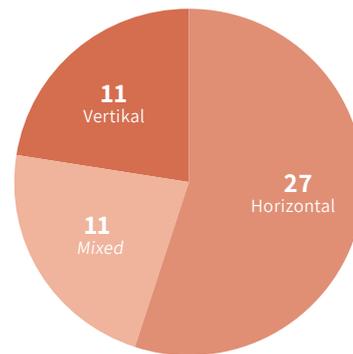
Tabel II - 1 Profil Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi Keuangan Heterogen		
	Des 17	Mar 18
Jumlah Konglomerasi Keuangan	49 KK	49 KK
Total Aset	6.457 T	7.408 T*)
% terhadap Total Aset SJK	66,57%	75,82%

\* Belum memperhitungkan aset Manajer Investasi

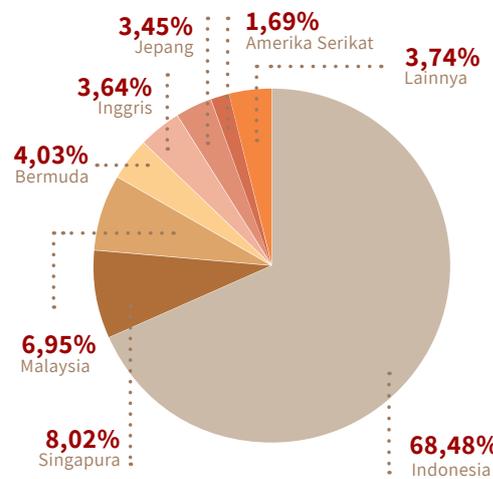
Jenis LJK	Total EU
Bank	36
Perusahaan Efek	3
Asuransi/Reasuransi	7
Perusahaan Pembiayaan	2
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	1
<b>Total</b>	<b>49 KK</b>

Grafik II - 1 Jenis Struktur Konglomerasi Keuangan

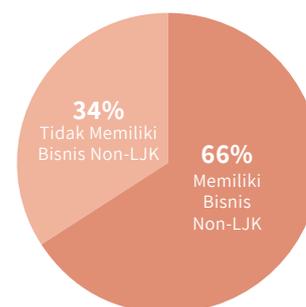


KK yang berada di Indonesia mayoritas dimiliki oleh WNI dan secara *group wide*, memiliki bisnis non LJK yang tercermin dari grafik berikut:

Grafik II - 2 Aset KK Berdasarkan Kepemilikan



Grafik II - 3 Komposisi Konglomerasi Keuangan yang Memiliki Bisnis Non-LJK secara Group Wide



#### Top 5 Segmen Bisnis Non-LJK

1. Jasa Keuangan (Non-KK)
2. Perusahaan Investasi
3. Real Estate & Properti
4. Industri Pengolahan
5. Perdagangan Besar & Eceran

Sebanyak 31 KK memiliki lini bisnis di sektor riil. Kelima sektor diatas merupakan sektor mayoritas yang dimiliki KK

## 2.2.2 Pengawasan Perbankan

### A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Pada triwulan II-2018, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 634 kantor bank yang terdiri dari 470 Kantor Pusat (KP) dan 164 Kantor Cabang (KC). Dari 634 kantor bank tersebut, 175 diantaranya merupakan kantor Bank Umum dan 459 kantor BPR dan BPRS.

**Tabel II - 2** — Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Realisasi Triwulan I-2018			Realisasi Triwulan II - 2018		
	KP	KC	Jumlah Kantor	KP	KC	Jumlah Kantor
BUK	43	196	239	26	149	175
BUS	-	-	-	-	-	-
UUS	-	-	-	-	-	-
BPR	455	12	467	410	13	423
BPRS	48	-	48	34	2	36
<b>Total</b>	<b>546</b>	<b>208</b>	<b>754</b>	<b>470</b>	<b>164</b>	<b>634</b>

Sumber: OJK

Selain melakukan pemeriksaan umum, pengawas juga melaksanakan pemeriksaan khusus yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pada triwulan II-2018, dilakukan 128 pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, *joint audit*, GCG, teknologi dan informasi, *fraud*, penetapan pencabutan, serta lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

**Tabel II - 3** — Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan II - 2018
Suku Bunga	-
Setoran Modal	32
Aktivitas Operasional	42
Teknologi dan Informasi	12
Aktivitas Treasuri	-
<i>Joint Audit</i>	5
GCG	-
<i>Fraud</i>	9
Penetapan Pencabutan	1
Pemeriksaan Kesiapan	-
Lainnya	27
<b>Total</b>	<b>128</b>

Sumber: OJK,  
Keterangan : Data Masih Sementara

### B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Pada triwulan II-2018, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK cukup beragam. Produk dan aktivitas baru yang telah diterbitkan mencapai 129 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan *bancassurance*.

**Tabel II - 4** — Perizinan Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Produk / Aktivitas Baru	Triwulan II - 2018
Reksa Dana	47
<i>Bancuassurance</i>	38
<i>E-Banking</i>	10
Perkreditan/Pembiayaan	-
Surat Berharga	10
Pendanaan	-
APMK	1
<i>Structured Product</i>	5
Aktivitas <i>Call Center</i>	-
LC	-
<i>Cash Management</i>	3
Fitur SMS Notifikasi	1
<i>E-Commerce</i>	1
Kepemilikan Logam Mulia	-
<i>Referral Retail Brokerage</i>	1
Lainnya	12
<b>Total</b>	<b>129</b>

Sumber: OJK

### C. Penegakan Kepatuhan Bank

- Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)**  
 Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/ atau kompetensi.

Pada triwulan II-2018, tidak terdapat pengurus atau pengelola dan pegawai bank yang mengikuti proses *Fit and Proper Test Existing*. Selain itu, untuk *database track record* (TR), selama triwulan II-2018 terdapat penambahan 19 pelaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Non Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya.

**Tabel II - 5** — Track Record Tindak Tipibank Triwulan II - 2018

Objek Track Record	Triwulan II - 2018
Pemegang Saham	2
Dewan Komisaris	1
Direksi	6
Pejabat Eksekutif	3
Pejabat Non Eksekutif	7
<b>Total</b>	<b>19</b>

Sumber: OJK

2. **Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan**  
Selama triwulan II-2018, terdapat 28 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 10 kantor bank (lima Kantor BU dan lima Kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan tindak lanjut investigasi. PKP yang ditindaklanjuti akan dilakukan pembahasan dalam forum *Quality Assurance* yang bertujuan memastikan langkah-langkah investigasi dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi. Sebagai tindak lanjut dari PKP yang diterima pada triwulan II-2018 terdapat 20 PKP pada delapan kantor bank yang masih dalam proses analisis, delapan PKP pada dua kantor bank yang dikembalikan kepada Satker Pengawasan Bank, dan 14 PKP pada tujuh kantor bank yang dilimpahkan ke Satuan yang menangani penyidikan.

**Tabel II - 6** — Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

No.	Topik	Triwulan II - 2018					
		Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total	
		BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank	Kasus (PKP)
1	PKP yang diterima dan ditindaklanjuti	5	5	2	24	11	26
2	PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	-	2	-	8	2	8
	a. Atas Dasar Analisis tim	-	2	-	8	2	8
	b. Atas dasar QA 1	-	-	-	-	-	-
3	Pelimpahan kepada Satker Penyidikan	0	7	0	14	7	14

Sumber: OJK

Sebagian besar (86%) kasus dugaan tipibank pada triwulan II-2018 merupakan kasus terkait perkreditan dan sisanya (14%) terkait kasus pendanaan. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Direksi yang mencapai delapan orang (62%), diikuti dua orang Pemegang Saham, dua orang Komisaris, dan satu orang karyawan.

3. **Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi**  
Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan II-2018, OJK menerima 22 permintaan keterangan ahli yang terdiri dari 16 pemenuhan atas permintaan Kepolisian Negara RI (Polri), empat pemenuhan permintaan Kejaksaan RI, dan dua pemenuhan permintaan kepada Penyidik lainnya.

**Tabel II - 7** — Tabel Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1	Polri	-	16	16
2	Kejaksaan RI	-	4	4
3	Penyidik Lainnya	-	2	2
	<b>Total</b>	-	<b>22</b>	<b>22</b>

Sumber: OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

## D. Kelembagaan Bank Umum

1. **Perizinan**  
Pada triwulan II-2018 telah diselesaikan 78 perizinan perubahan jaringan kantor BU yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, dan pembukaan kantor perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat KCP (29,49% - 23 perizinan), diikuti penutupan KCP (19,23% - 15 perizinan), dan perubahan status KK menjadi KCP (17,95% - 14 perizinan). Selain itu, terdapat pembukaan kantor perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia yaitu China Development Bank.

**Tabel II - 8** Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU

No	Jenis Kegiatan	Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018
1	<b>Pembukaan Bank Umum</b>		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
b.	Kantor Cabang (KC)	11	6
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	12	2
d.	Kantor Fungsional (KF)	1	1
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	<b>Penutupan Bank Umum</b>		
a.	Izin Usaha	-	-
b.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	17	-
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	39	15
e.	Kantor Fungsional (KF)	5	4
3	<b>Pemindahan Alamat Bank Umum</b>		
a.	Kantor Pusat (KP)	-	-
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
c.	Kantor Cabang (KC)	4	23
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	15	2
e.	Kantor Fungsional (KF)	1	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	1	-
4	<b>Perubahan Status Bank Umum</b>		
a.	Peningkatan Status		
-	KCP menjadi KC	6	5
-	KK menjadi KCP	7	14
-	KF menjadi KCP	-	-
-	KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
-	KP menjadi KC	-	-
-	KC menjadi KCP	11	3
-	KCP ke KF/KK	-	1
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	-
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indo	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>	<b>78</b>

Sumber: LKPBU

Catatan: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

**2. Jaringan Kantor**

Pada triwulan II-2018, jaringan kantor BUK berkurang 118 unit dari triwulan sebelumnya menjadi 139.508 jaringan kantor. Pengurangan terbesar utamanya terdapat pada kas keliling dan kantor kas. Sementara itu, jaringan ATM/ADM mengalami peningkatan sejumlah 269 unit.

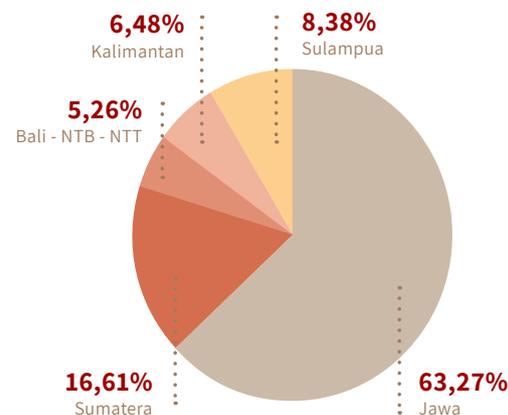
**Tabel II - 9** Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

Status Kantor	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
Kantor Pusat Operasional	50	50
Kantor Pusat Non Operasional	55	55
Kantor Cabang Bank Asing	10	9
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional + Syariah)	167	172
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.872	2.872
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	1
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	26	26
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.435	16.343
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-
Kantor Kas	10.621	10.509
Kantor Fungsional (Konvensional + Syariah)	1.575	1.509
Payment Point	1.980	2.020
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.457	1.294
Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14	13	13
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
ATM/ADM	104.365	104.634
<b>Total</b>	<b>139.626</b>	<b>139.508</b>

Sumber: LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 88.269 jaringan kantor (63,27%), diikuti pulau Sumatera 23.169 (16,61%), Sulampua 11.690 (8,38%), Kalimantan 9.045 (6,48%), dan Bali-NTB-NTT 7.335 (5,26%). Pengurangan jaringan kantor terjadi pada hampir di seluruh wilayah di Indonesia, dengan pengurangan terbesar di wilayah Sumatera dan Kalimantan masing-masing berkurang 59 jaringan kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan jaringan kantor di wilayah Jawa sebesar 31 jaringan kantor.

**Grafik II - 4** Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan II - 2018



Sumber: LKPBU

3. **Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)**  
 Pada triwulan II-2018, terdapat 48 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 2 PSP/PSPT, 12 Dewan Komisaris, dan 34 Direksi. Selain itu, terdapat 13 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus, disertai dengan *carry over* periode sebelumnya.

**Tabel II - 10** — FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan I-2018

Pemohon FTP	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FTP		Triwulan II - 2018
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP / PSPT	2	0	1	0	3
Dewan Komisaris	12	4	7	3	26
Direksi	34	6	5	1	46
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>75</b>

Sumber: OJK

## E. Kelembagaan BPR

### 1. Perizinan

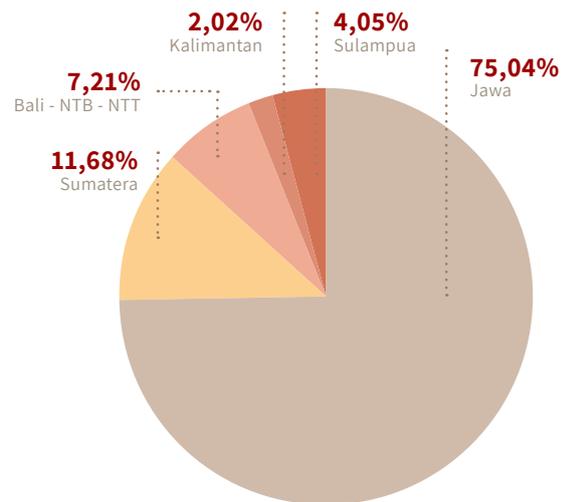
Selama periode laporan, terdapat dua proses perizinan pendirian usaha BPR kepada PT BPR Sorong Sukses Sejahtera dan PT BPR Muhadi Setia Budi serta empat pencabutan izin usaha BPR.

### 2. Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan II-2018 berkurang 12 bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.603 BPR. Sementara itu, jumlah jaringan kantor BPR masih sama yaitu 6.226 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor BPR di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (75,04% atau 4.672 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,68% atau 727 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,21% atau 449 kantor), wilayah Sulampua (4,05% atau 252 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,02% atau 126 kantor).

**Grafik II - 5** — Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan II - 2018



### 3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan II-2018, OJK melakukan FPT *New Entry* kepada 351 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 277 calon mendapatkan persetujuan serta 74 calon yang ditolak.

**Tabel II - 11** — Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Pemohon FPT	Triwulan II-2018		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	158	48	206
Komisaris	95	26	121
PSP	24	-	24
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>74</b>	<b>351</b>

Sumber: OJK

## 2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

### A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

#### 1. Pengawasan Transaksi Saham

Terkait pengawasan transaksi efek, OJK melakukan *monitoring* 27 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar di mana terdapat lima saham ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan tiga saham diputuskan untuk ditutup setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran, serta 19 saham sedang dilakukan *monitoring*.

OJK menelaah tujuh saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana terdapat tiga saham dalam penelaahan dan empat saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis. OJK juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap lima saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi

transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam di mana satu saham sedang dilakukan pemeriksaan dan empat saham telah selesai pemeriksaan.

## 2. Pengawasan Perusahaan Efek

OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) April, Mei, dan Juni berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 21, 21 dan 13 Partisipan di mana terdapat frekuensi keterlambatan pelaporan April, Mei, dan Juni tersebut masing-masing sebanyak 119, 205 dan 164 kali.

Terkait dengan Obligasi, OJK melakukan *review alert* pada April dan Mei yang menghasilkan 7.757 *alert* Obligasi Pemerintah, 2.340 *alert* Obligasi Korporasi dan 187 *alert* waran. OJK juga melakukan *monitoring* terhadap empat seri Obligasi Pemerintah, tiga seri Obligasi Korporasi dan dua seri Waran serta diselesaikan kertas kerja *monitoring* sebanyak tiga seri Obligasi Pemerintah dan empat seri Waran.

Selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas laporan evaluasi pembatalan pelaporan transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari Bursa Efek Indonesia periode April dan Mei di mana sebanyak 51 Partisipan dengan total 274 transaksi EBUS yang menyampaikan permohonan pembatalan pelaporan transaksi EBUS kepada PLTE. OJK juga melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) bulan April, Mei dan Juni.

## 3. Pemeriksaan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). OJK memberikan tanggapan laporan keuangan tahunan 2017 (*audited*) terhadap PT BEI, PT KPEI, P3IEI, PT PHEI dan PT KSEI. OJK juga memberikan tanggapan usulan KPI unggulan 2018 terhadap KSEI, PT BEI, PT KPEI, dan PT KSEI.

Selama periode laporan, OJK melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon direksi PT BEI kepada 28 calon direksi dari empat paket direksi, calon komisaris PT KSEI kepada 12 calon direksi dari empat paket komisaris, dan calon direksi PT KPEI kepada empat calon direksi. OJK juga menyampaikan penetapan calon anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia masa jabatan 2018-2021.

## 4. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Terkait dengan Perusahaan Efek, OJK memberi persetujuan terhadap 21 perubahan susunan direksi, 52 perubahan susunan komisaris, dan lima proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK

memberikan persetujuan peningkatan modal dasar dan disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 127 Perusahaan Efek dengan rata-rata total MKBD sebesar turun sebesar 0,13% menjadi Rp22,90 triliun. Terdapat dua Perusahaan Efek Anggota Bursa yang mempunyai nilai MKBD di bawah MKBD yang dipersyaratkan. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 55 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 42 Emiten

OJK juga melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan II-2018 yaitu periode Maret 2018 sampai Mei 2018 dimana terdapat lima Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada Maret 2018 dan enam Perusahaan Efek pada April 2018. Sementara itu, pada Mei 2018 terdapat lima Perusahaan Efek yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.

## 5. Pemeriksaan Teknis

Pada triwulan II-2018, OJK menyelesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan PT Bursa Efek Indonesia dan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan. Selain itu, OJK juga melakukan proses penentuan fokus pemeriksaan dan penyusunan program pemeriksaan terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

## 6. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap 60 Perusahaan Efek. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan catatan, dokumen pendukung dan sistem serta keterangan yang diberikan Perusahaan dengan fokus pada pelaksanaan pembiayaan transaksi meliputi transaksi marjin, pembiayaan non marjin dan transaksi *reverse* repo yang dilakukan oleh Perusahaan. Sampai akhir periode laporan, dilakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan 60 Perusahaan Efek.

## 7. Pemeriksaan Teknis Perusahaan Efek

Pada periode laporan, OJK menerima dua pengaduan terhadap Perusahaan Efek dimana satu pengaduan dilakukan pemeriksaan teknis dan satu pengaduan lainnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada terkait penanganan pengaduan. OJK juga menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap kantor cabang perusahaan efek di Bandung dimana hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Perusahaan Efek untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan.

## B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 14 kantor pusat MI, dua Perusahaan Efek sebagai APERD, empat kantor pusat APERD, empat Bank Kustodian (BK), dan tiga Produk Investasi (satu EBA dan dua RDPT). Sampai akhir triwulan II-2018, sebanyak 10 MI masih dalam proses permintaan konfirmasi dan empat MI dalam proses finalisasi LHP. Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD dan PE-APERD, sebanyak satu PE-APERD dalam proses finalisasi LHP dan lima APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, tiga BK masih dalam proses permintaan konfirmasi dan satu BK dalam proses finalisasi LHP.

OJK juga melakukan pengawasan secara elektronik dengan sistem *E-monitoring*. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan secara elektronik, OJK terus terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Terkait pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi dimana terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 April 2018 dan dua MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 Mei 2018. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan, di mana selama periode laporan terdapat dua MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode April 2018, satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Mei 2018, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Juni 2018.

## C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 12 Aksi Korporasi Triwulan II - 2018

No.	Aksi Korporasi	Triwulan II-2017	Triwulan II-2018
1	Transaksi Afiliasi	37	35
2	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	3	1
3	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	7	12
4	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	10	9
5	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	2
6	Pembagian Saham Bonus	-	-
7	Pembagian Dividen Berupa Kas	30	26
8	Pembagian Dividen Saham	1	-
9	Laporan Buyback Saham	-	-
10	Laporan Buyback Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	-
11	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	1	-
13	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	-	1
14	Penelaahan Atas Penawaran Tender	-	-
15	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-
16	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	8	5
17	Penelaahan Go Private	-	-

OJK juga melakukan pengawasan terhadap laporan berkala dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 13 Penyampaian Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2017		LT 2017	
		EPP	%	EPP	%
1	Tepat Waktu	570	84,4%	517	76,6%
2	Terlambat	56	8,3%	48	7,1%
3	Belum Menyampaikan	18	2,7%	72	10,7%
4	Emiten Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	0	0%	7	1%
5	Belum Wajib Menyampaikan	31	4,6%	31	4,6%

Berdasarkan hasil pengawasan terdapat tujuh Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang disampaikan tepat waktu. OJK juga melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 216 laporan keterbukaan atas informasi

atau fakta material, 87 laporan hasil pemeringkatan efek, 441 hasil RUPS, serta 10 laporan penjabatan Penawaran Umum. Selain itu, OJK melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan sebanyak 589 laporan.

OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap lima Emiten dan Perusahaan Publik dengan hasil: Tiga Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

#### D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode pelaporan, OJK menelaah 30 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari empat laporan dari Akuntan, enam laporan dari Konsultan Hukum, 13 laporan dari Penilai dan tujuh laporan Perubahan Data ASPM. Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap dua Biro Administrasi Efek (BAE) dan dua Wali Amanat (WA) dan menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas seluruh pemeriksaan kepatuhan tersebut.

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap tiga profesi Penilai dengan ruang lingkup pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal serta terhadap dua Konsultan Hukum. Selanjutnya, OJK melakukan pemetaan/*mapping* (*onsite*) terhadap tiga Notaris Pasar Modal dengan ruang lingkup pendalaman terhadap kegiatan Notaris sebagai Notaris Pasar Modal khususnya dalam penyusunan Akta Notariil dan penerapan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

OJK mengirimkan berkas pemeriksaan dalam rangka pendalaman Sistem Pengendalian Mutu kepada 12 KAP yang menjadi objek pemeriksaan dan sedang dalam proses mereviu tanggapan atas hasil pendalaman pedoman pengendalian mutu KAP dari 8 KAP. OJK telah melakukan penelaahan atas lima permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal. Pada triwulan II-2018, OJK menerbitkan lima Surat Keputusan Izin ASPM.

#### E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

##### 1. Pemeriksaan Pasar Modal

Terkait dengan penegakan hukum di Industri Pasar Modal, OJK melakukan 41 pemeriksaan yang terdiri dari satu Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran, 20 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran, dan 20 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran. Sampai dengan triwulan II-2018, terdapat tiga pemeriksaan yang ditingkatkan ke Penyidikan dengan dugaan pelanggaran antara lain :

- Ketentuan larangan melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek,
- Ketentuan larangan melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dan
- Ketentuan larangan bagi setiap Pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

##### 2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

###### 1. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode Triwulan II-2018, OJK menetapkan sebanyak 138 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal.

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan tiga Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu kepada Perorangan dan Emiten. Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif selama Triwulan II-2018, OJK menetapkan 13 Surat Teguran Pertama dan 23 Surat Teguran Kedua serta empat pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

###### 2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode Triwulan II-2018, OJK menindaklanjuti 23 Permohonan Keberatan di mana 12 Keberatan telah ditanggapi dan 11 Keberatan masih dalam proses.

Tabel II - 14 — Penetapan Sanksi Administratif

	Sanksi Administratif		Pencabutan Izin	
	Peringatan tertulis	Denda		
	Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	11	103 dengan total denda sebesar Rp838.450.000,-	
Pelanggaran	Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	4 dengan total denda sebesar Rp706.000.000,-	2
	Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	16	1 dengan total denda sebesar Rp100.000.000,-	
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>108</b>	<b>2</b>

## 2.2.4 Pengawasan IKNB

### A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

#### 1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan II-2018, OJK melakukan analisis terhadap 16 laporan keuangan berkala, yang terdiri

dari 12 laporan perusahaan asuransi umum dan empat laporan perusahaan asuransi jiwa.

Tabel II - 15 — Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis Triwulan II - 2018

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
April 2018	3	7	-	-
Mei 2018	1	1	-	-
Juni 2018	1	3	-	-

#### 2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan II - 2018, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan asuransi yang mana delapan merupakan pemeriksaan rutin

dan dua merupakan pemeriksaan khusus. OJK juga menerbitkan 14 LHP yang terdiri dari lima LHP Sementara dan sembilan LHP Final.

#### 3. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Berdasarkan data pemantauan pelaksanaan rekomendasi sampai dengan triwulan II-2018, terdapat 402 rekomendasi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, pada periode yang sama jumlah rekomendasi yang dilaksanakan sebanyak 87 rekomendasi sehingga total rekomendasi yang belum dilaksanakan adalah 305 rekomendasi.

Pada triwulan II-2018, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 17 perusahaan dan sanksi peringatan kedua kepada 1 perusahaan. Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari empat surat pencabutan sanksi peringatan pertama.

Tabel II - 16 — Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi selama Triwulan II - 2018

Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	Pencabutan Sanksi PKU
SP 1	SP 2	SP 3	SP 1	SP 2	SP 3		
17	1	-	4	-	-	11	-

4. **Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan**  
Pada triwulan II-2018, OJK menindaklanjuti sebanyak 25 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.
5. **Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahaan Cadangan**  
Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:
  - a. **Penatausahaan Dana Jaminan**  
Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2018 OJK telah memproses 9 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.
  - b. **Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan**  
Pada triwulan II-2018 OJK menerima 25 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.
  - c. **Pengesahan Cadangan**  
Selama periode triwulan II-2018, terdapat enam permohonan pengesahan cadangan premi dan tiga pengesahan kenaikan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan yang diajukan oleh perusahaan.

## B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

1. **Analisis Laporan (*off-site supervision*)**  
Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan II-2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel II - 17** — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun selama Triwulan II - 2018

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Apr 2018	Mei 2018	Jun 2018	Apr 2018	Mei 2018	Jun 2018
Dana Pensiun Pemberi Kerja	213	206	206	18	24	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24	24	-	1	1
<b>Total</b>	<b>238</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Laporan berkala Dana Pensiun yang diterima OJK adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 18** — Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun

Jenis Laporan	Jumlah
Laporan Aktuaris	80
Laporan Teknis Tahun 2017	43
Laporan Keuangan Tahun 2017 <i>audited</i>	209
Laporan Investasi Tahun 2017 <i>audited</i>	175

2. **Pemeriksaan (*on-site supervision*)**  
Pada triwulan II-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana Pensiun. Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHP Sementara kepada Dana Pensiun yang diperiksa paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan langsung berakhir. Pada triwulan II-2018, OJK telah menerbitkan 10 LHP Sementara dan 10 LHP Final Dana Pensiun.

## C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan II-2018, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 14 laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Maret, April, dan Mei 2018, enam laporan keuangan bulanan periode Maret, April dan Mei masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial, dan lima Laporan Tahunan untuk BPJS Badan dan masing-masing Dana Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa laporan tersebut di luar waktu yang ditentukan, sehingga OJK menetapkan sanksi peringatan pertama atas penyampaian laporan sebanyak empat sanksi selama triwulan II-2018.

## D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. **Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)**  
Selama triwulan II-2018, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode Maret-Mei 2018.

**Tabel II - 19** — Penyelesaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018
LBPP	11	8	6	180	183	185
LBPMV	6	7	3	57	56	60
LBPPI	-	-	-	2	2	2

\* LBPP : Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV : Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI : Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

- Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)**  
Pada triwulan II-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 12 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari delapan Perusahaan Pembiayaan dan empat Perusahaan Modal Ventura.
- Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**  
Perkembangan penyusunan laporan pemeriksaan selama triwulan II-2018, yaitu:

**Tabel II - 20** — Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPS telah dikirimkan	11
LHPF telah dikirimkan	9

- Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**  
Sampai akhir triwulan II-2018, OJK mengenakan 115 sanksi administratif terhadap lembaga pembiayaan yang terdiri dari 59 sanksi peringatan pertama (SP 1), 15 sanksi peringatan kedua (SP 2), dan 41 sanksi peringatan ketiga (SP 3)

**Tabel II - 21** — Pengenaan Sanksi terhadap Lembaga Pembiayaan sampai dengan Triwulan II-2018

Jenis Usaha	SP 1	SP 2	SP 3	Total
Perusahaan Pembiayaan	7	-	-	7
Perusahaan Modal Ventura	52	15	41	108
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>115</b>

- Perkembangan Penerapan Risk Based Supervision**  
Selama triwulan II-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap delapan Perusahaan Pembiayaan.

- Penyampaian Laporan Keuangan Audit tahun 2017 dan Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2017**  
Terkait dengan penyampaian laporan tahunan Perusahaan Pembiayaan yang telah diaudit, Selama triwulan II-2018, terdapat 166 Perusahaan Pembiayaan yang menyampaikan Laporan dan sebanyak 25 Perusahaan Pembiayaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit. Sementara itu, terkait dengan kewajiban Perusahaan Modal Ventura untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, terdapat 48 Perusahaan Modal Ventura yang telah menyampaikan Laporan dan sebanyak 15 Perusahaan Modal Ventura terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit.

Berdasarkan POJK nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling lambat 30 April tahun berikutnya. Selama periode laporan, terdapat 165 Perusahaan Pembiayaan yang telah menyampaikan Laporan dan sebanyak 26 Perusahaan Pembiayaan terlambat dalam menyampaikan laporan dimaksud. Selanjutnya, kepada Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tersebut diberikan sanksi administratif.

Terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mewajibkan Perusahaan Modal Ventura untuk menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sampai batas akhir penyampaian laporan dimaksud, terdapat 48 Perusahaan Modal Ventura yang menyampaikan Laporan dan sebanyak 15 Perusahaan Modal Ventura terlambat dalam menyampaikan laporan dimaksud.

## E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

- Pemberian Izin Usaha LKM**  
Sampai akhir triwulan II-2018, terdapat 196 LKM yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK.

**Tabel II - 22** — Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh

No.	Nama LKM	Asal Daerah
1	Koperasi LKM Agribisnis Maju Makmur Kalipucang	Magelang, Jawa Tengah
2	Koperasi LKM Aneka Tani Mandiri	Banjarnegara, Jawa Tengah
3	PT LKM Badan Kredit Desa Ponorogo	Ponorogo, Jawa Timur
4	PT LKM Sedasa	Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
5	PT LKMS Mahirah Muamalah	Banda Aceh, Aceh
6	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Modern Al Kautsar	Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
7	Koperasi LKMS UNISA	Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Koperasi LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah	Demak, Jawa Tengah

**2. Undangan Pihak Internal dan Eksternal OJK dalam rangka Sosialisasi UU LKM dan Pengembangan LKM**

Dalam rangka mensosialisasikan UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pengembangan LKM, selama triwulan II-2018 OJK memenuhi undangan pihak internal dan eksternal dalam berbagai acara, antara lain:

- Workshop* “Mendorong Inklusi Keuangan Pedesaan melalui Pengembangan BUMDes dan BUMADes”
- Workshop* Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
- Workshop* ‘Penguatan Kelembagaan LKM’

**3. Pelaksanaan Pendampingan Secara Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM**

OJK melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada LKM yang telah memperoleh izin usaha untuk mendukung pelaksanaan penyampaian laporan keuangan LKM kepada OJK. OJK juga melakukan pendampingan secara langsung. Pendampingan ini dilakukan juga untuk melihat profil dan proses bisnis LKM. Selama triwulan II-2018, OJK telah melakukan pendampingan LKM di empat kota dengan total sebanyak 15 LKM, antara lain:

**Tabel II - 23** — Pelaksanaan Pendampingan LKM selama Triwulan II - 2018

No.	Lokasi	Nama LKM
1	Pekalongan	1. Koperasi LKM Baringin Sakti
		2. Koperasi LKM Anduring
		3. Koperasi LKMA Gapoktan Tani Mugi Rahayu
		4. Koperasi LKMA Gapoktan Rukun Makmur
		5. Koperasi LKMA Gapoktan Suka Tani
		6. Koperasi LKMA Gapoktan Sidodadi Makmur
		7. Koperasi LKMA Gapoktan Tani Maju Desa Wonosido
		8. Koperasi LKMA Gapoktan Tani Makmur
		9. Koperasi LKMA Gapoktan Subur Makmur
2	Cirebon	1. PT LKM Ciamis
		2. Koperasi LKMS Gunung Jati
3	Kuningan	1. PT LKM Kuningan
4	Tasikmalaya	1. Koperasi LKMS Berkah Amanah Umat
		2. Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam
		3. Koperasi LKMS Al Wathon Cijantung

**4. Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro**

Selama triwulan II-2018, OJK melakukan asistensi perizinan badan kredit desa (BKD) menjadi LKM di dua kabupaten/kota, sebagai berikut:

**Tabel II - 24** — Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM selama triwulan II-2018

No.	Jenis	Kota / Kabupaten	Jumlah Peserta
1	Bank Kredit Desa (BKD)	Jember	40
		Banyuwangi	40

**5. Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian LKM syariah di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah. Selama periode laporan, jumlah LKM syariah terus meningkat menjadi 26 LKM Syariah.

**Tabel II - 25** — LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro) pada triwulan II-2018

No.	Nama LKM Syariah
1	Koperasi LKMS Pondok Pesantren Modern Al Kautsar
2	Koperasi LKMS UNISA
3	Koperasi LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah

## F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Sampai akhir triwulan II-2018 belum terdapat penambahan jumlah Perusahaan Penjaminan Konvensional. Jumlah Perusahaan Penjaminan Konvensional adalah sebanyak 21 perusahaan yang terdiri dari satu BUMN (Perum Jamkrindo), dua Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta (PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia/PT PKPI dan PT UAF Jaminan Kredit), dan 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah. Sementara itu, terdapat tiga Perusahaan Pergadaian yang telah mendapatkan izin usaha dan terdapat tiga Perusahaan Pergadaian yang baru terdaftar selama triwulan II-2018 sebagaimana berikut:

**Tabel II - 26** — Daftar Perusahaan Pergadaian yang telah Mendapatkan Izin Usaha atau telah terdaftar pada triwulan II-2018

No.	Perusahaan Pergadaian	Tempat Kedudukan
1.	PT Pergadaian Dana Sentosa	Yogyakarta
2.	PT Sahabat Gadai Sejati	Bandung
3.	CV Prima Perkasa	Semarang
4.	Gadai Murah Jogja	Yogyakarta
5.	PT Awi Gadai Jogja	Yogyakarta
6.	PT Gadai Mitra Rakyat	Bekasi

Berdasarkan pemeriksaan langsung yang telah diselesaikan, telah diterbitkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) selama triwulan II-2018.

## G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Hingga triwulan II-2018, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

- Penyelesaian pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sebanyak 30 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, yaitu 17 pemeriksaan terhadap Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- Penerbitan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF);

- Penyelesaian tindakan lanjut empat pengaduan jasa penunjang IKNB;
- Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 81 sanksi yang terdiri dari 26 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 31 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), 16 Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), enam Sanksi Administratif berupa Denda, dan dua Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU).

## H. Pengawasan *Financial Technology (Fintech)*

OJK melakukan berbagai kegiatan dalam mengembangkan *Fintech*

1. **Pendaftaran Penyelenggara *Fintech Lending***  
Pada triwulan II-2018, OJK memberikan tanda terdaftar kepada 24 penyelenggara *fintech lending*, sehingga total penyelenggara *fintech lending* yang telah terdaftar adalah sebanyak 64.

**Tabel II - 27** — Daftar Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar pada Triwulan II-2018

No.	Nama Penyelenggara	Nama Platform
1	PT Dana Pinjaman Inklusif	PinjamanGo
2	PT Perlu Fintech Indonesia	Iternak.id
3	PT Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar
4	PT Fintek Digital Indonesia	Kredito
5	PT Crowde Membangun Bangsa	Crowde
6	PT Kredit Plus Teknologi	Pinjam Gampang
7	PT Tanifund Madani Indonesia	Tanifund
8	PT Mulia Inovasi Digital	Danain
9	PT Bursa Akselerasi Indonesia	Indofund.id
10	PT Semesta Gerakan Persada	SGPIndonesia
11	PT Tri Digi Fin	KreditPro
12	PT Grha Dana Bersama	Avantee
13	PT Glotech Prima Vista	Do-It
14	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	Rupiah Cepat
15	PT Layanan Keuangan Berbagi	Danarupiah
16	PT Digital Micro Indonesia	Danabijak
17	PT Artha Permata Makmur	Cashcepat
18	PT Seva Kreasi Digital	Danalaut
19	PT Dana Syariah Indonesia	Danasyariah
20	PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia	Telefin
21	PT Modal Rakyat Indonesia	Modal Rakyat
22	PT Kawan Cicil Teknologi Utama	Kawan Cicil
23	PT Satustop Finansial Solusi	Sanders One Stop Solution
24	PT Alfa Finance Indonesia	Kreditcepat

2. Sosialisasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech Peer to Peer Lending*
- OJK menyelenggarakan sosialisasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fintech lending, ekonomi digital dan kebijakan OJK yang akan berdampak pada peningkatan jumlah serta sebaran *fintech* lending di Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang perwakilan dari 9 Kantor Regional OJK dan 26 Kantor OJK di daerah.

## I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan II-2018, OJK menerima 1.358 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Dengan demikian, sampai dengan triwulan II-2018 telah diproses sebanyak 3.768 permohonan yang terdiri dari 2.813 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB yang telah selesai diberikan izin/persetujuan/pencatatan, 903 permohonan dan pelaporan masih dalam proses penyelesaian, dan 52 permohonan lainnya dibatalkan.

**Tabel II - 28** — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai Triwulan II-2018

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi *)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018	Jumlah				
Pemberian Izin Usaha	32	14	46	9	10	17	10
Pencabutan Izin Usaha	9	7	16	7	6	3	-
Likuidasi	22	3	25	11	12	2	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	20	6	26	5	7	10	4
Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP	258	64	322	140	110	34	38
Perubahan Nama	5	-	5	2	1	2	-
Kantor Cabang	346	218	564	362	41	161	-
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	130	149	279	208	25	46	-
Produk	509	327	836	685	114	37	-
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	418	269	687	466	200	21	-
Pelaporan Pengurus	213	194	407	386	3	18	-
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	349	20	369	369	-	-	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	51	49	100	86	5	9	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	48	38	86	77	6	3	-
<b>Total</b>	<b>2.410</b>	<b>1.358</b>	<b>3.768</b>	<b>2.813</b>	<b>540</b>	<b>363</b>	<b>52</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

### 1. Pemberian Izin Usaha

Pada periode triwulan II-2018, terdapat dua permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun, lima permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian dan tujuh pendaftaran Perusahaan Pergadaian.

Dengan demikian, terdapat 46 permohonan izin usaha IKNB termasuk pendaftaran pergadaian, dengan sembilan permohonan telah diselesaikan dan delapan permohonan dikembalikan

**Tabel II - 29** — Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan II - 2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	-	1	-	-	-	1
Dana Pensiun	5	2	7	-	2	4	1
Perusahaan Pembiayaan	1	-	1	-	-	-	1
Perusahaan Modal Ventura	4	-	4	-	-	2	2
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha	15	5	20	5	6	5	4
Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran	6	7	13	4	2	6	1
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Selain itu, terdapat lima perusahaan pergadaian yang memperoleh izin usaha dan empat perusahaan pergadaian yang telah diberikan pernyataan pendaftaran. Di sisi lain, terdapat satu permohonan izin

usaha dan satu pendaftaran perusahaan pergadaian dikembalikan karena membatalkan permohonan, yaitu:

**Tabel II - 30** — Penetapan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian sampai dengan Triwulan II-2018

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1	PT Sili Gadai Nusantara	Perusahaan Pergadaian
2	PT Jawa Barat Gadai	Perusahaan Pergadaian
3	PT Pergadaian Dana Sentosa	Perusahaan Pergadaian
4	PT Sahabat Gadai Sejati	Perusahaan Pergadaian
5	PT Gadai Mitra Rakyat	Perusahaan Pergadaian

**Tabel II - 31** — Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan Pergadaian sampai dengan triwulan II-2018

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1	UD Ijab	Perusahaan Pergadaian
2	CV Prima Perkasa	Perusahaan Pergadaian
3	Gadai Murah Jogja	Perusahaan Pergadaian
4	PT Awi Gadai Jogja	Perusahaan Pergadaian

## 2. Pencabutan Izin Usaha

Selama periode laporan, permohonan pencabutan izin usaha IKNB yang baru diterima terdiri dari tiga permohonan pembubaran Dana Pensiun, tiga

permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, dan satu permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan Penjaminan,

**Tabel II - 32** — Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan Triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi *)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	-	1	1	-	-	-
Dana Pensiun	3	3	6	2	3	1	-
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	2	1	2	-
Perusahaan Modal Ventura	2	-	2	1	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	1	1	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Pada triwulan II-2018 terdapat penambahan dua Perusahaan Penjaminan yang memperoleh izin usaha, satu Perusahaan Pergadaian (Persero) yang

telah memperoleh izin usaha, dan dua Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh Pernyataan Terdaftar.

**Tabel II - 33** — Jumlah IKNB Konvensional sampai dengan Triwulan II-2018

No.	Jenis Industri	Jumlah
<b>I</b>	<b>Asuransi dan Reasuransi *</b>	
1	Asuransi Jiwa	53
2	Asuransi Umum	74
3	Reasuransi	6
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>138</b>
<b>II</b>	<b>Dana Pensiun</b>	
1	DPPK PPIP	44
2	DPPK PPMP	167
3	DPLK	24
	<b>Total Dana Pensiun</b>	<b>235</b>
<b>III</b>	<b>Lembaga Pembiayaan</b>	
1	Perusahaan Pembiayaan	188
2	Modal Ventura	62
3	Perusahan Pembiayaan Infrastruktur	2
	<b>Total Lembaga Pembiayaan</b>	<b>252</b>
<b>IV</b>	<b>Lembaga Jasa Keuangan Lainnya</b>	
1	Perusahaan Penjaminan	23
2	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesa Eximbank	1
4	Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha	11
5	Perusahan Pergadaian –Pendaftaran	14
	<b>Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya</b>	<b>50</b>
	<b>TOTAL LJKNB (Konvensional)</b>	<b>675</b>

### 3. Likuidasi

OJK menerima tiga permohonan terkait proses likuidasi dana pensiun yang terdiri dari satu permohonan persetujuan rencana kerja likuidasi,

satu permohonan persetujuan hasil penyelesaian likuidasi, dan satu permohonan persetujuan perubahan tim likuidasi.

**Tabel II - 34** — Rekapitulasi Likuidasi IKNB sampai dengan Triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I-2018	Triwulan II-2018				
<b>Perusahaan Asuransi dan Reasuransi</b>						
a. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	1	-	1	-	1	-
b. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	2	-	2	-	2	-
<b>Dana Pensiun</b>						
a. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	14	1	15	8	6	1
b. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	5	1	6	2	3	1
c. Persetujuan Perubahan Tim Likuidasi	-	1	1	1	-	-
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

#### 4. Akuisisi

Selama periode triwulan II-2018, terdapat enam permohonan pengambilalihan dan 20 permohonan pengambilalihan yang merupakan *outstanding* dari

triwulan sebelumnya. Rincian pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 35** — Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB sampai dengan Triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	2	4	2	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan	18	4	22	3	5	10	4
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

**Tabel II - 36** — Persetujuan Pengambilalihan IKNB sampai dengan Triwulan II-2018

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1	PT AXA Financial Indonesia	Perusahaan Asuransi
2	PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia	Perusahaan Asuransi
3	PT Cakrawala Citramega Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
4	PT Astra Sedaya Finance	Perusahaan Pembiayaan
5	PT Bahana Artha Ventura	Perusahaan Modal Ventura

#### 5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Selama triwulan II-2018, OJK menerima sebanyak 64 permohonan/pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan perusahaan/ perubahan anggaran dasar/

perubahan pemegang saham/perubahan PDP dan 258 permohonan/pelaporan dari triwulan sebelumnya.

**Tabel II - 37** — Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB sampai dengan Triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	49	8	57	29	18	10	-
Dana Pensiun	85	33	118	43	41	15	19
Perusahaan Pembiayaan	75	14	89	41	28	6	14
Perusahaan Modal Ventura	37	6	43	18	18	3	4
Perusahaan Penjaminan	12	2	14	8	5	-	1
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	1	1	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>258</b>	<b>64</b>	<b>322</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>34</b>	<b>38</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

#### 6. Perubahan Nama

Pada triwulan II-2018 OKJ menetapkan pelaporan perubahan nama terhadap dua perusahaan, yaitu:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (d/h PT Tugu Pratama Indonesia);
2. PT Akulaku Finance Indonesia (d/h PT Maxima Auto Finance)

**Tabel II - 38** — Rekapitulasi Perubahan Nama sampai dengan Triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	-	2	1	-	1	2
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	3	-	3	1	1	1	3
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

#### 7. Kantor di Luar Kantor Pusat (Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran)

Sampai akhir triwulan II-2018, OJK menerima 22 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi dan reasuransi serta lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal

ventura) yang terdiri dari pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat serta 18 pelaporan perubahan alamat kantor pusat untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

**Tabel II - 39** — Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB sampai dengan Triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
- Pembukaan Kantor Cabang	-	4	4	2	1	1
- Penutupan Kantor Cabang	-	6	6	6	-	-
- Perubahan Alamat	-	7	7	6	-	1
Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	3	2	5	5	-	-
Lembaga Pembiayaan dan LJKK						
- Pembukaan Kantor Cabang	104	85	189	118	15	56
- Penutupan Kantor Cabang	44	10	54	28	5	21
- Perubahan Alamat	195	104	299	197	20	82
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>218</b>	<b>564</b>	<b>362</b>	<b>41</b>	<b>161</b>

Sampai akhir triwulan II-2018, OJK menerima 279 pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor pemasaran Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

**Tabel II - 40** — Rekapitulasi Perubahan Nama sampai dengan triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	12	90	102	74	8	20
Perusahaan Pembiayaan	118	59	177	134	17	26
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>149</b>	<b>279</b>	<b>208</b>	<b>25</b>	<b>46</b>

**8. Pelaporan /Persetujuan Produk dan Persetujuan Bancassurance**

Pada periode triwulan II-2018, terdapat 327 permohonan pelaporan/persetujuan produk disertai 509 *outstanding* dari triwulan sebelumnya. OJK menyelesaikan sebanyak 685 permohonan/pelaporan.

**Tabel II - 41** — Rekapitulasi Pelaporan Produk sampai dengan Triwulan II - 2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Pencatatan Nama Lain	5	6	11	6	5	0
Pencatatan Perubahan Produk	105	51	156	116	38	2
Pencatatan Produk Baru	23	26	49	45	4	0
Persetujuan Bancassurance	141	85	226	212	1	13
Persetujuan Perubahan Produk	19	11	30	24	5	1
Persetujuan Produk Baru	209	147	356	275	60	21
Persetujuan ASO	7	1	8	7	1	0
<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>327</b>	<b>836</b>	<b>685</b>	<b>114</b>	<b>37</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

\*\*) Harus memperoleh persetujuan dari OJK dengan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

#### 9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan II-2018, terdapat 269 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) disertai dengan 418 yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan

triwulan II-2018, permohonan yang diselesaikan adalah sebanyak 466 permohonan. Sementara itu, 221 permohonan masih menunggu proses penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen.

**Tabel II - 42** — Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan II - 2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	108	70	178	134	38	6
Dana Pensiun	114	61	175	139	33	3
Perusahaan Pembiayaan	137	97	234	137	87	10
Perusahaan Modal Ventura	52	16	68	48	18	2
Perusahaan Penjaminan	7	25	32	8	24	-
<b>Total</b>	<b>418</b>	<b>269</b>	<b>687</b>	<b>466</b>	<b>200</b>	<b>21</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Dari sejumlah 466 permohonan PKK yang diselesaikan, terdapat 356 permohonan yang ditetapkan hasilnya terdiri dari 38 komisaris utama/ ketua dewan pengawas, 68 komisaris/dewan

pengawas, 32 komisaris independen, 55 direktur utama/ketua pengurus, 135 direktur/anggota pengurus, delapan pemegang saham pengendali, 12 aktuaris, dan delapan auditor internal.

**Tabel II - 43** — Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan II - 2018

Jabatan	Perusahaan Asuransi dan Reasuransi		Dana Pensiun		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Modal Ventura		Perusahaan Penjaminan	
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Komisaris Utama/ Ketua Dewan Pengawas	5	2	18	-	8	-	5	-	-	-
Komisaris / Dewan Pengawas	15	-	32	6	8	1	6	-	-	-
Komisaris Independen	16	1	-	-	11	-	1	-	2	1
Direktur Utama/ ketua Pengurus	13	-	12	1	22	-	5	1	1	-
Direktur/Anggota Pengurus	33	2	32	4	48	3	8	1	4	-
Pemegang Saham Pengendali	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-
Aktuaris	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Internal	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>94</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

#### 10. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

Selama triwulan II-2018, terdapat 194 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai 213 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan

sebelumnya. Dari jumlah dimaksud, sebanyak 386 telah dicatat dan sebanyak 21 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis.

**Tabel II - 44** — Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan II - 2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	44	52	96	89	3	4
Dana Pensiun	101	76	177	163	-	14
Perusahaan Pembiayaan	59	53	112	112	-	-
Perusahaan Modal Ventura	8	11	19	19	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	2	3	3	-	-
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>194</b>	<b>407</b>	<b>386</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

11. **Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB**  
 Pada triwulan II-2018, terdapat 20 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB disertai dengan

sebanyak 349 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan I - 2018.

**Tabel II - 45** — Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan II - 2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	68	-	68	68	-	-
Dana Pensiun	232	-	241	241	-	-
Perusahaan Pembiayaan	49	20	60	60	-	-
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>20</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	-	-

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

12. **Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal**  
 Selama triwulan II-2018, terdapat 49 pelaporan aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi.

Pelaporan aktuaris dan auditor internal yang telah diselesaikan adalah sebanyak 86 pelaporan. Sementara itu, sebanyak 14 pelaporan sisanya sedang dalam proses yang telah ditanggapi.

**Tabel II - 46** — Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal sampai dengan Triwulan II - 2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Tenaga Ahli dan Aktuaris	42	46	88	74	5	9
Auditor Internal	9	3	12	12	-	-
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

13. **Pelaporan Tenaga Kerja Asing**  
 Pada triwulan II-2018, terdapat 38 pelaporan

penggunaan tenaga kerja asing dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan.

**Tabel II - 47** — Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan triwulan II-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan I - 2018	Triwulan II - 2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	37	27	64	55	6	3
Perusahaan Pembiayaan	11	10	21	21	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	1	1	1	-	-
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

## J. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan Pialang Asuransi, perusahaan Pialang Reasuransi, dan perusahaan

penilai kerugian asuransi. Adapun pelayanan tersebut meliputi :

**Tabel II - 48** — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II - 2018

No.	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II - 2018	Outstanding Triwulan I - 2018	Status			
				Selesai	Proses*	Batal	Pengembalian Dokumen**
1	Pemberian Izin Usaha	-	3	1	2	-	-
2	Perubahan Nama	2	1	0	2	-	1
3	Perubahan Kepemilikan	18	33	6	45	-	-
4	Penambahan Modal	2	14	2	14	-	-
5	Perubahan Pengurus	44	63	31	67	-	9
6	Perubahan Alamat	9	16	6	17	1	1
7	Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan	3	6	3	5	-	1
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	20	31	16	32	1	2
9	Pendaftaran Pialang	19	24	20	17	6	-
10	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	3	1	3	1	-	-

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

\*\*) Harus memperoleh persetujuan dari OJK dengan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sampai dengan triwulan II-2018 telah terdaftar sebanyak 274 Akuntan Publik, 27 Konsultan Aktuaria, dan 138

Penilai yang berkegiatan di bidang IKNB.

**Tabel II - 49** — Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan II - 2018

Jenis Profesi	Jumlah Profesi Terdaftar Triwulan II - 2018	Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan II - 2018 (per 30 Juni 2018)
Akuntan Publik	2	274
Konsultan Aktuaria	-	27
Penilai	6	138
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>439</b>

Sementara itu, jumlah agen asuransi berbadan hukum dan agen penjamin (perseorangan dan berbadan hukum)

sampai dengan triwulan II-2018 tersaji sebagai berikut:

**Tabel II - 50** — Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin sampai dengan Triwulan II - 2018

Jenis Profesi	Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan II - 2018 (per 30 Juni 2018)
Agen Asuransi Berbadan Hukum	2
Agen Penjamin Perseorangan	42
Agen Penjamin Berbadan Hukum	37
<b>Total</b>	<b>81</b>

## K. Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli

Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang triwulan II-2018 terlampir sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II - 51** — Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama triwulan II-2018

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan I-2018		Jumlah
	Direkomendasikan	Tidak Direkomendasikan	
Pemegang Saham Pengandali	7	-	7
Komisaris	29	2	31
Direksi	40	3	43
Auditor Internal	1	-	1
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>5</b>	<b>82</b>

Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang triwulan II-2018 terlampir sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel II - 52** — Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Sampai dengan Triwulan I - 2018	Triwulan II-2018		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	165	1	-	166
2.	Pialang Reasuransi	43	-	-	43
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
	<b>Total</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>236</b>

## 2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

### 2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

#### 1. Penelitian/Kajian dan Pengaturan Konglomerasi Keuangan

OJK bekerja sama dengan World Bank dan konsultan yang ditunjuk melakukan Kajian tentang Metodologi dan Tools *Early Warning Systems* (EWS) Konglomerasi Keuangan (KK). Kajian tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka pengembangan EWS Konglomerasi

Keuangan yang mendukung pengawasan terintegrasi, sehingga pengawas dapat mendeteksi permasalahan KK secara dini berdasarkan kondisi keuangan KK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan non LJK yang terkait dengan KK, serta faktor eksternal lainnya.

#### 2. Kajian Risk Culture

OJK menyusun Kajian *Risk Culture* yang bertujuan memberikan pemahaman dan rekomendasi pendekatan pengaturan dan pengawasan mengenai *risk culture* kepada Industri Jasa Keuangan dan menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan OJK terkait dengan penerapan *risk culture* pada KK.

#### 3. Enhancement Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK secara berkelanjutan melakukan *enhancement* terhadap SIPT. Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK. Selanjutnya tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi SIPT modul data dan rasio keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan.
- Mendorong standardisasi proses bisnis dan produk pengawasan.
- Mengoptimalkan pengawas dalam menganalisis kondisi konglomerasi keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.
- Menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan.
- Memudahkan *audit trail* oleh pihak yang berkepentingan.
- Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

### 2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

#### A. Pengembangan Bank Umum

Pada triwulan II-2018, pengembangan pengawasan Bank Umum masih melanjutkan kegiatan pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bank yang sebelumnya terkait Siklus Pengawasan Bank, saat ini berfokus kepada tindak lanjut penetapan status pengawasan Bank.

Kedua SPO dibuat untuk memperkuat Pengawasan Bank Umum dan dasar hukum bagi Pengawas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, penyusunan pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pengawas Bank Umum juga sedang dalam proses finalisasi untuk selanjutnya digunakan sebagai panduan bagi Pengawas Bank Umum.

## B. Pengembangan BPR/BPRS

Dalam rangka menindaklanjuti temuan *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER) di Indonesia, yaitu memenuhi salah satu persyaratan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) yang direkomendasikan FATF, pada periode laporan, OJK menyusun kajian pelaksanaan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berbasis risiko pada BPR. Berdasarkan rekomendasi FATF sebelumnya, OJK mengembangkan *tools* penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) dan tengah disusun kajian yang mengakomodir penetapan periode pelaksanaan pengawasan *on-site* APU dan PPT berbasis risiko. Selain itu, OJK juga melakukan penyesuaian *tools* penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT dari hasil *Technical Assistance* IMF. Rekomendasi FATF dan IMF tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan Pedoman Pengawasan terkait Penilaian Penerapan APU dan PPT berdasarkan risiko bagi BPR.

### 2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

#### A. Kajian Pasar Modal

Pada triwulan II-2018 OJK melakukan penyusunan kajian mengenai Perusahaan Efek Daerah. Penyusunan kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi model pengaturan Perusahaan Efek pada level daerah. Pengembangan Perusahaan Efek Daerah diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru di daerah, mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan jumlah investor retail di daerah, meningkatkan tingkat literasi dan inklusi Pasar Modal di daerah, dan mencegah terjadinya investasi bodong yang sebagian besar terjadi di daerah.

#### B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Selama periode laporan, OJK melakukan sosialisasi peraturan kepada industri terkait dengan penerbitan POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan 2) Sosialisasi POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

#### C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

##### 1. Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal:

- a. **Enhancement Sistem C- BEST Next Generation (C-BEST NEXT-G)**  
Pengembangan sistem utama KSEI (C-BEST) guna mengantisipasi peningkatan jumlah investor dan integrasi aplikasi-aplikasi di luar

C-BEST yang selama ini digunakan sebagai pendukung aplikasi C-BEST.

- b. **Enhancement Architecture e-Clears (EAE)**  
Pengembangan arsitektur sistem utama KPEI (*e-Clears*) guna mengantisipasi peningkatan kapasitas, performa, fleksibilitas dan kehandalan sistem sistem kliring KPEI.
- c. **Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo - Third Party Repo**  
Pengembangan sistem *third party* repo ini bertujuan untuk mengembangkan model bisnis dan sistem repo yang efektif dan efisien serta dapat diaplikasikan oleh pelaku pasar. KPEI sebagai *third party* menyediakan layanan *back-office* atas transaksi repo yang sudah dilakukan para partisipan dalam pengelolaan agunan, *mark to market* dan *margin management*.
- d. **Implementasi General Clearing Member (GCM)**  
Implementasi GCM bertujuan memberikan pilihan kepada Anggota Bursa untuk fokus pada bisnis inti (terutama pemasaran) yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pemodal dan meningkatkan likuiditas pasar serta penurunan risiko secara keseluruhan, dengan risiko antara KPEI sebagai *Central Clearing Counterparty* (CCP) dengan GCM.

##### 2. Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU)

Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU) merupakan koordinasi pengembangan pasar Surat Utang antara OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Penilai Harga Efek Indonesia guna memperkuat performa Pasar Surat Utang melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan. Adapun capaian untuk Program TPPSU selama triwulan II-2018 adalah sebagai berikut:

- a. **Pengembangan Electronic Trading Platform Surat Utang (ETP)**  
ETP tahap 1 telah diresmikan secara langsung dengan anggota ETP 2017 berjumlah 10 partisipan dan terdapat kemungkinan penambahan dua partisipan *Focus Group Discussion* (FGD) telah dilakukan dengan Partisipan dalam rangka evaluasi sistem ETP. Dari hasil diskusi diperoleh beberapa masukan antara lain penambahan instrumen lainnya dalam ETP seperti SUN *benchmark*, Sukuk Ritel, dan Obligasi Korporasi guna menarik minat transaksi seperti melakukan penyempurnaan sistem, yaitu integrasi informasi nasabah ke sistem PLTE, proses kliring, fitur perhitungan pajak dan integrasi sistem dengan penyelesaian BI-SSSS dan S-INVEST.

- b. **Pengembangan Pasar Surat Utang Regional**  
Posisi Indonesia atas inisiatif internasional antara lain:
1. Dalam mengikuti inisiatif internasional, ASEAN *Capital Market Forum (ACMF)-Working Group A* telah merevisi POJK terkait prospektus penawaran umum yang mengakomodir ASEAN *disclosure standard*.
  2. Dalam mengikuti inisiatif internasional dalam *Asian Bond Market Initiative (ABMI)*, saat ini telah disusun POJK Penawaran Umum kepada *Investor Profesional* dan Penerbitan Surat Utang Non-IPO.
  3. Indonesia memenuhi *bond scorecard* dalam *Working Committee on Capital Market development (WC-CMD)*, kecuali:
    - *Acceptance of international MTN programmes.*
    - *No Restrictions on non-resident local currency (LCY).*
    - *Availability of active futures market.*
- c. **Pengembangan Pasar dan Produk Surat Utang Indonesia Government Bond Futures (IGBF)**  
IGBF sudah *live* sejak 6 Mei 2017. Sistem dan operasional kliring IGBF serta penyajian harga harga wajar *underlying* IGBF sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, tim akan meninjau peraturan di IKNB mengenai keperluan *hedging* dan mekanisme *hedging* yang diperbolehkan mengingat *hedging* tidak hanya dilakukan oleh perbankan. Selain itu, tim akan merevisi kemungkinan penambahan instrumen IGBF dengan *underlying interest rate*.

### 2.3.4 Pengembangan IKNB

#### A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Selama triwulan II-2018, OJK menyelenggarakan Seminar Aktuaris yang berkolaborasi dengan tim READI (*Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia*) dan bekerja sama dengan Universitas Andalas. Jumlah aktuaris (ASAI dan FSAI) mengalami kenaikan sejumlah 21 orang, sehingga sampai dengan triwulan II-2018 terdapat 535 aktuaris.

#### B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan II-2018, yaitu memverifikasi penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) secara internal OJK maupun bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

## 2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pada triwulan II-2018, stabilitas sistem keuangan nasional secara umum masih terjaga di tengah peningkatan volatilitas di pasar keuangan domestik. Kinerja industri jasa keuangan secara umum masih memadai, disertai profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. OJK akan senantiasa mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan, mempersiapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan memanfaatkan momentum perbaikan pertumbuhan.

### 2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

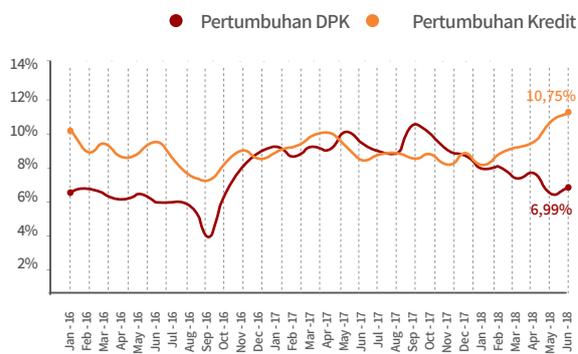
OJK menilai bahwa secara umum stabilitas sektor jasa keuangan dalam negeri pada triwulan II-2018 dalam kondisi terjaga. Meskipun demikian, OJK memantau adanya peningkatan *downside risks* terutama yang berasal dari eksternal, khususnya terkait ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih cepat serta ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Faktor-faktor risiko ini mendorong peningkatan tekanan di pasar keuangan emerging markets, termasuk Indonesia, dan perlu terus diwaspadai agar tidak menimbulkan gangguan yang signifikan bagi stabilitas sektor jasa keuangan.

Volatilitas pasar keuangan dalam negeri meningkat pada periode laporan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup pada level 5.799,24 atau melemah 6,30% dibandingkan posisi penutupan triwulan sebelumnya. Investor nonresiden membukukan *net sell* di pasar saham sebesar Rp25,9 triliun. Sebagaimana pergerakan pasar saham, di pasar Surat Berharga Negara (SBN) *yield* terpantau meningkat rata-rata 112 bps pada

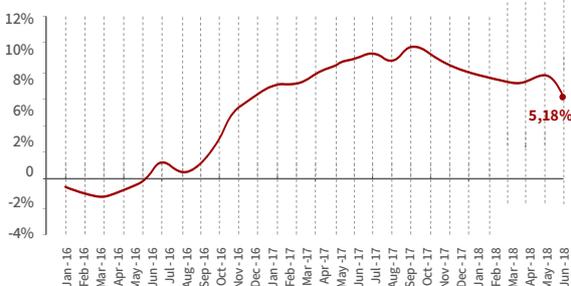
triwulan II-2018 dengan *net sell* investor nonresiden sebesar Rp28,6 triliun. Tekanan pada pasar modal domestik tersebut diharapkan dapat diredam oleh kinerja emiten yang terpantau masih stabil, serta membaiknya persepsi investor atas prospek perekonomian Indonesia.

Kinerja penyaluran kredit oleh sektor perbankan pada triwulan II-2018 mencatat sejumlah perkembangan positif. Kredit perbankan per Juni 2018 tercatat tumbuh sebesar 10,75% *yoy*, meningkat dibandingkan posisi akhir triwulan sebelumnya (8,54%). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga perbankan masih tumbuh moderat sebesar 6,99% (*yoy*). Di industri pembiayaan, piutang pembiayaan juga berada pada level yang moderat, yaitu sebesar 5,18% (*yoy*) per Juni 2018 (Maret 2018: 6,08%).

**Grafik II - 6** — Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



**Grafik II - 7** — Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan

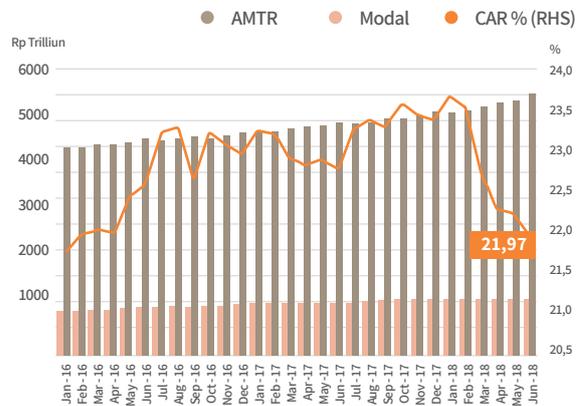


Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber pendanaan bagi korporasi domestik terpantau masih tinggi. Sepanjang triwulan II-2018, penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp74,4 triliun. Penghimpunan dana tersebut terutama dilakukan oleh emiten di sektor keuangan, disusul oleh emiten sektor industri dasar dan infrastruktur. Sebagian besar hasil penghimpunan dana dimanfaatkan oleh korporasi untuk membiayai modal kerja. Penghimpunan dana di pasar modal ini ke depan masih berlanjut, di mana dalam *pipeline* terdapat 22 perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dengan nilai indikatif sebesar Rp16,9 triliun.

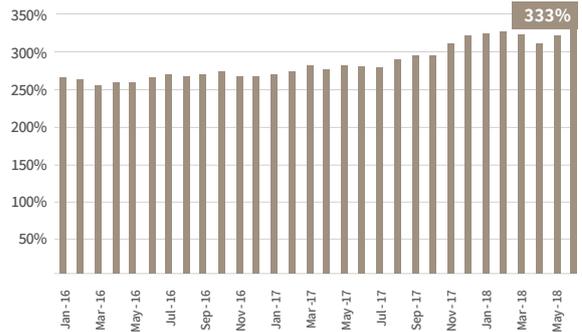
Permodalan industri jasa keuangan terpantau pada level yang memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko di masa yang akan datang, sekaligus untuk mendukung ekspansi penyaluran dana. Hal ini tercermin

dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan serta Risk Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa yang jauh berada di atas ketentuan minimum. CAR per Juni 2018 tercatat sebesar 21,97%. Sementara itu, RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 333% dan 455%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 3,14 kali (jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali), sehingga terdapat ruang yang cukup luas untuk bertumbuh lebih lanjut.

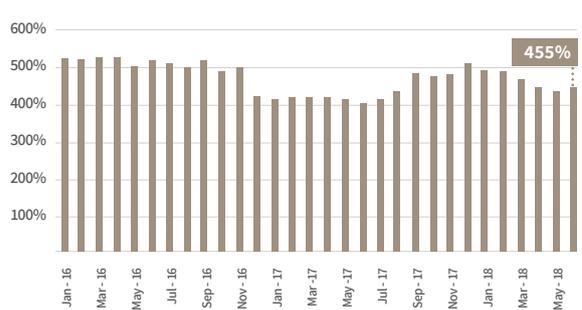
**Grafik II - 8** — Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan



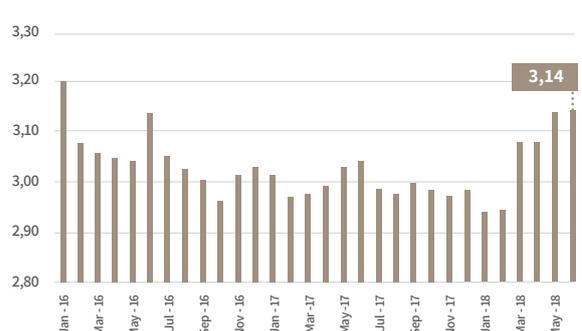
**Grafik II - 9** — Risk Based Capital (RBC) Asuransi Umum



**Grafik II - 10** — Risk Based Capital (RBC) Asuransi Jiwa



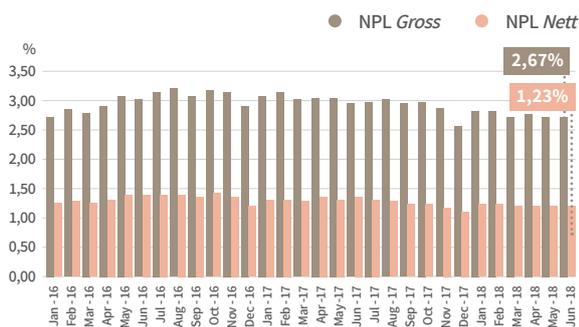
**Grafik II - 11** — Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



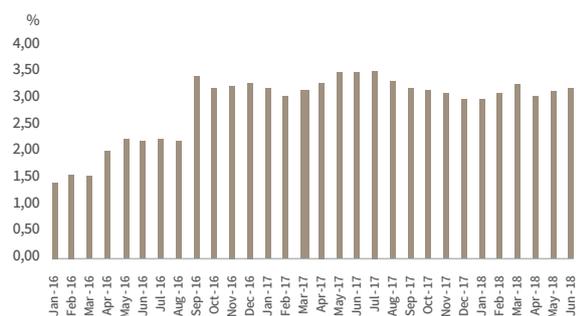
Dari sisi likuiditas lembaga jasa keuangan, alat likuid perbankan dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi risiko likuiditas. Pada akhir triwulan II-2018, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 92,5% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat masih tinggi pada level 19,6%. Terdapat kecenderungan penurunan rasio-rasio likuiditas pada periode laporan, antara lain terkait dengan peningkatan pertumbuhan kredit serta kebutuhan likuiditas masyarakat seiring bulan puasa dan Idul Fitri, Namun rasio-rasio tersebut masih terjaga di atas *threshold*.

Dari sisi risiko kredit, rasio kredit/pembiayaan bermasalah lembaga jasa keuangan terpantau masih pada level yang *manageable*, yang turut dipengaruhi oleh konsolidasi di perbankan dalam mengelola risiko kredit. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Juni 2018 tercatat masing-masing sebesar 2,67% dan 1,23%, turun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya (2,75% *gross* dan 1,20% *net*). Nilai nominal restrukturisasi kredit dan hapus buku di industri perbankan masih meningkat, namun pertumbuhannya terpantau terus melambat. Sementara itu, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga berada pada level yang *manageable* di bawah *threshold* 5%, dan pada akhir triwulan II-2018 tercatat sebesar 3,16% (Maret 2018: 3,25%).

**Grafik II - 12** — Rasio NPL Perbankan



**Grafik II - 13** — Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Risiko pasar lembaga jasa keuangan secara umum terkelola dengan baik di tengah kecenderungan pelemahan pasar keuangan domestik di triwulan II-2018. Posisi Devisa Neto (PDN) sektor perbankan per Juni 2018 tercatat sebesar 1,66% (Maret 2018: 1,75%), jauh di bawah batas maksimum sebesar 20%. Nilai investasi investor institusi domestik terdampak oleh peningkatan volatilitas pasar. Namun demikian, penurunannya terpantau moderat.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan II-2018 mencatat penurunan sebesar 2,00% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dana pensiun masing-masing turun sebesar 0,42% dan 1,74% pada periode yang sama.

## 2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Merespons peningkatan volatilitas pasar pada triwulan II-2018, OJK senantiasa mencermati dinamika perekonomian global dan domestik serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, terlebih dengan *downside risk* yang masih cukup tinggi. OJK akan mengambil *policy measures* yang tepat dalam hal tekanan di pasar modal domestik terus berlanjut. Untuk itu, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait juga akan terus diperkuat.

Dengan meningkatnya risiko di pasar keuangan, OJK terus meningkatkan pengawasan (*supervisory approach*) terutama terkait kegiatan lembaga jasa keuangan yang berhubungan dengan pasar keuangan, untuk memastikan bahwa lembaga jasa keuangan domestik menjalankan aktivitas bisnis secara *prudent* dan sesuai dengan bisnis intinya. Sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga telah memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan sesudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan memanfaatkan momentum perbaikan pertumbuhan. Beberapa opsi kebijakan yang dipertimbangkan oleh OJK di antaranya terkait dengan dukungan terhadap industri berorientasi ekspor, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, dukungan pengembangan sektor pariwisata, dan insentif untuk pembiayaan sektor perumahan. OJK juga terus memperkuat ketahanan pasar modal domestik melalui inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, serta penguatan infrastruktur pasar.

## 2.4.3 Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sepanjang triwulan II-2018, telah dilaksanakan serangkaian pertemuan level teknis untuk membahas berbagai isu, di antaranya terkait pembentukan Sekretariat KSSK, pertukaran data dan informasi di antara lembaga anggota KSSK, dan tindak lanjut evaluasi simulasi pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala satu kali setiap tiga bulan. Untuk triwulan II-2018, keempat anggota KSSK (Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan) telah melaksanakan Rapat KSSK pada tanggal 26 Juli 2018. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa sistem keuangan Indonesia pada triwulan II-2018 tetap terjaga di tengah kecenderungan peningkatan tekanan di perekonomian dan pasar keuangan global. KSSK memantau bahwa indikator-indikator makroekonomi dan sektor jasa keuangan secara umum masih terjaga, namun akan terus mencermati potensi tekanan dari eksternal maupun domestik.

Mengantisipasi ketidakpastian yang berasal dari lingkup global, KSSK telah melakukan asesmen terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Sesuai kewenangan masing-masing, lembaga-lembaga KSSK juga telah melaksanakan berbagai kebijakan yang diperlukan serta mempertimbangkan opsi-opsi kebijakan yang sesuai, baik di bidang fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, maupun penjaminan simpanan. Selain faktor risiko yang berasal dari eksternal, faktor risiko domestik yang akan terus dicermati ke depan terutama berasal dari pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan, kompleksitas dari implementasi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan, serta perkembangan kondisi politik menjelang pemilihan umum 2019.

Dalam rapat tersebut, KSSK juga menerima laporan telah beroperasinya Sekretariat KSSK guna mendukung tugas dan wewenang KSSK. Sekretariat KSSK ini terdiri atas perwakilan pegawai dari OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS. Selanjutnya, KSSK merencanakan akan kembali menyelenggarakan rapat berkala untuk triwulan III-2018 pada bulan Oktober mendatang.

## 2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### 2.5.1 Penelitian dan Pengaturan

#### A. Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Mataram dan Balikpapan

OJK menyelenggarakan sosialisasi ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen di Mataram dan Balikpapan dengan tema “Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen”. Sosialisasi tersebut dihadiri seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan akademisi dengan materi yang disampaikan adalah ketentuan literasi dan inklusi keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017), dan rancangan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

#### B. Seminar Nasional “Transparansi dan Disclosure Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Praktik Saat Ini vs *International Best Practices*”

OJK bersama World Bank menyelenggarakan seminar nasional yang bertema “Transparansi dan *Disclosure* Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Praktik Saat Ini vs *International Best Practices*” Seminar nasional tersebut dihadiri oleh 316 peserta yang berasal dari internal OJK, lembaga jasa keuangan, asosiasi industri jasa keuangan, World Bank serta lembaga terkait. Seminar ini terdiri dari *plenary session* dan *breakout session*.

Berdasarkan paparan narasumber dapat dilihat bahwa praktik *disclosure* produk dan layanan jasa keuangan diperlukan mempertimbangkan dua hal berikut: Dilihat dari sisi konsumen, terdapat informasi asimetris yang disebabkan konsumen tidak familiar dengan berbagai macam produk dan layanan jasa keuangan. Dari sisi industri jasa keuangan, adanya *disclosure* dan transparansi dapat meningkatkan kompetisi pasar karena konsumen dapat membandingkan produk dan layanan jasa keuangan dari standar informasi yang diberikan. Format standar *disclosure* produk dan layanan jasa keuangan dinilai penting karena dapat memitigasi risiko pengaduan konsumen. Melalui format standar *disclosure* konsumen akan mendapatkan informasi sejak awal mengenai produk keuangan yang dibeli khususnya terkait manfaat, risiko, biaya, denda, hak dan kewajiban.

### 2.5.2 Inklusi Keuangan

#### A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. OJK menyelenggarakan pembahasan finalisasi revisi Buku Pedoman TPAKD dengan mengundang perwakilan seluruh KR/KOJK, beberapa perwakilan dari Pemerintah Daerah (TPAKD Provinsi Sumatera Utara, TPAKD Kabupaten Kebumen dan TPAKD Kabupaten Tabalong) termasuk Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemendagri. Sampai dengan akhir triwulan II-2018, telah terbentuk 68 TPAKD dengan rincian 31 TPAKD Tingkat Provinsi dan 37 TPAKD tingkat Kabupaten/ Kota.

# OJK LUNCURKAN MODUL *E-LEARNING* BUKU LITERASI KEUANGAN UNTUK TINGKAT SD DAN SMP



Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan modul buku literasi keuangan untuk siswa SD dan SMP versi *E-Learning* sebagai salah satu upaya untuk menyediakan materi literasi keuangan berbasis IT bagi kalangan pelajar. Modul *E-Learning* ini bertujuan untuk menarik minat pelajar dan pengguna *E-Learning* secara umum mempelajari bidang keuangan melalui pembelajaran yang interaktif dan inovatif, antara lain dalam bentuk animasi dan permainan. *E-learning* merupakan sebuah terobosan teknologi dalam upaya peningkatan literasi keuangan bagi pendidikan pelajar di tanah air. Melalui Modul *E-Learning* ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelajar di seluruh wilayah Indonesia yang telah tersambung ke jaringan internet dalam mengakses materi literasi keuangan. Pemanfaatan modul *E-Learning* tergolong

praktis karena dapat langsung diakses pada PC, *notebook*, *smartphone*, *tablet*, maupun perangkat elektronik lainnya selama tersambung dengan jaringan internet.

Pengembangan modul *E-Learning* ini merupakan kerja sama OJK dengan Asian Development Bank (ADB) sejak tahun 2017. ADB mendukung penuh upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan OJK terhadap masyarakat, khususnya bagi kaum muda dan pelajar, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan modul *E-Learning* ini. Upaya ini juga merupakan langkah OJK dalam mengikuti perkembangan informasi teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Modul *E-Learning* tersebut dapat diunduh secara cuma-cuma melalui *minisite* Sikapi Uangmu ([www.sikapuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapuangmu.ojk.go.id)).

Berikut merupakan kisah sukses program TPAKD yang telah diterapkan dan mendapatkan *feedback* yang baik dari stakeholders dan masyarakat, antara lain:

1. **TPAKD Kabupaten Tabalong – Program Kredit Gerbang Emas**

Kredit Gerbang Emas merupakan salah satu program TPAKD dalam rangka memperluas akses permodalan UMKM dan pedagang kaki lima melalui penyediaan kredit berbiaya rendah dan telah didukung oleh Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas. Jumlah setoran Pemda sebanyak Rp 5 miliar di mana total penyaluran kredit adalah 27,74% atau Rp 1,3 miliar dengan NPL 0%.

2. **TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan – Fasilitasi Akses Kredit UMKM**

Program fasilitasi akses kredit UMKM binaan 5 Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pertanian telah direalisasikan oleh empat bank *partner* TPAKD sebanyak 355 UMKM atau 101,42% dari target 350 UMKM, dengan nominal penyaluran sebesar Rp74,69 milyar.

Program ini didukung implementasi program kemitraan antara skim asuransi pertanian dan peternakan PT Asuransi Jasindo dengan skim kredit usaha Bank Sulselbar, pelaksanaan program pengembangan klaster/sentra perikanan di Desa Boddia Kabupaten Takalar sebagai Desa Binaan TPAKD, peningkatan kuantitas dan kualitas data UMKM potensial yang direkomendasikan Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bank Partner TPAKD, serta perluasan program TPAKD hingga ke beberapa kabupaten potensial di Sulawesi Selatan.

3. **TPAKD Provinsi Jawa Tengah – Program Mitra Jateng 25**

Program Kredit yang ditujukan kepada UMKM yang memerlukan pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. Skim kredit Mitra Jateng 25 sebesar 7%. Sampai saat ini tercatat jumlah debitur mitra 25 bank Jateng sebanyak 8,440 debitur dengan jumlah plafon sebesar Rp 157,85 miliar.

Program fasilitasi pembiayaan LJK kepada sektor UMKM dipilih karena selaras dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Penguatan sektor UMKM masih menjadi prioritas utama karena sektor UMKM menjadi penyerap terbesar tenaga kerja di Jawa Tengah sebesar 80,82% dari total seluruh tenaga kerja di Jawa Tengah.

### 2.5.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

Selama periode laporan, OJK melaksanakan lima kegiatan edukasi keuangan yang berfokus kepada Petani, Nelayan, Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga serta Anggota Komunitas – komunitas Masyarakat. Pemilihan target peserta dalam edukasi tersebut sesuai dengan sasaran target peserta dalam Revisit Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2016.

#### A. Edukasi Keuangan Bagi Petani di Buleleng

Sebagai upaya peningkatan literasi keuangan kepada salah satu target prioritas sasaran kelompok, OJK melaksanakan edukasi keuangan bagi Petani di Kabupaten Buleleng. Dasar pemilihan wilayah Kabupaten Buleleng mengacu pada data hasil Sensus Pertanian 2013 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten dengan rumah tangga usaha pertanian tertinggi. Dalam pelaksanaan edukasi keuangan tersebut, peserta menerima materi pengenalan OJK dan waspada investasi, perencanaan keuangan, dan asuransi jasa tani.

#### B. Edukasi Keuangan bagi Komunitas Nelayan di Kota Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara

OJK bekerja sama dengan PT BPD Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan Edukasi Keuangan Bagi Komunitas Nelayan di Kota Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut diikuti 186 peserta, yang berasal dari komunitas nelayan di Kabupaten Wakatobi. Peserta edukasi keuangan menerima materi perencanaan keuangan dan produk/layanan jasa keuangan dari para narasumber, yaitu: Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perbankan terkait Kredit Perikanan, Asuransi Nelayan serta Perencanaan Keuangan.

#### C. Edukasi Keuangan bagi Komunitas Masyarakat Umum dan Perempuan/Ibu Rumah Tangga di Jakarta Timur

OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal pegawai, di mana kali ini dilaksanakan bagi 49 peserta. Peserta menerima serangkaian materi yang mencakup Pengenalan OJK dan Waspada Investasi serta Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga.

#### D. Edukasi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Sebagai upaya peningkatan literasi keuangan khususnya di daerah dengan potensi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar, menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi

pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dasar pemilihan wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu jumlah pelaku UMKM cukup besar (sebanyak 269.267 atau 16,8% dari total sekitar 1,6 juta jiwa penduduk), di mana 90% didominasi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan dukungan pelatihan keuangan maupun akses ke pembiayaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 112 pelaku UMKM anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Perkumpulan Perempuan Wirausaha (PERWIRA). Pada edukasi ini, peserta menerima berbagai materi, yaitu Pengenalan OJK dan Waspada Investasi yang dilanjutkan dengan Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Usaha.

### E. Edukasi Keuangan Bagi Masyarakat Umum Anggota Komunitas Kristiani di Kota Yogyakarta

OJK memberikan edukasi keuangan bagi anggota Komunitas Kristiani di wilayah Kota Yogyakarta di Kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta dengan bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Nias Yogyakarta. Kegiatan berlangsung dengan baik dan diikuti oleh 59 orang anggota komunitas kristiani baik para pemuda maupun orang tua. Para peserta mengikuti rangkaian sesi edukasi dengan materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, serta Pengelolaan Keuangan.

### F. Edukasi Waspada Investasi

- 1. Edukasi Waspada Investasi bagi ASN, Pelaku UMKM, dan Bhayangkari di Surabaya**

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan peserta terhadap modus investasi yang merugikan dan marak terjadi di tengah masyarakat, OJK menyelenggarakan Edukasi Waspada Investasi bagi ASN, pelaku UMKM, dan pengurus serta anggota Bhayangkari Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya. Pemilihan Kota Surabaya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan didasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut terdampak kasus penipuan berkedok investasi dengan *return* tinggi. Peserta kegiatan menerima sesi pengenalan OJK dan Waspada Investasi, diskusi waspada investasi dan materi terkait pengenalan investasi di Pasar Modal Indonesia. Kegiatan diikuti oleh 135 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota Bhayangkari Provinsi Jawa Timur, pelaku UMKM binaan Disperindagkop Provinsi Jawa Timur, dan ASN Disperindagkop Provinsi Jawa Timur.
- 2. Edukasi Waspada Investasi bagi Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumatera Utara dan Hijabers Community di Kota Medan**

OJK bekerja sama dengan Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumatera Utara dan Hijabers Community Kota Medan telah menyelenggarakan Edukasi Waspada Investasi bagi

Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumatera Utara dan Hijabers Community Kota Medan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 205 peserta yang terdiri dari komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumatera Utara dan Hijabers Community di Kota Medan. Peserta edukasi keuangan menerima materi dari para narasumber, yaitu Pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan, Pengenalan Satgas Waspada Investasi, dan Perencanaan Keuangan.

### 3. Edukasi Waspada Investasi kepada Anggota dan Pengurus Bhayangkari di Batam

Sebagai tindak lanjut MOU antara Pengurus Pusat Bhayangkari dengan OJK, dilaksanakan edukasi keuangan bagi pengurus dan anggota Bhayangkari daerah Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran investasi ilegal. Sebanyak 155 peserta menghadiri kegiatan edukasi keuangan yang terdiri dari materi pengenalan OJK dan waspada investasi, pengenalan Satgas Waspada Investasi (SWI), peran kepolisian dalam SWI, dan perencanaan keuangan.

### G. Safari Ramadhan

#### 1. Edukasi Keuangan Safari Ramadhan

Pada bulan suci Ramadhan, OJK melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan sebagai bentuk edukasi keuangan dan perencanaan keuangan yang diselenggarakan secara rutin khusus pada bulan Ramadhan. Safari Ramadhan dilaksanakan di empat lokasi setiap minggunya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Safari Ramadhan bagi Anggota Majelis Taklim di Masjid Al – Barkah, Tanjung Barat di Jakarta**

Sebagai pembukaan dari kegiatan rangkaian kegiatan Edukasi Keuangan selama bulan Ramadhan, telah dilaksanakan Safari Ramadhan di Aula Masjid Al – Barkah Tanjung Barat. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Pengurus Majelis Taklim Masjid Al – Barkah dan diikuti oleh 154 orang. Kegiatan edukasi keuangan tersebut bertujuan agar para peserta memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi OJK, produk/layanan jasa keuangan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus investasi ilegal. Pada kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK, IJK, dan Waspada Investasi dan Perencanaan Keuangan.
- b. Safari Ramadhan Bagi Pelaku UMKM dan Anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Depok**

Pelaku UMKM dan Anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Depok menjadi target edukasi kedua dari rangkaian kegiatan Safari Ramadhan tahun ini. Sebanyak 84 orang pelaku UMKM dan anggota IPEMI Kota Depok mengikuti

kegiatan. Pada kegiatan ini disampaikan Pengenalan OJK, Waspada Investasi, dan Industri Pasar Modal.

- c. **Safari Ramadhan bagi Santri Pondok Pesantren La Tansa di Kabupaten Lebak, Banten serta Buka Puasa Bersama**  
OJK bekerja sama dengan Pengurus Pondok Pesantren La Tansa telah menyelenggarakan Edukasi Safari Ramadhan bagi Santri Pondok Pesantren La Tansa di Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan tersebut diikuti oleh 259 santri setingkat SMA. Peserta edukasi keuangan menerima materi dari para narasumber, yaitu, Pengenalan OJK dan Waspada Investasi dan Perencanaan Keuangan.
- d. **Safari Ramadhan bagi Pengurus dan Anggota DMI, MUI, IPEMI, serta Komunitas Pengusaha Kota Bogor**  
Kegiatan Safari Ramadhan terakhir tahun ini menyoar segmen Pengurus dan Anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), dan pelaku usaha Kota Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 107 orang peserta yang mendapatkan paparan materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi. Selain itu, peserta juga menerima materi Perencanaan Keuangan.

## H. Pengembangan Infrastruktur

Dalam rangka pengembangan Infrastruktur untuk bidang edukasi sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2018 OJK melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. **Sinergi Edukasi OJK Dengan Kemendikbud Bagi Guru IPS Tingkat SMA dan SMK di Wilayah Palu dan Pulau Flores**  
OJK melaksanakan Kegiatan Sinergi Edukasi OJK Dengan Kemendikbud Bagi Guru IPS Tingkat SMA di Wilayah Palu dan Pulau Flores. Kegiatan tersebut diikuti oleh 86 orang Guru IPS tingkat SMA dari wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parimo dan Poso dan sebanyak 92 guru tingkat SMA dan SMK dari yang berasal dari 9 kabupaten di Pulau Flores, yaitu: Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik, interaktif, dan para peserta antusias menerima pengetahuan baru.
2. **Peluncuran Galeri Investasi Mobile dan Seminar Pasar Modal di Universitas Tadulako Palu**  
OJK bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Galeri Investasi Mobile di Universitas Tadulako, Palu. Upaya membangun Galeri Investasi di berbagai kampus juga didorong untuk mengembangkan literasi dan inklusi sektor pasar modal ke masyarakat. Pengetahuan dan minat masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan di pasar modal perlu dikembangkan melalui

peningkatan pemahaman dan kemudahan akses produk layanan keuangan di sektor tersebut. Selain peluncuran Galeri Investasi Mobile, acara dilanjutkan dengan Seminar Pasar Modal di Indonesia. Dalam acara tersebut, dilakukan pengukuran peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan.

## 3. Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Pemerintah

- a. **Edukasi dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan dan Surabaya**  
Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah yaitu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), OJK menyelenggarakan penguatan edukasi dan sosialisasi (edusos) BPNT bagi perangkat daerah, pendamping BPNT, dan pengelola agen bank penyalur yang berasal dari 83 kota/kabupaten pada 19 provinsi di Indonesia. Rangkaian edukasi dan sosialisasi BPNT ini diselenggarakan di Jakarta, Medan, dan Surabaya, dengan secara khusus menyoar peserta pada daerah perluasan BPNT tahap 2, 3, dan 4. Materi yang disampaikan meliputi Arah dan Kebijakan Bantuan Sosial Pangan, Mekanisme BPNT, dan dilengkapi dengan diskusi kelompok terkait isu utama dalam program BPNT serta pengayaan seputar literasi keuangan dan waspada investasi.
- b. **Hari Konsumen Nasional 2018 di Pangkalpinang**  
Dalam rangka berpartisipasi pada peringatan Hari Konsumen Nasional 2018 di Pangkalpinang yang bertema “Konsumen Cerdas di Era Ekonomi Digital”, OJK membuka layanan SLIK agar masyarakat dapat mengetahui informasi kredit yang mereka miliki pada industri jasa keuangan sekaligus memberikan saran/masukan apabila terdapat informasi kredit macet. Pengenalan OJK dan waspada investasi di tengah masyarakat umum dengan membagikan brosur, flyer, majalah dan mengadakan *mini-games* seputar tugas dan fungsi OJK, layanan Konsumen 157 serta mengetahui akses informasi dan referensi jika ada penawaran investasi dari perusahaan yang menghimpun dana masyarakat.

4. Aktivitas Sosial Media



Untuk meningkatkan efektivitas publikasi materi literasi dan/atau informasi keuangan lainnya kepada masyarakat luas, OJK telah memanfaatkan beberapa media digital melalui *minisite* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> dan media sosial *sikapiuangmu* pada Facebook, Twitter, dan Instagram. Tujuan dari pembuatan infografis tersebut adalah untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap OJK, IJK, maupun produk keuangan.

Sepanjang triwulan II-2018, telah diterbitkan sebanyak 13 artikel dengan 49.538 jumlah pengunjung. Artikel tersebut sesuai dengan tema

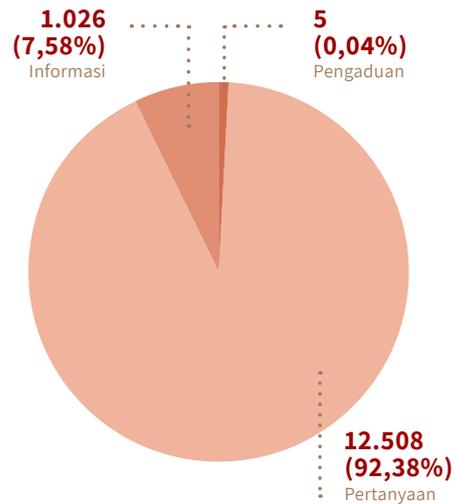
dan isu terkini dengan ilustrasi serta infografis yang menarik pada *minisite* dan media sosial.

2.5.4 Perlindungan Konsumen

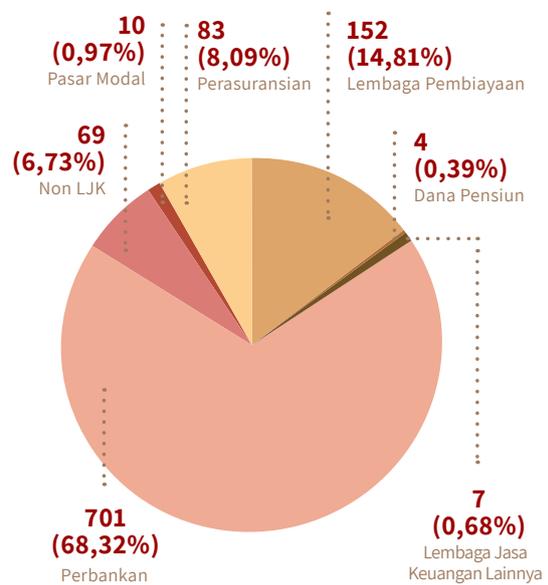
A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan II-2018, layanan konsumen OJK menerima 13.539 layanan yang terdiri dari 1.026 penerimaan informasi, 12.508 pertanyaan dan lima pengaduan.

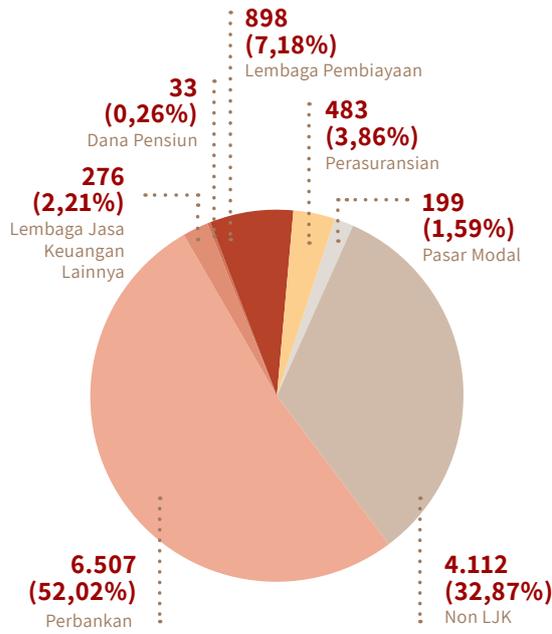
Grafik II - 14 Layanan Masuk Triwulan II-2018



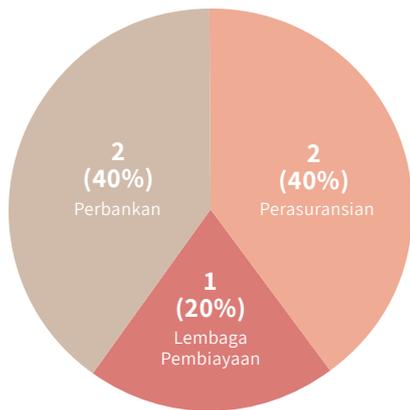
Grafik II - 15 Informasi per Sektor Triwulan II-2018



**Grafik II - 16** — Pertanyaan per Sektor Triwulan II-2018



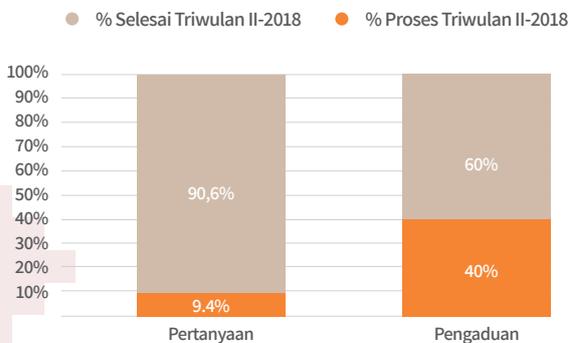
**Grafik II - 17** — Pengaduan per Sektor Triwulan II-2018



Sumber : OJK

Pada triwulan II-2018, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 90,6% (11.329 layanan), layanan pengaduan selesai 60,0% (tiga pengaduan).

**Grafik II - 18** — Grafik Tingkat Penyelesaian Layanan Triwulan II - 2018

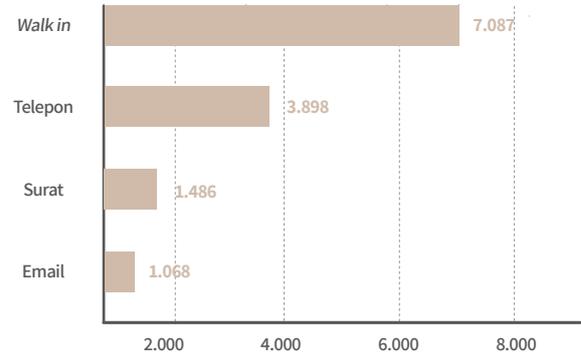


Sumber : OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan

berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, faksimili dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen sebagai berikut:

**Grafik II - 19** — Kanal Layanan Triwulan II - 2018



Sumber : OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan II - 2018, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK dengan *walk in* atau datang langsung ke kantor OJK.

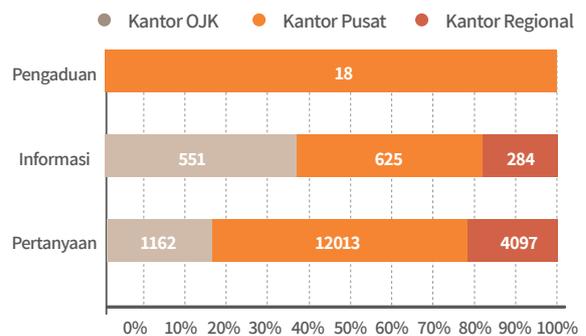
**Tabel II - 53** — Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	8.766
Kantor Regional	1.763
Kantor OJK	3.010
<b>Total</b>	<b>13.539</b>

Sumber : OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 65% dari total penerimaan layanan pada triwulan II-2018.

**Grafik II - 20** — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



## B. Layanan Informasi Debitur

Masyarakat yang ingin memperoleh Informasi mengenai debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya dapat mendatangi pusat layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di kantor-kantor OJK seluruh Indonesia pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK adalah cakupan Informasi yang lebih luas dan tidak lagi terbatas hanya pada industri perbankan. Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR dan 142 BPRS 32 Lembaga Pembiayaan, lima Perusahaan Modal Ventura, delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan satu Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut yang diberikan melalui *platform* informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi *iDeb Viewer*.

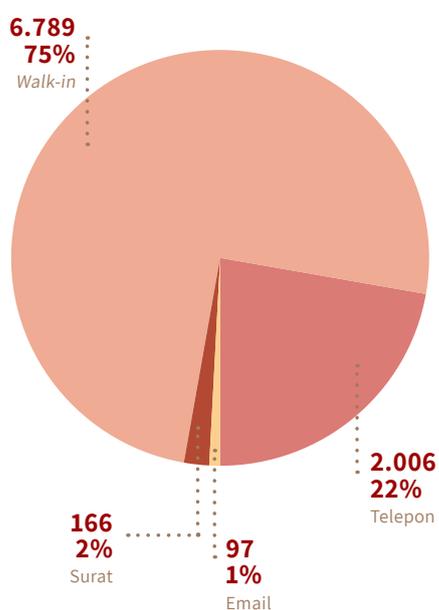
Pada triwulan II-2018, sebanyak 9.058 masyarakat telah menerima layanan SLIK baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor OJK maupun *call center*. Permintaan Informasi yang dilayani antara lain mengenai data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. SLIK juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/ pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

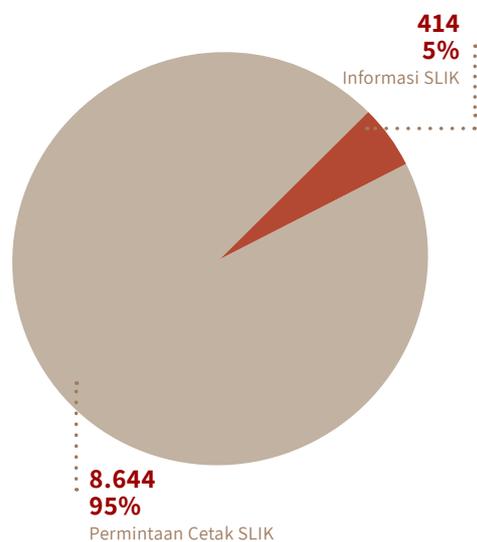
## C. Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan II-2018, OJK melakukan dua kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di Solo dan Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan Asistensi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sesuai Perubahan PDK No.1/PDK.07/2016, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan pengaduan dan meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM serta penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS. Peserta yang hadir berjumlah 70 orang dan merupakan perwakilan dari PUJK dan internal OJK. Materi yang disampaikan terkait statistik dan data perkembangan penanganan pengaduan penggunaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (Sistem *Customer Relationship Management* atau CRM) dan proses penanganan pengaduan di wilayah Kantor OJK dan Kantor Regional OJK. Selain itu, materi yang disampaikan kepada PUJK adalah terkait kewajiban penanganan pengaduan di internal PUJK, Sosialisasi Perlindungan Konsumen serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Grafik II - 21 — Data SLIK Triwulan II - 2018



Grafik II - 22 — Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK



## D. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan II-2018, OJK melaksanakan dua kegiatan untuk memperkuat infrastruktur perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan *Coffee Morning* bersama *Working Group Internal Dispute Resolution*, yang merupakan acara diskusi mengenai isu skimming yang berhubungan dengan *e-banking* dalam rangka meningkatkan upaya pengamanan dan pemenuhan prinsip kehati-hatian yang berkelanjutan bersama. Selain itu OJK melaksanakan Sosialisasi Perlindungan Konsumen SJK kepada akademisi dan mahasiswa di Universitas Sam Ratulangi, Manado dengan narasumber internal OJK dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI). Materi sosialisasi yang disampaikan

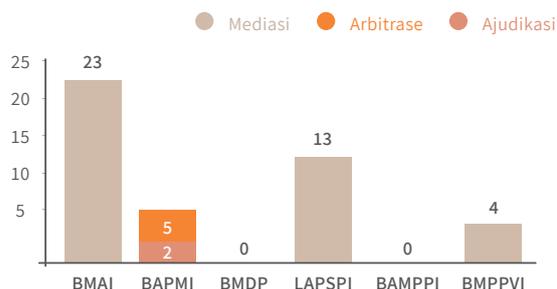
kepada 141 peserta tersebut mengenai OJK dan peran OJK dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS, serta perkembangan *financial technology* di Indonesia.

## 2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

### A. Monitoring LAPS di Sektor Jasa Keuangan

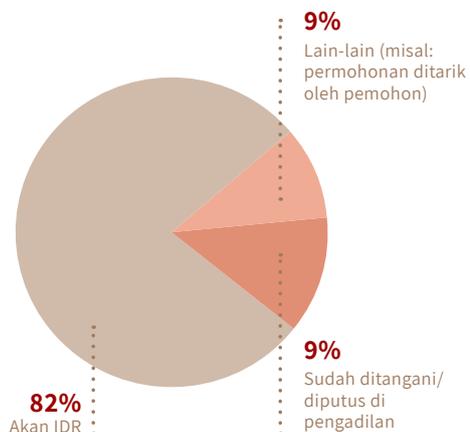
Sampai dengan periode pelaporan, data penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS pada semester I-2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik II - 23** — Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS



Selain total 47 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima dan diproses oleh LAPS tersebut di atas, terdapat total 11 permohonan sengketa lain yang ditolak oleh LAPS dan akan diselesaikan melalui IDR.

**Grafik II - 24** — Alasan Penolakan Permohonan Penyelesaian Sengketa



### B. Roadmap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022)

Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang berkelanjutan, OJK memiliki cita-cita untuk mewujudkan LAPS terintegrasi di sektor jasa keuangan pada 2020. Rangkaian upaya penggabungan dimaksud dimulai dengan penyusunan *Roadmap* “Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022).

Misi *Roadmap* “Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022)” adalah terselenggaranya layanan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan Indonesia yang kredibel. Ada dua visi yang hendak dicapai untuk mewujudkan misi tersebut. Visi pertama mewujudkan LAPS di sektor jasa keuangan yang aksesibel, independen, adil, efektif dan efisien, yang dipercaya oleh masyarakat, konsumen, dan pelaku usaha jasa keuangan. Visi Kedua terbentuknya LAPS yang terintegrasi di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kedua visi tersebut, OJK telah menyusun beberapa program kerja terkait LAPS yang sedang dan akan dilaksanakan sepanjang periode 2018-2022.

### C. Sosialisasi Prospek Penyelesaian Sengketa Melalui LAPSPI dan Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase LAPSPI

Dalam rangka memperkuat keyakinan PUJK perbankan sebagai anggota dan *stakeholders* LAPSPI, OJK dan LAPSPI bekerja sama menyelenggarakan Sosialisasi Prospek Penyelesaian Sengketa Melalui LAPSPI dan Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase LAPSPI di Jakarta. Peserta sosialisasi sebanyak 150 orang yang merupakan perwakilan dari PUJK perbankan anggota LAPSPI. Materi yang disampaikan terkait mengenai latar belakang dan definisi manajemen risiko hukum dalam meningkatkan efisiensi industri perbankan, manfaat penyelesaian sengketa melalui LAPS, kesempatan LAPSPI sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta kebijakan dan sikap Mahkamah Agung terkait putusan arbitrase dalam rangka penegakan kontrak.

### D. Sosialisasi Meningkatkan Fungsi Mediasi Sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Pembiayaan, Pergadaian, dan Modal Ventura

Sebagai salah satu dukungan OJK untuk memperkuat LAPS di sektor jasa keuangan, OJK bekerja sama dengan Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Modal Ventura (BMPPVI) menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “meningkatkan fungsi mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura”. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan industri pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura dan konsumen dalam memanfaatkan layanan BMPPVI serta agar para pihak dapat secara optimal memanfaatkan layanan mediasi BMPPVI, mengetahui kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan dapat melaksanakan hasil kesepakatan melalui mediasi. Sosialisasi dihadiri oleh 107 peserta perwakilan dari PUJK pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura yang merupakan anggota BMPPVI.

## 2.5.6 Market Conduct

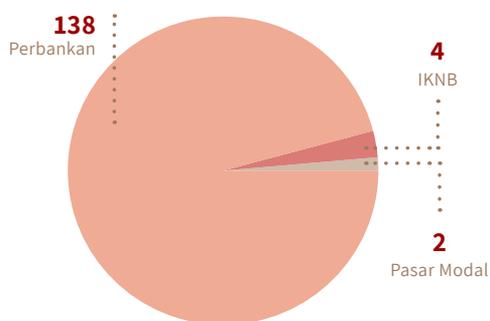
### A. Pengawasan Market Conduct

Pada triwulan II-2018, OJK melanjutkan pemeriksaan tematik (*thematic surveillance*) secara *onsite* sebagai bagian *pilot project* pengawasan *market conduct* terhadap empat Bank Pembangunan Daerah, dua bank umum konvensional dan satu bank umum syariah dan dua perusahaan pembiayaan. Tema kegiatan pemeriksaan tematik *market conduct* fokus pada aspek perlindungan konsumen pada perjanjian baku. Dalam pemeriksaan tematik *market conduct*, OJK melakukan *review* konten dan format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) agar seimbang, adil, dan wajar serta tidak mengandung unsur eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan, sesuai POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku. Secara umum, OJK masih menemukan klausula eksonerasi, tidak adil, tindakan sepihak dan ketundukan nasabah pada ketentuan yang akan berlaku. Selain itu, dalam implementasi masih terdapat isu transparansi dan praktik PUJK tidak seluruhnya menyampaikan salinan akad pembiayaan/perjanjian kredit kepada nasabah.

### B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan sektor jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Monitoring yang dilakukan mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 144 iklan, di mana sebanyak 96% adalah iklan mengenai Sektor Perbankan (138 iklan) Lima besar produk yang banyak dipasarkan melalui iklan berturut-turut adalah Tabungan, *Internet Banking*, Kartu Kredit, KPR, dan Deposito Berjangka.

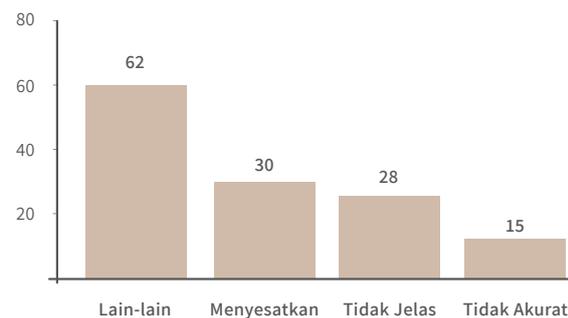
Grafik II - 25 Jumlah Iklan Per Sektor



Dari seluruh iklan tersebut, 61,1% (88 iklan) patut diduga melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Kriteria yang paling

banyak dilanggar berturut-turut adalah Lain-Lain (62), Menyesatkan (30), Tidak Jelas (28), Tidak Akurat (15).

Grafik II - 26 Kategori Dugaan Pelanggaran Iklan SJK



Hingga periode pelaporan, masih ditemukan kecenderungan pelanggaran lebih dari satu kriteria di satu iklan dan iklan PUJK yang belum mencantumkan “Terdaftar dan Diawasi OJK”. Padahal ini menjadi salah satu upaya peningkatan *awareness* masyarakat untuk memilih lembaga keuangan resmi yang jelas legalitasnya.

### 2.5.7 Investor Alert Portal

OJK melakukan update berkala terhadap daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam *Investor Alert Portal* (IAP) sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah potensi kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Untuk mengetahui daftar entitas yang tercantum dalam IAP, masyarakat dapat mengakses *minisite* [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id) atau mengunduh *mobile apps* Sikapiuangmu yang tersedia di *Playstore* dan *Apple Store*.

Sepanjang triwulan II-2018, terdapat 44 entitas baru yang diunggah serta dua entitas yang diperbarui nama dan situsnya sehingga terdapat 193 entitas terdaftar dalam IAP. OJK mengimbau masyarakat tidak melakukan investasi pada entitas-entitas tersebut. OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui telepon 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id), atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) apabila mendapatkan penawaran investasi yang tidak wajar.

## 2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

### 2.6.1 Penanganan Perkara

Fungsi penyidikan yang dilaksanakan oleh OJK mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK, dan SEDK Penyidikan. Pada periode triwulan II-2018, OJK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari dua perkara Perbankan. Berdasarkan hasil proses penyidikan dan gelar perkara, dua berkas perkara perbankan tersebut telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI. Selanjutnya terdapat empat berkas perkara perbankan yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Dengan demikian, OJK

telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

### 2.6.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

OJK secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya penyidik sesuai dengan formasi efektif, penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan Nota Kesepakatan, dan penyelesaian empat kajian terkait di bidang tindak pidana sektor jasa keuangan.

### 2.6.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait antara lain Kejaksaan RI dan Mabes Polri.

### 2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi terkadang tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari penawaran tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

### 2.6.5 Penandatanganan Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi dengan 13 Kementerian/ Lembaga

Pada triwulan II-2018, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi dengan 13 Kementerian/ Lembaga di Jakarta pada 25 Mei 2018. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan 13 Kementerian/ lembaga yang ditandatangani pada triwulan sebelumnya.

### 2.6.6 Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Aparat Penegak Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi (SWI) memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan tim kerja satgas waspada investasi daerah di KR/KOJK. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang

banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM. Pada triwulan II-2018, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan pembekalan tim kerja satgas waspada investasi daerah di propinsi Bali dan kota Cirebon. Selain itu, SWI juga telah melaksanakan inisiasi sosialisasi satgas waspada investasi di kota Bandung.

Selama periode laporan OJK melaksanakan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dengan 13 Kementerian/Lembaga pada 25 Mei 2018. Hal tersebut dibentuk dengan tujuan dalam rangka memperkuat koordinasi terkait penanganan dan pencegahan terjadinya investasi ilegal yang semakin merebak di berbagai bidang.

### 2.6.7 Penyampaian Informasi Melalui Media

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi melakukan siaran pers guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan Entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal yang berindikasi merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa dan elektronik. Pada periode pelaporan triwulan II-2018, SWI melakukan tiga kali siaran pers terkait imbauan kepada masyarakat atas investasi bodong.

### 2.6.8 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode pelaporan di triwulan II-2018, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 24 Entitas yang terdiri dari empat entitas di bidang *forex/futures/trading*, enam entitas di bidang *cryptocurrency*, 12 entitas di bidang *multi level marketing*, dan dua entitas di bidang lainnya. Selanjutnya terdapat empat Entitas yang telah diproses hukum oleh kepolisian.

## 2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

### 2.7.1 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester II Tahun 2017

Sebagai bagian pertanggungjawaban OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) terhadap pelaksanaan penerapan pengawasan program APU PPT Sektor Jasa Keuangan, OJK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor

Jasa Keuangan Tahun 2017. Laporan ini mencakup data statistik terkait hasil pengawasan program APU PPT terhadap Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan (TKM, TKT, dan TKL), hasil analisis sekaligus rekomendasi dalam rangka penguatan pengawasan APU PPT pada sektor jasa keuangan. Salah satu hasil pemeriksaan program APU PPT terkait kewajiban pelaporan adalah penurunan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) telah cukup efektif sehingga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat mengidentifikasi TKM dengan baik. Laporan tersebut sejalan dengan Rekomendasi 33 FATF, di mana suatu negara harus memiliki statistik yang komprehensif terkait hal-hal yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi sistem APU PPT.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi pelaku industri jasa keuangan, dalam periode laporan telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk sosialisasi maupun *workshop* sebagai berikut:

1. **Sosialisasi Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).** Dalam rangka peningkatan *awareness* serta pemahaman dalam pelaksanaan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, OJK mengadakan sosialisasi penerapan program APU PPT bagi sektor IKNB di Jakarta. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan peserta sebanyak 115 orang yang berasal dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Perusahaan Pegadaian baik swasta dan yang dimiliki BUMN, Perusahaan Modal Ventura, perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending (Fintech)* dan beberapa Asosiasi Perusahaan IKNB terkait. Pada sosialisasi tersebut, disampaikan arahan kepada seluruh peserta agar mampu meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko sehingga dapat setara dengan sektor perbankan dan pasar modal.
2. **Sosialisasi Penerapan Program APU PPT pada Perusahaan Modal Ventura Anggota Asosiasi Modal Ventura untuk *Startup* Indonesia (AMVESINDO).** OJK menjadi narasumber dalam Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) kepada Perusahaan Modal Ventura. Sosialisasi ini dilaksanakan di Jakarta dan dihadiri oleh 40 orang perwakilan peserta perusahaan modal ventura dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan dimaksud, OJK menyampaikan pemaparan terkait latar belakang dan dasar ketentuan dari penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dimaksud bertujuan untuk persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER)* terhadap Indonesia sebagai rangkaian dalam pengajuan Indonesia sebagai Anggota dari *Financial Action Task Force (FATF)* pada triwulan I-2019.

3. ***Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).**

*Workshop* pendampingan diselenggarakan melalui kerjasama antara OJK dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran satuan kerja. Kegiatan *workshop* pendampingan ini merupakan bagian dari *recycling program* bagi industri jasa keuangan. *Workshop* pendampingan ini diselenggarakan di Jakarta. Total peserta yang hadir 51 peserta yang merupakan perwakilan BPD seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung tujuan peningkatan efektivitas implementasi penerapan program APU PPT berbasis risiko, maka pada *workshop* tersebut tidak hanya dipaparkan materi, namun juga memberikan simulasi dan studi kasus. Selanjutnya, disampaikan juga materi terkait modus dan tipologi pencucian uang terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mungkin terjadi pada bisnis BPD.

## 2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

### 2.8.1 Kerjasama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan II-2018, OJK menyelenggarakan 50 kegiatan kelembagaan antara lain *Focus Group Discussion (FGD)* mengenai Pembahasan Satgas Waspada Investasi OJK, peta liberalisasi keuangan global dan kawasan ASEAN, pendampingan kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja, yang melibatkan beberapa lembaga Negara dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

OJK melaksanakan Sosialisasi bersama Anggota Komisi XI DPR RI antara lain terkait pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia, pencegahan terhadap maraknya praktek investasi bodong, peran OJK dalam mencegah investasi fiktif di Indonesia, akses keuangan bagi masyarakat desa, peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi era digital, peran OJK dalam membuka akses keuangan untuk generasi muda dan peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat pertanian.

## 2.8.2 Kerjasama Internasional

### A. Penyelesaian Negosiasi dalam rangka Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan kerjasama internasional, diperlukan penyelesaian negosiasi mengenai peningkatan komitmen jasa keuangan di ASEAN yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan Sektor Non-Bank dalam Paket ke-8 AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*);
2. Tindak lanjut negosiasi dalam lingkup ABIF (*ASEAN Banking Integration*) Framework; dan
3. Peningkatan peran OJK pada perundingan sektor jasa keuangan dalam kelompok kerja ASEAN (WC-CMD, WC-FSL, WC-FINC, AIFo, ACFM, dll)

Adapun pada triwulan II-2018 partisipasi aktif OJK dalam upaya Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEAN antara lain dituangkan kegiatan kelompok kerja ASEAN WC-FSL, di Bangkok.

### B. Penguatan Peran OJK dalam hubungan internasional.

Pada triwulan II-2018, terdapat satu perjanjian kerjasama internasional, yang ditandatangani yaitu Kerjasama OJK dengan *International Finance Cooperation (IFC)* terkait: (i) Nota kesepahaman (sebagai payung dari perjanjian kerjasama); dan (ii) Perjanjian kerjasama tentang pengembangan dan implementasian kebijakan dan peraturan keuangan berkelanjutan yang sudah ditandatangani pada 19 April 2018. OJK juga dalam proses yang melaksanakan MoU dengan *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* dan Bank of Thailand telah mencapai tahap penyampaian kepada *counterparts* dan finalisasi.

### C. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan international counterparts, antara lain:

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kerjasama dengan *international counterparts*, pada triwulan II-2018 OJK melaksanakan pemenuhan kewajiban OJK terhadap *international standard setting bodies* dan kebutuhan permintaan informasi *counterpart* internasional. OJK mengirimkan delapan *draft* kepada *counterparts* yaitu :

1. Tanggapan terhadap *annex developments in ASEAN+3 Economies*;
2. Tanggapan terhadap survei FSB *Trade Repositories (TR)*;
3. Tanggapan terhadap *draft questionnaire thematic peer review of resolution planning FSB (financial stability board)*;
4. Tanggapan terhadap *financial stability board key attributes assesment methodology for the insurance sector*;

5. Tanggapan terhadap *draft minutes of the 32nd meeting of the council and the 16th general assembly of the islamic financial services board*
6. Tanggapan terhadap pertanyaan tambahan *second round review of exchange of information on request (EOIR)* Indonesia;
7. Tanggapan atas survey IFSB terkait *Financial Inclusion and Islamic Finance*; dan
8. Tanggapan atas survey IFSB terkait *Membership Expectation*.

### D. Penyelenggaraan Event Internasional

Pada triwulan II-2018, telah terselenggara lima kegiatan yaitu:

1. OJK menerima kunjungan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Consultation Visit* perihal perkembangan di sektor perbankan dan pasar modal;
2. OJK menerima kunjungan dalam rangkaian kegiatan *workshop Macquarie ASEAN Banking Tours*. Adapun kegiatan tersebut membahas perihal pandangan OJK terhadap perkembangan sektor perbankan di Indonesia;
3. OJK menerima kunjungan Lembaga Simpan Pinjam (LPS) dan *International Monetary Fund (IMF)*. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka *Capacity building* terkait *benchmarking* manajemen krisis;
4. OJK menerima kunjungan kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paramaribo dalam rangka studi Suriname terkait Pengawasan Perbankan di Indonesia; dan
5. OJK menerima kunjungan *Singapore Economics & Management Institute* perihal persiapan kunjungan delegasi Tailong Bank dalam melaksanakan *workshop* perihal pengawasan perbankan dan kemajuan keuangan digital.

Halaman ini sengaja di kosongkan

## BAB 3

# TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH



## Pengembangan

---



Penyusunan *Master Plan* Pengembangan Ekonomi Syariah



Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) atas Aset-Aset yang Berasal dari Transaksi Syariah



Kajian Skema Sukuk

## Event

---



*iB Research Fellowship Program* 2018 dengan tema “Transformasi Perbankan Syariah”



Kegiatan *iB Vaganza* di Bandung, *Workshop* Guru SMA/ sederajat di Palu dan *ToT* Keuangan Syariah di Kupang



Sosialisasi IKNB Syariah di Pontianak dan Surabaya

### 3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

#### 3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Kondisi ketahanan perbankan syariah secara umum pada triwulan II-2018 semakin solid, tercermin dari menguatnya permodalan bank dengan CAR yang tumbuh 212 bps (*qtq*) dari triwulan I-2018 menjadi 20,59%. Menguatnya permodalan tersebut didukung oleh meningkatnya rentabilitas dengan ROA sebesar 10 bps (*qtq*) menjadi sebesar 1,69% dan efisiensi yang membaik dengan turunnya BOPO sebesar 87 bps (*qtq*) menjadi sebesar 84,78%. Fungsi intermediasi perbankan selama

triwulan II-2018 tetap tumbuh meskipun lambat dengan laju pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 3,00% (*qtq*) dan 0,35% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 1,16% (*qtq*). Selain itu, risiko kredit perbankan syariah juga membaik dengan menurunnya *NPF gross* sebesar 58 bps (*qtq*) menjadi sebesar 3,28% dan menurunnya *NPF net* sebesar 31 bps (*qtq*) menjadi 1,88%.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Pertumbuhan ( <i>qtq</i> ) Triwulan I-2018		Pertumbuhan ( <i>qtq</i> ) Triwulan II-2018		Pertumbuhan ( <i>yoy</i> ) Triwulan II-2018	
				Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
<b>BUS + UUS + BPRS</b>									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp. T)	387,87	439,32	444,43	4,29	+ 0,99	5,11	+ 1,16	56,56	+ 14,58
Share Aset Perbankan Syariah (BUS + UUS + BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS + BUK + BPRS + BPR)	5,42	5,80	5,71	-	+ 0,02	-	- 0,10	-	+ 0,28
DPK (Rp. T)	308,05	347,15	348,38	5,45	+ 1,59	1,23	+ 0,35	40,33	+ 13,09
Pembiayaan (Rp. T)	272,84	294,70	303,54	1,24	+ 0,42	8,84	+ 3,00	30,70	+ 11,25
Jumlah NPF (Rp. T)	11,39	11,94	10,68	0,12	+ 0,98	-1,26	-10,57	- 0,71	- 6,27
Jumlah Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BUS	13	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- UUS	21	21	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BPRS	167	167	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kantor	2.641	2.620	2.634	10,00	0,38	14,00	0,53	- 7,00	- 0,27
<b>Rasio Keuangan BUS &amp; UUS</b>									
NPF Gross (%)	3,99	3,86	3,28	-	- 0,01	-	- 0,58	-	- 0,71
NPF Net (%)	2,46	2,19	1,88	-	+ 0,06	-	- 0,31	-	- 0,58
ROA (%)	1,49	1,59	1,69	-	+ 0,42	-	+ 0,10	-	+ 0,21
BOPO (%)	87,13	85,65	84,78	-	- 3,97	-	- 0,87	-	- 2,36
FDR (%)	87,85	84,32	86,46	-	- 0,99	-	- 2,14	-	- 1,39
<b>BUS</b>									
Total Aset BUS (Rp. T)	271,83	294,27	294,32	6,24	+ 2,17	0,05	+ 0,02	22,49	+ 8,27
DPK (Rp. T)	224,42	244,82	241,07	6,60	+ 2,77	- 3,75	- 1,53	16,65	+ 7,42
Pembiayaan (Rp. T)	185,57	190,06	189,68	0,27	+ 0,14	- 0,39	- 0,20	4,11	+ 2,21
Jumlah NPF (Rp. T)	8,29	8,67	7,27	-0,38	- 4,15	- 1,40	- 16,18	- 1,02	- 12,34
CAR (%)	16,42	18,47	20,59	-	- 0,56	-	+ 2,12	-	+ 4,17
NPF Gross (%)	4,47	4,56	3,83	-	- 0,20	-	- 0,73	-	- 0,64
ROA (%)	1,10	1,23	1,37	-	- 0,59	-	+ 0,14	-	+ 0,27
BOPO (%)	90,98	89,90	88,75	-	- 5,01	-	- 1,16	-	- 2,23
FDR (%)	82,69	77,63	78,68	-	- 2,02	-	+ 1,05	-	- 4,01
Jumlah Kantor	1.849	1.822	1.826	- 3,00	- 0,16	4,00	0,22	- 23,00	- 1,24
<b>UUS</b>									
Total Aset UUS (Rp. T)	106,37	133,93	138,88	-2,22	- 1,63	4,95	+ 3,70	32,52	+ 30,57
DPK (Rp. T)	77,59	95,09	100,14	-1,41	+ 1,46	5,05	+ 5,31	22,55	+ 29,06
Pembiayaan (Rp. T)	79,75	96,56	105,34	0,65	+ 0,68	8,79	+ 9,10	25,60	+ 32,10
Jumlah NPF (Rp. T)	2,29	2,38	2,40	0,36	+ 17,55	0,02	+ 0,98	0,11	+ 4,81
NPF Gross (%)	2,87	2,46	2,28	-	+ 0,35	-	- 0,18	-	- 0,59
ROA (%)	2,49	2,40	1,43	-	- 0,07	-	- 0,98	-	- 1,06
BOPO (%)	75,08	72,64	72,62	-	- 1,51	-	- 0,02	-	- 2,46
FDR (%)	102,78	101,54	105,19	-	+ 2,15	-	+ 3,65	-	- 2,42
Jumlah Kantor	336	348	349	4,00	1,16	1,00	0,29	13,00	3,87
<b>BPRS</b>									
Total Aset BPRS (Rp. T)	9,67	11,11	11,22	0,27	+ 2,53	0,11	+ 0,98	1,55	+ 16,04
DPK (Rp. T)	6,04	7,25	7,17	0,26	+ 3,70	-0,08	- 1,10	1,12	+ 18,60
Pembiayaan (Rp. T)	7,52	8,08	8,52	0,31	+ 4,04	0,44	+ 5,49	1,00	+ 13,31
Jumlah NPF (Rp. T)	0,81	0,89	1,00	0,14	+ 18,09	0,12	+ 13,27	0,20	+ 24,66
CAR (%)	20,62	20,60	19,96	-	- 0,21	-	- 0,64	-	- 0,66
NPF Gross (%)	10,71	10,98	11,78	-	+ 1,30	-	+ 0,80	-	+ 1,07
ROA (%)	2,24	2,38	2,41	-	- 0,17	-	+ 0,03	-	+ 0,17
BOPO (%)	86,50	84,23	85,97	-	- 1,11	-	+ 1,74	-	- 0,53
FDR (%)	124,47	111,53	118,91	-	+ 0,41	-	+ 7,38	-	- 5,55
Jumlah Kantor	456	450	459	9,00	2,04	-458,00	2,00	3,00	0,66

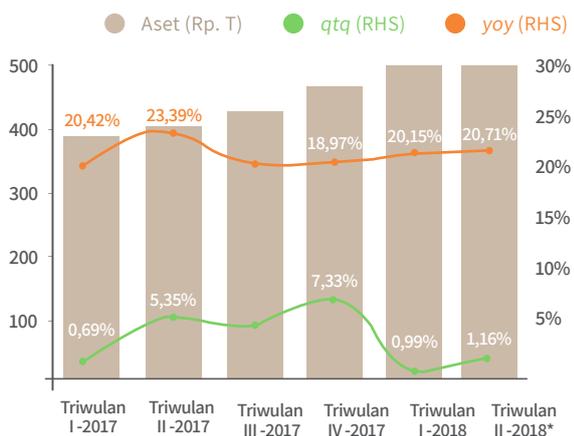
Sumber : OJK, SPS Juni 2018

## A. Aset

Aset perbankan syariah pada triwulan II-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 1,16% (*qtq*) dan secara tahunan masih terjaga (14,58%, *yoy*). Pertumbuhan aset pada triwulan II-2018 ini mengalami perlambatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (5,35%, *qtq*), sehingga pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional pada triwulan II-2018 sebesar 5,71%, menurun dibandingkan triwulan I-2018 yang sebesar 5,80%. Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 66,22%, 31,25%, dan 2,53%. Kontributor terbesar pertumbuhan aset perbankan syariah merupakan UUS yang mampu tumbuh 3,70% (*qtq*), sementara BUS dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,02% (*qtq*) dan 0,98% (*qtq*).

Komponen utama aset perbankan syariah yaitu pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 68,30%, penempatan pada Bank Indonesia (11,50%), dan surat berharga yang dimiliki (13,46%). PYD tumbuh dengan laju yang cukup terjaga (3,00% *qtq*, atau 11,25% *yoy*). Sementara itu, penempatan pada Bank Indonesia mengalami penurunan secara triwulanan (-19,97% *qtq*) meski secara tahunan meningkat (8,52% *yoy*). Di lain pihak, penempatan pada surat berharga yang dimiliki perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan (18,15% *qtq*, atau 65,56% *yoy*). Di sisi pasiva, pertumbuhan aset dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan modal, yang masing-masing meningkat sebesar 0,35% (*qtq*) dan 21,23% (*qtq*). Tingginya peningkatan modal utamanya didorong oleh peningkatan modal disetor sebesar Rp6,20 triliun selama triwulan II-2018.

**Grafik III - 1** — Tren Aset Perbankan Syariah



Sumber : SPS, Juni 2018

## B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,31% dari total sumber dana perbankan syariah, diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,84%, liabilitas kepada bank lain sebesar 1,94% dan surat

berharga yang diterbitkan sebesar 1,71% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan II-2018.

**Grafik III - 2** — Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah

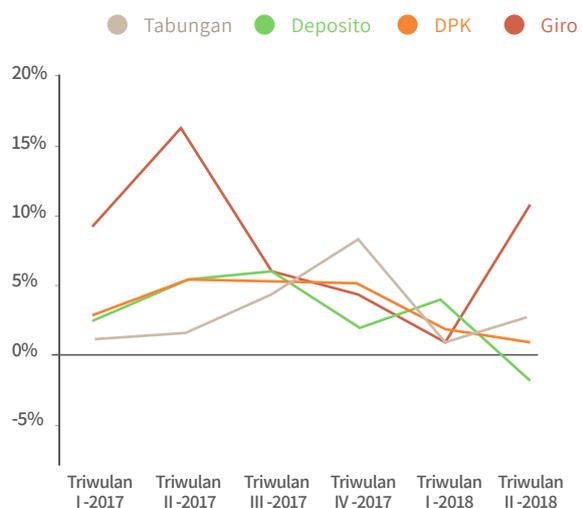


Sumber : SPS, Juni 2018

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan II-2018 tumbuh tertahan pada level 0,40% (*qtq*), meski secara tahunan peningkatan berada pada level 13,09% (*yoy*). DPK tumbuh 0,35% (*qtq*), melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (18,81%, *yoy*). Pertumbuhan DPK di triwulan II-2018 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai pertumbuhan 5,43% (*qtq*) atau 25,06% (*yoy*).

Perlambatan tersebut dipengaruhi melambatnya pertumbuhan giro dan deposito dari triwulan II-2017 yang masing-masing sebesar 17,47% (*qtq*) dan 5,48% (*qtq*) menjadi masing-masing sebesar 10,97% (*qtq*) sementara deposito justru menurun dengan laju -2,78% (*qtq*). Namun, tabungan tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 1,13% (*qtq*) menjadi 2,51% (*qtq*).

**Grafik III - 3** — Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber : SPS, Juni 2018

### C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah tumbuh 3,00% (*qtq*), lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan I-2018 yang tumbuh sebesar 0,42% (*qtq*). Berdasarkan jenis penggunaannya, pada triwulan II-2018 pembiayaan investasi tumbuh melambat pada periode laporan (0,89%, *qtq*) dibandingkan triwulan I-2018 (1,11%, *qtq*). Sementara itu, perbaikan terjadi pada pembiayaan konsumsi yang tumbuh 2,72% (*qtq*), meningkat dibandingkan triwulan I-2018 yang tumbuh 2,24% (*qtq*). Sama halnya dengan pembiayaan modal kerja juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar

4,79% (*qtq*), meningkat dibandingkan triwulan I-2018 yang justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,20% (*qtq*).

Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 42,42% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 34,70% dan 22,88%. Porsi ini mengalami pegeseran dibandingkan triwulan I-2018 yang memiliki komposisi pembiayaan konsumsi, modal kerja, dan investasi masing-masing sebesar 42,53%, 34,11%, dan 23,36%.

Tabel III - 2 — Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

	Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
					Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
Modal Kerja	95.710	100.520	105.336	+ 34,70%	8,16%	- 2,20%	4,79%	13,64%	13,60%	10,06%
Investasi	64.888	68.832	69.444	+ 22,88%	5,42%	1,11%	0,89%	13,93%	11,83%	7,02%
Konsumsi	112.239	125.348	128.762	+ 42,42%	4,37%	2,24%	2,72%	28,33%	16,56%	14,72%
<b>Total</b>	<b>272.838</b>	<b>394.699</b>	<b>325.061</b>	<b>+ 100,00%</b>	<b>5,92%</b>	<b>0,42%</b>	<b>3,00%</b>	<b>19,33%</b>	<b>14,41%</b>	<b>11,25%</b>

Sumber : SPS, Juni 2018

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan ekonomi yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 57,66% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan II-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 3,12% (*qtq*) atau 8,78% (*yoy*). Pertumbuhan yang cukup tinggi ini dikontribusikan oleh sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh sebesar 21,76% (*qtq*) atau meningkat Rp2,43 triliun (*qtq*).

Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 14,71% (*qtq*) atau mengalami peningkatan sebesar Rp1,53 triliun (*qtq*). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh 6,97% (*qtq*) atau meningkat Rp1,49 triliun (*qtq*).

Sementara itu, pada sektor non-produktif, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 3,03% (*qtq*), melambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan II-2017 yang mampu tumbuh sebesar 4,47% (*qtq*). Pada sektor ini, penurunan pertumbuhan triwulanan terbesar terjadi pada pembiayaan untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang pada triwulan yang sama tahun sebelumnya mampu tumbuh sebesar 8,03% (*qtq*) dan 5,22% (*qtq*). Sementara itu, pada triwulan II-2018 hanya mampu tumbuh 2,38% (*qtq*) dan 0,77% (*qtq*). Pertumbuhan pembiayaan pemilikan rumah tinggal dan pemilikan flat/apartemen menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari triwulan II-2017 yang masing-masing sebesar 3,74% (*qtq*) dan 6,18% (*qtq*) hingga pada triwulan II-2018 masing-masing mencapai 4,65% (*qtq*) dan 7,07% (*qtq*).

Tabel III - 3 ——— Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS & UUS (Rp Miliar)	Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
					Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan II-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
Lapangan Usaha	156.389	164.973	17.122	57,66%	7,11%	-1,02%	3,12%	14,02%	12,99%	8,78%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	9.847	10.396	11.924	4,04%	3,82%	-0,23%	14,71%	25,75%	9,61%	21,10%
Perikanan	1.350	1.048	1.191	0,40%	-9,54%	-28,36%	13,70%	-2,15%	-29,79%	-11,75%
Pertambangan dan Penggalian	7.085	6.551	5.555	1,88%	3,70%	-4,56%	-15,21%	12,45%	-4,12%	-21,61%
Industri Pengolahan	20.558	21.440	22.934	7,77%	2,51%	-0,10%	6,97%	12,34%	6,91%	11,56%
Listrik, Gas, dan Air	7.085	11.150	13.576	4,60%	-4,90%	0,96%	21,76%	9,05%	34,96%	72,80%
Konstruksi	19.782	21.273	22.033	7,47%	37,29%	-4,16%	3,57%	82,74%	47,64%	11,38%
Perdagangan Besar dan Eceran	30.450	32.472	32.935	11,16%	3,85%	-1,12%	1,43%	7,00%	10,75%	8,16%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.489	3.730	4.125	1,40%	1,87%	3,24%	10,58%	26,08%	8,89%	18,21%
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	11.028	9.833	9.841	3,34%	6,18%	-2,51%	0,05%	-2,34%	-5,33%	-10,77%
Perantara Keuangan	19.385	18.590	17.769	6,02%	7,07%	-5,07%	-4,42%	-1,08%	2,68%	-8,34%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	11.657	12.218	12.217	4,14%	2,67%	-0,88%	-0,01%	13,21%	7,60%	4,80%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9	5	4	0,00%	13,25%	-26,23%	-24,36%	-96,52%	-32,37%	-54,83%
Jasa Pendidikan	4.390	4.794	4.947	1,68%	6,89%	-2,27%	3,18%	27,75%	16,73%	12,68%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.511	3.981	3.862	1,31%	8,76%	-0,99%	-2,98%	28,93%	23,31%	10,00%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	4.895	6.699	6.454	2,19%	8,33%	34,70%	-3,66%	6,11%	48,27%	31,85%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	343	331	354	0,12%	4,22%	-0,26%	6,99%	1,46%	0,39%	3,06%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0,00%	-	-	-	-100,00%	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	752	462	402	0,14%	9,28%	-14,27%	-12,93%	-51,10%	-32,91%	-46,54%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	106.214	118.787	122.389	41,48%	4,47%	2,24%	3,03%	30,03%	16,84%	15,23%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	55.363	62.321	65.221	22,11%	3,74%	2,73%	4,65%	18,92%	16,77%	17,80%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	1.632	2.092	2.240	0,76%	6,18%	6,94%	7,07%	14,32%	36,08%	37,22%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.086	3.119	3.121	1,06%	-1,97%	-0,72%	0,05%	4,12%	-0,90%	1,14%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.303	9.779	10.012	3,39%	8,03%	-3,39%	2,38%	7,89%	13,55%	7,61%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	36.829	41.476	41.796	14,17%	5,22%	2,91%	0,77%	66,57%	18,50%	13,49%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2.715	2.861	2.510	0,85%	-5,16%	0,93%	-12,27%	-18,46%	-0,04%	-7,54%
<b>Total</b>	<b>265.317</b>	<b>286.621</b>	<b>295.021</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,32%</b>	<b>2,93%</b>	<b>19,42%</b>	<b>14,40%</b>	<b>15,20%</b>

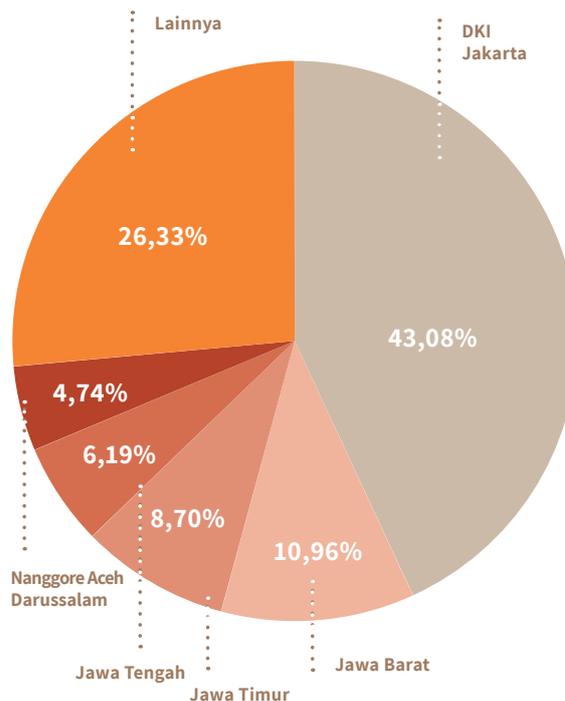
Sumber : SPS, Maret 2018

Kualitas pembiayaan bank syariah membaik, yang terlihat dari rasio NPF *Gross* triwulan II-2018 yang terjaga pada angka 3,28%, menurun dibandingkan posisi triwulan I-2018 yang sebesar 3,86%. Secara umum, perbaikan pembiayaan macet terjadi pada hampir semua sektor dengan rata-rata penurunan NPF *Gross* sebesar -1,52% dari 23 sektor ekonomi. Sektor ekonomi produktif (lapangan usaha) menunjukkan perbaikan NPF *Gross* sebesar 0,91% (*qtq*) dari triwulan I-2017 yang sebesar 5,42% menjadi sebesar 4,33% pada triwulan II-2018. Perbaikan NPF sektor ekonomi produktif didorong oleh turunnya NPF pada sektor-sektor utama, di antaranya sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 3,95% (*qtq*) menjadi sebesar 1,82% pada triwulan II-2018, sektor Listrik, Gas, dan Air mengalami penurunan sebesar 3,49% (*qtq*) menjadi sebesar 4,16%, dan sektor Industri Pengolahan yang turun sebesar 1,29% (*qtq*) menjadi sebesar 4,55%.

Perbaikan juga terjadi pada sektor ekonomi rumah tangga yang pada triwulan I-2018 memiliki NPF *Gross* sebesar 1,95% menjadi 1,80% pada triwulan II-2018. Perbaikan pada sektor ekonomi konsumsi (rumah tangga) utamanya terjadi seiring dengan menurunnya NPF pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal sebesar -0,23% (*qtq*) menjadi 2,10%, Apartemen/Flat sebesar -0,50% (*qtq*) menjadi 1,37%, serta penurunan NPF pembiayaan untuk Pemilikan Ruko atau Rukan sebesar -0,80% (*qtq*) menjadi 4,23%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 70,05%, khususnya DKI Jakarta (43,08%), Jawa Barat (10,96%), Jawa Timur (8,70%), dan Jawa Tengah (6,19%). Sementara provinsi yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nanggroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 4,74%. Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya terutama Bagian Timur Indonesia, serta sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

**Grafik III - 4** ———— Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber : SPS, Juni 2018

#### D. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR yang selalu terjaga dalam threshold. Pada triwulan II-2018, FDR perbankan syariah sebesar 86,46%, meningkat 2,14% (*qtq*) dibandingkan triwulan I-2018 yang sebesar 84,32%. Namun demikian, secara tahunan FDR menurun sebesar 1,39 (*yoy*) dari triwulan II-2017 yang sebesar 87,85%.

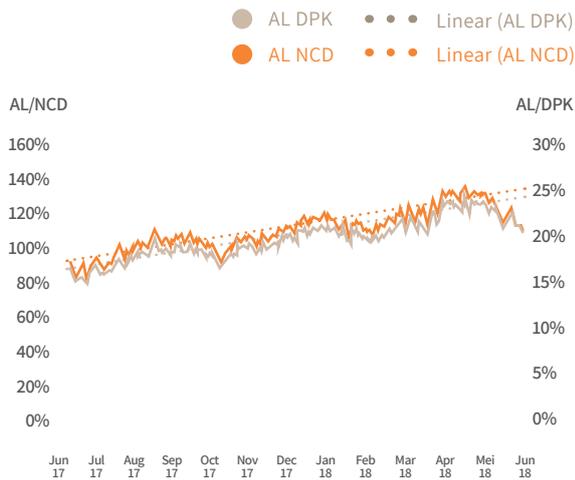
Peningkatan FDR selama triwulan II-2018 didorong oleh peningkatan FDR BUS maupun UUS yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,05% (*qtq*) dan 3,65% (*qtq*). Peningkatan juga terjadi pada FDR BPRS yang pada triwulan I-2017 sebesar 111,53% menjadi sebesar 118,91% pada triwulan II-2018.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/ NCD selama triwulan II-2018 sebesar 134,04%, menurun dibandingkan pada triwulan I-2018 sebesar 141,05%, namun meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II dalam 4 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/ DPK yang pada triwulan II-2018 sebesar 24,42%, menurun dibandingkan triwulan I-2018 yang sebesar 25,40%. Namun demikian, jika dibanding dalam 4 tahun terakhir rasio AL/NCD menunjukkan tren peningkatan.

**Tabel III - 4** — Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	Triwulan II - 2014	Triwulan II - 2015	Triwulan II - 2016	Triwulan II - 2017	Triwulan II - 2018
AL/NCD	78,66%	91,45%	101,74%	117,04%	134,04%
AL/DPK	13,89%	16,29%	18,06%	21,03%	24,42%

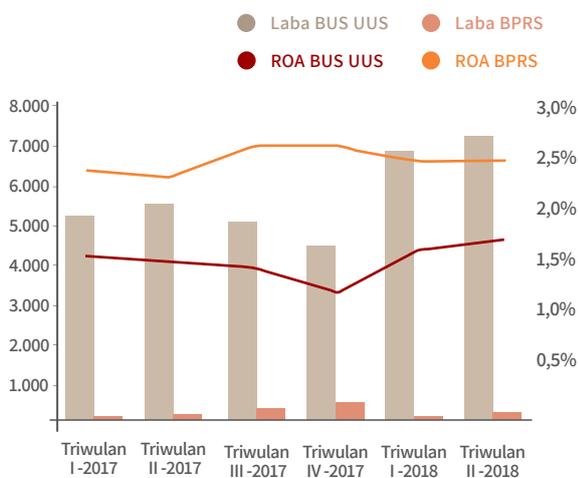
**Grafik III - 5** — Indikator Likuiditas Harian BUS



## E. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan II-2018 sebesar 1,69%, lebih tinggi dari triwulan I-2018 maupun triwulan II-2017 yang masing-masing sebesar 1,59% dan 1,49%. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan serta efisiensi bank syariah sehingga turut mendorong kenaikan laba sebesar 7,23% (*qta*) menjadi Rp7,18 triliun.

**Grafik III - 6** — Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber : SPS, Juni 2018

Perbaikan rentabilitas juga terjadi pada BPRS dengan rasio ROA sebesar 2,41% pada triwulan II-2018. Rasio ROA tersebut meningkat dibandingkan triwulan I-2018 yang sebesar 2,40% dan triwulan II-2017 yang sebesar 2,24%. Perbaikan ROA BPRS juga didukung oleh pertumbuhan laba sebesar 78,28% (*qta*) menjadi Rp131,02 miliar.

## E. Permodalan

OJK mencatat ketahanan perbankan syariah relatif cukup kuat yang diindikasikan oleh tingkat permodalan yang memenuhi persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, CAR BUS meningkat 212 bps dari posisi triwulan sebelumnya menjadi 20,32%, dengan jumlah modal sebesar Rp36,22 triliun (mengalami pertumbuhan sebesar 9,51%, *qta*). Sementara itu, aset tertimbang menurut risiko (ATMR) BUS sebesar Rp178,28 triliun mengalami penurunan (-0,43%, *qta*). Rasio pemenuhan modal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan posisi triwulan II-2017 di mana CAR sebesar 16,422%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan meski masih memadai menjadi 19,96%.

### 3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Pada triwulan II-2018, Industri Pasar Modal Syariah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Berbagai produk Pasar Modal Syariah mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Reksa Dana Syariah mengalami peningkatan baik sisi jumlah maupun NAB nya. Di sisi lain, Indeks Saham Syariah baik ISSI maupun JII mengalami penurunan baik dari sisi indeks dan kapitalisasinya. Selama triwulan II-2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Indeks Saham Syariah Baru, yaitu *Jakarta Islamic Index 70* (JII70). Konstituen JII70 terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat.

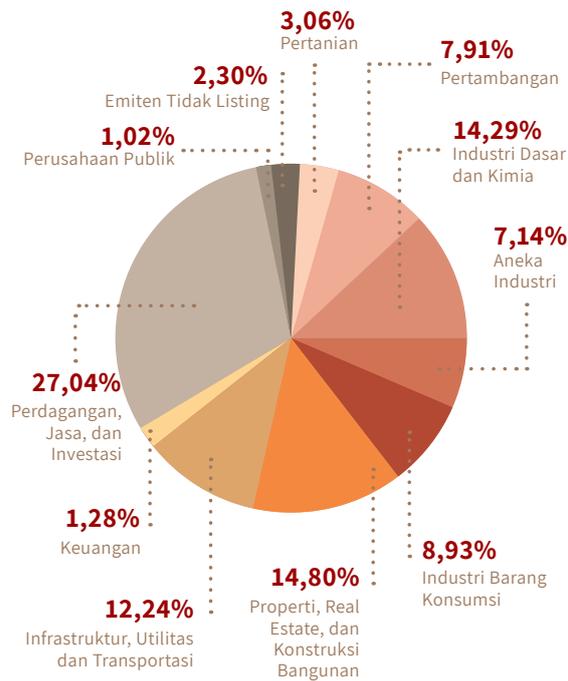
## A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I-2018 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-24/D.04/2018 yang meliputi 381 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode I-2018 berlaku sampai akhir November 2018. Selama periode laporan, DES periode I-2018 mengalami penambahan 11 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham, sehingga saham yang termasuk dalam DES berjumlah 392 saham.

Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 106 saham (27,04%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi sebanyak 58 saham (14,80%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 56 saham (14,29%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan

Transportasi sebanyak 48 saham (12,24%) dan 124 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

**Grafik III - 7** — Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Pada akhir periode laporan, indeks ISSI ditutup pada level 173,25 poin atau menurun 5,63% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi pasar saham sebesar Rp3.427,58 triliun atau 52,64% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham ISSI. Kapitalisasi ini menurun sebesar 4,38% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI akhir periode sebelumnya. Sementara itu, JII70 ditutup pada level 217,42 poin dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp2.510,03 triliun.

**Tabel III - 5** — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Dalam triliun rupiah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	1.672,10	2.557,85	-	4.219,02
2014	1.944,53	2.946,90	-	5.228,04
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
Triwulan I - 2018	2.123,50	3.584,60	-	6.884,88
Triwulan II - 2018	2.047,17	3.427,58	2.510,03	6.511,73

**Tabel III - 6** — Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	585,11	143,71	-	4.274,18
2014	691,04	168,64	-	5.226,95
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	6.355,65
2017	759,07	189,86	-	6.188,99
Triwulan I - 2018	704,28	183,59	-	6.188,99
Triwulan II - 2018	654,771	173,25	217,42	5.799,24

## B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama triwulan II-2018, terdapat penerbitan 12 seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp2,35 triliun. Selain itu, terdapat tujuh seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo dengan total Rp2,12 triliun. Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi 89 seri atau meningkat sebesar 5,95% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sukuk korporasi sebesar Rp16,34 triliun atau meningkat sebesar 1,45%.

Tabel III - 7 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2013	11.949	64	7.562	36
2014	12.872	71	7.114	35
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	15.740	79
Triwulan I - 2018	27.583	144	16.104	84
Triwulan II - 2018	29.933	156	16.338	89

### C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2018 terdapat 19 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta tiga Reksa Dana Syariah bubar sehingga total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 198, dengan NAB sebesar Rp32,17 triliun atau meningkat 4,21% dari sisi jumlah dan meningkat 3,40%

dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 10,31% dari total 1.921 Reksa Dana dan 6,61% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp486,56 triliun.

Tabel III - 8 — Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%
Triwulan I - 2018	190	1.659	1.849	10,28%	31.108,82	465.395,08	496.503,90	6,27%
Triwulan II - 2018	198	1.723	1.921	10,31%	32.167,28	454.394,70	486.561,99	6,61%

Grafik III - 8 — Perkembangan Reksa Dana Syariah



## D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir periode laporan, jumlah SBSN yang *outstanding* sebanyak 58 seri, dengan nilai sebesar Rp612,20 triliun. Selama periode pelaporan terdapat penambahan satu seri dari periode sebelumnya, dan peningkatan dari sisi nilai sebesar 5,25% dibandingkan periode sebelumnya.



**Tabel III - 9** — Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (triliun)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	297,58	48
2016	412,63	52
2017	551,56	56
Triwulan I - 2018	581,64	57
Triwulan I - 2018	612,20	58

## E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan II-2018, para pihak yang mempunyai jasa layanan Syariah meliputi:

- 48 Manajer Investasi Syariah yang mengelola Reksa Dana Syariah
- 27 Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi
- 10 Pihak telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES
- 14 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah
- 13 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (sistem *online trading* syariah)
- Tujuh Wali Amanat terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi
- 78 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal.

### 3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan II-2018, aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar 0,27% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp96,73 triliun. Aset industri perasuransian syariah mendominasi porsinya yaitu sebesar 43% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 10 — Aset IKNB Syariah

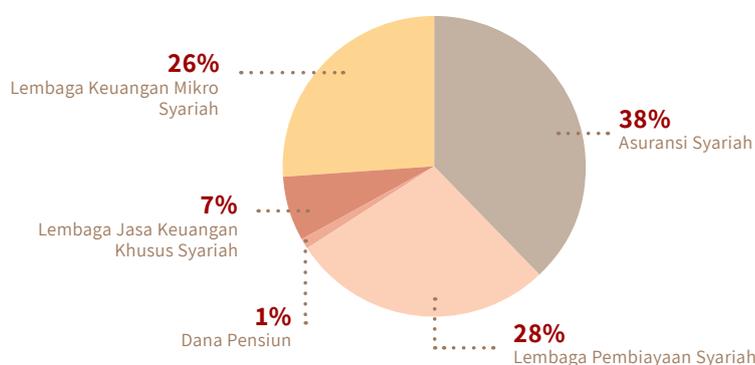
Dalam triliun rupiah

No.	Industri	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Perasuransian Syariah	35,25	37,37	39,41	40,52	42,74	41,85
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	37,64	38,78	36,80	34,48	32,77	29,51
3	Dana Pensiun Syariah	-	-	-	1,30	1,32	1,36
4	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	19,61	21,39	22,26	22,74	22,50	23,85
5	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,16
	<b>Total</b>	<b>92,58</b>	<b>97,62</b>	<b>98,57</b>	<b>99,15</b>	<b>99,45</b>	<b>96,73</b>

Sampai akhir triwulan II-2018, terdapat 63 perusahaan perasuransian syariah, 47 lembaga pembiayaan syariah, satu Dana Pensiun Syariah, 11 lembaga jasa keuangan

syariah khusus, dan 37 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, terdapat 8 penambahan jumlah entitas IKNB Syariah.

Grafik III - 10 — Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan II-2018



## A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2018, Industri perasuransian syariah mengalami penurunan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 2,09%, 0,78% dan peningkatan nilai kontribusi bruto dan klaim bruto masing-masing sebesar

97,76% dan 107,88% menjadi Rp41,85 triliun, Rp36,30 triliun, Rp8,09 triliun, dan Rp2,55 triliun dibandingkan triwulan I-2018. Sementara itu kewajiban mengalami penurunan sebesar 3,45% menjadi Rp7,86 triliun.

Tabel III - 11 — Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	<b>Aset</b>						
	Asuransi Jiwa Syariah	28,93	30,42	31,32	33,48	33,48	34,36
	Asuransi Umum Syariah	4,91	4,98	5,28	5,37	5,37	5,69
	Reasuransi Syariah	1,42	1,96	1,61	1,66	1,66	1,80
	<b>Jumlah</b>	<b>35,25</b>	<b>37,37</b>	<b>39,41</b>	<b>40,52</b>	<b>42,74</b>	<b>41,85</b>
2	<b>Investasi</b>						
	Asuransi Jiwa Syariah	26,28	27,41	28,78	30,42	30,42	31,26
	Asuransi Umum Syariah	3,23	3,36	3,54	3,67	3,67	3,81
	Reasuransi Syariah	1,12	1,49	1,19	1,22	1,22	1,23
	<b>Jumlah</b>	<b>30,63</b>	<b>32,26</b>	<b>33,52</b>	<b>35,31</b>	<b>36,58</b>	<b>36,30</b>
3	<b>Kontribusi Bruto</b>						
	Asuransi Jiwa Syariah	2,39	4,91	7,60	11,34	11,34	6,69
	Asuransi Umum Syariah	0,51	0,95	1,43	1,88	1,88	0,99
	Reasuransi Syariah	0,13	0,30	0,53	0,78	0,78	0,41
	<b>Jumlah</b>	<b>3,03</b>	<b>6,16</b>	<b>9,56</b>	<b>14,00</b>	<b>4,09</b>	<b>8,09</b>
4	<b>Klaim Bruto</b>						
	Asuransi Jiwa Syariah	0,85	1,73	2,21	3,53	3,53	1,90
	Asuransi Umum Syariah	0,22	0,46	0,68	0,88	0,88	0,37
	Reasuransi Syariah	0,09	0,24	0,49	0,53	0,53	0,28
	<b>Jumlah</b>	<b>1,16</b>	<b>2,44</b>	<b>3,44</b>	<b>4,95</b>	<b>1,23</b>	<b>2,55</b>
5	<b>Kewajiban</b>						
	Asuransi Jiwa Syariah	3,91	4,07	5,37	4,32	4,55	4,29
	Asuransi Umum Syariah	2,66	2,66	2,82	2,86	2,94	2,86
	Reasuransi Syariah	0,47	0,64	0,60	0,59	0,66	0,72
	<b>Jumlah</b>	<b>7,05</b>	<b>7,19</b>	<b>8,79</b>	<b>7,78</b>	<b>8,14</b>	<b>7,86</b>

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 63 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah, 50 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi

syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari satu Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dengan aset sebesar Rp 1,36 triliun.

## B. Industri Pembiayaan Syariah

Pada triwulan II-2018, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami

penurunan sebesar 10,8% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp27,12 triliun.

**Tabel III - 12** — Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

Dalam Rp miliar

No.	Komponen	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018
1	Kas dan Setara Kas	602,17	955,26	833,92	1.103,56	1.353,07	553
2	Aset Tagihan Derivatif	-10,27	-	-	4,02	14,92	43
3	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	33.726,41	24.050,84	31.993,54	28.645,49	26.171,71	23.800
5	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
7	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	95,71	111,28	98,06	88,45	57,06	54
8	Aset tetap dan Inventaris - Neto	144,30	124,20	118,03	114,60	111,87	118
9	Aset Pajak Tangguhan	23,23	23,57	48,23	24,80	21,80	20
10	Rupa-Rupa Aset	1.888,20	2.224,20	2.486,93	2.275,66	2.664,42	2.532
	<b>Total</b>	<b>36.489,75</b>	<b>37.489,36</b>	<b>35.578,71</b>	<b>32.256,57</b>	<b>30.394,85</b>	<b>27.120,08</b>

Sampai akhir triwulan II-2018 terdapat 38 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 35 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan empat

perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.273,49 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp1.112,14 miliar.

## C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari enam Perusahaan Penjaminan Syariah di mana dua perusahaan berbentuk *full fledged* dan empat UUS, serta masing masing satu UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan UUS PT Pegadaian (Persero). Aset kegiatan syariah pada Perusahaan Penjaminan, PT

Pegadaian (Persero) dan LPEI masing-masing sebesar Rp1,30 triliun, Rp5,84 triliun dan Rp16,27 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 44 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp155,36 miliar.

### 3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2018 OJK melaksanakan penyusunan ketentuan sesuai dengan PDK Nomor 11/PDK.02/2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PDK *rule making rule*) terhadap rancangan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan rancangan POJK Manajemen Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terdiri dari :

1. Pembahasan atas kedua rancangan POJK dalam forum
2. Permintaan tanggapan tertulis atas kedua rancangan POJK kepada satuan kerja terkait dan industri BPRS
3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kedua rancangan POJK untuk BPRS wilayah Barat di Jakarta dan untuk BPRS wilayah Timur di Yogyakarta.

#### 3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Pada periode pelaporan dilakukan revisi POJK Nomor 19/POJK.04/2015 terkait Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Revisi peraturan tersebut bertujuan untuk menghasilkan kerangka peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah yang komprehensif dan terkini sehingga tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun juga alternatif investasi yang aman bagi investor.

#### 3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua POJK untuk sektor IKNB konvensional yang mengatur IKNB syariah yaitu POJK Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan satu SEOJK yang mengatur IKNB syariah yaitu SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2018 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara elektronik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Penerbitan peraturan ini merupakan amanat dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Surat Edaran ini merupakan panduan bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam menyusun permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan.

### 3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

##### A. Perizinan

Selama periode laporan, OJK melaksanakan proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap satu calon pemegang saham pengendali, 44 calon pengurus Bank Syariah dan 11 pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan hasil lima calon pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat dan dua calon DPS dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, terdapat satu calon Pengurus Bank Syariah tidak disetujui, dua calon pengurus Bank Syariah dibatalkan serta tujuh dokumen calon pengurus Bank Syariah dan lima calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada akhir periode laporan terdapat satu proses calon pemegang saham pengendali, 29 proses perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pengurus Bank Syariah dan tiga calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian.

Terkait perizinan produk baru, OJK menerima enam permohonan masuk yang seluruhnya masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 25 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, perubahan status kantor dan penghentian kegiatan LSB dengan hasil 13 permohonan telah disetujui, satu permohonan dihentikan, dan 11 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada periode laporan, OJK menerima 12 permohonan perizinan lainnya yaitu berupa lima permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah, satu permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), satu permohonan pemisahan *spin off*, dan empat permohonan merger dan/atau akuisisi yang masih dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, satu permohonan izin usaha pendirian bank syariah telah disetujui.

##### B. Pengawasan

Optimisme terhadap perekonomian nasional yang semakin membaik memberikan harapan positif sehingga mendorong pertumbuhan pembiayaan di perbankan syariah (BUS) sebesar 2,21% (*yoj*) di triwulan II-2018 menjadi Rp189,68 triliun. Sejalan harapan positif tersebut, kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan yang tidak diperpanjang oleh OJK mendorong *awareness* BUS untuk mengoptimalkan proses manajemen risiko pembiayaan. Sejalan fundamental perekonomian nasional yang baik, terdapat perbaikan kondisi nasabah yang menyebabkan terjadinya penurunan NPF menjadi 3,83%. Meski demikian, untuk mengantisipasi risiko kredit ke depannya. akibat tantangan yang berasal dari

ekonomi global, OJK senantiasa mendorong peningkatan *awareness* BUS terhadap substansi penerapan manajemen risiko kredit, sebagai bagian *supervisory concern* OJK dalam rangka mendukung pencapaian “industri perbankan yang tumbuh berkualitas”.

Sejalan dengan meningkatnya *awareness* tersebut, kecukupan permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan II-2018 semakin membaik dan berada di atas *threshold* (rasio KPMM minimum 14%), yakni 20,59% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (16,42%). Kecukupan permodalan tersebut antara lain, didukung oleh optimisme terhadap perekonomian nasional dan rencana pengembangan usaha BUS, sehingga terdapat 6 BUS dari 13 BUS yang merencanakan penambahan modal di tahun 2018 dimana 2 BUS di antaranya telah melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*), sebagai wujud dukungan terhadap pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Namun demikian, di balik optimisme tersebut masih terdapat bank dengan rasio KPMM di bawah *threshold* dan masih dalam proses peningkatan modal akibat adanya penundaan rencana peningkatan modal di tahun 2018. Terkait hal itu, *supervisory concern* dari OJK terutama mendorong bank tersebut untuk segera merealisasikan peningkatan modal.

Dari sisi operasional, secara umum efisiensi masih memerlukan penyempurnaan akibat struktur dana BUS masih didominasi oleh dana mahal (deposito) dan rendahnya *fee based income*, sebagaimana tercermin dari rasio BOPO yang masih tergolong tinggi yaitu 88,75%, meski membaik dari tahun sebelumnya (90,98%). Perbaikan tersebut terutama adanya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh 2 BUS di akhir 2017 menyebabkan kinerja di triwulan II-2018 membaik sebagaimana tercermin dari rasio NIM meningkat signifikan menjadi 1,57% di triwulan II-2018. Adapun upaya perbaikan efisiensi pada masing-masing BUS terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing, terutama dengan mengoptimalkan pendapatan dan biaya, antara lain menyempurnakan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi jaringan kantor dengan mengurangi jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan membuka layanan tanpa kantor. Adapun Sebagai langkah *supervisory action*, OJK menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern* (khususnya kegiatan *on-site supervision*) terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDI dan kecukupan pengendalian intern.

Berkenaan dengan profil risiko Perbankan Syariah yang cenderung stabil akibat upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing BUS dengan didukung oleh efektifitas *supervisory action* OJK dalam menjaga kelangsungan bank, maka *rating* peringkat RBBR di Perbankan Syariah masih sejalan dengan periode

sebelumnya (Desember 2017), yaitu tergolong Cukup Sehat. Adapun potensi risiko utama sesuai *Supervisory Plan* 2018 masih berasal dari risiko kredit dan risiko operasional. Adapun aspek permodalan merupakan *concern Supervisory Plan* pada BUS tertentu.

### 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan Pasar Modal Syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Sampai akhir triwulan II-2018, terdapat 10 Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES OJK melakukan pemeriksaan kepada satu perusahaan penerbit DES di mana laporan hasil pemeriksaan tersebut sedang dalam proses.

### 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 63 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan lima Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap enam Perusahaan Perasuransian syariah. Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, OJK menerbitkan dua LHPLS Perusahaan Pembiayaan Syariah, dua LHPLF Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap empat Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Terkait dengan layanan kelembagaan OJK memberikan izin unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Pool Advista Finance dan mencatat pendaftaran Perusahaan Pergadaian Syariah PT Nabasa Jaya. OJK juga melakukan pencabutan izin UUS PT Suzuki Finance Indonesia. Serta memberikan persetujuan atas rencana pemisahan tidak murni Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

Terkait dengan izin kantor cabang Syariah, OJK memberikan izin satu kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah; pencatatan kantor selain kantor cabang pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah serta pencatatan kantor di luar kantor pusat pada lima Perusahaan Perasuransian Syariah. OJK juga melakukan pencatatan perubahan susunan Direksi pada empat Perusahaan Asuransi Syariah, satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu Perusahaan Penjaminan Syariah. Selain itu, OJK melakukan pencatatan perubahan Dewan Pengawas Syariah pada dua perusahaan Asuransi Syariah dan satu Perusahaan Pembiayaan Syariah serta pencatatan atas perubahan Dewan Komisaris pada tiga perusahaan asuransi syariah serta satu Perusahaan Pembiayaan Syariah.

OJK melakukan pencatatan pelaporan penambahan modal disetor pada tiga perusahaan asuransi syariah dan satu perusahaan modal ventura syariah. OJK juga melakukan pencatatan atas pemenuhan syarat keberlanjutan sepuluh pihak utama perusahaan asuransi syariah dan tiga pihak utama perusahaan pembiayaan syariah.

Terkait dengan Pimpinan Unit Syariah, OJK melakukan pengadministrasian perubahan Pimpinan Unit Syariah pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah. OJK juga melakukan pengadministrasian perubahan Aktuaris, Auditor Internal dan Tenaga Ahli pada satu Perusahaan Asuransi Syariah. Selain itu, terkait dengan Penilaian kemampuan dan Keputusan, OJK melakukan 21 penilaian kemampuan dan keputusan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III - 13** — Objek Penilaian Kemampuan dan Keputusan

Objek Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Jumlah
Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah	3
Komisaris Perusahaan Modal Ventura Syariah	2
Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah	4
Direksi Perusahaan Asuransi Syariah	4
Auditor Internal	1
Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi Syariah	2
Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah	1
Dewan Pengawas Syariah Modal Ventura	4
<b>Total</b>	<b>21</b>

Terkait dengan produk IKNB syariah, OJK melakukan persetujuan sebelas produk baru asuransi jiwa syariah dan delapan produk baru asuransi umum syariah, serta pencatatan empat produk asuransi jiwa syariah, persetujuan kerjasama pemasaran *Bancassurance* enam produk asuransi syariah serta persetujuan satu kegiatan kerjasama penjaminan (*co-guarantee*).

### 3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2018, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

##### 1. Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) atas Aset-Aset yang Berasal dari Transaksi Syariah

Selama periode laporan, PSAK 71 telah disahkan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 *Financial Instruments* untuk menggantikan PSAK 55 Instrumen Keuangan-

Pengakuan dan Pengukuran. Penggantian PSAK tersebut memunculkan pertanyaan apakah PSAK 71 akan diterapkan pada transaksi berbasis syariah terutama di lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan lain-lain sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam terkait metodologi penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, kaidah akuntansi, dan *international best practice*. Terkait hal tersebut, OJK bekerja sama dengan Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) menyusun Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) Atas Aset-aset yang Berasal dari Transaksi Berbasis Syariah. Selama periode laporan, OJK melaksanakan *sharing session* mengundang narasumber dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki eksposur dalam penerapan IFRS 9. *Sharing session* ini menghadirkan narasumber dari KAP yang menyampaikan materi dengan judul “PSAK 71 *Financial Instruments- Impairment*”. Tujuan dari *sharing session* tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, filosofi, dan formula penurunan nilai IFRS 9 serta tantangan yang dihadapi perbankan luar dan dalam negeri yang telah dan sedang melakukan persiapan untuk menerapkan penurunan nilai IFRS 9 beserta dampaknya terhadap laporan keuangan bank.

##### 2. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018

Dalam rangka mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, OJK serta Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) akan menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 pada September 2018 di Banda Aceh, dengan *host university* adalah Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Pada triwulan II-2018, dilakukan publikasi penerimaan *Call for Paper* di mana terdapat tiga kategori peneliti, yaitu Muda, Madya, dan Utama (Scopus). Dalam kegiatan ini, terdapat panel *session Prominent Scholar Lecture on Islamic Finance*.

##### 3. iB Research Fellowship Program 2018

Dalam rangka mendorong kebijakan berbasis riset (*research-based policy*), OJK mengembangkan berbagai wadah riset di mana salah satunya adalah *iB Research Fellowship Program 2018*. Pada periode laporan, tema besar yang diangkat adalah “Transformasi Perbankan Syariah”. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan dua kajian terpilih yang bertemakan “Kajian Menumbuhkan dan Memperkuat Kesadaran Tujuan Maqasid Syariah kepada Sumber Daya Insani Perbankan Syariah” dan “Kajian Analisis Adopsi Nasabah Terhadap Rencana Pengaplikasian Teknologi Finansial Urun Dana (*Crowdfunding*) oleh Perbankan Syariah”.

#### 4. iB Research Grant Program 2018

Dalam rangka mendukung pengembangan riset perbankan dan keuangan syariah, OJK menyelenggarakan program kolaborasi riset yang disebut *iB Research Grant Program 2018*. Sasaran utama program ini adalah percepatan pelaksanaan agenda riset daftar topik dan permasalahannya, serta untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah oleh mahasiswa yang hasil keluarannya bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang perbankan dan keuangan syariah. Pada triwulan II-2018, OJK memberikan *research grant* kepada tiga orang peneliti yang terdiri dari dua orang setingkat S1 dan satu orang setingkat S2. Penelitian yang berhasil lolos bertema “Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Transaksi Keuangan di Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Artha Madani dan Ammana Fintek Syariah)”, “Peran Bank Syariah dalam menggerakkan Mobilitas Sosial (Studi Kasus: Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengangguran melalui Pembiayaan UMKM di Indonesia)”, dan “Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah *Islamic Branchless Banking* di Jawa Timur”.

#### 5. Review Kebijakan dan Standar

Selama periode pelaporan, OJK juga melaksanakan review kebijakan dan standar. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia**  
Menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis, industri perbankan syariah harus melakukan transformasi agar dapat terus bertumbuh secara sehat dan mempunyai daya saing yang kuat sehingga dapat meningkatkan kontribusi kepada perekonomian nasional. Terkait hal tersebut, saat ini disusun Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia yang mencakup permasalahan, tantangan, solusi, gambaran, dan harapan industri perbankan syariah.
- b. **Kajian *Spin-Off***  
Dalam rangka mempersiapkan industri perbankan syariah menyambut kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) pada tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, OJK menyusun kajian komprehensif sebagai panduan penyusunan pengaturan terkait pemisahan unit usaha tersebut. Kajian ini bertujuan agar BUS hasil pemisahan memiliki kapasitas dan kualitas operasional yang memadai, konsisten dengan kualitas layanan dan *strategic value* BUK induk atau grup usaha serta menjadikan kewajiban pemisahan UUS sebagai momentum penguatan industri perbankan syariah.
- c. **Kajian Indeks Return Sektor Riil**  
Kajian Pengembangan Indeks Return Sektor Riil merupakan kajian bersama antara OJK dan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menyusun indeks yang merepresentasikan kinerja sektor riil sesuai

prinsip syariah. Kajian ini merupakan tindak lanjut dari kajian yang dilakukan pada tahun 2010-2012 yang menghasilkan metode *Cash Recovery Rate* (CRR). CRR adalah penghitungan imbal hasil bisnis yang menitikberatkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari investasi yang dilakukan dengan mengabaikan suku bunga.

- d. **Kajian Model Bisnis dan Pendirian Bank Wakaf Mikro dengan *Platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah)**  
Secara konsisten OJK memperluas cakupan fasilitasi pendirian dan pengembangan Bank Wakaf Mikro agar sesuai dengan rancangan model bisnis yang disusun. Pada triwulan II-2018, OJK memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro dan mulai merambah luar Pulau Jawa, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta tidak lagi hanya berbasis Pesantren, tetapi juga mulai menerapkan konsep Bank Wakaf Mikro di Universitas.
- #### 6. Kerjasama Institusi Keuangan Syariah
- a. **The Islamic Financial Services Board (IFSB)**  
Sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan organisasi internasional, OJK dengan IFSB bekerja sama untuk menyelenggarakan IFSB *Public Hearing* untuk tiga *exposure draft* terkait keuangan syariah. Acara tersebut dihadiri oleh 75 peserta dari SJK syariah yang menyampaikan tanggapan terhadap *exposure draft* yang dipresentasikan oleh IFSB.
  - b. **Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan**  
Forum Koordinasi - Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FKP3K) yang beranggotakan OJK, BI dan Kemenkeu merupakan forum yang dilatarbelakangi adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memadai, pendalaman pasar keuangan, dan koordinasi yang baik antara lembaga terkait. Salah satu produk dari FKP3K adalah Strategi Nasional Pendalaman dan Pengembangan Pasar Keuangan (SNPPK) yang berisi strategi ketiga institusi untuk pasar keuangan yang implementasinya akan secara terus menerus dimonitor melalui *dashboard* yang disusun oleh OJK.
  - c. **Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)**  
Komite Nasional Keuangan Syariah, yang pada Pasal (1) menyebutkan bahwa, “Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah. KNKS diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan wakil ketua yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. KNKS memiliki anggota dewan pengarah yang terdiri dari 10 kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Pada periode laporan, telah diselenggarakan rapat

Pembahasan Perkembangan Tindak Lanjut *Quick Wins* Rapat Pleno KNKS yang membahas progress yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Selain itu akan disusun *Master Plan* Pengembangan Ekonomi Syariah untuk mengembangkan *Master Plan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MPAKSI) yang sudah ada.

## 7. Pengembangan Produk

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, selama triwulan II-2018 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- a. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan Expo iB Vaganza dan Keuangan Syariah *Fair* yang bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah baru baik nasabah perbankan syariah maupun keuangan syariah dengan detail sebagai berikut :
  - a. iB Vaganza Bandung yang diikuti oleh 19 BUS/UUS, 1 BPRS dan 2 IKNB Syariah dengan perolehan sejumlah 3.472 rekening baru dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 81 M.
- b. Dalam rangka memperluas target sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah melalui *Workshop* dan TOT, yaitu :
  - i. *Workshop* Perbankan Syariah Untuk Guru dan Tenaga Pengajar Tingkat SMA/Sederajat di Kota Palu dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 86,51%
  - ii. TOT Keuangan Syariah Terintegrasi bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 71,77%
- c. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perbankan syariah sekaligus menjadi Program *Recycling* kepada SDM Perbankan Syariah, telah dilaksanakan *Workshop* Peningkatan Performa Layanan Perbankan Syariah yang dihadiri oleh perwakilan BUS/UUS/UUS BPD dan BPRS. Adapun tingkat pemahaman peserta *workshop* sebesar 86,58%.

### 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan II-2018, OJK melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengembangan Pasar Modal Syariah, antara lain:

#### 1. Kajian Atas Peraturan Yang Diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengelolaan Investasi, Transaksi Dan Lembaga Efek, Emiten Dan Perusahaan Publik, Pasar Modal Syariah, Dan Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam rangka mewujudkan sektor Pasar Modal yang tangguh, stabil dan berdaya saing tinggi melalui

penelitian yang bertujuan untuk pengembangan Pasar Modal Indonesia, OJK melakukan penyusunan kajian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni (i) merupakan salah satu bentuk respon OJK atas masukan pemangku kepentingan dalam penerapan ketentuan peraturan di sektor Pasar Modal, (ii) deteksi adanya persinggungan antara peraturan di sektor lain, dan (iii) evaluasi mandiri atas peraturan yang diterbitkan (*self-evaluation*).

#### 2. Kajian Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah pada Perguruan Tinggi

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi pada kebutuhan SDM yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah di industri pasar modal syariah, karena pada realitanya SDM yang bekerja di industri pasar modal syariah mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Umum. Rendahnya tingkat penyerapan SDM yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah tersebut dikarenakan belum adanya *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

#### 3. Kajian Optimalisasi Peran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dalam rangka Penjualan Reksa Dana Syariah

Reksa Dana syariah merupakan salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang dapat diakses luas oleh masyarakat. Dalam memasarkan produk investasi tersebut, Agen Penjual Reksa Dana (APERD) melalui Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD)nya memegang peranan penting. Jika melihat kuantitas, jumlah APERD yang menjual produk reksa dana syariah dan WAPERD saat ini sudah banyak, namun *Asset Under Management* (AUM) Reksa Dana syariah masih relatif kecil dibandingkan AUM Reksa Dana secara keseluruhan. Selanjutnya, *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019 mengamanahkan perlu adanya peningkatan peran bank syariah dalam kegiatan pasar modal yang salah satunya berperan sebagai APERD. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan besarnya potensi peningkatan AUM Reksa Dana syariah dan banyaknya jumlah APERD dan WAPERD yang telah ada, maka perlu dilakukan optimalisasi peran APERD dan WAPERD dalam meningkatkan penjualan Reksa Dana syariah.

#### 4. Kajian Skema Sukuk

Kajian mengenai Skema Sukuk dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi skema penerbitan sukuk yang telah digunakan. Kumpulan skema sukuk tersebut dapat memberikan gambaran terkait jenis skema penerbitan sukuk yang paling tepat dan sesuai bagi *stakeholders* pasar modal syariah. Selanjutnya, seluruh skema penerbitan sukuk sejak pertama kali diterbitkan akan dianalisis aspek kesyariahnya untuk meningkatkan

keyakinan investor bahwa sukuk yang diterbitkan Emiten telah menggunakan syariat sesuai kaidah Islam.

## 5. Kajian Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda

Penyusunan Kajian Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda dilakukan sebagai salah satu upaya OJK dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah yang masih sangat rendah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan program inklusi keuangan bersama lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait yang menyasar komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut sejalan dengan amanat Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit 2017*) yang menitikberatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan membuat prioritas sasaran kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, salah satunya adalah kelompok pelajar/mahasiswa.

## 6. Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian

Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan prinsip syariah di pasar modal pada kustodian. Latar belakang dari kajian ini adalah belum adanya ketentuan khusus mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal pada kustodian dari investasi syariah.

## 7. Kajian Market Maker Sukuk

*Market share* sukuk saat ini masih di bawah 5% dan perdagangannya di pasar sekunder relatif tidak likuid. Rendahnya likuiditas tersebut berpotensi menghambat perkembangan sukuk di Indonesia, karena akan menghasilkan *liquidity premium* yang tercermin dalam besaran imbal hasil sukuk. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan likuiditas tersebut, salah satunya dengan melakukan analisis terkait *market maker* sukuk. Kajian ini menganalisa data-data terkait perdagangan sukuk dan kemudian melihat kemungkinan dibentuknya *market maker* sukuk.

## 8. Kajian Aspek Syariah Transaksi Efek Syariah (Aspek Syariah Kliring dan Penjaminan)

Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia terus berkembang dari tahun ketahun. Namun, persentase jumlah investor pasar modal dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, maka terdapat potensi yang besar bagi peningkatan jumlah investor pasar modal syariah. Upaya peningkatan investor tersebut harus didukung dengan berbagai hal, salah satu upaya tersebut adalah memastikan

bahwa pasar modal syariah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini menganalisis kesesuaian aspek syariah kliring dan penjaminan transaksi saham di Bursa.

## 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pengembangan IKNB syariah dengan data sebagai berikut

### 1. Sosialisasi Asuransi Mikro Syariah

Selama periode laporan, OJK bekerja sama dengan Bank Dunia dan delapan perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah menyelenggarakan sosialisasi asuransi mikro dan asuransi mikro syariah. Sosialisasi tersebut dihadiri peserta dengan latar belakang profesi yang beragam. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi sebagai sarana perlindungan atas risiko keuangan yang disebabkan musibah dan sekaligus memperkenalkan fitur asuransi mikro syariah sehingga dapat mendorong inklusi asuransi mikro syariah.

### 2. Sosialisasi “Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia” di Pontianak

OJK menyelenggarakan sosialisasi IKNB Syariah bekerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan tema yang dibawakan mengenai “Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia”. Tujuan kegiatan dimaksud adalah memaparkan peran OJK dalam upaya mengembangkan IKNB, memberikan pemahaman kepada mahasiswa/dosen/masyarakat umum terkait dengan produk-produk IKNB Syariah, menampung masukan dari narasumber dan/atau peserta sosialisasi dalam rangka meningkatkan peran IKNB syariah di Indonesia. Selain itu, OJK juga menyelenggarakan mini expo yang diikuti oleh enam Perusahaan IKNB Syariah.

### 3. Sosialisasi “Ramadhan Berkah Bersama Asuransi Syariah dan Dana Pensiun Syariah” di Surabaya

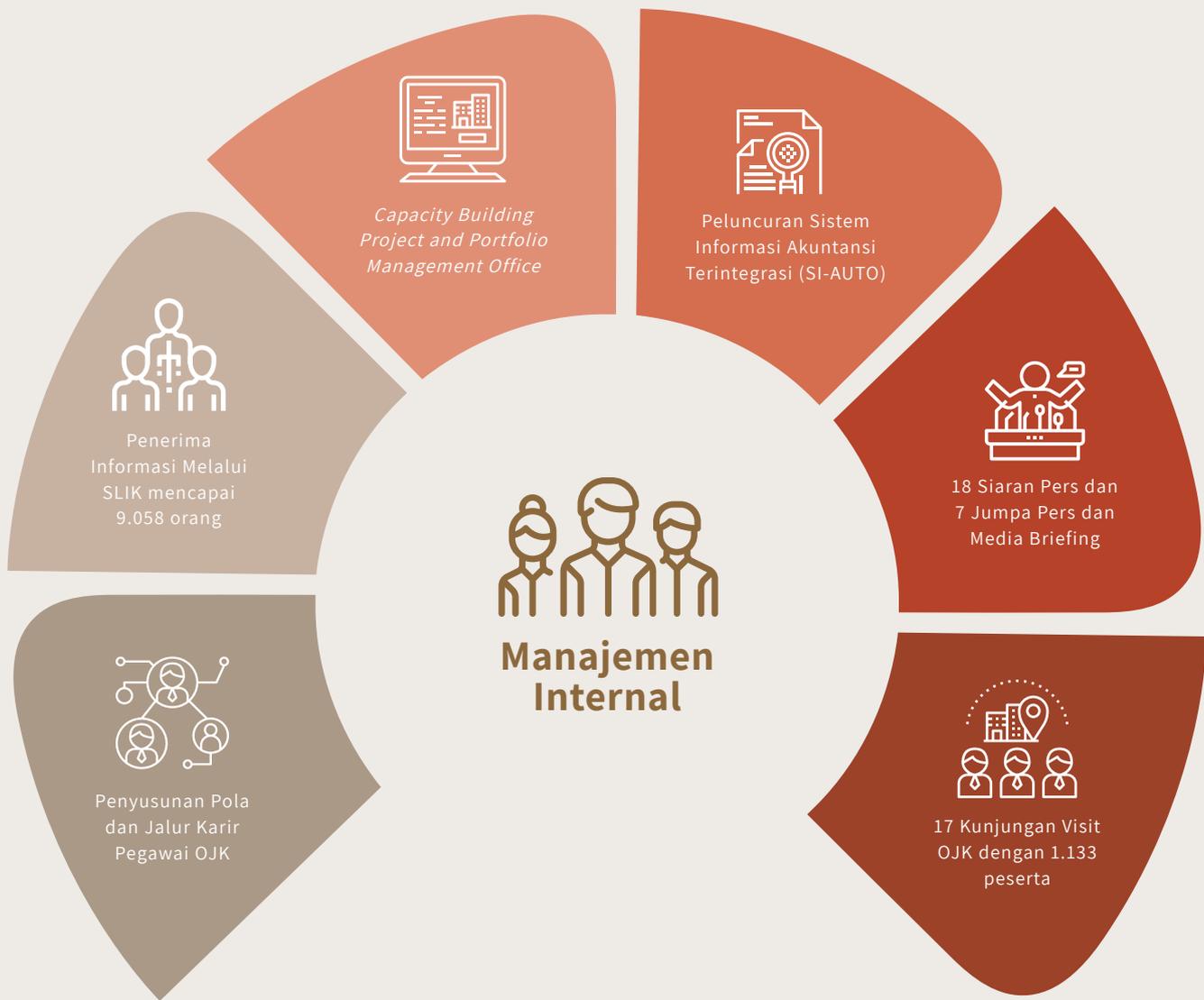
OJK bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya menyelenggarakan sosialisasi asuransi syariah dan dana pensiun syariah dengan tema “Ramadhan Berkah Bersama Asuransi Syariah dan Dana Pensiun Syariah”. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh peserta dari mahasiswa, dosen, koperasi, dan pelaku usaha di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk, proses bisnis, dan pengaturan asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 4

**MANAJEMEN  
STRATEGIS  
DAN TATA  
KELOLA  
ORGANISASI**





## 4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

### 4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja di OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat untuk periode 2018 yaitu evaluasi Peta Strategi OJK Wide 2018 untuk triwulan I-2018. Selain itu, OJK juga memasuki siklus tahap pertama untuk periode 2019 yaitu persiapan penyusunan strategi OJK 2019. Dalam rangka mendukung sistem pelaksanaan MSAK, pada periode berjalan OJK melakukan forum Manajer IKU dan Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Manajer IKU dan Anggaran masing-masing Satuan Kerja (Satker) serta mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan pengelolaan manajemen kinerja. Dalam forum yang sama, dilakukan juga *benchmarking* melalui pemaparan proses manajemen strategi dan kinerja di lembaga sejenis seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK telah mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Integrasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Capaian Kinerja 2017 dan Laporan Triwulan I-2018 sebagai pertanggungjawaban kegiatan OJK kepada publik.

**Grafik IV - 1** — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



### 4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki Peta Strategi 2018 yang di dalamnya terdapat enam Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel**  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kepuasan *Stakeholders* terhadap kinerja OJK yang diukur dengan survei yang ditujukan kepada *Stakeholders* OJK seperti Lembaga Jasa Keuangan, Media, Akademisi, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui indeks integritas organisasi dan pengelolaan keuangan yang handal.
- 2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan**  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK antara lain rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui peningkatan indeks inklusi keuangan.
- 3. Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing**  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, penguatan *surveillance* stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan serta penerapan *best fit international standard*.
- 4. Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan**  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan kontribusi SJK pada sektor ekonomi prioritas, peningkatan kontribusi SJK bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK.
- 5. Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel**  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui perlindungan konsumen yang kredibel, peningkatan produk keuangan mikro dan optimalisasi pemanfaatan *Fintech*.
- 6. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah**  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah.

### 4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Inisiatif Strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK Wide 2018. Sehubungan dengan pelaksanaan IS OJK 2018, capaian pelaksanaan IS OJK sampai dengan triwulan II-2018 dengan detail sebagai berikut:

1. **IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan**  
Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama yang dicapai sampai triwulan II-2018 pada inisiatif strategis ini antara lain penyusunan RPOJK Inovasi Keuangan Digital, penyelenggaraan “*International Seminar on Fintech Regulation and Policies*”, pembangunan *Fintech Center* serta penyusunan *Roadmap Fintech* dan *Regulatory Sandbox*.
2. **IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi**  
Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terwujudnya pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Beberapa kegiatan utama yang dicapai sampai triwulan II-2018 pada inisiatif strategis ini antara lain penyusunan kajian penguatan proses bisnis pengawasan dan sistem informasi pengawasan. Detail kajian tersebut antara lain:
  - a. **Kajian penguatan proses bisnis pengawasan**  
Cakupan kajian meliputi penguatan proses pengawasan bank secara lebih dini dan berkala melalui penguatan Laporan Analisis Bulanan (LAB) dan penguatan proses persiapan pemeriksaan melalui penyediaan data dan informasi awal
  - b. **Kajian penguatan sistem informasi pengawasan**  
Cakupan kajian penguatan sistem informasi pengawasan meliputi pembangunan OJK-BOX (OBOX) sebagai media penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan dan bersifat rinci/detail. Untuk data dan informasi yang bersifat agregat (*condensed report*) akan disampaikan melalui sistem informasi APOLO
3. **IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan**  
Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam kerangka

upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya-upaya konkrit yang perlu dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II-2018 antara lain: Pembangunan *Dashboard* pemantauan capaian target *Market Development Project* – Pasar Modal (*Dasboard MDDPM*), Peluncuran Pusat Layanan Informasi Obligasi Daerah (*phone* dan *email*) dengan 2 *dedicated officers* yang dibekali pelatihan dan buku *Frequently Asked Questions* terkait ObDa. Penyelenggaraan Pelatihan ObDa bagi Pemda dan Pejabat/ Pegawai KR/ KOJK di Semarang dan Surabaya, kajian rencana pendirian Perusahaan Efek (PE) Daerah dan pematangan program *Piloting PE* Daerah serta penyusunan Peta Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Pasar Modal dalam rangka peningkatan jumlah profesi penunjang pasar modal.

4. **IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank**  
Tujuan pelaksanaan IS-4 adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Beberapa kegiatan utama pada IS-4 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II-2018 antara lain penyusunan *gap analysis* mengenai pengawasan, pengaturan, market dan perlindungan konsumen IKNB, penyusunan buku *Arsitektur IKNB*, *Komparasi Manajemen Risiko*, *Tata Kelola dan siklus Risk Based Supervision*, pelaksanaan *workshop Risk Based Supervision* Tahap I - 2018.
5. **IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan**  
Tujuan pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Beberapa kegiatan utama pada IS-5 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II-2018 antara lain *Go Live* Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi (SI-AUTO) sebagai bentuk transformasi keuangan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di OJK serta Implementasi sistem SIAUTO dan rekonsiliasi data SI-AUTO untuk kantor pusat.
6. **IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis**  
Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada IS-6 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II-2018 antara lain:

- a. **Perizinan Terintegrasi**
  - Penyusunan *Gap Analysis* dan *Road Map* Perizinan Terintegrasi OJK.
  - Identifikasi kebutuhan *enhancement* sistem SPRINT dan sosialisasi.
  - Identifikasi proses bisnis: (i) Perizinan permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham; dan (ii) *Fit and Proper Test* di masing-masing kompartemen.
  - Pengembangan dan implementasi SPRINT untuk perizinan solo dan interkoneksi: pembahasan *enhancement* untuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dan Obligasi/Sukuk.
- b. **Desain Proses Bisnis**
  - Menetapkan program kerja yang memuat kegiatan standarisasi dan desain proses bisnis, koordinator & anggota tim kerja, target penyelesaian serta anggaran.
  - Penyusunan laporan gap analisis, identifikasi dan pemetaan Standar Prosedur Operasional (SPO).
- c. **Digital Office**
  - Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi (RBSIT), termasuk di dalamnya *Digital Office* OJK dan kajian pembangunan *middleware system*.
  - Pembangunan *Record Management System* (RMS).
  - SEDK Implementasi RMS.
  - Revisi dan Permintaan Tanggapan SEDK Pengarsipan dan permintaan tanggapan draft SEDK Pengarsipan kepada Satker terkait.
- d. **Rule Making Rule**
  - Proses hasil kajian *Rule Making Rule* (RMR) dan Proses RMR atas draft RPDK perubahan Tata cara Pembentukan Peraturan di OJK.

Selain pelaksanaan keenam IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dalam Proyek Khusus (PK) OJK. Sampai triwulan II-2018, progres pelaksanaan PK adalah sebagai berikut:

1. **PK-1 Penederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis**
  - a. Pembahasan dengan Direksi Industri Jasa Keuangan terkait rencana Penyaluran KUR pada *re-planting* atau peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat berbasis *Cluster*.
  - b. Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait rencana

penyaluran KUR untuk perikanan di Toli-toli bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk pengadaan Kapal di Natuna

2. **PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (*Research Based Policy*)**

OJK melaksanakan riset OJK-wide dengan topik sebagai berikut:

  - a. Pemetaan Peluang dan Tantangan Perbankan Digital
  - b. Teknologi Digital dan Tenaga Kerja Perbankan
  - c. Risiko dan Kontribusi *Fintech Peer-to-Peer Lending* Terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia
  - d. Dinamika Perilaku Perdagangan Investor Institusi dan Individu Melalui Perspektif *Market Microstructure*: Kasus Bursa Efek Indonesia
  - e. Potensi dan Peluang Penerapan Asuransi Berkelanjutan di Indonesia
  - a. Peramalan Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Pendekatan *System Dynamics*
  - b. Studi Empiris Konsolidasi Perbankan di Asia: Dampak Terhadap Risiko Bank, Diversifikasi Pendapatan dan Penyaluran Kredit; dan Biaya Intermediasi
3. **PK-3 Digital Economy dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa Keuangan**

OJK melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung perkembangan *Digital Economy*, antara lain:

  - a. Menyusun konsep awal *Digital Economy* yang meliputi dasar, filosofi, model bisnis, implementasi dan pengaturan yang terkait dengan *Digital Economy*.
  - b. Melakukan kajian terhadap *framework*, model dan faktor-faktor *Digital Economy*.
  - c. Mempelajari bentuk, kegiatan usaha dan pengaturan *e-commerce*.
  - d. Mempelajari kegiatan usaha *e-commerce* yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha sektor jasa keuangan.

Untuk mendukung kualitas pelaksanaan IS, OJK bekerja sama dengan ADB meluncurkan pelatihan PMO kepada *initiative coordinator* dengan tema "*Portfolio and Project Management Training*" dengan jumlah partisipan 35 peserta.

## 4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

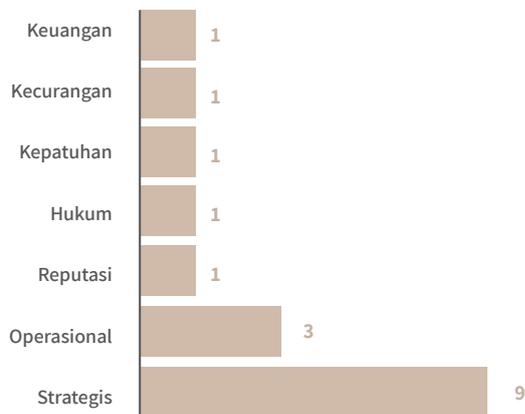
### 4.2.1 Pelaksanaan Audit Internal

Sampai akhir triwulan II-2018, OJK menyelesaikan 19 penugasan audit yang terdiri dari tiga penugasan audit Tema *Assurance*, 14 penugasan audit KR/KOJK, dan dua penugasan audit khusus.

### 4.2.2 Profil Risiko OJK

Berdasarkan Keputusan Dewan Audit KEP-2/D.06/2018, OJK memiliki tujuh jenis risiko dengan 17 tema risiko yang harus mendapat perhatian khusus untuk dikelola dengan baik. Berdasarkan data dimaksud, risiko OJK dikelompokkan per jenis risiko dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja (proses utama dan pendukung). Pengelompokkan berdasarkan jenis risiko diperoleh sebagai berikut:

Grafik IV - 2 — Komposisi Jenis Risiko OJK Wide



### 4.2.3 Pendampingan Profil Risiko Satuan Kerja (*Partnership Program*)

Selama triwulan II-2018, telah dilaksanakan 13 *partnership* program yang berfokus pada pendampingan profil risiko Satuan Kerja kantor pusat. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengisian profil risiko, mitigasi dan CSA dilakukan secara sistem melalui Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO).

### 4.2.4 Mitigasi Risiko OJK Wide

Sampai dengan triwulan II-2018, 248 rincian mitigasi telah dilaksanakan, dan enam rincian mitigasi sedang dilaksanakan dari total 254 rincian mitigasi risiko yang jatuh tempo. Berdasarkan pengelompokkan realisasi Mitigasi Risiko OJK Triwulan II-2018 dapat dirinci sebagai berikut :

- 466 rincian mitigasi (72,70%) terkait Proses Bisnis (*Process*);
- 136 mitigasi (21,22%) terkait Sumber Daya Manusia (*People*);
- 39 mitigasi (6,08%) terkait Teknologi (*Technology*).

### 4.2.5 *Control Self Assessment (CSA)*

CSA merupakan proses penilaian efektifitas pengendalian internal guna memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Penilaian dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan dilakukan berulang untuk tujuan perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan CSA yang efektif menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai di OJK. Pada triwulan II-2018, responden yang terlibat pelaksanaan CSA sebanyak 199 responden dari 309 responden yang ditargetkan.

### 4.2.6 Program Pengendalian Gratifikasi

Selama periode pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (UPG OJK) telah menerima dan mengelola 92 laporan gratifikasi. Dari 92 laporan tersebut 5 di antaranya yaitu laporan penolakan gratifikasi dan 87 lainnya merupakan laporan penerimaan gratifikasi. Total laporan gratifikasi yang telah dikelola UPG sejak 2015 berjumlah 547 laporan.

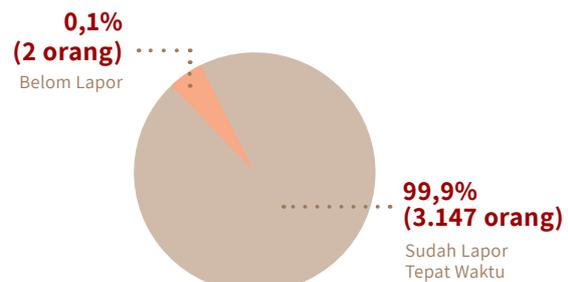
### 4.2.7 *Whistle Blowing System*

*Whistle Blowing System* merupakan sarana yang disediakan OJK untuk melaporkan Insan OJK yang diindikasikan melakukan *fraud*. Sampai periode triwulan II-2018, sebanyak 271 laporan diterima, 26 laporan sedang ditindaklanjuti, 29 laporan telah selesai ditindaklanjuti dan 36 laporan sedang dalam proses verifikasi dan analisa Konsultan Pengelola OJK WBS. Adapun laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sejumlah 85 laporan dan laporan tidak terkait pelanggaran oleh Insan OJK (laporan pengaduan konsumen, laporan pelanggaran di industri) sejumlah 95 laporan.

### 4.2.8 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pada triwulan II-2018, OJK fokus pada penerimaan *hardcopy* LHKPN dari pegawai yang selanjutnya diteruskan kepada KPK. Sampai dengan 30 Juni 2018, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh pegawai OJK sejumlah 99,9% (3.147 pegawai) dan 0,1% (2 pegawai) belum melaporkan LHKPN.

Grafik IV - 3 — Jumlah Sosialisasi Berdasarkan Peserta Sosialisasi



## 4.2.9 Sosialisasi

OJK secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas kepada pihak internal maupun eksternal. Sampai akhir triwulan II-2018, OJK melaksanakan 20 sosialisasi di mana 17 sosialisasi dilakukan kepada internal OJK dan 3 lainnya dilakukan kepada pihak eksternal.

## 4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Pada triwulan II-2018, Dewan Komisiner menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner (RDK) sebanyak 15 kali yang membahas 12 topik yang bersifat laporan dan 36 topik dalam rangka pengambilan keputusan. Forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK tersebut diselenggarakan dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif, dan transparan.

Grafik IV - 4 — Gambaran Topik RDK



Pada triwulan II-2018, Dewan Komisiner secara rutin menerima laporan perkembangan terkini dan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan dalam RDK Laporan *Market Update*. Selain itu, sejumlah kebijakan strategis telah ditetapkan oleh Dewan Komisiner dalam triwulan ini yang dituangkan

dalam bentuk peraturan, keputusan, dan produk hukum lainnya. Terdapat tujuh kebijakan strategis dalam bentuk Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) bagi industri jasa keuangan telah diputuskan oleh Dewan Komisiner selama triwulan ini.

Pada industri perbankan, Dewan Komisiner menyetujui Rancangan POJK (RPOJK) tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Dengan adanya inovasi teknologi informasi dan telekomunikasi, bank harus menyiapkan strategi baru untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih cepat, mudah dan sesuai kebutuhan nasabah. Peraturan OJK ini meliputi pengaturan terhadap jenis layanan perbankan digital, proses verifikasi nasabah oleh bank, dan lain sebagainya.

Terkait industri Pasar Modal, Dewan Komisiner menyetujui kebijakan strategis dalam rangka memberikan alternatif instrumen pembiayaan bagi perusahaan dan instrumen investasi bagi pemodal profesional. Kebijakan strategis ini dituangkan dalam RPOJK tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional. Selain itu, peraturan baru di industri Pasar Modal yang diputuskan pada triwulan ini adalah RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang diantaranya mengatur mengenai komisaris dan direksi, etika bisnis, pelaporan, dan lain sebagainya. Selain aturan baru, terdapat penyempurnaan peraturan Bapepam menjadi Peraturan OJK yaitu penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.

Pada industri keuangan non bank, Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Pendanaan Dana Pensiun yang merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2012. Penyempurnaan ini dibutuhkan seiring dengan adanya dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi pendanaan Dana Pensiun.

Dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Dewan Komisiner telah menyetujui RPOJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan ini antara lain mengatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melayani pengaduan konsumen, pelaporan pelayanan pengaduan konsumen, peran Direksi dan Komisaris terkait pelayanan pengaduan konsumen, serta ketentuan lainnya.

Dengan perkembangan dan inovasi pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Inovasi Keuangan *Digital* di Sektor Jasa Keuangan. Pengaturan dalam RPOJK tersebut meliputi ruang lingkup inovasi keuangan *digital*, kewajiban pencatatan kepada OJK, *regulatory sandbox*, pendaftaran, tata kelola, pelaporan, kerahasiaan data serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Terkait dengan ketentuan di internal OJK, Dewan Komisiner menyetujui penyempurnaan ketentuan

tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di OJK (*Rule Making Rule/RMR*). Penyempurnaan ketentuan meliputi jangka waktu proses RMR, Program Legislasi tahunan OJK, dan lain sebagainya.

Topik kelembagaan industri jasa keuangan meliputi keputusan Dewan Komisiner atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Kebijakan strategis lainnya yang diputuskan oleh Dewan Komisiner antara lain insentif OJK terhadap pengembangan *green bonds* dan pengembangan *Data Center* OJK.

Dewan Komisiner juga menyelenggarakan *Board Seminar* (BS) untuk membahas materi tertentu dan memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK. Dalam forum BS di triwulan ini, Dewan Komisiner menerima laporan progres pelaksanaan inisiatif strategis OJK tahun 2018, kajian komitmen Indonesia dalam MEA untuk industri Asuransi, pengembangan sistem informasi OJK dan penyusunan Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022, tanggapan terhadap penyusunan RUU dan beberapa kajian hukum, serta beberapa topik lainnya.

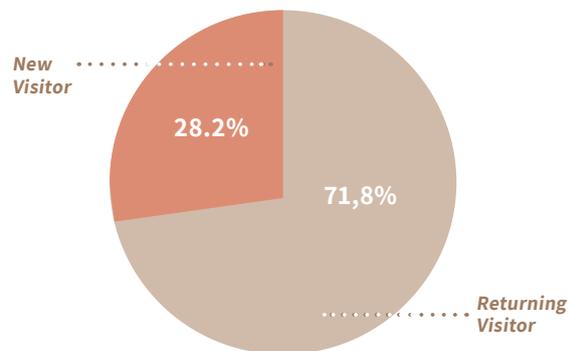
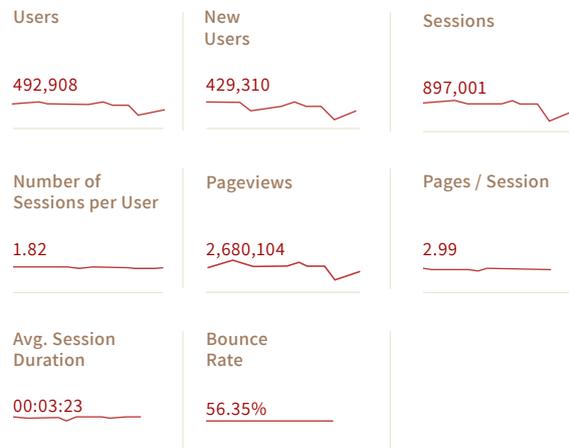
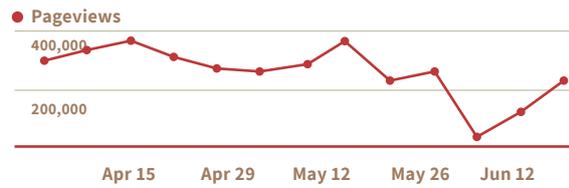
Forum BS juga menjadi bagian dari proses *Rule Making Rule* di OJK. Dalam triwulan ini sejumlah Rancangan POJK telah dibahas dalam forum BS untuk mendapatkan arahan atau perspektif dari Dewan Komisiner serta masukan Satuan Kerja lain terhadap substansi aturan. Selanjutnya, Rancangan POJK tersebut disampaikan kepada pemangku kepentingan seperti industri jasa keuangan untuk mendapatkan masukan.

## 4.4 KOMUNIKASI

### 4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

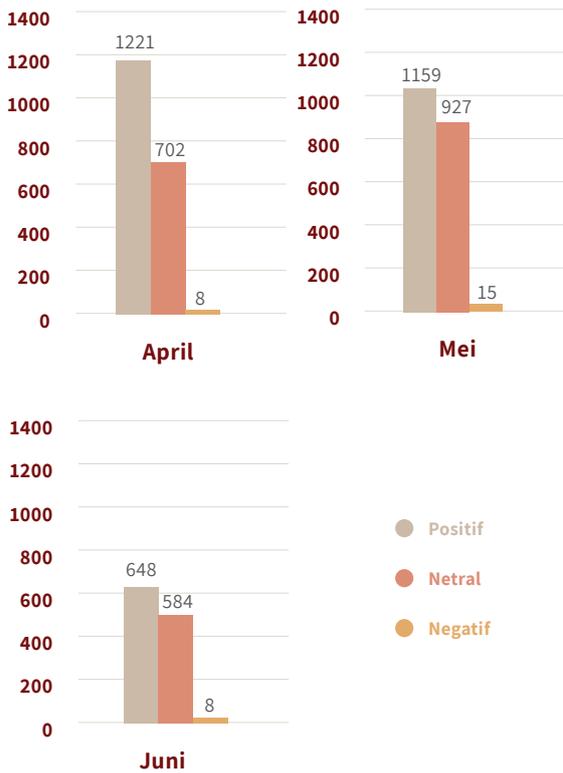
**Grafik IV - 5** — Statistik Pengunjung Website OJK Triwulan II - 2018



Selama periode triwulan II-2018, *website* OJK telah mengunggah 234 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan dan sebagainya. *Website* OJK juga memiliki 15 *minisite*. pengunjung *website* OJK pada Juni 2018 adalah 492.908 users dan jumlah halaman yang dibaca adalah 2.680.104 *page views*. Pada periode triwulan II-2018 OJK mempublikasikan 108 materi meliputi infografis, foto dan video kegiatan OJK. Media sosial twitter OJK memiliki lebih dari 36.600 *followers*, media sosial facebook OJK memiliki lebih dari 31.836 *followers* dan Instagram OJK memiliki lebih dari 59.800 *followers*.

Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisis ini dilakukan melalui monitoring terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 234 media cetak, 4211 media *online*, 11 stasiun televisi nasional.

Grafik IV - 6 Jumlah Pemberitaan Triwulan II - 2018



Total pemberitaan selama triwulan II-2018 mengalami kenaikan 14,6% menjadi 5.272 berita dengan rata-rata 1.757 berita perbulan atau sekitar 57 berita per harinya. Sementara itu, pemberitaan dengan *tone* negatif turun 22,5% menjadi 31 berita negatif. *Tone* positif sebanyak 3.028 berita dan *tone* netral sebanyak 2.213 berita. Berita negatif tersebut memiliki per sentase hanya sebesar 0,6% dari total keseluruhan berita pada triwulan II-2018.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan II-2018 OJK menerbitkan 18 siaran pers yang didominasi oleh OJK Wide sebanyak 10 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa. Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK pada triwulan II-2018 adalah:

Tabel IV - 1 Siaran Pers Triwulan I-2018

No.	Judul Siaran Pers
1	Tindaklanjut Pengawasan Dan Pembinaan Beroperasinya AJBB 1912
2	Kenaikan <i>Rating</i> Moody's Dorong Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan
3	OJK Dan IFC Sepakat Teruskan Kerjasama Pengembangan Program Keuangan Berkelanjutan
4	Bangun Kredibilitas, OJK Lakukan Pergantian Pejabat
5	OJK Ungkap Kasus Penyelewengan Di BPR KS Kas Bali
6	Stabilitas Industri Jasa Keuangan Terkini Tetap Terjaga
7	Jaga Stabilitas, OJK Ubah Ketentuan " <i>Structured Product</i> " Bagi Bank Umum
8	OJK Dorong Transparansi Produk dan Layanan Jasa Keuangan
9	OJK Dorong Industri Keuangan Syariah Dengan Manfaatkan Teknologi
10	Tingkatkan <i>Good Governance</i> OJK Luncurkan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi (SI-AUTO)
11	OJK Klarifikasi Penyebutan Jabatan Faris Rabidin
12	OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
13	OJK Luncurkan Modul <i>E-Learning</i> Buku Literasi Keuangan Untuk Tingkat SD Dan SMP
14	RDK Bulanan OJK: Stabilitas Dan Likuiditas Industri Jasa Keuangan Terjaga
15	OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Budisetia
16	OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mega Karsa Mandiri - Depok
17	OJK Dukung Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Melalui LKM Nelayan
18	RDK Bulanan : Stabilitas Dan Likuiditas Terjaga, Pertumbuhan Kredit Meningkat

OJK menyelenggarakan tujuh jumpa pers dan *Media Briefing* yang terdiri dari empat topik IKNB, dua topik EPK dan satu topik Perbankan. Program ini merupakan upaya OJK dalam menjalin kerja sama yang erat dengan para wartawan media. Topik jumpa pers dan *media briefing* pada triwulan II-2018 adalah:

**Tabel IV - 2** — Jumpa Pers dan Media *Briefing* Triwulan II - 2018

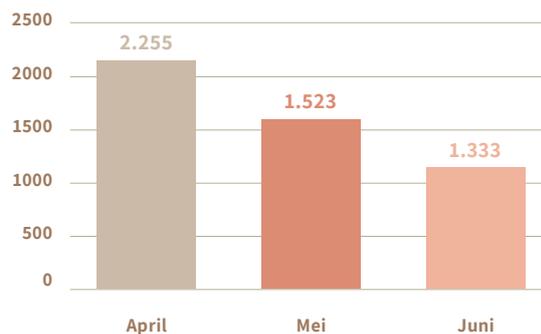
No.	Nama Kegiatan
1	Disiplin Pasar di Industri <i>Fintech</i>
2	<i>Update</i> terkini Satgas Waspada Investasi
3	Ketentuan Baru <i>Structured Product</i>
4	Peluncuran Modul <i>E-Learning</i> Buku Literasi Keuangan untuk Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
5	Perkembangan Industri Pembiayaan
6	Perkembangan Pendaftaran Pergadaian Swasta
7	Perkembangan <i>Fintech: Sandbox</i> dan Pengawasan

Sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif OJK di masyarakat, OJK mengadakan kegiatan pelatihan dan *gathering* wartawan media massa sebanyak dua kali yaitu di Purwokerto (jumlah peserta 65 wartawan) dengan tema “Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Bank Wakaf Mikro” serta di Yogyakarta dengan jumlah peserta 25 wartawan foto dan 12 redaktur dengan tema Bank Wakaf Mikro. OJK juga mengadakan diskusi dan buka puasa bersama antara Anggota Dewan Komisiner, pejabat di lingkungan OJK, redaktur media massa, dan wartawan. Selain itu OJK melakukan kunjungan ke 2 perusahaan media untuk menjalin komunikasi dan diskusi serta *sharing* perkembangan terkini industri jasa keuangan. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang.

#### 4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id) dan telepon (021) 29600000 ext 1200. Layanan informasi tersebut ditangani langsung oleh bagian Humas dan satuan kerja yang bersangkutan. Selama periode triwulan II-2018, OJK telah menerima surat elektronik sebanyak 5.111 yang meliputi pengaduan dan pelaporan lembaga jasa keuangan, permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, serta peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan.

**Grafik IV - 7** — Jumlah Layanan Informasi Triwulan II - 2018



#### 4.4.3 Kunjungan Instansi

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program edukasi kepada masyarakat terhadap peran dan fungsinya, OJK menerima kunjungan dari berbagai instansi. Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke email di [visitOJK@ojk.go.id](mailto:visitOJK@ojk.go.id). Selama periode triwulan II-2018, OJK telah menerima tiga kunjungan dengan total 119 peserta. Adapun instansi yang melakukan kunjungan adalah

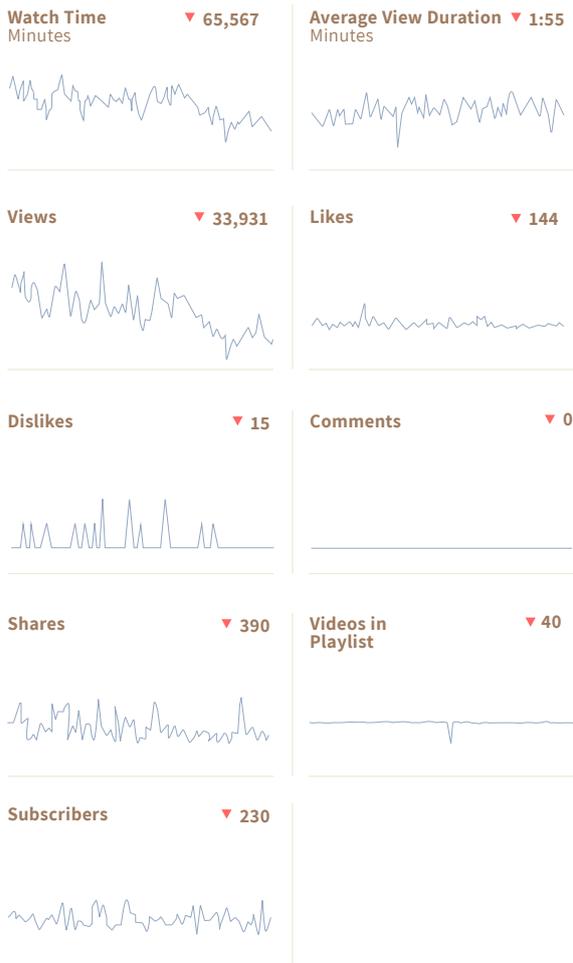
**Tabel IV - 3** — Kunjungan Instansi Triwulan II - 2018

No.	Nama Instansi
1	Kejaksaan Agung
2	Badan Siber dan Sandi Negara
3	Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Dikreg Sespimti) Polri

#### 4.4.4 OJK TV

OJK TV merupakan medium komunikasi OJK yang menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan dan IDX Channel (TV Bursa). Selama triwulan II-2018, OJK TV memproduksi 41 liputan yang terdiri dari 22 liputan OJK-Wide, tujuh liputan dari bidang IKNB, enam liputan dari bidang EPK, empat liputan dari bidang Perbankan, dan dua liputan di bidang Pasar Modal. Selama periode triwulan II-2018 kanal youtube Jasa Keuangan telah disaksikan lebih dari 33.931 *viewers*.

Grafik IV - 8 — Statistik OJK TV Triwulan II - 2018



## 4.5 KEUANGAN

### 4.5.1 Realisasi Anggaran

Pada 2018, anggaran OJK dibiayai sepenuhnya dari pungutan OJK sebesar Rp4.977,187 miliar. Sampai akhir triwulan II-2018, realisasi anggaran OJK adalah sebesar Rp1.943,196 miliar atau 39,04% dari pagu anggaran. Persentase realisasi tersebut mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan II-2017 yaitu sebesar 40,55%.

### 4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

OJK menerapkan *Performance Based Budgeting* (PBB) dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran. PBB merupakan konsep penyusunan anggaran yang menghubungkan antara sasaran strategis dengan anggaran yang tersedia, sehingga setiap program kerja yang dianggarkan mendukung *Destination Statement* dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan OJK. PBB tersebut telah diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018 dan penyusunan Proyeksi Anggaran Jangka Menengah Tahun 2018 s.d 2022. Dalam rangka mendukung implementasi PBB, OJK melakukan kajian konsep *Activity Based*

*Costing* (ABC). Konsep ABC bertujuan meningkatkan kewajaran dalam alokasi anggaran kegiatan OJK antar satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi anggaran.

Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, OJK bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan review terhadap Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Hasil *review* tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kerangka kerja (*framework*) Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.



## Peluncuran Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO)

Sebagai bentuk transformasi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pada triwulan II-2018 OJK meluncurkan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO) yang mengintegrasikan enam aplikasi yang terdiri dari empat aplikasi keuangan, satu aplikasi pengelolaan aset dan satu aplikasi *Cash Management*. Selain itu, SI-AUTO juga dipersiapkan untuk melakukan interkoneksi dengan aplikasi lainnya seperti Sistem Remunerasi OJK (OJK-SAR), SIMFOSIA (perjalanan dinas pegawai), dan Sistem Manajemen Pengelolaan Kinerja (SIMPEL).

SI-AUTO menciptakan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dari mulai aspek perencanaan, sistem pembayaran, perhitungan perpajakan, pengelolaan aset serta pertanggungjawaban keuangan. Dengan SI-AUTO, diharapkan Laporan Keuangan OJK mulai semester I-2018 dapat dihasilkan secara otomatis. Laporan keuangan secara *real time* dapat dihasilkan sesuai kebutuhan OJK sehingga pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama ini dapat dipertahankan oleh OJK, untuk tahun-tahun berikutnya.

Upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya manusia di OJK sehingga manfaat efisiensi dan efektifitas kinerja dapat dirasakan oleh Industri Jasa Keuangan di Indonesia pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Di samping transformasi keuangan melalui SI-AUTO, OJK juga melakukan transformasi keuangan melalui tiga aspek lainnya yaitu penyempurnaan standar dan kebijakan akuntansi OJK, penerapan anggaran berbasis kinerja atau *Performance Based Budgeting* (PBB) dan penyiapan SDM petugas implementasi SI-AUTO.

Dengan transformasi keuangan tersebut, diharapkan terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif secara *end to end* sehingga mempermudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.



## 4.6 SISTEM INFORMASI

### 4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

#### a. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

SPRINT merupakan aplikasi perizinan *end to end solution* dan adaptif yang berbasis *web*, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi pada proses permohonan perizinan. Pada tahun 2018 akan dikembangkan SPRINT modul Lembaga dan Produk Investasi, modul Perubahan Data Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, modul WPE dan WAPERD, modul *Bancassurance Unit* Syariah, modul Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaga), modul Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun Syariah, dan modul Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi.

#### b. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Pengembangan SIPT bertujuan mendukung kegiatan pengawasan terintegrasi yaitu dalam melakukan analisis penilaian profil risiko dan kondisi konglomerasi keuangan secara berkala. Sistem ini diharapkan menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta membentuk standar pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT 2018 akan mengakomodir perubahan format Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan penambahan modul *Early Warning System* (EWS)

#### c. Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS)

SILARAS merupakan aplikasi pelaporan elektronik yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan pelaporan wajib oleh LJK. Sistem ini diharapkan membantu pelaksanaan pelaporan dari segi *monitoring* ketepatan waktu serta kemudahan pengolahan dan analisa data keuangan disampaikan LJK. Pengembangan SILARAS pada tahun 2018 meliputi penambahan validasi dan form rincian pada laporan perusahaan pembiayaan, serta pembangunan laporan berkala *financial technology* dan industri perasuransian berbasis metadata.

#### d. Sistem Aplikasi Pengawasan dan Monitoring

Selama periode laporan, OJK mengembangkan sistem aplikasi pengawasan dan monitoring antara lain (a) *Dashboard* Konglomerasi Keuangan, (b) *Dashboard* Pendalaman Pasar Keuangan, (c) Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) modul *Risk Based Approach* (RBA), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM), (e) Sistem *e-Monitoring* Pengelolaan Investasi, (f) Sistem *e-Monitoring* Modul *S-INVEST*, (g) Sistem Pelayanan Informasi dan Statistika IKNB (SIPIKA), (h) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (i) Sistem Informasi Geografis LJKNB (SIGEO), (j) Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR Modul Tingkat Kesehatan, Modul *Know Your* BPR/BPRS, Modul *Quality Assurance* BPR/BPRS, (k) Aplikasi Data Pokok, (l) *Enhancement* pada Sistem Informasi Perbankan terkait APOLO, (m) Data *Warehouse* Bank Umum.

### 4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung tupoksi utama OJK, OJK juga mengembangkan aplikasi untuk mendukung kapasitas organisasi antara lain (a) Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), (b) Pengembangan Sistem Informasi Rapat Dewan Komisiner (SI RDK), (c) Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT), (d) Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal (SIAI), (e) Sistem Tata Persuratan dan Kearsipan OJK (RMS - *Record Management System*), (f) Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA), (g) Pembangunan *E-Procurement* OJK, (h) Aplikasi *Mobile* Sumber Daya Manusia (SMART HR), (i) *Learning Management System* (LMS) OJK.

## 4.7 LOGISTIK

### 4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Kegiatan OJK selama periode laporan, terkait penyediaan gedung kantor pusat terpadu adalah melanjutkan perencanaan penataan untuk mengakomodir pemindahan sebagian pegawai ke gedung kantor pusat baru. Secara paralel OJK masih akan mengkaji kepemilikan gedung kantor pusat terpadu secara mandiri, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran serta koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OJK.

### 4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK yang mandiri, saat ini dilakukan perancangan untuk pembangunan gedung Kantor OJK Papua, Nusa Tenggara Barat, Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun yang saat ini telah menempati gedung kantor sendiri (terpisah dari gedung Bank Indonesia) baik yang merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga akhir periode laporan adalah sebanyak 29 Kantor, yakni:

**Tabel IV - 4** — Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

1	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung) – Milik OJK	16	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh)
2.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang)	17	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari) – pinjam pakai
3.	Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Medan)	18	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu)
4.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar)	19	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon)
5.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang)	20	Kantor OJK Prov. Papua dan Papua Barat (Jayapura)
6.	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)	21	Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung)
7.	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin)	22	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi)
8.	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya)	23	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu)
9.	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta)	24	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang)
10.	Kantor OJK Solo (Solo)	25	Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)
11.	Kantor OJK Tegal (Tegal)	26	Kantor OJK Cirebon (Cirebon)
12.	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto)	27	Kantor OJK Prov. Riau (Pekanbaru)
13.	Kantor OJK Jember (Jember)	28	Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara (Manado) – pinjam pakai
14	Kantor OJK Kediri (Kediri)	29	Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat (Pontianak)
15	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam)		

#### 4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dari sisi pengaturan kelogistikan terdapat beberapa ketentuan dalam tahap finalisasi, yakni terkait Pedoman Kearsipan, *Tender Management*, *Vendor Management*, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), Pemanfaatan Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lainnya (BMPL), serta Pengamanan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas BMOJK dan BMPL. Dalam hal pengembangan sistem kelogistikan, OJK saat ini tengah melakukan pembangunan Aplikasi Sistem Persuratan dan Kearsipan *Record Management System* (RMS).

#### 4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

##### 4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan II-2018, OJK menerbitkan kebijakan terkait Sumber Daya Manusia, yaitu penetapan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/D.01/2018 tentang Pembentukan Forum Sumber Daya Manusia. Pembentukan Forum Sumber Daya Manusia (Forum SDM) dilakukan untuk menjalankan amanat Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK Nomor 6/PDK.02/2015 tentang Sistem Pemenuhan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Forum SDM yang berperan sebagai pelaksana pembahasan seleksi kompetensi dalam rangka promosi.

##### 4.8.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan II-2018 telah dilakukan proses promosi untuk jabatan Pemimpin Satuan Kerja baik di Kantor Pusat, Kantor OJK Regional dan Kantor OJK. Seluruh tahapan promosi yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /SEDK.02/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Sistem Pemenuhan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan.

##### 4.8.3 Pengembangan Organisasi

Dalam rangka penyusunan pola dan jalur karir pegawai, OJK melakukan dua kegiatan pada triwulan II-2018, yaitu:

1. **Benchmark**  
Tujuan *benchmark* didasari oleh kemiripan dari segi status kelembagaan serta pengalaman dalam menyusun dan mengimplementasikan *career path* bagi pegawai. Ruang lingkup pelaksanaan *benchmark* adalah pengelolaan manajemen karir pegawai khususnya terkait penyusunan jalur karir
2. **Forum Group Discussion tentang Career Management**  
Tujuan dari FGD adalah memahami implementasi konsep manajemen karir di berbagai organisasi dan industri serta meningkatkan keterampilan praktisi SDM di OJK dalam membuat kebijakan terkait SDM.

#### 4.8.4 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Selama triwulan II-2018 terdapat beberapa perkembangan terkait sistem informasi sumber daya manusia dan organisasi OJK, antara lain:

1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)
2. Pengembangan Sistem *Mobile SDM* (SMART-HR) Triwulan II - 2018
3. Pengembangan *Digital Assistant* (Dilan)

### 4.9 OJK INSTITUTE

#### 4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Program terbagi menjadi tahap *Pre-Training*, *Training* dan *Post Training (assignment)*. Selama triwulan II-2018, PPKB dilaksanakan sebanyak satu kali yaitu PPKB Level Madya (Kepala Bagian) *batch* 1 di Jakarta yang diikuti oleh 37 peserta.

#### 4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang dilaksanakan pada triwulan II-2018 sebagai berikut :

- a. **Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)**  
Pada triwulan II-2018 telah diselenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 2 (Kepala Sub Bagian) *batch* tiga dengan total peserta 42 orang.
- b. **PPK Non In-House Luar Negeri**  
PPK *Non In-House* Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan terkait biaya, kualitas materi dan kualitas penyelenggara pelatihan. Selama triwulan II-2018 tercatat total 13 pegawai melaksanakan pengembangan kompetensi di luar negeri.
- c. **PPK Non In House Dalam Negeri**  
PPK *Non In House* Dalam Negeri selama triwulan II-2018 diikuti sebanyak 81 pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dengan 32 judul program.
- d. **PPK In-House Dalam Negeri**  
PPK *In-House* Dalam Negeri selama triwulan II-2018 dilaksanakan melalui 15 IHT untuk pengembangan kompetensi teknis dengan jumlah peserta secara 815 pegawai, dan lima IHT untuk pengembangan kompetensi perilaku dengan jumlah peserta 354 pegawai.

#### 4.9.3 Program Pendidikan Formal

Selama triwulan II-2018, terkait program pendidikan formal tercatat 12 orang pegawai mendapat skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), delapan orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), tujuh orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK), lima orang pegawai untuk skim-4 (beasiswa dengan pembiayaan secara mandiri dengan penggantian dari OJK).

#### 4.9.4 Program Penugasan

Selama triwulan II-2018, OJK Institute menugaskan satu pejabat untuk melaksanakan *fellowship* di Jepang, lima pejabat ditugaskan sebagai narasumber di Dalam Negeri (Jakarta, Surabaya, dan Bali), dua pejabat ditugaskan sebagai narasumber di Luar Negeri (Beijing dan Hong Kong).

#### 4.9.5 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka Program Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan, OJK Institute melakukan 15 *workshop* pada triwulan II-2018 yaitu *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pimpinan UUS Perusahaan Pembiayaan, *Workshop* Implementasi Integrasi GRC di Indonesia, *Workshop Financial Technology*, *Treasuri*, *Liquidity Gap Strategy*, *IT*, *Sales* dan *Fraud*, *Workshop* Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) Perbankan Wilayah Indonesia Bagian Utara, *Workshop Infrastructure Investment: Valuation and Financing*, dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 1556 orang.

#### 4.9.6 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Sektor Jasa Keuangan (SJK), kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. *Workshop* Pembahasan KKNi Audit Intern Bank dan *Wealth Management*
- b. Pelaksanaan Verifikasi *Internal* dan *Workshop* Pembahasan KKNi Pembiayaan dan Perasuransian
- c. Verifikasi Internal RKKNI Pasar Modal
- d. *Workshop* Pembahasan RKKNI Pasar Modal
- e. *Workshop* Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan
- f. *Workshop* Prakonvensi RSKKNI Perasuransian
- g. Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Eksternal Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang Pembiayaan dan Perasuransian

#### 4.9.7 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK, selama triwulan II-2018, OJK Institute memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 113 pelajar/mahasiswa dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satuan Kerja terkait untuk 70 penelitian skripsi/tesis/disertasi.

#### 4.9.8 Program Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit* OJK adalah program diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat atau instansi yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Dalam penyelenggaraan program tersebut, OJK memberikan materi tentang Perbankan, Pasar Modal, IKNB, EPK, dan materi lainnya mengenai OJK sesuai dengan permohonan topik yang diajukan oleh peserta kunjungan. Pada triwulan II-2018 terdapat 14 kunjungan dengan 1.014 peserta dari SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

### 4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan rangkaian Program Transformasi, OJK merumuskan *Roadmap* Program Budaya untuk menentukan tujuan dan fokus Program Budaya periode 2018-2022 serta tema dan tolok ukur keberhasilan program setiap tahunnya. Adapun tema Program Budaya Kerja 2018 adalah “Insan OJK Sigap”.

Dalam mendukung pencapaian visi OJK Way 2022, yakni “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”, OJK melaksanakan sistem pengelolaan budaya kerja OJK Way yang terdiri dari empat dimensi yaitu sebagai berikut:

1. **Organisasi**  
Struktur kewenangan, tugas dan fungsi serta rentang kendali yang jelas di setiap Satuan Kerja untuk memastikan pelaksanaan program budaya dilakukan secara akuntabel dan profesional. Setiap Satuan Kerja memiliki Kelompok Mitra Perubahan yang terdiri dari :
  - a. *Change Leader*, yaitu Pemimpin atau Kepala Satuan Kerja,
  - b. *Change Partner*, Insan OJK yang ditunjuk oleh *Change Leader* untuk menjadi koordinator pelaksana program perubahan di Satuan Kerja,
  - c. *Change Agent*, Insan OJK yang ditunjuk sebagai eksekutor dan operator program perubahan di Satuan Kerja.
2. **Program**  
Adanya kejelasan bentuk dan desain program budaya kerja yang disesuaikan dengan tema, tujuan, dan *roadmap* kegiatan OJKWay.

3. **Monitoring**  
Kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultansi, yang dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal dan eksternal kepada Satuan Kerja guna mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud.
4. **Media Kampanye**  
Penguatan *mindset* Insan OJK terkait pelaksanaan program budaya melalui berbagai saluran komunikasi secara efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh Insan OJK.

#### 4.10.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang dijalankan selama Triwulan II-2018 adalah:

1. **Change Partner Forum 2018**  
*Change Agent Forum* 2018 diselenggarakan untuk memperkaya wawasan *Change Agent* dalam mendukung Program Perubahan dan Budaya OJK Way 2018 “Insan OJK Sigap”. Kegiatan ini terdiri dari *review* program budaya Triwulan I-2018, *sharing session* pelaksanaan program budaya antar *Change Agent*, pendalaman materi terkait kemampuan teknis *Change Agent* dalam mengkomunikasikan dan mendukung pelaksanaan program budaya, *team building* dan *role play* serta sesi konsultansi dengan Konsultan Budaya Internal.
2. **Townhall Meeting Anggota Dewan Komisiner**  
*Townhall Meeting* merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner (ADK) dengan Insan OJK mengenai budaya kerja, kebijakan organisasi dan pandangan ADK terhadap kondisi industri jasa keuangan saat ini, termasuk peran OJK selaku pengawas industri jasa keuangan. Selama periode laporan, *Townhall Meeting* diselenggarakan sebanyak satu kali, yakni bersama Anggota Dewan Komisiner yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen di *lobby* Gedung Sumitro, Jakarta.
3. **Inisiasi Digital Office**  
Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penggunaan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional kinerja seluruh Satuan Kerja, OJK melakukan inisiasi *Digital Office*. Adapun langkah inisiasi yang ditempuh di triwulan II-2018 mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengembangan dan distribusi media kampanye optimalisasi *virtual meeting* untuk rapat koordinasi antar Satuan Kerja melalui *e-mail blast*, *screen saver*, poster, dan media sosial;

- b. Penggunaan fitur *virtual meeting* untuk konsultasi kinerja dan budaya kerja dengan Kelompok Mitra Perubahan seluruh Satuan Kerja

#### 4.10.2 Monitoring Program Budaya

Di bidang *monitoring program* budaya, OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau progress implementasi program-program perubahan dan budaya yang telah dilaksanakan, di antaranya yaitu:

1. **Monitoring Program Budaya Triwulan II-2018: Konsultasi, Offsite & Onsite Monitoring**  
Kegiatan Konsultasi dilakukan sepanjang tahun bersama Satker dengan Tim Konsultasi Budaya melalui telepon, *email*, nota dinas maupun atau media lain berupa instagram dan *Whatsapp Group*. Mekanisme penilaian program budaya dilakukan masing-masing Satuan Kerja melalui pelaporan program budaya dan *self-assessment*, yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system*. Laporan tersebut selanjutnya diverifikasi melalui *onsite monitoring* dan telepon.
2. **Enhancement Dashboard Monitoring OJKway**  
Pada triwulan II-2018, dilakukan peningkatan dan perbaikan fitur serta pengembangan tampilan baru yang lebih memudahkan pengguna dalam melakukan *self-assessment* program budaya di setiap satuan kerja.

#### 4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Di bidang media komunikasi budaya dan perubahan, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye, di antaranya:

1. **Penerbitan Majalah Integrasi**  
OJK menerbitkan empat edisi Majalah Integrasi dengan tema “Insan OJK Proaktif”, “Transisi Kartini Indonesia”, “Membangun Karakter Profesional dan Inklusif”, serta “Membangun *Trust* OJK”.
2. **Pesan Anggota Dewan Komisioner**  
Selama periode laporan, telah disampaikan empat pesan ADK kepada seluruh pegawai OJK.
3. **Pengkinian *Screen Saver* Nilai Strategis, Program Budaya dan Pencapaian Kinerja**
4. **Pengkinian Konten Media Sosial OJKway dan OJKway TV**

# SINGKATAN DAN AKRONIM

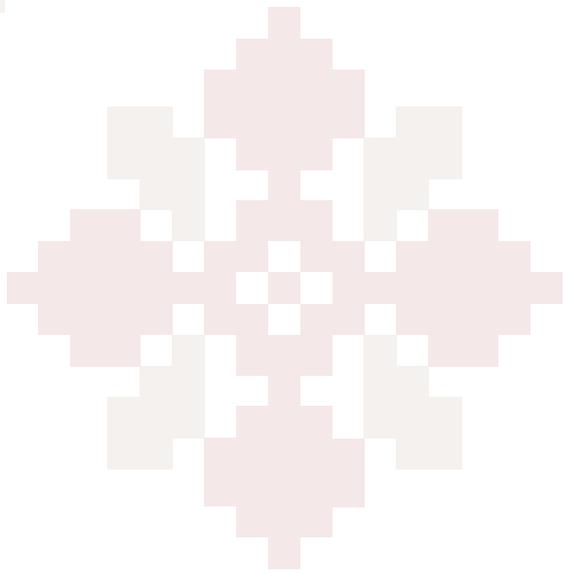
<b>AAJI</b>	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
<b>AAS</b>	<i>Australia Awards Scholarship</i>
<b>AASI</b>	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
<b>AAUI</b>	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
<b>ABIF</b>	<i>ASEAN Banking Integration Framework</i>
<b>ACIA</b>	<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>
<b>ACKS</b>	Aku Cinta Keuangan Syariah
<b>ADK</b>	Anggota Dewan Komisiner
<b>AFAS</b>	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i>
<b>AHM</b>	Anugerah Media Humas
<b>AIMRPK</b>	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
<b>AML</b>	<i>Anti Money Laundering</i>
<b>APERD</b>	Agen Penjual Efek Reksa Dana
<b>APRA</b>	<i>Australia Prudential Regulatory Authority</i>
<b>ASBANDA</b>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
<b>ASEAN</b>	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
<b>ASIC</b>	<i>Australia Securities and Investment Commission</i>
<b>ATIGA</b>	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>
<b>ATISA</b>	<i>ASEAN Trade In Services Agreement</i>
<b>ATM</b>	<i>Automatic Teller Machine</i>
<b>ATMR</b>	Aset Tertimbang Menurut Risiko
<b>AUTP</b>	Asuransi Usaha Tani Padi
<b>BAE</b>	Biro Administrasi Efek
<b>BAMPPI</b>	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
<b>BAPMI</b>	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
<b>BAVI</b>	Badan Arbitrase Ventura Indonesia
<b>BEI</b>	Bursa Efek Indonesia
<b>BI</b>	Bank Indonesia
<b>BIN</b>	Badan Intelijen Negara
<b>BMAI</b>	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
<b>BMDP</b>	Badan Mediasi Dana Pensiun
<b>BMPP</b>	Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
<b>BMPPI</b>	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
<b>BMT</b>	Baitul Mal Wat Tamwil
<b>BNP2TKI</b>	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
<b>BNSP</b>	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
<b>BOPO</b>	Beban Operasional Pendapatan Operasional
<b>BPD</b>	Bank Pembangunan Daerah
<b>BPKP</b>	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
<b>BPK-RI</b>	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
<b>BPR</b>	Bank Perkreditan Rakyat
<b>BRC</b>	<i>BPD Regional Champion</i>
<b>BS</b>	Board Seminar
<b>BSA</b>	<i>Basic Saving Account</i>
<b>BUK</b>	Bank Umum Konvensional
<b>BUMD</b>	Badan Usaha Milik Daerah
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>BUS</b>	Bank Umum Syariah
<b>CA</b>	<i>Combined Assurance</i>
<b>CBRC</b>	<i>China Banking Regulatory Commission</i>
<b>CDD</b>	<i>Customer Due Diligence</i>
<b>CFT</b>	<i>Combating the Financing of Terrorism</i>
<b>CKPN</b>	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

<b>CR</b>	<i>Cash Ratio</i>
<b>CRM</b>	<i>Costumer Relationship Management</i>
<b>CTKI</b>	Calon Tenaga Kerja Indonesia
<b>DCC</b>	<i>Data Center Collocation</i>
<b>DES</b>	Daftar Efek Syariah
<b>DFSA</b>	<i>Dubai Financial Service Autorithy</i>
<b>DJPU</b>	Direktorat Jendral Pengelola Utang
<b>DPD</b>	Dewan Perwakilan Daerah
<b>DPK</b>	Dana Pihak Ketiga
<b>DPLK</b>	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
<b>DPPK PPIP</b>	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
<b>DPPK PPMP</b>	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat
<b>DRC</b>	<i>Disaster Recovery Center</i>
<b>EBA-SP</b>	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
<b>EDC</b>	<i>Electronic Data Capture</i>
<b>Eduwan</b>	Edukasi Wartawan
<b>ETP</b>	<i>Electronic Trading Platform</i>
<b>FAPM</b>	Foruma Akuntan Pasar Modal
<b>FGD</b>	<i>Focus Group Discussion</i>
<b>FKMM</b>	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
<b>FKSSK</b>	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
<b>FREKS</b>	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
<b>FSA</b>	<i>Financial Services Agency</i>
<b>FSAP</b>	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
<b>FSC</b>	<i>Financial Service Commission</i>
<b>FSS</b>	<i>Financial Supervisory Service</i>
<b>FTA</b>	<i>Free Trade Agreement</i>
<b>GCG</b>	<i>Good Corporate Governance</i>
<b>GeNTa PM</b>	Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
<b>GIZ</b>	<i>Deutsche Gesellscaft fur Internationale Zusammenarbeit</i>
<b>GMRA</b>	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
<b>GRC</b>	<i>Governance Risk and Compliance</i>
<b>HKHPM</b>	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
<b>HMETD</b>	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
<b>ICMA</b>	<i>International Capital Market Association</i>
<b>IDB</b>	<i>Islamic Development Bank</i>
<b>IFAC</b>	<i>International Federation of Accountant</i>
<b>IFAR</b>	Investasi Terhadap Total Aset
<b>IFC</b>	<i>International Finance Corporation</i>
<b>IFCC</b>	<i>Integrated Financial Customer Care</i>
<b>IFN</b>	<i>Interantional Finance News</i>
<b>IFSB</b>	<i>Islamic Financial Services Board</i>
<b>IGBF</b>	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
<b>IHSG</b>	Indeks Harga Saham Gabungan
<b>IJEPA</b>	<i>Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement</i>
<b>IJK</b>	Industri Jasa Keuangan
<b>IKI</b>	Indikator Kinerja Pegawai
<b>IKNB/NBFI</b>	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
<b>IKU/KPI</b>	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
<b>ILM</b>	Iklan Layanan Masyarakat
<b>IMF</b>	<i>International Monetary Fund</i>
<b>INDOBeX</b>	<i>Indonesia Bond Indexes</i>
<b>IOSCO</b>	<i>International Organization of Securities Commission</i>
<b>IRR</b>	<i>Integrated Risk Rating</i>
<b>IS</b>	Inisiatif Strategis
<b>JARING</b>	Jangkau, Sinergi, dan Guideline
<b>JII</b>	Jakarta Islamic Index
<b>JPSK</b>	Jaring Pengaman Sistem Keuangan
<b>KDK</b>	Keputusan Dewan Komisioner

<b>Kemenaker</b>	Kementerian Ketenagakerjaan
<b>Kemendagri</b>	Kementerian Dalam Negeri
<b>Kemendesa</b>	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
<b>KI</b>	Kredit Investasi
<b>KIK</b>	Kontrak Investasi Kolektif
<b>KK</b>	Kredit Konsumsi
<b>KKB</b>	Kredit Kendaraan Bermotor
<b>KKP</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>KLHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>KMK</b>	Kredit Modal Kerja
<b>KOINKU</b>	Kompetisi Inklusi Keuangan
<b>KOJK</b>	Kantor OJK
<b>KPD</b>	Kontrak Pengelolaan Dana
<b>KPJKS</b>	Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
<b>KPMM/CAR</b>	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
<b>KPMR</b>	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
<b>KPPU</b>	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
<b>KPR</b>	Kredit Pemilikan Rumah
<b>KR</b>	Kantor Regional
<b>KSEI</b>	Kustodian Sentral Efek Indonesia
<b>KUB</b>	Kelompok Usaha Bersama
<b>KYC</b>	<i>Know Your Customer</i>
<b>KYFC</b>	<i>Know Your Financial Conglomerates</i>
<b>LAPS</b>	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
<b>LAPSPI</b>	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
<b>LDR</b>	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
<b>LJK</b>	Lembaga Jasa Keuangan
<b>LJKNB</b>	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
<b>LKM</b>	Lembaga Keuangan Mikro
<b>LoI</b>	<i>Letter of Intent</i>
<b>LoU</b>	<i>Letter of Understanding</i>
<b>LPEI</b>	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
<b>LPHE</b>	Lembaga Penilaian Harga Efek
<b>LPS</b>	Lembaga Penjamin Simpanan
<b>LTV</b>	<i>Loan to Value</i>
<b>MCRA</b>	<i>Market Conduct Risk Assessment</i>
<b>MEA/AEC</b>	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
<b>MI</b>	Manajer Investasi
<b>MIA</b>	Manajer IKU dan Anggaran
<b>MoU</b>	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
<b>MPSJKI</b>	<i>Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia</i>
<b>MSAK</b>	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
<b>NAB</b>	Nilai Aktiva Bersih
<b>NIM</b>	Net Interest Margin
<b>NPF</b>	<i>Non Performing Finance</i>
<b>NPL</b>	<i>Non-Performing Loan</i>
<b>OECD</b>	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
<b>OJK</b>	Otoritas Jasa Keuangan
<b>ORP</b>	Outreach Program
<b>OSINT</b>	<i>Open Source Intelligence</i>
<b>PCE</b>	Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
<b>PCP</b>	Pendidikan Calon Pejabat
<b>PCS</b>	Pendidikan Calon Staf
<b>PCT</b>	Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
<b>PDB</b>	Produk Domestik Bruto
<b>PDK</b>	Peraturan Dewan Komisioner
<b>PDN</b>	Posisi Devisa Neto
<b>PE</b>	Perusahaan Efek
<b>PELAKU</b>	Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
<b>PESTEL</b>	<i>Political, Economy, Social, Technology, Environment, and Law</i>

<b>PI</b>	Penasihat Investasi
<b>PKR</b>	Pasar Keuangan Rakyat
<b>PM</b>	Pasar Modal
<b>PMK</b>	Protokol Manajemen Krisis
<b>POJK</b>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<b>POKTAN</b>	Kelompok Tani
<b>PPF</b>	Program Pendidikan Formal
<b>PPG</b>	Program Pengendalian Gratifikasi
<b>PPK</b>	Program Pengembangan Kompetensi
<b>PPKB</b>	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
<b>PPKD</b>	Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
<b>PPL</b>	Program Pendidikan Lanjutan
<b>PPP</b>	Program Penugasan Pegawai
<b>PSP</b>	Pemegang Saham Pengendali
<b>PUB</b>	Penawaran Umum Berkelanjutan
<b>PUJK</b>	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
<b>Rakerstra</b>	Rapat Kerja Strategis
<b>RBS</b>	<i>Risk Based Supervisory</i>
<b>RCEP</b>	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
<b>RDK</b>	Rapat Dewan Komisioner
<b>REPO</b>	<i>Repurchase Agreement</i>
<b>RGS</b>	<i>Risk and Governance Summit</i>
<b>RKA</b>	Rencana Kerja Anggaran
<b>ROA</b>	<i>Return on Assets</i>
<b>ROE</b>	<i>Return on Equity</i>
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RSS</b>	Rumah Sehat Sejahtera
<b>Satgas</b>	Satuan Tugas
<b>SBN</b>	Surat Berharga Negara
<b>SBSN</b>	Surat Berharga Syariah Negara
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>SEDK</b>	Surat Edaran Dewan Komisioner
<b>SEOJK</b>	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
<b>SIAI</b>	Sistem Informasi Audit Internal
<b>SID/DIS</b>	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
<b>SIELOG</b>	Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
<b>SIMARIO</b>	Sistem Informasi Manajemen Risiko
<b>SIMFOSIA</b>	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
<b>SiMOLEK</b>	Mobil Literasi Keuangan
<b>SimPel</b>	Simpanan Pelajar
<b>SIMPEL</b>	Sistem Pengelolaan Kinerja
<b>SIPMI</b>	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
<b>SIPP</b>	Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
<b>SISKA</b>	Sistem Aplikasi Keuangan OJK
<b>SISPANDI</b>	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
<b>SISPUAS</b>	Sistem Informasi Penatausahaan Aset
<b>SJK</b>	Sektor Jasa Keuangan
<b>SKM</b>	Sahat Keuangan Maritim
<b>SKP</b>	Satuan Kredit Profesi
<b>SKPD</b>	Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>SLA</b>	Service Level Agreement
<b>SMES</b>	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
<b>SMF</b>	Sarana Multi Finance
<b>SNKI</b>	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
<b>SNLKI</b>	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
<b>SPE</b>	Sistem Pelaporan Emiten
<b>SPP/WBS OJK</b>	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>
<b>SRO</b>	<i>Self Regulatory Organization</i>
<b>STP</b>	<i>Straight Through Processing</i>
<b>STTD</b>	Surat Tanda Terdaftar

<b>SUN</b>	Surat Utang Negara
<b>SWOT</b>	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i>
<b>TKHT</b>	Tunjangan Kesehatan Hari Tua
<b>TKI</b>	Tenaga Kerja Indonesia
<b>TOT</b>	<i>Training of Trainers</i>
<b>TPHT</b>	Tunjangan Perumahan Hari Tua
<b>TPI</b>	Tempat Pelelangan Ikan
<b>UMKM/MSME</b>	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>UU LKM</b>	Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
<b>UU OJK</b>	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
<b>UUS</b>	Unit Usaha Syariah
<b>WAPERD</b>	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
<b>WBS</b>	<i>Whistle Blowing System</i>
<b>WCFSL</b>	<i>Working Committee on Financial Services Liberalisation</i>
<b>WMI</b>	Wakil Manajer Investasi
<b>WPEE</b>	Wakil Penjamin Emisi Efek
<b>WPPE</b>	Wakil Perantara Pedagang Efek
<b>XBRL</b>	<i>Extensible Business Reporting Language</i>
<b>YKP OJK</b>	Yayasan Kesejahteraan Pekerja
<b>yoy</b>	<i>year over year</i>
<b>ytd</b>	<i>year to date</i>
<b>ZMET</b>	<i>Zaltman Metaphor Elicitation Technique</i>



Halaman ini sengaja di kosongkan





**Otoritas Jasa Keuangan**

Indonesia Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710  
Tel. 62 21 296 00000  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

-  [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)
-  [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)
-  [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)
-  [OtoritasJasaKeuangan](https://www.youtube.com/OtoritasJasaKeuangan)

